



LKJ - IP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2021

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr, Wb.



Alhamdulillah robbil'alamin, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya Pemerintah Kota Dumai telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrumen dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Dumai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja Tahun Keempat. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016 - 2021, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat. Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek - aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian Pemerintah Kota Dumai sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Dumai.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dumai, Maret 2021

WALI KOTA DUMAI



H. FAISAL, SKM, MARS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	3
1. Aspek Pemerintah Daerah.....	3
2. Aspek Geografi dan Demografi.....	7
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	7
b. Letak dan Kondisi Geografis.....	7
c. Topografi.....	8
d. Geologi	9
e. Hidrologi.....	9
f. Klimatologi.....	10
g. Wilayah Rawan Bencana.....	11
h. Demografi.....	12
3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	15
a. Perkembangana PDRB.....	15
b. Pendapatan per Kapita.....	17
c. Tingkat Kemiskinan.....	19
d. Distribusi Pendapatan.....	23
e. Inflasi	24
f. Produktivitas Total Daerah.....	26
g. Kondisi IPM Kota Dumai.....	26
D. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
A. VISI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021.....	31

B. MISI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021.....	31
C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI 2020	55
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	60
1. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja.....	61
Tujuan 1 Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	61
Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih	65
Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan..	68
Sasaran Strategis 1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan	80
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan	85
Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya Partisipasi Pendidikan ..	91
Sasaran Strategis 2.2 Meningkatnya Angka Kelulusan Pendidikan Dasar	98
Sasaran Strategis 2.3 Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	102
Tujuan 3 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	106
Sasaran Strategis 3.1 Terkendalinya Kejadian Mortalitas Morbilitas dan Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	109
Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	129
Tujuan 4 Meningkatkan Prestasi Daerah Dalam Kepemudaan dan Olahraga	137
Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya Prestasi Daerah Dalam Kepemudaan dan Olahraga	140
Tujuan 5 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	143
Sasaran Strategis 5.1 Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	147
Sasaran Strategis 5.2 Menurunnya Persentase Penduduk	

Miskin	150
Sasaran Strategis 5.3 Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	153
Sasaran Strategis 5.4 Meningkatnya Lapangan Kerja	154
Tujuan 6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	159
Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pelayanan Publik	162
Sasaran Strategis 6.2 Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	165
Tujuan 7 Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian Perkebunan dan Perikanan Dalam Memenuhi Kebutuhan Lokal..	170
Sasaran Strategis 7.1 Meningkatnya Pendapatan Petani	172
Sasaran Strategis 7.2 Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	175
Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	178
Sasaran Strategis 8.1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Perdagangan dan Industri Sebagai Sektor Unggulan Dalam Mendukung Perekonomian Daerah	180
Sasaran Strategis 8.2 Meningkatnya Investasi di Kota Dumai	184
Tujuan 9 Mewujudkan Pembangunan Manusia Berbasis Nilai- Nilai Agama dan Budaya Melayu Sejak Dini	187
Sasaran Strategis 9.1 Meningkatnya Implementasi Budaya Melayu Dalam Pendidikan Dasar	190
Sasaran Strategis 9.2 Meningkatnya Implementasi Nilai- Nilai Keagamaan Dalam Pendidikan Dasar	193
B.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja	196
B.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	201
B.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020	208
C. REALISASI ANGGARAN.....	211
D. PENJABARAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN	

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2020	221
1. Sasaran 1.1. Meningkatnya Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih.....	221
2. Sasaran 1.2. Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan.....	223
3. Sasaran 1.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan.....	233
4. Sasaran 2.1. Meningkatnya Partisipasi Pendidikan.....	234
5. Sasaran 2.2. Meningkatnya Angka Kelulusan Pendidikan Dasar.....	237
6. Sasaran 2.3. Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.....	238
7. Sasaran 3.1. Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan Meningkatnya Status Gizi Masyarakat.....	243
8. Sasaran 3.2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat.....	250
9. Sasaran 4.1. Meningkatnya Prestasi Daerah Dalam Kepemudaan dan Olahraga.....	258
10. Sasaran 5.1. Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat.....	258
11. Sasaran 5.2. Menurunnya Persentase Penduduk Miskin.....	259
12. Sasaran 5.3. Menurunnya Laju Pertumbuhan Pendudukan.....	261
13. Sasaran 5.4. Meningkatnya Lapangan Kerja.....	265
14. Sasaran 6.1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pelayanan Publik.....	266
15. Sasaran 6.2. Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	293
16. Sasaran 7.1. Meningkatnya Pendapatan Petani.....	326
17. Sasaran 7.2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat.....	331
18. Sasaran 8.1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa, Perdagangan dan Industri Sebagai Sektor Unggulan dalam Mendukung Perekonomian Daerah.....	334
19. Sasaran 8.2. Meningkatnya Investasi di Kota Dumai.....	335
20. Sasaran 9.1. Meningkatnya Implementasi Budaya Melayu dalam Pendidikan Dasar.....	337
21. Sasaran 9.2. Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Pendidikan Dasar.....	337
BAB IV PENUTUP.....	340

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2. Pernyataan Telah Direview Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020

DAFTAR TABEL

BAB 1	PENDAHULUAN	
Tabel 1.1	Rekapitulasi PNS Kota Dumai Berdasarkan Golongan dan Satuan Perangkat Daerah per Desember 2020	5
Tabel 1.2	Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai	10
Tabel 1.3	Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2011-2020	11
Tabel 1.4	Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2011-2020	11
Tabel 1.5	Jumlah Kejadian Kebakaran di Kota Dumai	12
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2019	13
Tabel 1.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2012-2020	13
Tabel 1.8	PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019	15
Tabel 1.9	Laju Pertumbuhan Kota Dumai Tahun 2014-2019	16
Tabel 1.10	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2014-2019	18
Tabel 1.11	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2013-2019	18
Tabel 1.12	Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2014-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau	19
Tabel 1.13	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2013-2019	22
Tabel 1.14	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2018	27
Tabel 1.15	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2019	28
BAB 2	PERENCANAAN KINERJA	
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	34
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja 2020 Pemerintah Kota Dumai	42
BAB 3	AKUNTABILITAS KINERJA	
Tabel 3.1	Skala Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020	56
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020	56
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 1.	61

Tabel 3.4	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1	65
Tabel 3.5	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2	68
Tabel 3.6	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.3	80
Tabel 3.7	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 2	85
Tabel 3.8	Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Dumai Tahun 2020	86
Tabel 3.9	Harapan Lama Sekolah (HLS)	88
Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1	91
Tabel 3.11	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.2	98
Tabel 3.12	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.3	102
Tabel 3.13	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 3	106
Tabel 3.14	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan 2020	108
Tabel 3.15	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1	109
Tabel 3.16	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2	130
Tabel 3.17	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Rawat Jalan (Masyarakat Miskin) Kota Dumai Tahun 2020	132
Tabel 3.18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Rawat Inap (Masyarakat Miskin) Kota Dumai Tahun 2020	133
Tabel 3.19	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Rujukan (Masyarakat Miskin) Kota Dumai Tahun 2020	133
Tabel 3.20	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 4	137
Tabel 3.21	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1	140
Tabel 3.22	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 5	143
Tabel 3.23	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.1	147
Tabel 3.24	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.2	150
Tabel 3.25	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.3	153
Tabel 3.26	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.4	154
Tabel 3.27	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 6	159
Tabel 3.28	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1	163
Tabel 3.29	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2	165
Tabel 3.30	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 7	170
Tabel 3.31	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.1	172

Tabel 3.32	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.2	175
Tabel 3.33	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 8	178
Tabel 3.34	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8.1	180
Tabel 3.35	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8.2	184
Tabel 3.36	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 9	187
Tabel 3.37	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9.1	190
Tabel 3.38	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9.2	193
Tabel 3.39	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	201
Tabel 3.40	Efisiensi Anggaran Tahun 2020 Pemerintah Kota Dumai	204
Tabel 3.41	Eliminasi Program	204
Tabel 3.42	Realisasi Anggaran Sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja 2020 Pemerintah Kota Dumai	211

DAFTAR GAMBAR

BAB 1	PENDAHULUAN	
Gambar 1.1	Peta Kota Dumai	8
Gambar 1.2	Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai	9
Gambar 1.3	Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2019	14
Gambar 1.4	Angka Kemiskinan Kota Dumai 2014-2019	20
Gambar 1.5	Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2014-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau.	21
Gambar 1.6	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau	22
Gambar 1.7	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2013-2019	23
Gambar 1.8	Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2013-2018	24
Gambar 1.9	Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2013-2018 Kota Dumai vs Provinsi Riau	25
Gambar 1.10	Perkembangan Inflasi/ Deflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2019	25
Gambar 1.11	Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2019	28
BAB 3	AKUNTABILITAS KINERJA	
Gambar 3.1	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	62
Gambar 3.2	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	64
Gambar 3.3	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	65
Gambar 3.4	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipa	66
Gambar 3.5	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipa	67

Gambar 3.6	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	68
Gambar 3.7	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	69
Gambar 3.8	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	70
Gambar 3.9	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	71
Gambar 3.10	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	72
Gambar 3.11	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	73
Gambar 3.12	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	73
Gambar 3.13	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	74
Gambar 3.14	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	75
Gambar 3.15	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	75
Gambar 3.16	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	76
Gambar 3.17	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	76
Gambar 3.18	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	77
Gambar 3.19	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	77
Gambar 3.20	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	78
Gambar 3.21	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	78
Gambar 3.22	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	79
Gambar 3.23	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	79
Gambar 3.24	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	80
Gambar 3.25	Persentase Kualitas udara	81
Gambar 3.26	Persentase kualitas air	82
Gambar 3.27	Persentase Kualitas udara	83
Gambar 3.28	Persentase kualitas air	83

Gambar 3.29	Persentase Kualitas udara	84
Gambar 3.30	Persentase kualitas air	84
Gambar 3.31	Rata-rata lama sekolah	86
Gambar 3.32	Harapan lama sekolah	87
Gambar 3.33	Rata-rata lama sekolah	89
Gambar 3.34	Harapan lama sekolah	90
Gambar 3.35	Rata-rata lama sekolah	90
Gambar 3.36	Harapan lama sekolah	91
Gambar 3.37	Angka melek huruf	92
Gambar 3.38	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93
Gambar 3.39	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	94
Gambar 3.40	Angka melek huruf	95
Gambar 3.41	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96
Gambar 3.42	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	96
Gambar 3.43	Angka melek huruf	97
Gambar 3.44	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97
Gambar 3.45	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	98
Gambar 3.46	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99
Gambar 3.47	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100
Gambar 3.48	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100
Gambar 3.49	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	101
Gambar 3.50	Angka Kelulusan (AL) SD/M	101
Gambar 3.51	Angka Kelulusan (AL) SD/M	102
Gambar 3.52	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	103
Gambar 3.53	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	104
Gambar 3.54	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	104
Gambar 3.55	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	105
Gambar 3.56	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	105

Gambar 3.57	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	106
Gambar 3.58	Angka Harapan Hidup	107
Gambar 3.59	Angka Harapan Hidup	108
Gambar 3.60	Angka Harapan Hidup	109
Gambar 3.61	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	110
Gambar 3.62	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	112
Gambar 3.63	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	113
Gambar 3.64	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	114
Gambar 3.64.1	Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan 2020	115
Gambar 3.64.2	Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai tahun 2020	116
Gambar 3.64.3	Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan 2020	117
Gambar 3.64.4	Jumlah Kematian Balita Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	117
Gambar 3.64.5	Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan 2020	118
Gambar 3.64.6	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	119
Gambar 3.64.7	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dari Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2020	119
Gambar 3.65	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	120
Gambar 3.65.1	Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020	121
Gambar 3.65.2	Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	121
Gambar 3.65.3	Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan 2020	122

Gambar 3.65.4	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020	123
Gambar 3.65.5	Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai dari Tahun 2016 s/d 2020	124
Gambar 3.65.6	Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari Tahun 2016 Sampai Dengan 2020	125
Gambar 3.65.7	Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020	125
Gambar 3.66	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	126
Gambar 3.66.1	Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan 2020	127
Gambar 3.67	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	128
Gambar 3.68	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	129
Gambar 3.69	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	129
Gambar 3.70	GDR (Gross Death Rate) Angka Kematian Umum untuk Setiap 1000 Penderita Keluar dari Rumah Sakit	130
Gambar 3.71	Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapat Akses Pelayanan Kesehatan Gratis	131
Gambar 3.72	GDR (Gross Death Rate) Angka Kematian Umum untuk Setiap 1000 Penderita Keluar dari Rumah Sakit	134
Gambar 3.73	Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapat Akses Pelayanan Kesehatan Gratis	135
Gambar 3.74	GDR (Gross Death Rate) Angka Kematian Umum untuk Setiap 1000 Penderita Keluar dari Rumah Sakit	135
Gambar 3.75	Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapat Akses Pelayanan Kesehatan Gratis	136
Gambar 3.74.a	GDR (Gross Death Rate) Angka Kematian Umum untuk Setiap 1000 Penderita Keluar dari Rumah Sakit	136
Gambar 3.76	Peringkat Olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/POPDA)	138
Gambar 3.77	Peringkat Olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/POPDA)	139

Gambar 3.78	Peringkat Olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/POPDA)	139
Gambar 3.79	Peringkat Olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/POPDA)	141
Gambar 3.80	Peringkat Olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/POPDA)	142
Gambar 3.81	Peringkat Olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/POPDA)	142
Gambar 3.82	Pengeluaran PerKapita yang Disesuaikan	144
Gambar 3.83	PDRB Per Kapita	144
Gambar 3.84	Pengeluaran PerKapita yang Disesuaikan	145
Gambar 3.85	PDRB Per Kapita	145
Gambar 3.86	Pengeluaran PerKapita yang Disesuaikan	146
Gambar 3.87	PDRB Per Kapita	146
Gambar 3.88	Indeks Gini	147
Gambar 3.89	Indeks Gini	148
Gambar 3.90	Indeks Gini	148
Gambar 3.90.a	Indeks Gini	149
Gambar 3.91	Tingkat Kemiskinan	151
Gambar 3.92	Tingkat Kemiskinan	151
Gambar 3.93	Tingkat Kemiskinan	152
Gambar 3.93.a	Tingkat Kemiskinan	152
Gambar 3.94	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	153
Gambar 3.95	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	154
Gambar 3.96	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	154
Gambar 3.97	Tingkat Pengangguran Terbuka	155
Gambar 3.98	Tingkat Pengangguran Terbuka	157
Gambar 3.99	Tingkat Pengangguran Terbuka	158
Gambar 3.99.a	Tingkat Pengangguran Terbuka	158
Gambar 3.100	Indeks Kepuasan Masyarakat	160
Gambar 3.101	Indeks Kepuasan Masyarakat	162
Gambar 3.102	Indeks Kepuasan Masyarakat	162
Gambar 3.103	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau	163

Gambar 3.104	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau	164
Gambar 3.105	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau	164
Gambar 3.106	Opini BPK	166
Gambar 3.107	Persen Nilai Akuntabilitas	166
Gambar 3.108	Opini BPK	167
Gambar 3.109	Persen Nilai Akuntabilitas	167
Gambar 3.110	Opini BPK	168
Gambar 3.111	Nilai Akuntabilitas	168
Gambar 3.110.a	Opini BPK	169
Gambar 3.111.a	Nilai Akuntabilitas	169
Gambar 3.112	Nilai PDRB Sektor Pertanian/Kehutanan/Perikanan	171
Gambar 3.113	Nilai PDRB Sektor Pertanian/Kehutanan/Perikanan	171
Gambar 3.114	Nilai PDRB Sektor Pertanian/Kehutanan/Perikanan	172
Gambar 3.115	Pendapatan Perkapita Petani	173
Gambar 3.116	Pendapatan Perkapita Petani	174
Gambar 3.117	Pendapatan Perkapita Petani	174
Gambar 3.118	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	176
Gambar 3.119	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	177
Gambar 3.120	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	177
Gambar 3.121	Laju Pertumbuhan Ekonomi	179
Gambar 3.122	Laju Pertumbuhan Ekonomi	179
Gambar 3.123	Laju Pertumbuhan Ekonomi	180
Gambar 3.124	Persentase Kontribusi Sektor Jasa dan perdagangan pada PDRB	181
Gambar 3.125	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	181
Gambar 3.126	Persentase Kontribusi Sektor Jasa dan Perdagangan terhadap PDRB	182
Gambar 3.127	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	183
Gambar 3.128	Persentase Kontribusi Sektor Jasa dan Perdagangan pada PDRB	183
Gambar 3.129	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	184
Gambar 3.130	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	185
Gambar 3.131	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	186

Gambar 3.132	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	187
Gambar 3.133	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kegiatan Agama di Luar Kurikulum Wajib Serta Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu	188
Gambar 3.134	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kegiatan Agama di Luar Kurikulum Wajib Serta Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu	189
Gambar 3.135	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kegiatan Agama di Luar Kurikulum Wajib Serta Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu	189
Gambar 3.136	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu	191
Gambar 3.137	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu	192
Gambar 3.138	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu	192
Gambar 3.139	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kegiatan Agama diluar Kurikulum Wajib	194
Gambar 3.140	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kegiatan Agama diluar Kurikulum Wajib	195
Gambar 3.141	PerPersentase Sekolah Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kegiatan Agama diluar Kurikulum Wajib	195



A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja, maupun capaian kinerja selama Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai ini didasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Wali kota Dumai Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan wali kota Dumai Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 38 Seri E).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ke 4 (empat) dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2016 - 2021.

1. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

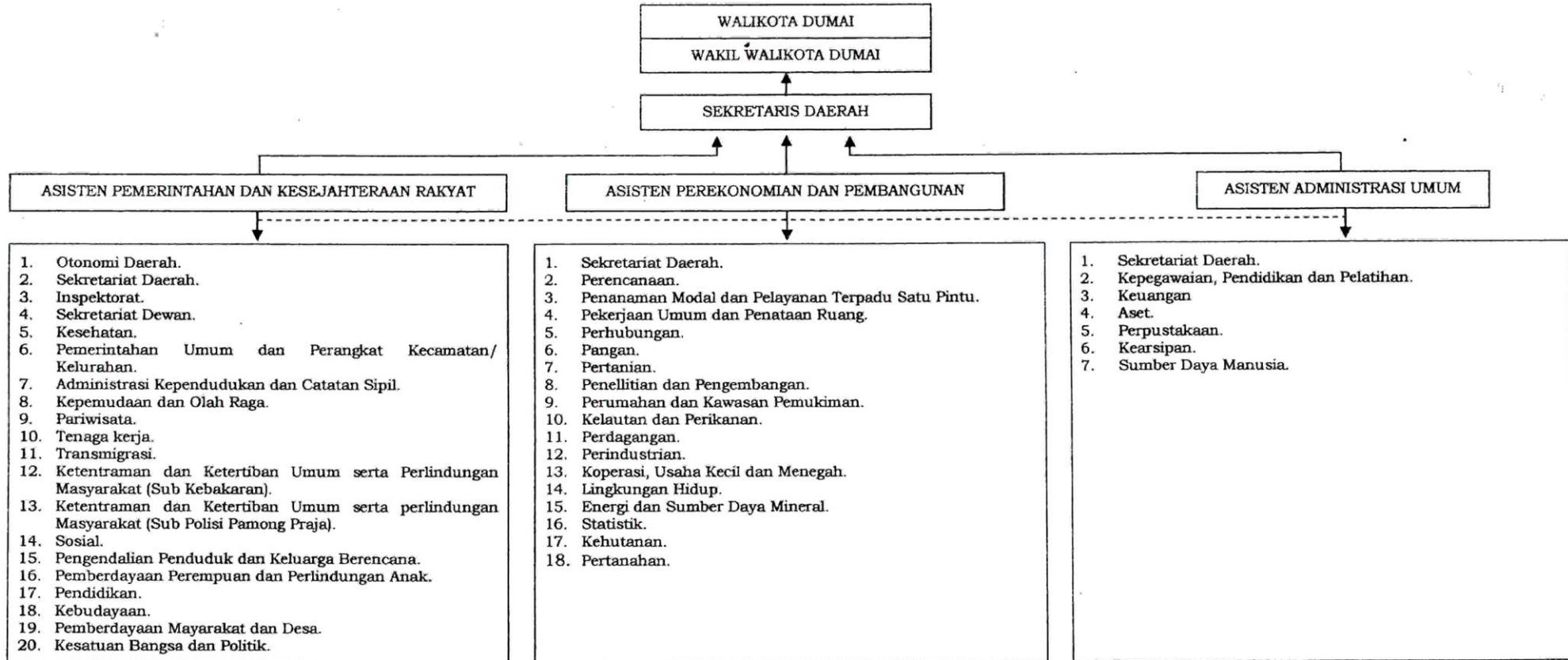
1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai selama Tahun Anggaran 2020;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai pada Tahun 2020;
3. Menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai pada masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kota Dumai dengan diterapkannya azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Aspek Pemerintah Daerah

Berdasarkan Keputusan Wali kota Dumai Nomor : 29/ORG/2019 tentang Alur Koordinasi berdasarkan Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembentukan Kelembagaan, berikut ditampilkan alur koordinasi dan bentuk kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Dumai.

ALUR KOORDINASI BERDASARKAN URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN BENTUK KELEMBAGAAN



Keterangan :

- (Solid line with arrow) Garis Koordinasi Vertikal dan Pengambilan Keputusan
- (Dashed line) Garis Koordinasi Horizontal
- ↔ (Double-headed arrow) Garis Koordinasi menurut bentuk serta tugas dan fungsi organisasi

Dari alur koordinasi tersebut dapat terlihat pembagian urusan yang dikoordinasikan oleh Asisten berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya Jumlah PNS berdasarkan golongan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Rekapitulasi PNS Kota Dumai Berdasarkan Golongan dan Satuan Perangkat Daerah per Desember 2020

JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN						
NO	PERANGKAT DAERAH	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Total
1	Sekretariat Daerah	0	40	67	25	132
2	Sekretariat DPRD	0	15	21	6	42
3	Inspektorat	0	4	23	20	47
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	151	1068	479	1703
5	Dinas Kesehatan (Tidak termasuk RSUD)	0	86	320	34	440
5a	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai	0	32	238	29	299
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	17	59	2	78
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	6	16	2	24
8	Dinas Sosial	0	4	13	2	19
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	6	20	5	32
10	Dinas Lingkungan Hidup	3	6	29	4	42
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	25	7	32
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	2	20	5	27
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	7	34	6	47
14	Dinas Perdagangan	0	8	27	6	41
15	Dinas Perhubungan	1	30	41	4	76
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	3	52	11	66
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	5	19	5	29
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	3	23	1	27
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0	4	19	4	27
20	Dinas Perikanan	0	4	19	6	29
21	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	9	21	6	36
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	7	24	1	33
23	Satuan Polisi Pamong Praja	0	28	16	4	48
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	3	22	10	35
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	13	35	5	53
26	Badan Pendapatan Daerah	0	34	33	4	71

JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN						
NO	PERANGKAT DAERAH	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Total
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	6	19	5	30
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	21	10	2	33
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	3	16	4	23
30	Kecamatan Bukit Kapur	1	16	35	1	53
31	Kecamatan Dumai Barat	0	4	35	1	40
32	Kecamatan Dumai Kota	0	7	42	1	50
33	Kecamatan Dumai Selatan	0	9	38	2	49
34	Kecamatan Dumai Timur	0	9	31	1	41
35	Kecamatan Medang Kampai	0	5	36	1	42
36	Kecamatan Sungai Sembilan	0	8	36	3	47
JUMLAH		12	616	2604	714	3946

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2020

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai pada Tahun 2020 berjumlah 3946 orang dengan rincian golongan I berjumlah 12 orang, golongan II berjumlah 616 orang, golongan III berjumlah 2.604 orang dan selebihnya sebanyak 714 orang adalah golongan IV. Sedangkan Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 1.331 laki-laki 2.615 Perempuan.

Secara administrasi Kota Dumai dikepalai oleh seorang Wali kota, dibantu oleh seorang Wakil Wali kota. Didalam melaksanakan tugasnya, Wali kota dibantu oleh 36 Perangkat Daerah. Sekretaris Daerah membawahi 3 (tiga) Asisten dan 12 (dua belas) Bagian yaitu :

a. Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), yang membawahi:

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
3. Bagian Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Bagian Kerjasama Daerah

b. Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) yang membawahi :

1. Bagian Administrasi Perekonomian
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Bagian Administrasi Pertanahan

c. Asisten III (Administrasi Umum) yang membawahi :

1. Bagian Hukum dan HAM
2. Bagian Organisasi
3. Bagian Keuangan dan Aset
4. Bagian Umum

2. Aspek Geografi dan Demografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mempunyai luas wilayah 1.727,38 km². Kota Dumai memiliki 7 (Tujuh) Kecamatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Kelurahan. Batas wilayah administratif Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- Utara : Selat Rupa, Pulau Rupa dan Selat Melaka .
- Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- Barat : Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Dumai merupakan salah satu dari 2 (dua) kota di Provinsi Riau yang terletak di pesisir Pulau Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka dan merupakan jalur transportasi perdagangan yang strategis. Ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 101°23'37" -101°28'13" Bujur Timur dan 1°23'23" - 1°24'23" Lintang Utara.

Kota Dumai memiliki 52 sungai besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Kota Dumai dengan total panjang keseluruhannya sepanjang 222 km. Seluruh sungai tersebut bermuara ke Selat Rupa dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan Peta Kota Dumai dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1: Peta Kota Dumai

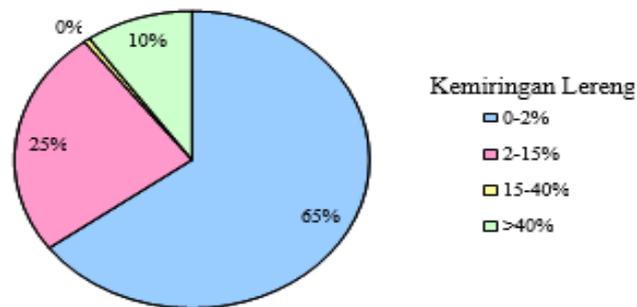


(Sumber: Kota Dumai dalam Angka Tahun 2020)

c. Topografi

Dilihat dari segi topografi, Kota Dumai termasuk ke dalam kategori daerah yang datar dengan kemiringan lereng $0 < 3\%$, di mana sebelah utara Kota Dumai umumnya merupakan dataran yang landai dan ke selatan semakin bergelombang. Kota Dumai berada pada ketinggian antara 1–50 meter di atas permukaan laut. Secara morfologis sebagian besar atau sekitar 41.032 Ha (64,90%) merupakan daerah yang datar, dengan kemiringan lereng 0-2%. Sekitar 15.642 Ha (24,71%) merupakan daerah yang landai sampai berombak dengan kemiringan lereng 2-15%, dan sekitar 364 Ha (0,58%) merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40%, serta sekitar 6.200 Ha (9,81%) merupakan daerah berbukit dengan kemiringan lereng $>40\%$, yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas dan Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur. Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai dapat dilihat pada Diagram 1.1

Gambar 1.2: Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

d. Geologi

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan. Formasi geologi Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari formasi *Alluvium* Muda dan *Alluvium* Tua yang berawa-rawa di wilayah pesisir Kota Dumai. Struktur geologi di Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari endapan kuarter yang membentuk lahan bergambut.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu *Typic Tropaquepts* atau *Fluvisol Gleik* dan *Hydric Trophemis* atau *Humic Histosol*. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada saat air laut sedang pasang.

e. Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari Timur ke Barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki *permeabilitas* dan *porositas* yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal Kota Dumai.

Di Kota Dumai terdapat 52 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel 1.2 dibawah ini yaitu Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai.

Tabel 1.2: Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	-
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Nyirih 2. Sungai Siput 3. Sungai Bunian 4. Sungai Sepit 5. Sungai Perpat 6. Sungai Parit 7. Sungai Sepi 8. Sungai Tiram 9. Sungai Pauh 10. Sungai Bakau Tua 11. Sungai Teluk Dalam 12. Sungai Teluk Kijuk 13. Sungai Tengar Besar 14. Sungai Tengar Kecil 15. Sungai Tawar Kecil 16. Sungai Tawar Besar 17. Sungai Sempit Kecil 18. Sungai Sempit Besar 19. Sungai Tembuan 20. Sungai Tianjung 21. Sungai Santahalu 22. Sungai Penempul 23. Sungai Geniot 24. Sungai Geniot Kecil 25. Sungai Buluhala 26. Sungai Teras 27. Sungai Penyengat 28. Sungai Ilir 29. Sungai Danau 30. Sungai Hulu 31. Sungai Sembilan 32. Sungai Mampu 33. Sungai Mampu Kecil 34. Sungai Nerbit Kecil 35. Sungai Nerbit Besar 36. Sungai Paul 37. Sungai Mesjid 38. Sungai Banain 39. Sungai Saliyo 40. Sungai Bulu Ala 41. Sungai Tambuan 42. Sungai Teritib 43. Sungai Selat Mati
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	-
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	-

Sumber: Kota Dumai dalam Angka Tahun 2021

f. Klimatologi

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2020 berkisar antara 78%-88%. Sedangkan suhu udara pada tahun 2020 berkisar antara 26,3°C-27,8°C. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan terbanyak selama tahun 2020 terjadi pada bulan November yaitu 366,8 mm³ sedangkan terkecil terjadi pada bulan Maret dengan nilai berturut-turut sebesar 69,1 mm³. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan September dan November sebanyak 25 hari dan terkecil pada bulan Maret sebanyak 11 hari. Perkembangan banyaknya hari dan curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2011 sampai 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.3 dan Tabel

1.4. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun kegiatan pertanian, seperti persawahan, perkebunan, dan perikanan

Tabel 1.3: Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2011-2020

Bulan	Tahun									
	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	19	13	13	13	13	16	20	14	10	13
Februari	6	11	11	11	11	11	21	5	5	13
Maret	15	11	11	11	11	9	12	12	8	11
April	16	11	11	11	11	17	21	11	15	20
Mei	5	14	14	14	14	15	21	19	7	19
Juni	9	7	7	7	7	15	6	4	10	15
Juli	9	14	14	14	14	13	9	10	5	16
Agustus	8	18	18	18	18	9	17	14	7	15
September	15	7	7	7	7	13	20	13	8	25
Oktober	22	17	17	17	17	15	20	22	23	13
Nopember	26	21	21	21	21	21	20	21	12	25
Desember	14	24	24	24	24	20	19	18	9	21
Total	164	168	168	168	168	174	206	163	119	206

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel 1.4: Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2011-2019

Bulan	Tahun									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	182,3	130,0	130,0	200,0	200,0	121,6	411,7	96,6	150,6	78,4
Februari	29,3	132,0	132,0	150,0	150,0	59,3	418,0	44,3	43,0	74,7
Maret	45,0	198,0	198,0	201,0	201,0	94,0	182,6	90,7	132,0	69,1
April	403,4	261,0	261,0	226,0	226,0	194,2	181,0	166,3	177,0	240,5
Mei	23,3	157,0	157,0	190,0	190,0	358,3	145,0	187,4	86,0	304,1
Juni	77,4	49,0	49,0	160,0	160,0	64,6	95,0	48,6	185,0	178,5
Juli	162,1	203,0	203,0	160,0	160,0	122,4	106,7	157,4	93,0	268,0
Agustus	167,1	499,0	499,0	200,0	200,0	79,7	237,5	79,9	66,0	213,4
September	356,3	153,0	153,0	257,0	257,0	171,7	237,8	447,3	79,0	350,4
Oktober	260,8	121,0	121,0	290,0	290,0	82,3	179,4	447,3	347,0	153,5
Nopember	311,3	313,0	313,0	299,0	299,0	318,0	238,3	289,7	178,0	366,8
Desember	230,8	368,0	368,0	258,0	258,0	166,5	166,0	247,3	182,7	209,9
Total	2.249,1	2.584,0	2.584,0	2.591,0	2.591,0	1.832,6	2.599,0	2.302,8	1719,3	2507,3

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

g. Wilayah Rawan Bencana

Kota Dumai mempunyai kawasan rawan bencana yang beragam dan tersebar secara luas. Seluruh kawasan rawan bencana yaitu bencana banjir harus diantisipasi sejak dini dengan berbagai pendekatan mitigasi yang dapat menghindari atau mengurangi dampak bencana. Perlu adanya pembatasan dan syarat-syarat tertentu dalam pembangunan permukiman serta kawasan rawan bencana. Hal ini dilakukan terkait dengan keamanan permukiman dan

masyarakat. Diinsentif dapat dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pembangunan pada kawasan rawan bencana.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai no.15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya di Kota Dumai adalah potensi rawan banjir, rawan kebakaran dan angin puting beliung. Kawasan rawan banjir tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Kawasan rawan kebakaran tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan. Kawasan rawan angin puting beliung tersebar di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Medang Kampai.

Kebakaran hutan dan lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan. Kejadian yang disebabkan tingginya potensi dorongan kecepatan angin mencapai lebih dari 30 km/jam. Kecepatan angin ini dikarenakan faktor masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Jika dilihat dari banyaknya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan, maka selama periode 2020 terjadi peningkatan kejadian bencana, dimana bencana kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi pada tahun 2020 berturut-turut sebanyak 111 kejadian. Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut ini.

Tabel 1.5 Jumlah Kejadian Kebakaran di Kota Dumai

Lokasi Kejadian	Jumlah Kejadian
Hutan dan Lahan	79
Perumahan/Pemukiman	19
Pertokoan/Kios/Kafe	1
Kantor	-
Lain-lain	12
Total	111

Sumber: Kota Dumai dalam Angka Tahun 2020

h. Demografi

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai menunjukkan penurunan selama periode 2014-2019. Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan

penduduk cenderung mengalami penurunan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 2,74%. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,96%.

Tabel 1.6: Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2019

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2014	143.900	136.209	280.109	2,20
2015	146.792	139.175	285.967	2,09
2016	149.791	142.117	291.908	2,08
2017	152.731	144.907	297.638	1,96
2018	155.638	147.654	303.292	2,74
2019	158.287	150.525	308.812	2,15

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020

Adapun rata-rata pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tersebut adalah $2,15\% \pm 0,12\%$. Mulai tahun 2014 sampai tahun 2019 jumlah penduduk Kota Dumai tidak mengalami pertumbuhan, atau dengan kata lain pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan pertumbuhan adalah 0,07%. Selain kematian penduduk, rendahnya tingkat kelahiran dan proses migrasi penduduk karena kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan menjadi salah satu indikator menurunnya jumlah penduduk di Kota Dumai.

Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2012-2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2020 Annual Population Growth Rate (%)
	2020	2010–2020
Bukit Kapur	51.564	2,98
Medang Kampai	16.794	4,94
Sungai Sembilan	41.738	4,13
Dumai Barat	44.292	2,09
Dumai Timur	52.791	1,35
Dumai Kota	68.930	2,24
Dumai Selatan	40.673	-20
Kota Dumai	316.782	2,17

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2021

Jumlah penduduk paling banyak selama periode 2010-2020 terdapat di Kecamatan Dumai Kota dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai. Pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata tertinggi

selama periode 2010-2020 terjadi di Kecamatan Bukit Kapur yaitu sebesar 4,94%.

Jika melihat nilai rasio ketergantungan kota Dumai, maka peluang kota Dumai untuk masuk dalam kondisi Bonus demografi sangat besar. Bonus demografi terjadi ketika komposisi penduduk masuk kedalam priode yang disebut dengan *window of opportunity*, yaitu suatu waktu dimana rasio ketergantungan berada pada titik terendah, biasa 0,49, yang berarti bahwa jumlah penduduk usia kerja pada saat periode tersebut lebih dari dua kali lipat penduduk non usia kerja. Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2019.

Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2019



Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020

Komposisi penduduk Kota Dumai menurut kelompok umur memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif lebih banyak menanggung anak-anak yang belum aktif secara ekonomi. Apabila dicermati lebih lanjut, lebih dari 11% penduduk Kota Dumai merupakan balita, lebih dari 10% merupakan penduduk usia 5-9 tahun, dan lebih 2% merupakan penduduk usia >65 tahun. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kota dalam penanganan penduduk balita dan usia 5-9 tahun terutama dari segi kesehatan dan asupan gizi serta pelayanan pendidikan dasar.

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

a. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah harus memperhatikan seluruh aspek pembangunan. Sebagai ukuran kuantitatif maka data PDRB tetap merupakan informasi yang berguna dan mendasar, walaupun belum bisa menggambarkan aspek pembangunan secara keseluruhan.

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan PDRB. Selama tahun 2013-2019, PDRB Kota Dumai terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, PDRB ADHK Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 23,5 triliun rupiah, sedangkan PDRB ADHB Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 32,9 triliun rupiah. Peningkatan PDRB ini menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang di Kota Dumai. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8 PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019

NO	Sektor / Sub Sektor	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1437.57	1551.17	1687.64	1806.63	1877.80	1929.05
2	Pertambangan dan Penggalian	108.90	120.47	121.86	116.79	120.20	128.33
3	Industri Pengolahan	12499.50	13544.27	15088.11	16611.66	18671.09	20899.25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11.69	18.03	24.52	27.10	28.10	31.77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.65	4.04	4.29	4.74	4.88	5.33
6	Konstruksi	2562.18	2869.88	3214.66	3533.02	3786.76	4049.17
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4589.15	4691.52	5000.29	5250.80	5416.76	5743.14

8	Transportasi dan Pergudangan	727.11	807.76	862.15	918.54	973.96	1055.84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	200.38	235.07	260.52	280.82	303.92	320.06
10	Informasi dan Komunikasi	234.99	270.71	294.25	333.68	380.26	418.39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	366.13	355.03	367.27	375.46	390.06	397.21
12	Real Estat	113.12	127.22	134.71	143.28	153.25	162.04
13	Jasa Perusahaan	1.22	1.42	1.55	1.66	1.84	2.06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	494.47	524.62	541.62	553.24	568.68	587.76
15	Jasa Pendidikan	122.92	142.98	149.35	155.05	161.94	177.13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37.78	46.88	49.79	53.47	56.82	65.84
17	Jasa lainnya	117.70	142.50	159.68	176.90	196.64	220.03
Produk Domestik Regional Bruto		23628.47	25453.57	27962.26	30342.84	33092.97	36192.40

Sumber : Dumai Dalam Angka Tahun 2020

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi wilayah, baik struktur perekonomian regional maupun struktur perekonomian sektoral. Struktur perekonomian regional digunakan untuk menganalisis peran masing-masing kabupaten/kota baik secara keseluruhan maupun sektoral dalam wilayah provinsinya. Distribusi peran ekonomi sub wilayah kabupaten/kota juga menunjukkan tingkat konsentrasi dan pemerataan perekonomian wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.9.

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang positif jika diikuti pula oleh tingginya pertumbuhan penduduk, apalagi jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang produktif, maka yang terjadi adalah penurunan produktivitas yang akan menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.9

Tabel 1.9 Laju Pertumbuhan Kota Dumai Tahun 2014-2019

Sektor	Laju Pertumbuhan Ekonomi (r) Tahunan (%)						Rata - Rata (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,62	0,1	1,14	3,31	2,82	2,02	1,84
Pertambangan dan Penggalian	0,9	0,19	-4,04	-4,95	-3,74	2,29	-1,56
Industri Pengolahan	6,19	2,92	5,71	5,17	7,51	7,17	5,78
Pengadaan Listrik dan Gas	13,65	9,75	18,12	1,04	3,21	7,29	8,84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,95	2,76	(0,16)	4,60	1,13	6,24	2,75
Konstruksi	(4,59)	1,85	3,03	5,34	2,58	4,15	2,06

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,95	0,13	2,16	2,84	1,94	2,92	1,82
Transportasi dan Pergudangan	9,92	2,02	3,02	4,82	3,84	5,36	4,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,20	2,35	2,58	6,30	6,50	6,50	5,57
Informasi dan Komunikasi	11,24	7,15	4,13	6,25	5,75	7,21	6,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	(39,50)	(6,88)	0,51	(0,74)	2,09	0,12	(7,40)
Real Estat	3,75	5,01	1,41	3,43	3,89	5,34	3,81
Jasa Perusahaan	8,50	7,67	3,61	6,91	9,07	7,74	7,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,42	2,02	0,16	0,11	0,28	2,33	0,89
Jasa Pendidikan	8,96	5,24	0,55	2,70	3,94	5,62	4,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,56	9,94	0,87	5,49	5,57	10,83	5,88
Jasa lainnya	11,86	7,81	5,26	7,99	8,61	8,79	8,39
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%)	2,69	2,03	4,14	4,46	5,35	5,61	4,05

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai Tahun 2020, diolah.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada 1 (satu) sektor ekonomi pun pada PDRB Kota Dumai yang terus menerus mengalami pertumbuhan dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Bahkan sektor industri pengolahan yang menjadi sektor utama penggerak perekonomian Kota Dumai, mulai tahun 2014 (tahun dengan pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu 2013-2018) dapat dikatakan mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor utama penggerak perekonomian tetapi laju pertumbuhannya masih dibawah beberapa sektor yang ada di Kota Dumai, dan sektor ini memiliki laju pertumbuhan rata-rata selama periode 2014-2019 sebesar 3,70%. Sektor ekonomi yang mengalami laju pertumbuhan rata-rata tertinggi selama periode 2014-2019 adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 8,84%.

b. Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing- masing penduduk. Diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Secara umum, semakin tinggi PDRB/kapita maka semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah. Tapi kenyataannya PDRB/kapita tidaklah selalu menggambarkan pendapatan riil masyarakat dan distribusi pendapatan yang sama, sehingga seringkali dijumpai banyak wilayah memiliki PDRB perkapita tinggi namun masyarakatnya masih miskin dikarenakan distribusinya yang tidak merata.

Tabel 1.10 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2014-2019

Uraian	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB ADHK perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	84.354,54	88.928,34	95.733,57	101.798,70	108.787,11	117.198,81
PDRB ADHK perkapita Provinsi Riau (juta Rp.)	109.784,64	102.887,81	104.861,11	105.858,67	110.826,76	110.826,76
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	2,69	1,91	4,64	4,09	5,35	5,61
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	2,71	0,22	2,18	2,68	2,37	2,00
Klasifikasi Wilayah	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang g cepat	Wilayah berkembang cepat	Wilayah berkembang cepat

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020, diolah)

Pada Tabel 1.9 berikut tersaji perkembangan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dan persentasenya menurut kelompok makanan dan bukan makanan di Kota Dumai tahun 2013-2019.

Tabel 1.11 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2013-2019

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Perkapita Makanan							
Nominal (Rp)	492.336	479.722	511.316	574.717	602.559	608.839	
Persentase (%)	53,10	50,96	45,46	48,32	50,64	47,52%	53,12%
Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan							
Nominal (Rp)	434.894	461.705	613.344	614.756	587.256	672.279	
Persentase (%)	46,90	49,04	54,54	51,68	49,36	52,48	46,88%
Jumlah Pengeluaran Perkapita	927.230	941.427	1.124.660	1.189.473	1.189.815	1.281.118	12.453

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2013-2019 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 927.230,- menjadi Rp. 1.281.118,-. Bila dilihat dari persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan, dari 50,96% pada tahun 2014 menjadi 47,52% di tahun 2018. Sebaliknya, pengeluaran untuk bukan makanan mengalami peningkatan, dari 46,90% pada tahun 2014 menjadi 52,47% di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan, artinya orientasi pengeluaran bukan lagi hanya untuk makanan namun sudah untuk konsumsi non makanan yang terdiri dari perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama lainnya dan lain-lain.

c. Tingkat Kemiskinan

Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan di Kota Dumai tahun 2014-2019 fluktuatif seperti tersaji pada Tabel 1.12.

Tabel 1.12 Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2014-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Dumai							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/B In	341.525	353.079	369.624	403.244	418.597	439.152
Jumlah penduduk miskin Kota Dumai	000 Jiwa	13,62	14,97	13,76	13,53	11,19	10,95
Persentase penduduk miskin Kota Dumai	(%)	4,83	5,26	4,74	4,57	3,71	3,56
Provinsi Riau							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/B In	379.223	399.211	426.001	456.493	479.944	528.468
Jumlah penduduk miskin Prov Riau	000 jiwa	498,28	531,39	515,40	514,62	500,44	490,72
Persentase penduduk miskin Prov Riau	(%)	7,99	8,42	7,98	7,78	7,39	7,08
Indonesia							
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/B In	296.681	333.034	350.420	370.910	392.154	392.154
Jumlah penduduk miskin Prov Riau	000 jiwa	27.727,78	28.513,57	27.764,32	26.582,99	25.674,58	25.674,58
Persentase penduduk miskin Prov Riau	(%)	10,96	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin kota Dumai adalah 4,83%, kemudian mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 5,26% menjadi 3,56% di tahun 2019. Namun jika diperhatikan Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena belum adanya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di Kota Dumai, sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Dumai masih bersifat parsial atau dapat dikatakan belum terpadu antar

Perangkat daerah yang ada di Kota Dumai. Disisi lain, tingginya angka kemiskinan di tahun 2015 ini diindikasikan disebabkan oleh tingginya persentase penduduk miskin di daerah *hinterland*, baik terhadap 11 kab/kota lainnya di Provinsi Riau maupun terhadap Provinsi tetangga (Sumatera Utara 10.53% dan Jambi 8.86%). Tingginya angka pendapatan perkapita di Kota Dumai menjadi daya tarik bagi penduduk miskin di daerah *hinterland* untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di Kota Dumai.

Gambar 1.4 Angka Kemiskinan Kota Dumai 2014-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

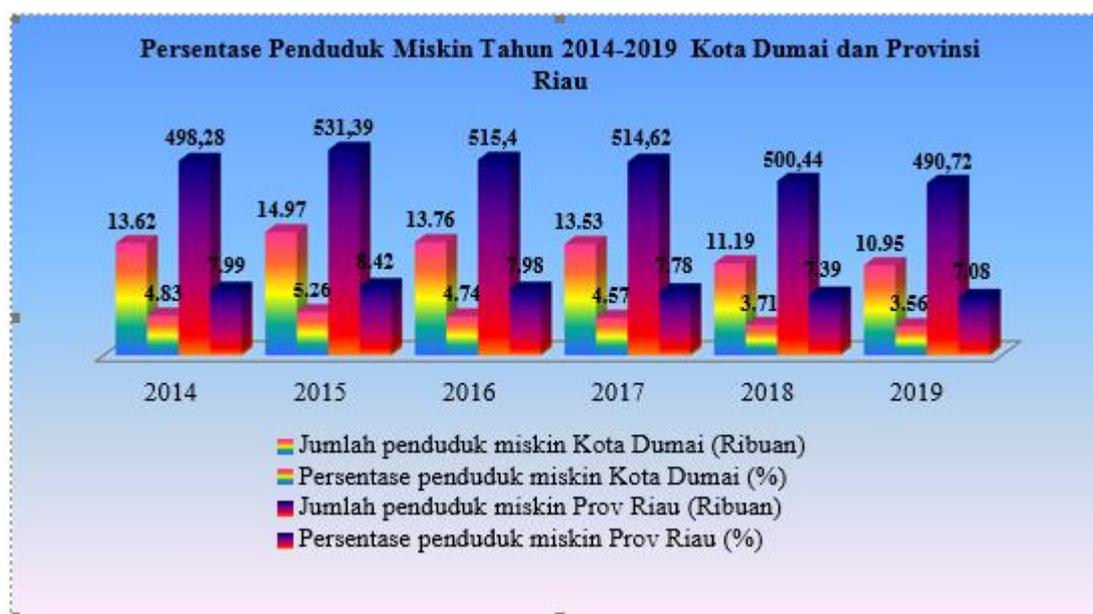
Seperti yang terlihat pada Gambar diatas dapat diasumsikan terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk tahun 2019 pemerintah kota dumai berhasil menekan tingkat kemiskinan sebesar 0,15%, hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya pertumbuhan ekonomi yang kondusif diberbagai sektor. Berikut Gambar 1.5 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2014-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau.

Gambar 1.5 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2014-2019
Kota Dumai dan Provinsi Riau.



Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin Provinsi Riau adalah 8,42%, kemudian mengalami penurunan menjadi 7,08% di tahun 2019. Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin Kota Dumai yang mengalami penurunan 5,26% pada tahun 2015 menjadi 3,56% di tahun 2019. Berbeda dengan dua komponen kemiskinan sebelumnya, garis kemiskinan Kota Dumai selama periode 2014-2019 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan (r) tahunan sebesar 5,01%, 341.525,00/kapita/bulan pada menjadi Rp. 439.152 /kapita/bulan pada tahun 2019. Selama periode 2014-2019 tersebut persentase penduduk miskin Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Riau seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.6

Gambar 1.6 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2019 Kota Dumai dan Provinsi Riau



(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2020)

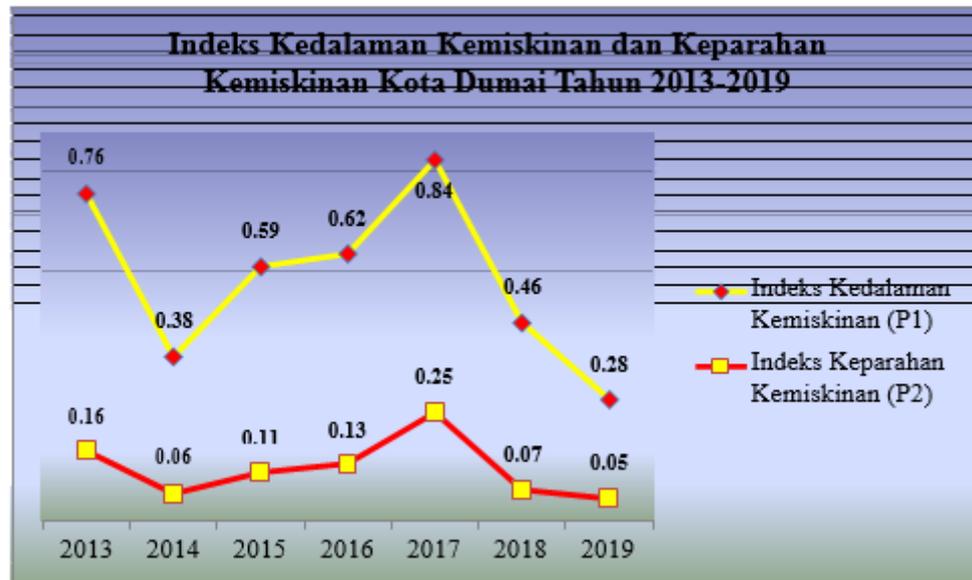
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada Tabel 1.12 dan Gambar 1.7 berikut tersaji perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2012-2017 (tanpa data tahun 2013).

Tabel 1.13 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2013-2019

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,76	0,38	0,59	0,62	0,84	0,46	0,28
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,06	0,11	0,13	0,25	0,07	0,05

(Sumber: Provinsi Dalam Angka Tahun 2019)

Gambar 1.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2013-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

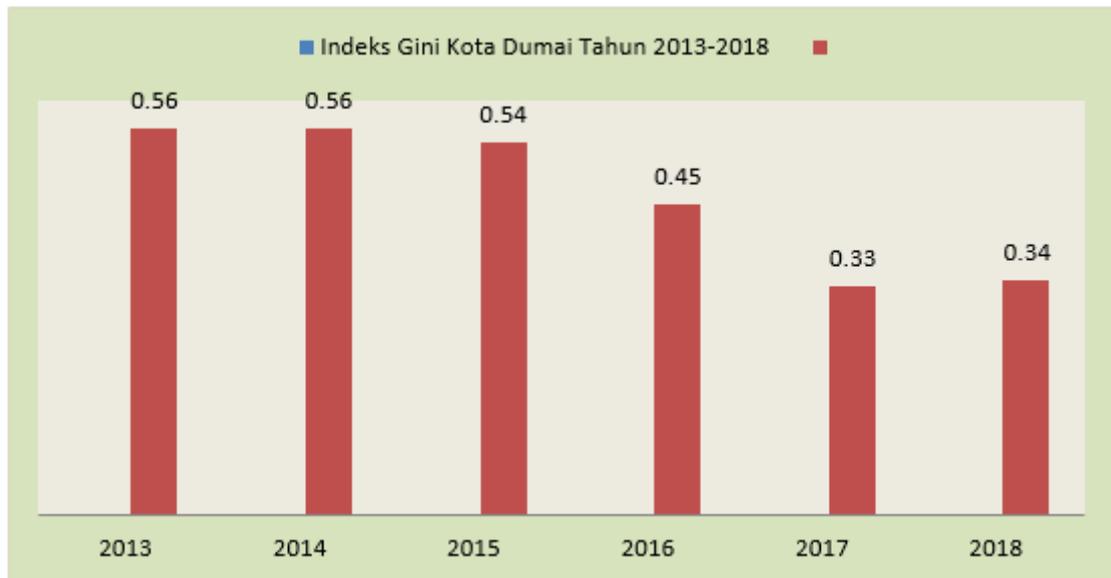
Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa trend indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kota Dumai cenderung berfluktuatif. Indeks kedalaman terendah selama kurun waktu 2013-2019 terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 0,38, kemudian memburuk sampai tahun 2017 yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan namun kemudian membaik kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,28. Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, selama periode trend indeks keparahan kemiskinan, selama kurun waktu 2013-2019, indeks keparahan kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 0,06 kemudian memburuk sampai tahun 2017 yang mengindikasikan bahwa selama periode tersebut ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif meningkat namun kemudian membaik pada tahun 2019 menjadi 0,05.

d. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin. Salah satu indikator untuk mengukur distribusi

pendapatan adalah Indeks Gini. Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2013-2018, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang. Berikut ini Gambar 2.12 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2013-2018.

Gambar 1.8 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2013-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

e. Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2012 (2012 = 100). IHK dengan tahun dasar tersebut dihitung berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup 2012 untuk menggantikan IHK tahun 2007 = 100, yang berlaku sejak bulan Juni tahun 2008. Pergeseran tahun dasar ini dimaksudkan agar IHK yang baru mampu mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat di Indonesia, dan secara khusus diharapkan dapat menggambarkan tingkat inflasi. berikut tabel 2.21

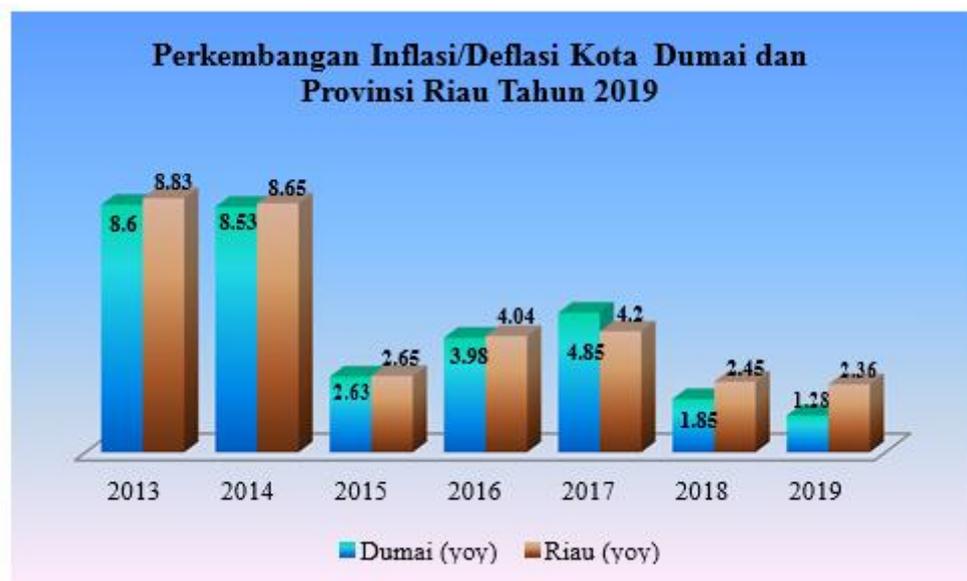
menunjukkan perbandingan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2013-2019 dan Gambar 1.8 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2019 Kota Dumai vs Provinsi Riau.

Tabel 1.9 Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2013-2018 Kota Dumai vs Provinsi Riau

Bulan	Inflasi (Persen)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	1,28	0,43	-0,33	0,65	1,58	0,36	-0,04
Februari	0,41	0,3	-0,68	0,32	1,12	-0,24	-0,32
Maret	-0,01	0,24	0,13	0,23	-0,19	0,05	0,07
April	0,17	0,4	0,38	-0,64	-0,21	0,14	0,35
Mei	0,4	0,14	0,98	0,06	0,11	0,16	1,05
Juni	1,39	0,66	0,59	0,79	0,90	0,65	0,80
Juli	1,91	0,83	0,78	0,46	0,05	-0,10	0,41
Agustus	0,61	0,65	0,55	0,05	0,14	-0,34	-0,25
September	0,32	0,64	-0,23	0,64	0,05	-0,26	-0,79
Oktober	1,17	0,42	0,11	0,47	0,08	0,50	0,05
November	0,45	1,86	-0,02	0,82	0,62	0,70	-0,12
Desember	0,19	1,66	0,39	0,07	0,53	0,22	0,07
Dumai (yoy)	8,60	8,53	2,63	3,98	4,85	1,85	1,28
Riau (yoy)	8,83	8,65	2,65	4,04	4,20	2,45	2,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.10 Perkembangan Inflasi/ Deflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari Tabel 1.14 diatas terlihat bahwa inflasi tahunan Kota Dumai selama kurun waktu 2013-2019 cenderung tidak stabil. Pada tahun 2013 Kota Dumai mengalami inflasi tahunan tertinggi selama kurun waktu 2013-2019. Pada Tahun 2019 merupakan tahun dengan inflasi paling rendah selama kurun waktu 2013-2019. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara makro. Jika dilihat dari kondisi inflasi bulanan tahun 2019 seperti yang tersaji pada Gambar 2.13 diatas, terlihat bahwa inflasi bulanan tertinggi di Kota Dumai di bulan mei. Untuk Kota Dumai inflasi bulanan terendah terjadi di bulan Maret. Pada Tahun 2019 Kota Dumai mengalami deflasi pada bulan Januari, Februari, Agustus, September dan November.

f. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah menunjukkan produktivitas suatu wilayah dalam memberikan kesejahteraan dan perbaikan perekonomian bagi para pekerja yang berada dalam sektor-sektor pembentuk PDRB. Produktivitas total daerah diperoleh dengan membagi total PDRB dengan Jumlah total Pekerja yang bekerja pada sektor-sektor pembentuk PDRB. Karena keterbatasan data ketenagakerjaan yang dimiliki, maka produktivitas total daerah Kota Dumai yang dapat diukur adalah produktivitas total daerah Kota Dumai tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Produktivitas Total Daerah} &= \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah pekerja}} \\ &= (32.994.260,7 \times 10^6) / 1127.897 \\ &= 257.975.251,18 \end{aligned}$$

Produktivitas menunjukkan nilai rupiah yang diterima pekerja yang bekerja diseluruh sektor pembentuk PDRB. Analisis komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan nilai produktivitas total daerah dengan pendapatan perkapita dan perbandingan antar sektor. Semakin tinggi dan besar produktivitas suatu sektor, semakin besar perannya bagi pembangunan.

g. Kondisi IPM Kota Dumai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Sejak tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metodologi baru dengan perubahan pada beberapa indikatornya diantaranya angka harapan hidup saat

lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Domestik Bruto (PNB) per kapita. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka ini didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk dapat mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Rata rata lama sekolah didefinisikan sebagai banyaknya tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Keempat indikator IPM tersebut cenderung meningkat selama tahun 2011-2018. Berikut table 1.15 Menampilkan angka Harapan Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2011-2018.

Tabel 1.14 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2018

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Dumai	11.87	12.07	12.27	12.40	12.46	12.75	12.97	12,98

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Selama periode 2010-2019 IPM Kota Dumai terus meningkat. Sejak tahun 2011 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2019 adalah sebesar 70,43; 71,07; 71,59; 71,86; 72,20; 72,96; 73,46; 74,06; 74,64. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi.

Tabel 1.15 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2019

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kuantan Singingi	65,07	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32	68,66	69,53	69,96	70,78
Indragiri Hulu	65,10	65,93	66,50	66,68	67,11	68,00	68,67	68,97	69,66	70,05
Indragiri Hilir	61,98	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80	65,35	66,17	66,51	66,84
Pelalawan	65,95	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82	70,21	70,59	71,44	71,85
Siak	69,78	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70	73,18	73,73	74,07
Kampar	68,62	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39	72,19	72,50	73,15
Rokan Hulu	63,59	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29	67,68	68,67	69,36	69,93
Bengkalis	69,29	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29	71,98	72,27	72,94	73,44
Rokan Hilir	64,13	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81	67,52	67,84	68,73	69,40
Kepulauan Meranti	59,71	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25	63,90	64,70	65,23	65,93
Pekanbaru	77,34	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32	79,69	79,97	80,66	81,35
Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020)

Gambar 1.11 Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2019



(Sumber: BPS, 2020)

D. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Umum Kota Dumai serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020; perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan target pada Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 dan upaya/ langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Prencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Perangkat Daerah /Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

“Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah”

Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021, Peraturan Walikota nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kota Dumai untuk mencapainya dalam Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MENPAN & RB RI) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. VISI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai. Dalam penetapan Visi dan Misi rancangan teknokratik Pembangunan Kota Dumai mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang RPJPD Kota Dumai, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024. Adapun Visi RPJMN adalah *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*. Adapun Visi Pembangunan Provinsi Riau adalah “*Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)*”

Mengacu kepada Visi RPJMN dan Visi Provinsi Riau serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”

B. MISI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan perikanan serta ketahanan pangan
6. Meningkatkan produktivitas sektor jasa, perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021

Berdasarkan analisis dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 di atas maka diperlukan strategi yang mewujudkan visi pembangunan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada 7 (Tujuh) misi sebagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah:

1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih;
 - b) Meningkatnya infrastruktur perkotaan;
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan sasaran :
 - a) meningkatnya partisipasi pendidikan;
 - b) meningkatnya angka kelulusan pendidikan dasar;
 - c) meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran:
 - a) Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat;
 - b) Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
4. Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga dengan sasaran meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :
 - a) Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat;
 - b) Menurunnya persentase penduduk miskin;
 - c) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
 - d) Meningkatnya lapangan kerja.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik;
 - b) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya pendapatan petani;
 - b) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah;
 - b) Meningkatnya investasi di Kota Dumai;
9. Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar;
 - b) Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Visi Terwujudnya Masyarakat Dumai yang Makmur dan Madani pada Tahun 2021											
	Misi 1	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar									
		Tujuan 1 Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	%	28,6	42,8	42,8	57,1	57,1	100	100
		Sasaran 1.1 Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	400	600	800	4300	10015	16230	16230
		Sasaran 1.2 Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	2,00	3,42	3,44	3,48	3,50	3,55	3,55
			Persentase panjang	%	55,57	56,24	56,92	57,59	58,26	58,94	58,94

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			jaringan jalan dalam kondisi baik									
			Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,00	2,79	2,80	2,83	2,85	2,9	2,9	
			Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	2,04	5,92	6	6	7	7	7	
			Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	12	28	40	52	60	72	72	
			Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	356	369	395	416	437	457	457	
		Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%	60	65	70	75	80	85	85

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Persentase kualitas air	%	60	65	70	75	80	85	85	
	Misi 2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing										
		Tujuan 2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,58	9,62	9,65	9,69	9,73	9,77	9,77
				Harapan lama sekolah	Tahun	12,68	12,87	13,06	13,25	13,45	13,68	13,68
		Sasaran 2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%	99,43	99,44	99,45	99,46	99,47	99,48	99,48
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,25	99,25	99,5	99,75	99,92	100	100
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	85,26	88,76	92,26	95,76	99,26	100	100
		Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	1 : 339	1 : 339	1 : 339	1 : 339	1 : 339	1 : 339	1 : 339
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	1 : 473	1 : 473	1 : 473	1 : 473	1 : 473	1 : 473	1 : 473
		Tujuan 3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,06	70,08	71,00	71,02	71,04	71,04	71,04
		Sasaran 3. 1	Terkendalnya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Terkendalnya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase Terkendalnya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	86,84	100	100	100	100	100	100
				Persentase Meningkatnya	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Status Gizi Balita								
		Sasaran 3.2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31	31	31	31	31	31	31
			Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	126.672	126.363	127.366	146.887	169.887	192.887	192.887
		Tujuan 4 Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	6	-	5	-	3	-	3

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Sasaran 4.1 Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	6	-	5	-	3	-	3
	Misi 3	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan									
		Tujuan 5 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Rp. 000	11.531	11.652	12.016	12.391	12.777	13.176	13.176
			PDRB per kapita	Rp. 000	95.733,57	100.332,3	105.151,92	110.203,07	115.496,86	121.044,95	121.044,95
		Sasaran 5.1 Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,450	0,438	0,426	0,415	0,403	0,400	0,400
		Sasaran 5.2 Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,74	4,66	4,58	4,50	4,42	4,34	4,34
		Sasaran 5.3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	2,078	2,076	2,074	2,072	2,070	2,068	2,068

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(LPP)									
		Sasaran 5.4	Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,51	8,97	8,40	7,90	7,42	6,98	6,98
	Misi 4	Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan										
		Tujuan 6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	72	74	76	78	80	81.5	81,5
		Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau	Peringkat	9	8	7	6	5	4	4
		Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai Akuntabilitas	Nilai	CC	CC	B	B	B	B	B
	Misi 5	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan										
		Tujuan 7	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Rp. Milyar	1.687,64	1.791,53	1.901,83	2.018,91	2.143,19	2.275,14	2.275,14

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		memenuhi kebutuhan lokal										
		Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	165,60	175,79	186,61	198,10	210,30	223,24	223,24
		Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	79,68	80,48	81,28	82,09	82,91	83,74	83,74
	Misi 6	Meningkatkan Produktivitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah										
		Tujuan 8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,64	4,13	4,22	4,32	4,37	4,42	4,42
		Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.42	21.43	21.44	21.45	21.46	21.47	21.47
				Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap	%	53.88	54.07	54.27	54.46	54.65	54.85	54.85

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PDRB								
		Sasaran 8.2 Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	5.563.502.258.070	5.674.772.303.231	5.788.267.749.296	5.904.033.104.282	6.022.113.766.368	6.142.556.041.695	6.142.556.041.695
	Misi 7	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamais serta Berbasis Budaya Melayu									
		Tujuan 9 Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	74	79,5	85	90,5	96	100	100
		Sasaran 9.1. Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan	%	71	77	83	89	95	100	100

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kurikulum muatan lokal budaya melayu								
		Sasaran 9.2. Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	77	82	87	92	97	100	100

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2020
Pemerintah Kota Dumai**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Target 2020
1	2	3		4	5
Misi 1 :Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar					
1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	1	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	10.015
2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	2	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,5
		3	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,26
		4	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,85
		5	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7
		6	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	60
		7	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	416
3	Meningkatnya kualitas lingkungan	8	Persentase Kualitas udara	%	80
		9	Persentase kualitas air	%	80
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing					
4	Meningkatnya partisipasi pendidikan	10	Angka melek huruf	%	99,47

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Target 2020
1	2	3		4	5
		11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,92
		12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99,26
5	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
		14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
6	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	15	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	'0.277083 3
		16	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	'0.370138 9
7	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	17	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
		18	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
		19	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
8	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	20	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
		21	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	169887
9	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	22	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga	Peringkat	3

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Target 2020
1	2	3		4	5
			Pelajar Daerah/ POPDA)		
Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan					
10	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	23	Indeks Gini	Indeks	0,403
11	Menurunnya persentase penduduk miskin	24	Tingkat Kemiskinan	%	4,42
12	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	25	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,07
13	Meningkatnya lapangan kerja	26	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,42
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan					
14	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	27	Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau	Peringkat	5
15	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	28	Opini BPK	Opini BPK	WTP
		29	Nilai Akuntabilitas	Nilai	B
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan					
16	Meningkatnya pendapatan petani	30	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210,3
17	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	31	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,91
Misi 6 : Meningkatkan Produktivitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah					
18	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	32	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.45

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Target 2020
1	2	3		4	5
		33	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.46
19	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	34	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6.022.113 .766.368
Misi 7 :Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamais serta Berbasis Budaya Melayu					
20	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	35	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95
21	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	36	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	97

Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp.	16.865.770.831
		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp.	150.000.000
Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	158.304.000
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp.	2.154.785.000
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp.	80.831.469.150,00
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp.	8.195.996.400
		Program pengendalian banjir	Rp.	2.352.172.590
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp.	2.877.755.500
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp.	13.497.992.925
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp.	303.750.000
		Program pengelolaan areal pemakaman	Rp.	276.807.250
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rp.	2.958.339.722
		Program Perencanaan Tata Ruang	Rp.	700.000.000
		Program Pemanfaatan Ruang	Rp.	280.000.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp.	120.000.000
Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp.	6.084.227.200
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Rp.	15.800.000

		Program peningkatan pengendalian polusi	Rp.	81.650.000
Sasaran 2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp.	859.365.350
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp.	1.819.739.250
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp.	297.364.850
Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	12.170.070.700
Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp.	26.004.487.950
Sasaran 3.1	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	1.210.702.000
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Rp.	90.911.000
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Rp.	70.075.000
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.	627.540.000
		Program obat dan perbekalan kesehatan	Rp.	8.886.435.495
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	316.115.000
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp.	693.104.000
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp.	1.297.070.000
Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	33.876.677.280
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	5.105.668.310
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.	490.291.000

		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp.	38.054.118.600
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp.	1.997.000.000
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	Rp.	9.745.872.090
Sasaran 4.1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp.	730.492.891
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Rp.	381.462.000
Sasaran 5.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp.	765.598.000
Sasaran 5.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp.	205.839.000
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp.	541.876.000
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp.	746.661.000
		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Rp.	215.861.000
Sasaran 5.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Program Keluarga Berencana	Rp.	296.914.275
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Rp.	1.093.259.234
		Program pelayanan kontrasepsi	Rp.	704.210.000

		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Rp.	704.210.000
Sasaran 5.4	Meningkatnya lapangan kerja	program peningkatan kesempatan kerja	Rp.	59.650.000
		Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Rp.	83.698.500
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	999.800.000
Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp.	123.550.000
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Rp.	311.768.000
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp.	261.544.000
		Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Rp.	114.580.000
		Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil	Rp.	200.640.000
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	1.653.201.700
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp.	2.184.617.000
		Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Rp.	1.065.630.000
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rp.	48.000.000
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp.	1.237.782.500
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp.	1.324.000.000

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp.	39.525.000
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp.	139.598.400
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp.	368.653.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp.	947.412.400
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp.	1.093.259.234
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	542.055.420
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp.	391.638.950
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	393.585.000
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	711.724.750
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	110.851.500
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	50.000.000
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	891.900.000
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	50.000.000
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	426.110.000
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	965.700.000

		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	68.678.000
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	355.122.000
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	394.353.000
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	243.933.810
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	436.000.000
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	918.000.000
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	109.200.000
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	583.450.000
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	1.015.676.000
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	179.256.000
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	571.230.000
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	959.475.000
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	121.761.946
Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp.	135.000.000
		Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Rp.	2.581.404.700
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.	2.861.905.700

		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rp.	330.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	368.350.692
		program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rp.	104.364.900
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rp.	27.034.000
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Rp.	37.350.000
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	4.124.356.300
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp.	102.959.000
		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Rp.	2.254.292.325
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp.	9.672.607.000
		Program perencanaan pembangunan daerah	Rp.	1.977.664.300
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp.	213.706.226
		Program perencanaan sosial dan budaya	Rp.	758.787.736
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.	6.003.000.200
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp.	62.893.400
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp.	139.598.400
Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp.	784.021.750

		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp.	1.126.095.000
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp.	752.900.000
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rp.	407.525.000
		Program pengembangan budidaya perikanan	Rp.	1.150.993.400
		Program pengembangan perikanan tangkap	Rp.	355.069.230
Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rp.	2.231.774.600
		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp.	166.590.000
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rp.	573.030.000
Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp.	376.291.000
		Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Rp.	25.883.000
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp.	80.455.000
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp.	250.000.000
Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp.	295.870.000
Sasaran 9.1.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Program pengembangan Kemitraan	Rp.	1.080.653.000
Sasaran 9.2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	12.170.070.700

pendidikan dasar

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp.	4.139.500.000
--	-----	---------------

TOTAL :	Rp.	368.372.419.512
----------------	------------	------------------------



Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Daerah Kota Dumai pada tahun 2020 telah melakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta masih mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi

Adapun Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah Kota Dumai, sebagai alat ukur untuk melihat pencapaian Visi RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Makmur dan Madani pada Tahun 2021. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah Kota Dumai tersebut, digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel TC.17 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

A. PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI 2020

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan

dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, sangat disadari bahwa kedua metode yang digunakan tersebut membutuhkan perumusan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi hasil.

Tabel 3.1: Skala Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020

No	Interval Kinerja Tahun 2020	Kriteria Kinerja Tahun 2020	Kode
1	91 < 100	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

Capaian kinerja sasaran strategis kurun tahun 2016 – 2021 yang merupakan target dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai terlihat pada Tabel III.2 dokumen Laporan Kinerja ini, sedangkan pencapaian realisasi kinerja yang tertuang dalam misi pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.2: Capaian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
			2020	2020	(%)	
1	2	3	4	5	6	
Misi 1 :Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar						
Tujuan 1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1.	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	%	57,1	84,85	148,60
% Pencapaian Tujuan					148,60	
Sasaran 1.1 : Meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	2.	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	10.015	6.611	66,01

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
			2020	2020	(%)	
1	2	3	4	5	6	
% Pencapaian sasaran					66,01	
Sasaran 1.2 : Meningkatkan infrastruktur perkotaan	3.	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,5	0,26	7,43
	4.	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,26	33,48	57,47
	5.	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,85	0	0
	6.	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	7	24,32	347,43
	7.	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	60	100	166,67
	8.	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	416	435	104,57
% Pencapaian sasaran					113,93	
Sasaran 1.3 : Meningkatkan kualitas lingkungan	9.	Persentase Kualitas udara	%	80	80	100
	10.	Persentase kualitas air	%	80	80	100
% Pencapaian sasaran					100	
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing						
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	11.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,73	10,04	103,19
	12.	Harapan lama sekolah	Tahun	13,45	12,40	92,19
% Pencapaian Tujuan					97,69	
Sasaran 2.1 : Meningkatkan partisipasi pendidikan	13.	Angka melek huruf	%	99,47	99,43	99,96
	14.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,92	99	99,08
	15.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	99,26	83,24	83,86
% Pencapaian sasaran					94,30	
Sasaran 2.2 : Meningkatkan angka kelulusan Pendidikan dasar	16.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100,00	100,00
	17.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100,00	100,00
% Pencapaian sasaran					100,00	
Sasaran 2.3 : Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	18.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0,277083333	0,267016	96,37

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Target Tahunan	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2020	2020	(%)
1	2		3	4	5	6
	19.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0,370138889	0,207378	56,03
	% Pencapaian sasaran					76,20
Tujuan 3 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	20.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04	70,93	99,85
	% Pencapaian Tujuan					99,85
Sasaran 3.1 : Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbiditas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	21.	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100	99,96	99,96
	22.	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100	48,24	48,24
	23.	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100,00	100,00
	% Pencapaian sasaran					82,73
Sasaran 3.2 : Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	24.	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31	44,86	55,29
	25.	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	169.887	158.823	93,49
	% Pencapaian sasaran					74,39
Tujuan 4 : Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	26.	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3	0,00	0
	% Pencapaian Tujuan					0
Sasaran 4.1 : Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	27.	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3	0,00	0
	% Pencapaian sasaran					0
Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan						
Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	28.	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Rp. 000	12.777	12.453	97,46
	29.	PDRB per kapita	Rp. 000	115.496,86	117.198	101,47
	% Pencapaian Tujuan					99,47

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			2020	2020	(%)
1	2	3	4	5	6
Sasaran 5.1 : Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	30. Indeks Gini	Indeks	0,403	0,379	105,96
% Pencapaian sasaran					105,96
Sasaran 5.2 : Menurunnya persentase penduduk miskin	31. Tingkat Kemiskinan	%	4,42	3,16	128,51
% Pencapaian sasaran					128,51
Sasaran 5.3 : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	32. Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,07	2,17	95,17
% Pencapaian sasaran					95,17
Sasaran 5.4 : Meningkatnya lapangan kerja	33. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,42	8,19	89,62
% Pencapaian sasaran					89,62
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan					
Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	34. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	80,09	100,11
% Pencapaian Tujuan					100,11
Sasaran 6.1 : Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	35. Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	5	5,00	100
% Pencapaian sasaran					100
Sasaran 6.2 : Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	36. Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	100,00
	37. Nilai Akuntabilitas	Nilai	B	B	100,00
% Pencapaian sasaran					100,00
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan					
Tujuan 7 : Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	38. Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Rp. Milyar	2.143,19	2.079,21	97,01
% Pencapaian Tujuan					97,01
Sasaran 7.1 : Meningkatnya pendapatan petani	39. Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210,3	236,43	112,43
% Pencapaian sasaran					112,43
Sasaran 7.2 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	40. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,91	82,25	99,20
% Pencapaian sasaran					99,20
Misi 6 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah					
Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	41. Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,37	-1,05	-24,03

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
			2020	2020	(%)	
1	2	3	4	5	6	
% Pencapaian Tujuan					-24,03	
Sasaran 8.1 : Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	42.	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21,46	14,48	67,47
	43.	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54,65	57,74	105,66
% Pencapaian sasaran					88,60	
Sasaran 8.2 : Meningkatnya investasi di Kota Dumai	44.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6.022.113.766.368	12.961.297.980.000	215,23
% Pencapaian sasaran					215,23	
Misi 7 :Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu						
Tujuan 9 : Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	45.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	96	96	100
% Pencapaian Tujuan					100	
Sasaran 9.1 : Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	46.	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95	95	100
% Pencapaian sasaran					100	
Sasaran 9.2 : Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	47.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	97	97	100
% Pencapaian sasaran					100	

Sumber : Dumai dalam Angka 2021 dan LKj Perangkat Daerah 2020

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan Analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang sudah ditargetkan dalam

dukumen perencanaan. Sehingga pada tahun 2020 yang merupakan tahun kedua implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021, yang secara bertahap dan konsisten telah diupayakan untuk mewujudkan misi dan 9 tujuan melalui 21 (dua puluh satu) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja Tujuan serta 36 (tiga puluh enam) Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pemerintah Kota Dumai.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Misi 1. Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pencapaian misi pertama ini melalui 1 (satu) Tujuan dan 3 (Tiga) sasaran strategis, 1 (satu) indikator Tujuan, 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dengan penjelasan berikut :

Tujuan 1

Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

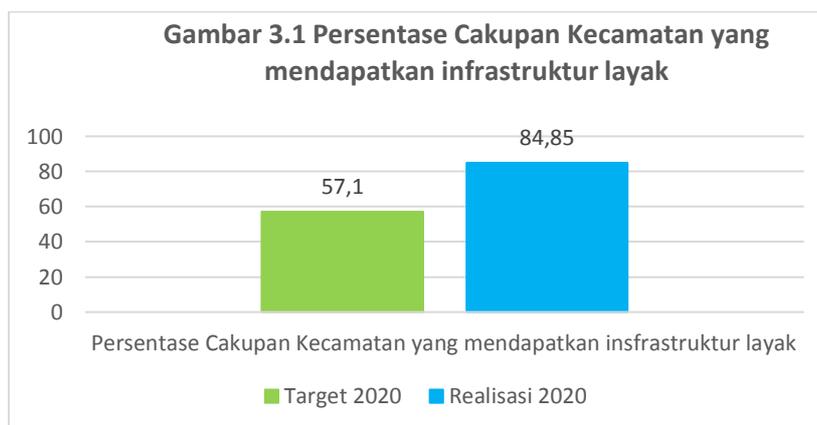
Tujuan 1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 1 “Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup**. Untuk mengukur Tujuan 1 ini terdapat 1 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.3 berikut di bawah ini:

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 1.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	%	48,48	48,48	57,58	57,1	84,85	148,60	100	84,85
	Rata-rata Capaian Kinerja							148,60		

Terlihat dari tabel 3.3 diatas pada Misi Pertama tujuan 1 ini 1 (satu) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : **Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan insfrastruktur layak**
Target tahun 2020 **Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan insfrastruktur Layak** adalah 57,1% dan realisasi tahun 2020 sebesar 84,85% dengan tingkat capaian sebesar 148,60%.

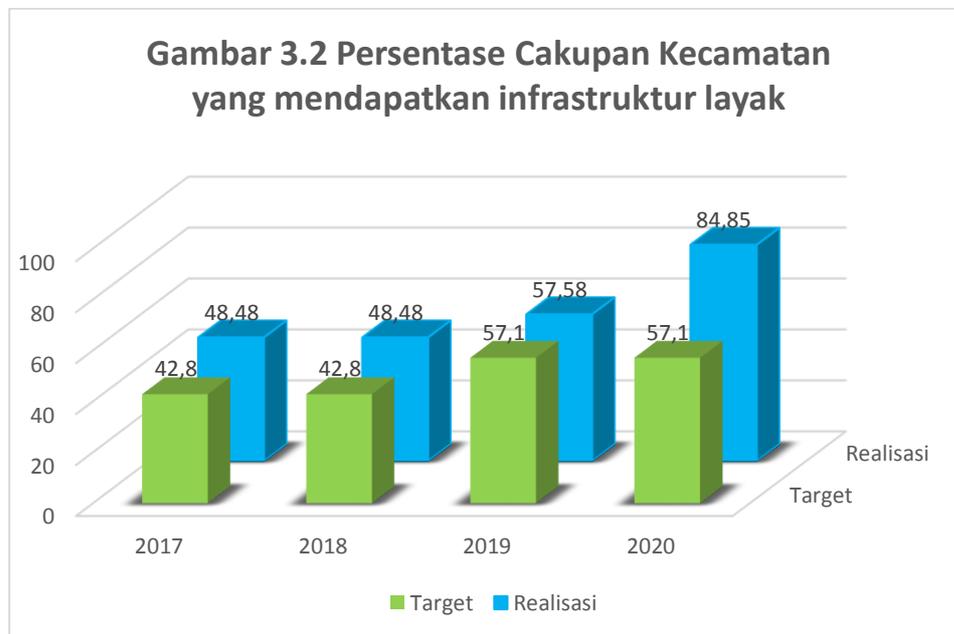


Pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 Terdapat 28 kelurahan dengan cakupan insfrastruktur layak dari 33 kelurahan atau sebesar 84,85%. Adapun Cakupan 7 Kecamatan yang mendapatkan insfrastruktur layak dapat dijabarkan pada 33 kelurahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Dumai Kota, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Dumai Kota (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Sukajadi (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Bintan (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Rimba Sekampung (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Laksamana (Infrastruktur Layak)
2. Kecamatan Medang Kampai, yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Pelintung (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Guntung (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Teluk Makmur (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Mundam (Infrastruktur Layak)
3. Kecamatan Dumai Timur, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:

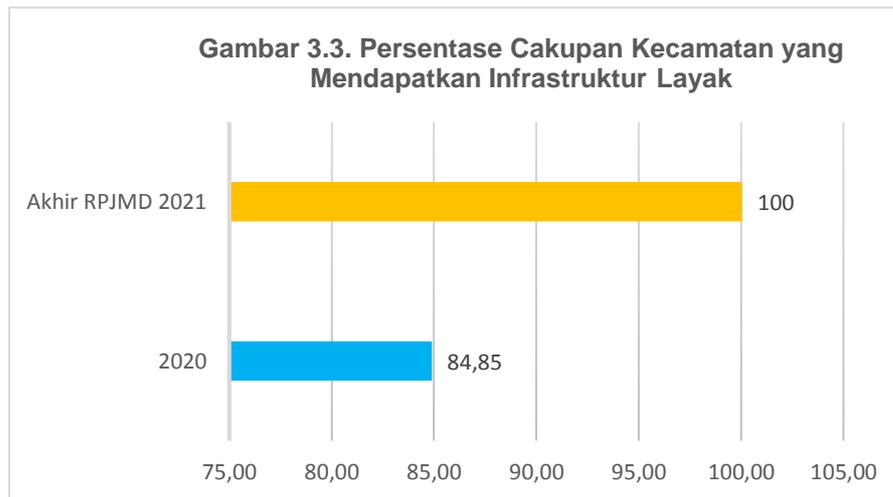
- Kelurahan Tanjung Palas (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Jaya Mukti (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Bukit Batrem (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Teluk Binjai (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Buluh Kasap (Infrastruktur Layak, tanah konsesi)
4. Kecamatan Dumai Barat, yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu:
- Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Pangkalan Sesai (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Purnama (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Bagan Keladi (Infrastruktur Layak)
5. Kecamatan Dumai Selatan, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
- Kelurahan Bumi Ayu (Infrastruktur Layak, tanah konsesi)
 - Kelurahan Bukit Datuk (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Bukit Timah (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Ratu Sima (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Mekar Sari (Infrastruktur Layak)
6. Kecamatan Bukit Kapur, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
- Kelurahan Bagan Besar (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Kayu Kapur (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Bukit Nenas (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Kampung Baru (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Gurun Panjang (Infrastruktur Layak)
7. Kecamatan Sungai Sembilan, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
- Kelurahan Bangsal Aceh
 - Kelurahan Lubuk Gaung
 - Kelurahan Tanjung Penyembal
 - Kelurahan Basilam Baru
 - Kelurahan Batu Teritip
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
- a. Indikator Kinerja Tujuan : **Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak**

Realisasi Pada tahun 2019 Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak adalah sebesar 57,58%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 sebesar 84,85. Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak meningkat menjadi 148,60%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : **Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 84,85% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 84,85%.



Sasaran Strategis 1.1

Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih

Sasaran strategis 1.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “**Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar**”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**. Untuk mengukur sasaran 1.1 ini terdapat 1 (Satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.4 berikut di bawah ini :

Tabel 3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1

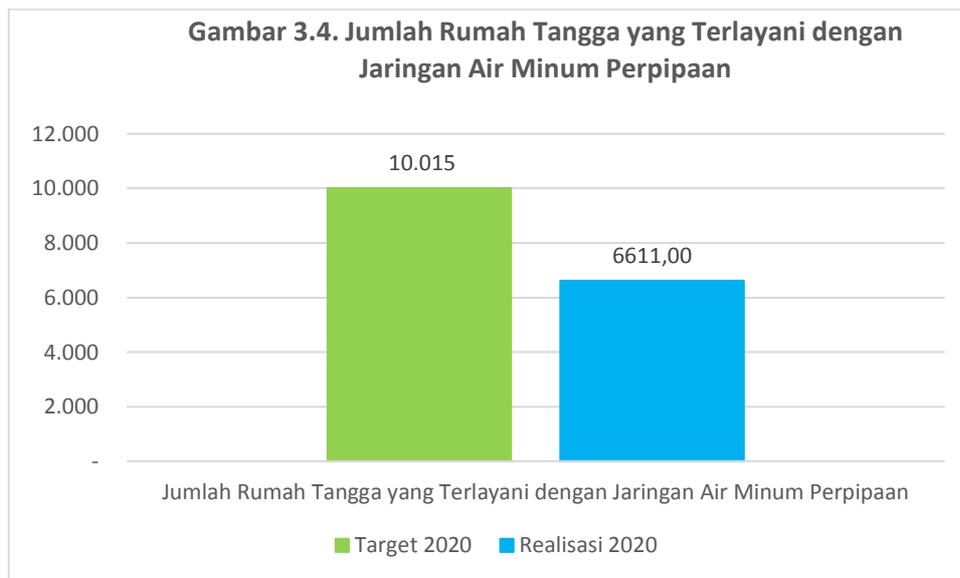
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	600	888	4310	10.015	6.611	66,01	16230	14,24
	Rata-rata Capaian Kinerja							66,01		

Terlihat dari tabel 3.4 diatas pada Tujuan pertama ini sasaran strategis 1.1 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

- a. Indikator Kinerja Sasaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan

Target tahun 2020 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan adalah 10.015 SR dan realisasi tahun 2020 sebesar 2.311 SR dengan tingkat capaian sebesar 23,075%.

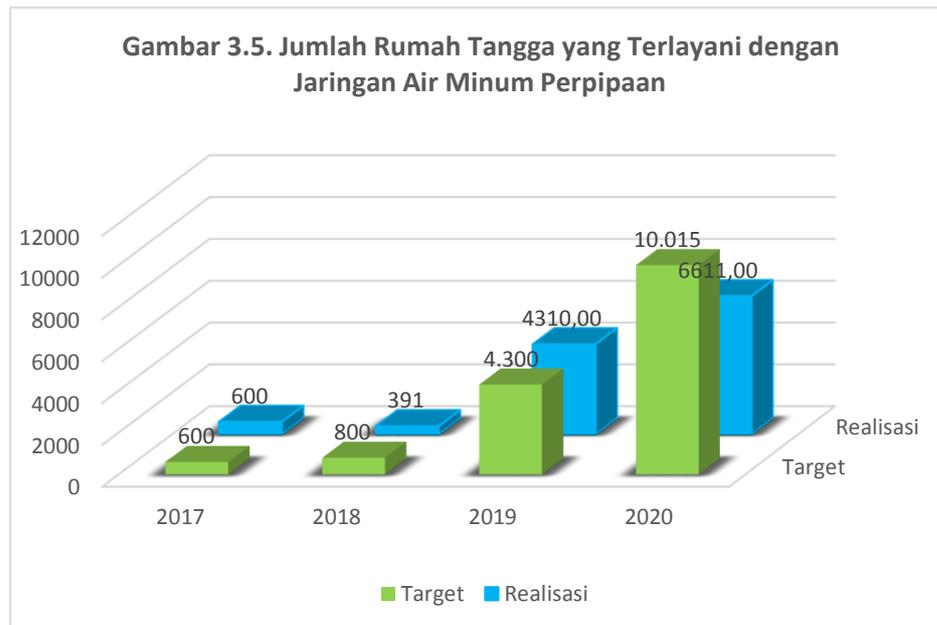


Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi, Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air, Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai, Pembangunan Infrastruktur Air Bersih, Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum, dan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

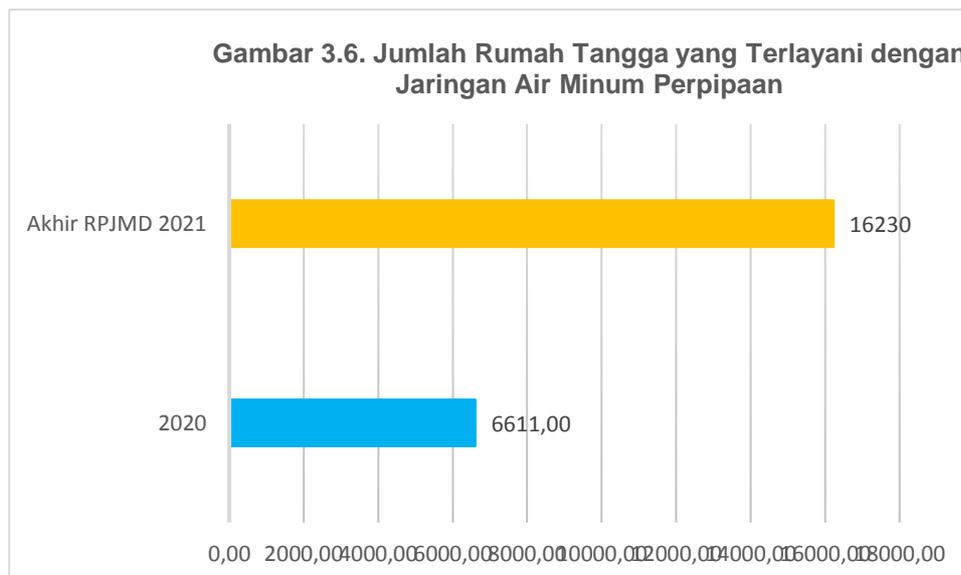
- a. Indikator Kinerja Sasaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan

Realisasi Pada tahun 2019 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan adalah sebesar 4.310 SR, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan meningkat menjadi sebesar 6611 SR.



Pada tahun 2020 Kapasitas Debit Air Bersih adalah sebesar 65 liter/detik termasuk dalam indeks kategori “CUKUP”.

3. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan
 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 16.230 SR, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 (realisasi tahun 2016 sebesar 1300 SR + tahun 2017 sebesar 600 SR + tahun 2018 sebesar 391 SR + tahun 2019 sebesar 4.310 SR+tahun 2020 sebesar 6.611) sebesar 13.212 SR dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 81,40%.



Sasaran Strategis 1.2

Meningkatnya infrastruktur perkotaan

Sasaran strategis 1.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan 1 “Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup**. Untuk mengukur sasaran 1.2 misi pertama ini terdapat 6 (enam) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.5 berikut dibawah ini :

Tabel 3.5. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2019 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	2,73	3,85	3,95	3,5	0,26	7,43	3,55	7,32
2	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	52,35	51,82	37,45	58,26	33,48	57,47	58,94	56,80
3	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	7,5	17,5	13,75	2,85	0	0,00	2,9	0

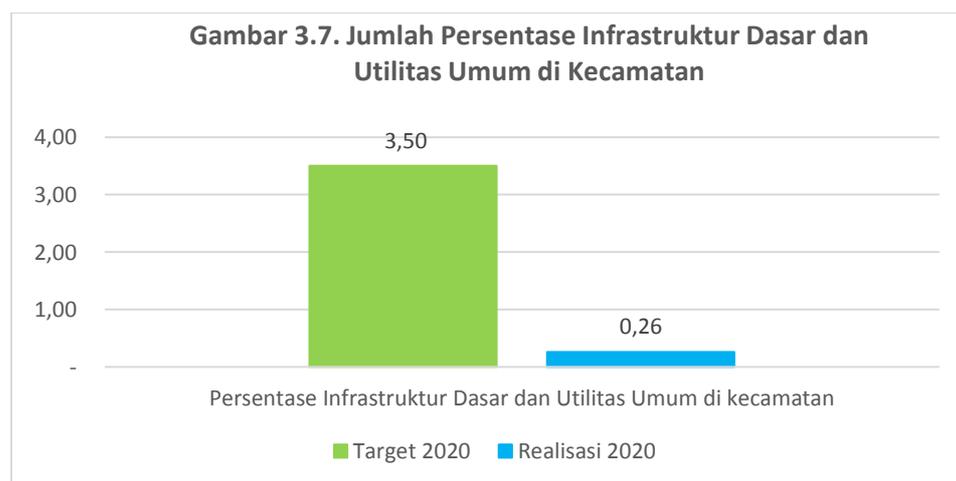
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2019 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
4	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	1,86	23,84	28,93	7	24,32	347,43	7	347,43
5	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	28	40	52	60	100	166,67	72	138,89
6	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	369	392	412	416	435,00	104,57	457	95,19
	Rata-rata Capaian Kinerja							113,93		

Terlihat dari tabel 3.5 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 1.2 terdapat 6 (enam) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan

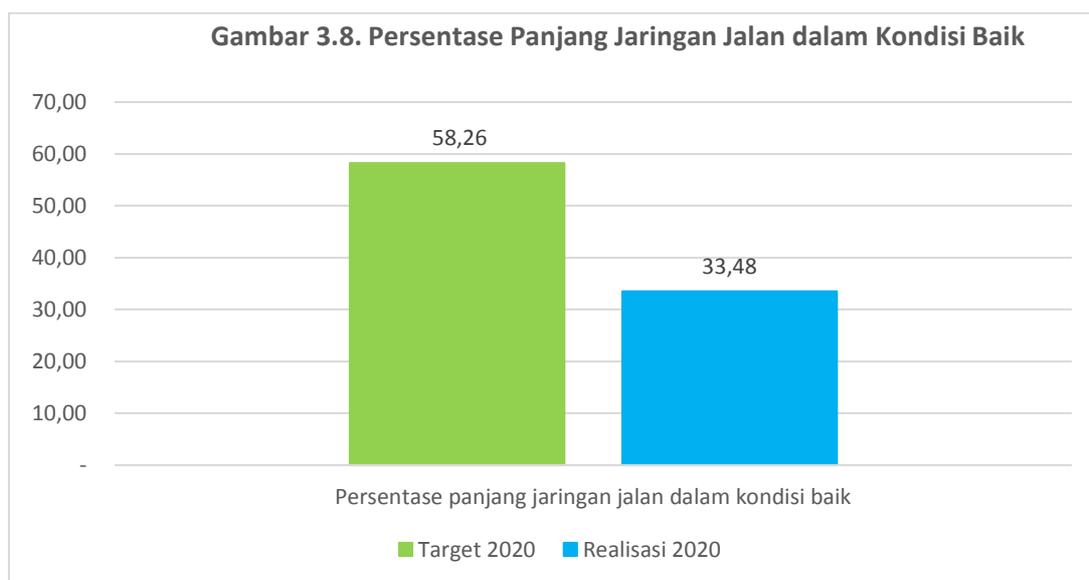
Target tahun 2020 Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan adalah 3,5% dan realisasi tahun 2020 sebesar 0,26% dengan tingkat capaian sebesar 0,26%.



Untuk melaksanakan indikator sasaran maka dilaksanakan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini bertujuan

untuk membangun jalan lingkungan dan drainase. (semenisasi dan infrastruktur lainnya). Jumlah Ruas jalan sesuai dengan Keputusan Walikota nomor 613/DPUPR/2017 berjumlah 2569 ruas jalan (gang dan jalan), dan ruas yang memiliki lebar lebih kecil atau sama dengan 3 meter yang diasumsikan merupakan kewenangan OPD DPRKP dan UPT DPUPR berjumlah 1542 ruas jalan (60% dari 2569 ruas jalan). Tahun 2020 jumlah kegiatan infrastruktur yang terlaksana berjumlah 4 paket dengan kondisi refocusing anggaran penanggulangan akibat bencana Covid-19, sehingga terjadi pengurangan paket pekerjaan infrastruktur. Realisasi IKU-nya 0,26 % dengan realisasi capaian 7,4 %.

- b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
 Target tahun 2020 Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 58,26% dan realisasi tahun 2020 sebesar 33,48% dengan tingkat capaian sebesar 57,47 %.

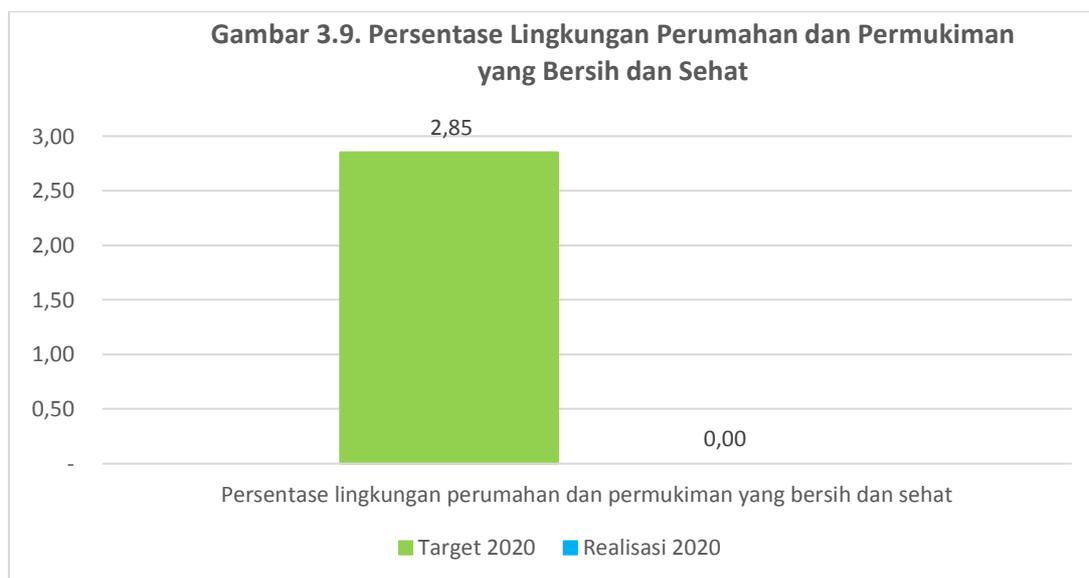


Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 37,45 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2020 yaitu 33,48 atau 93,23 %. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat, Rehabilitasi/pemeliharaan

alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat, Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kec.Dumai Selatan, Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kec.Bukit Kapur, Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kec.Medang Kampai, Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan, kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.

- c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat.

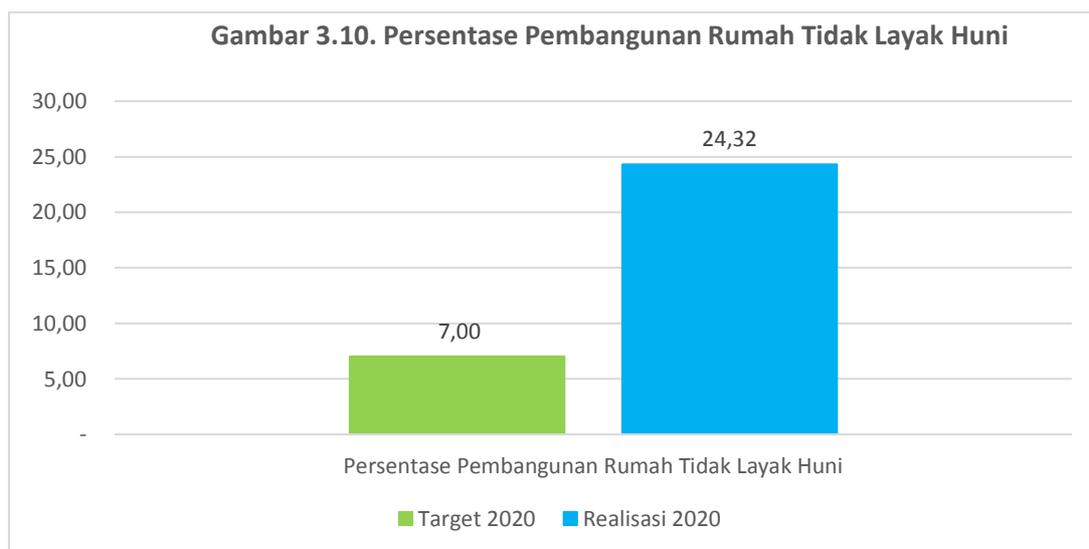
Target tahun 2020 Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat adalah 2,85% dan realisasi tahun 2020 sebesar 0% dengan tingkat capaian sebesar 0%.



Untuk mencapai indikator sasaran direncanakan untuk pembangunan sanitasi selama 5 (tahun) berjumlah 40 unit dalam bentuk IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++. Pada Tahun 2020 tidak ada kegiatan pembangunan IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++, Dinas Perkim membangun Tangki

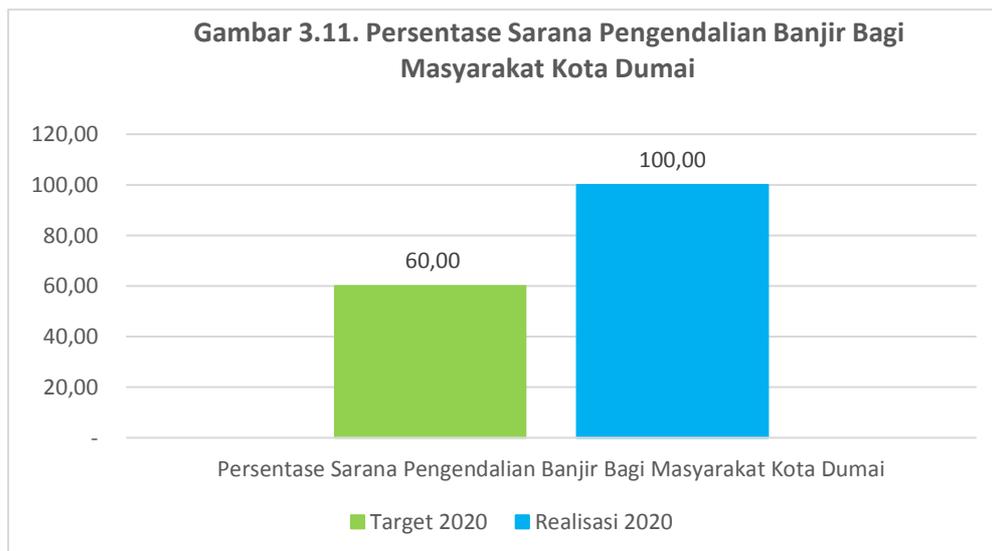
Septik Individu sebanyak 483 unit dengan penerima manfaat 1954 jiwa sehingga realisasi IKU sebesar 0 %.

- d. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
Target tahun 2020 Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni adalah 7% dan realisasi tahun 2020 sebesar 24,32% dengan tingkat capaian sebesar 347,43 %.



Berdasarkan data yang bersumber Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Dumai, jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 1412 hasil pengurangan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 jumlah pembangunan program perumahan sebanyak 344 unit yang bersumber dari DAK, BSPS dan APBD provinsi. Adapun realisasi IKU nya 24,32 % dengan capaian realisasinya 347,43 %.

- e. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai
Target tahun 2020 Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai adalah 60% dan realisasi tahun 2020 sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 166,67%.



Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai, Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir.

- f. Indikator Kinerja Sasaran : Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan
 Target tahun 2020 Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan adalah 416 ruas jalan dan realisasi tahun 2020 sebesar 435 ruas jalan dengan tingkat capaian 104,57 %.

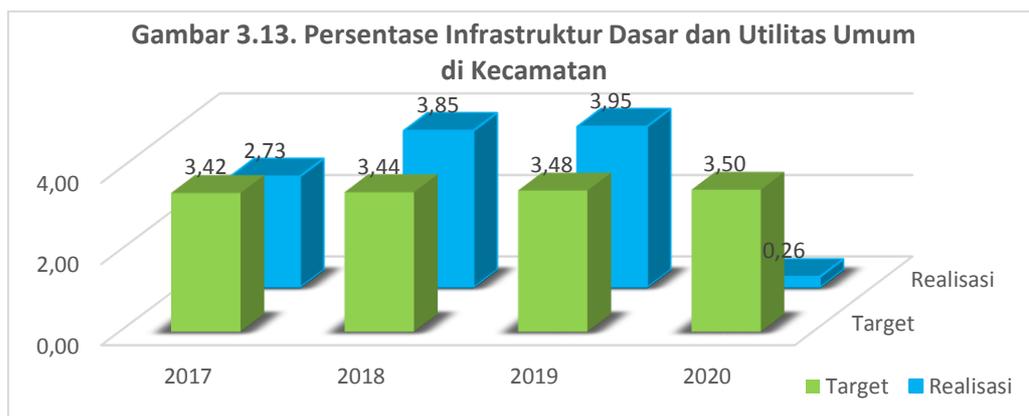


Indikator ini dilaksanakan dengan satu program, yaitu Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan 2 kegiatan yang bertujuan melakukan pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan di Kota Dumai. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan 23 paket pekerjaan PJU. Adapun realisasi IKU-nya 435 Ruas Jalan dengan capaian realisasinya 104,57 %.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

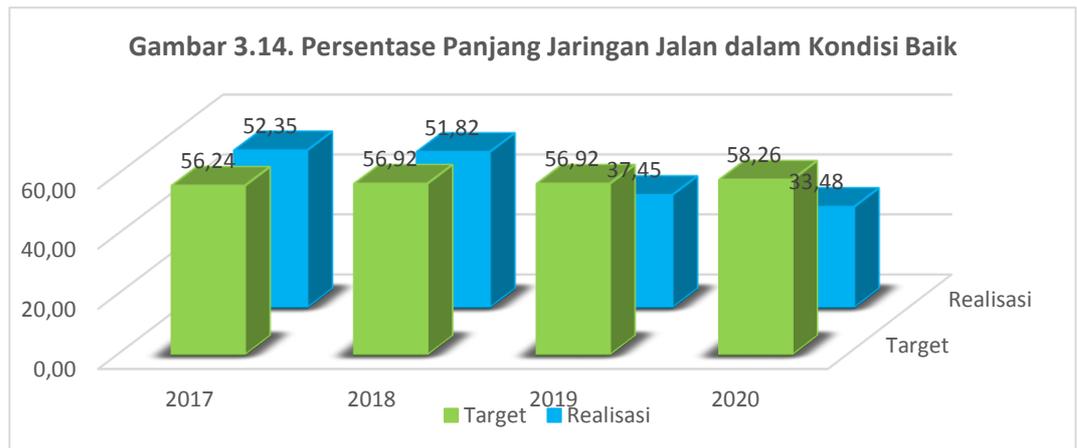
a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan

Realisasi Pada tahun 2019 Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan adalah sebesar 3,95%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan meningkat menjadi sebesar 0,26%.

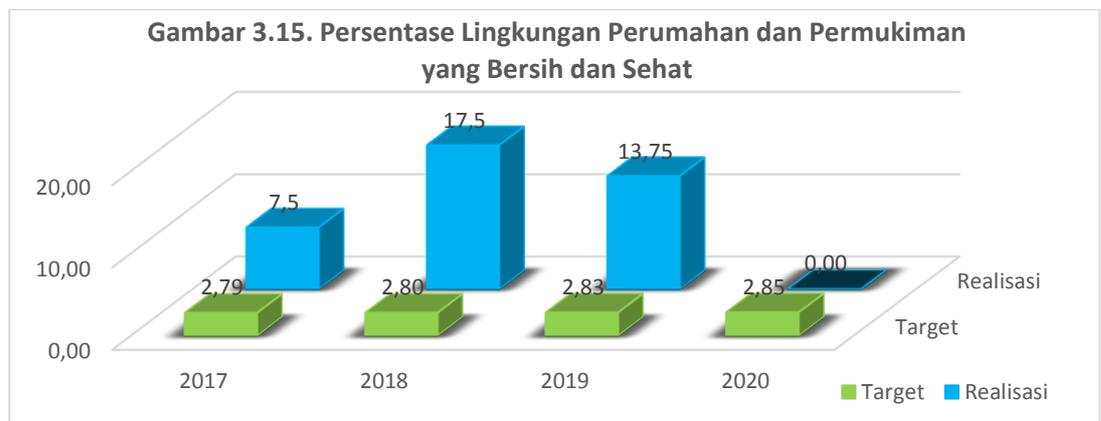


b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Realisasi Pada tahun 2019 Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah sebesar 37,45%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menurun menjadi 33,48%. Termasuk dalam indeks kategori "BAIK". Menurunnya tingkat kondisi jalan disebabkan adanya kesalahan dalam pengolahan data survey data dasar jalan.



- c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat
- Realisasi Pada tahun 2019 Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat adalah sebesar 13,75%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat menurun menjadi 0%.

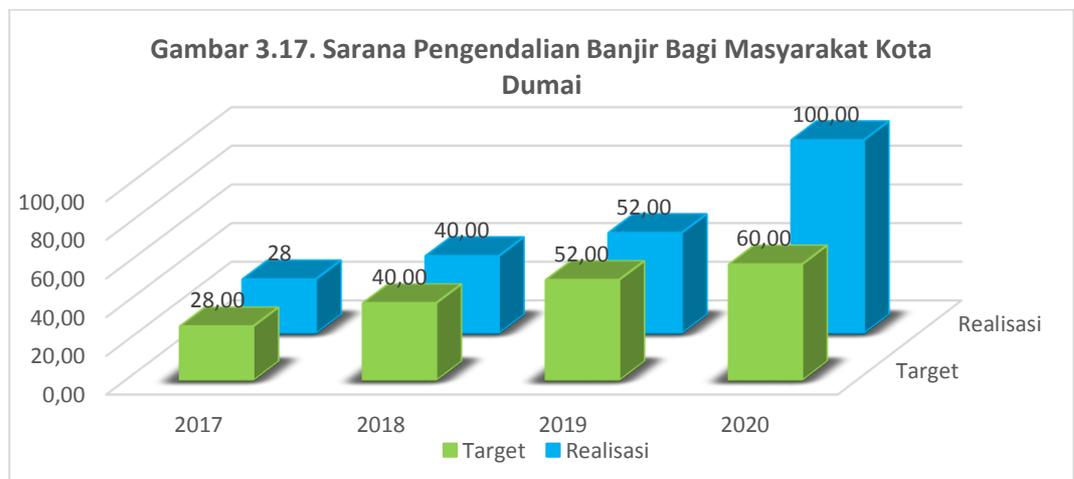


- d. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
- Realisasi Pada tahun 2019 Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni adalah sebesar 28,93%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni meningkat menjadi 24,32%.



- e. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai

Realisasi Pada tahun 2019 Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai adalah sebesar 52%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai meningkat menjadi 100%. Ini termasuk dalam indeks kategori “BAIK”.



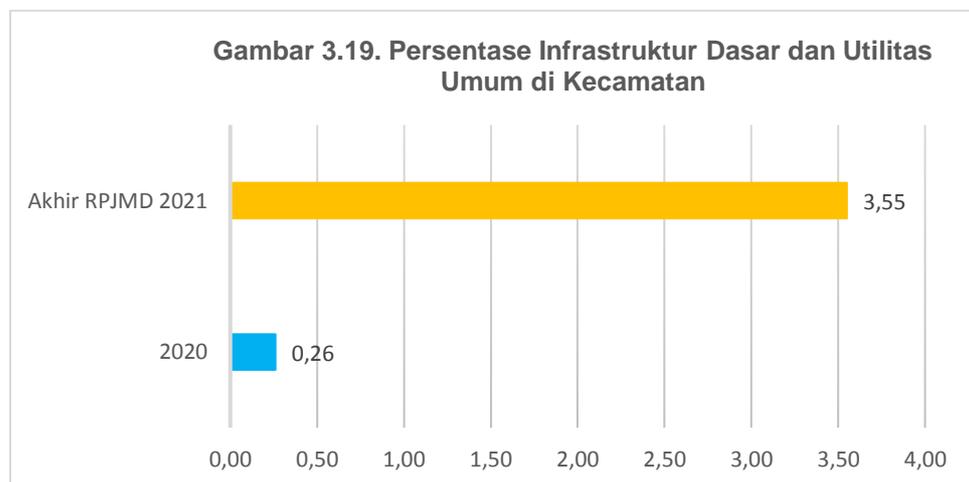
- f. Indikator Kinerja Sasaran : Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan
 Realisasi Pada tahun 2019 Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan adalah sebesar 412 ruas jalan, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan meningkat menjadi 435 ruas jalan.



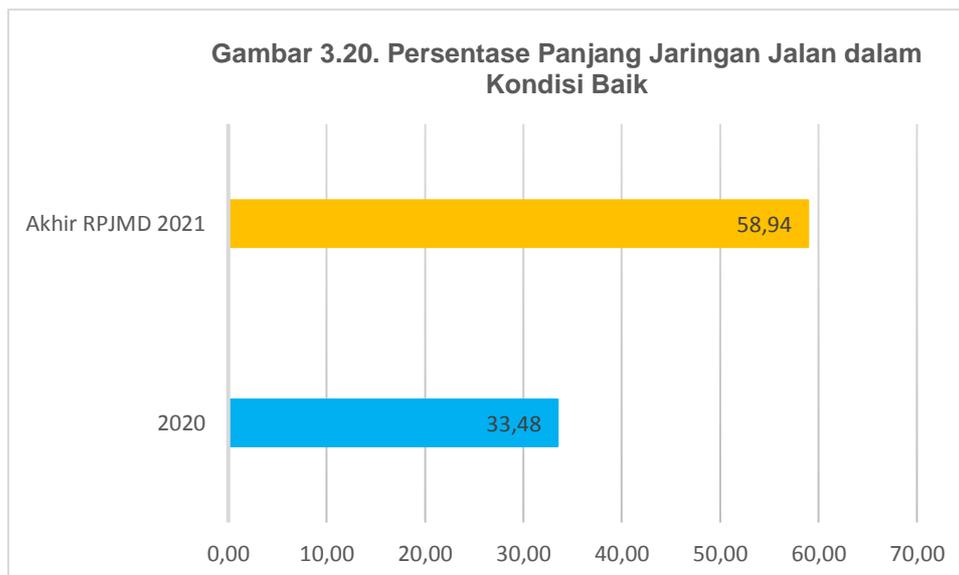
3. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 3,55%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2020 sebesar 0,26% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 7,32 %.

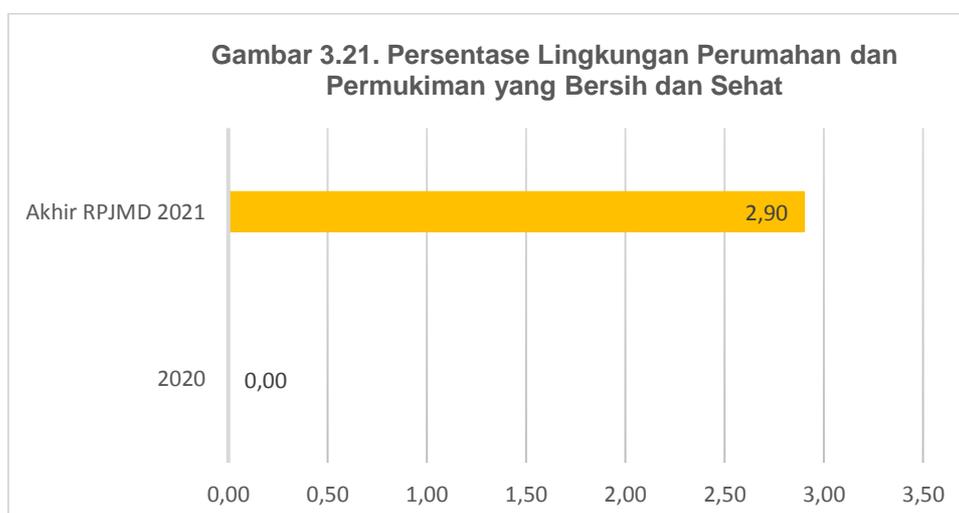


b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 58,94%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2020 sebesar 33,48% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 56,80%.

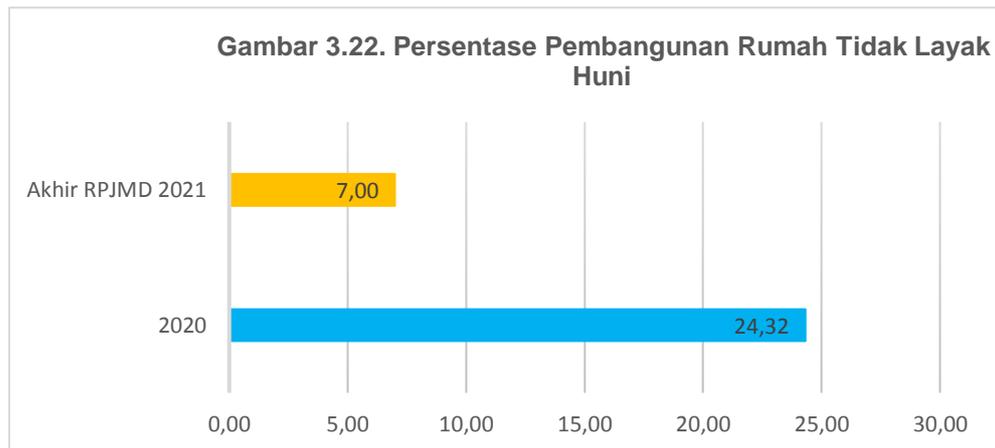


- c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 2,9%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 0% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 0%.

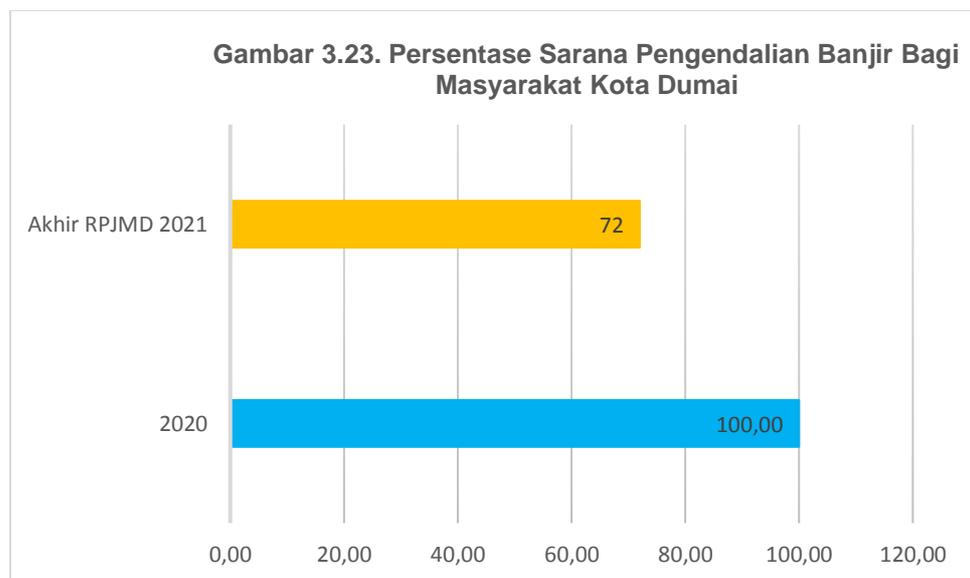


- d. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 7%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2020 sebesar 24,32% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 347,43%.



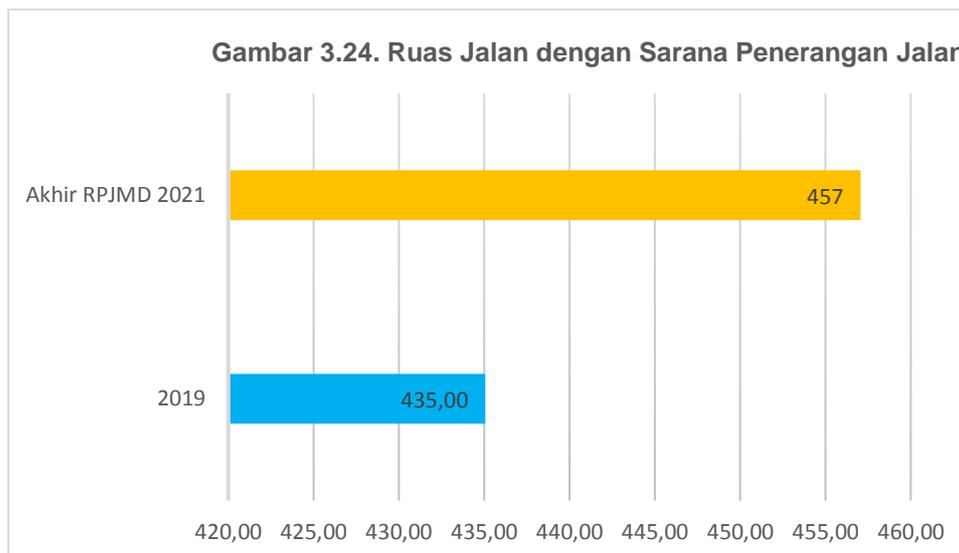
- e. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 72%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 138,89%.



- f. Indikator Kinerja Sasaran : Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 457 ruas jalan, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2020 sebesar 435 ruas jalan dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 95,19%.



Sasaran Strategis 1.3

Meningkatnya kualitas lingkungan

Sasaran strategis 1.3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar”. Sasaran ini didukung OPD Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mengukur sasaran misi pertama ini terdapat 2 (Dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.6 berikut di bawah ini :

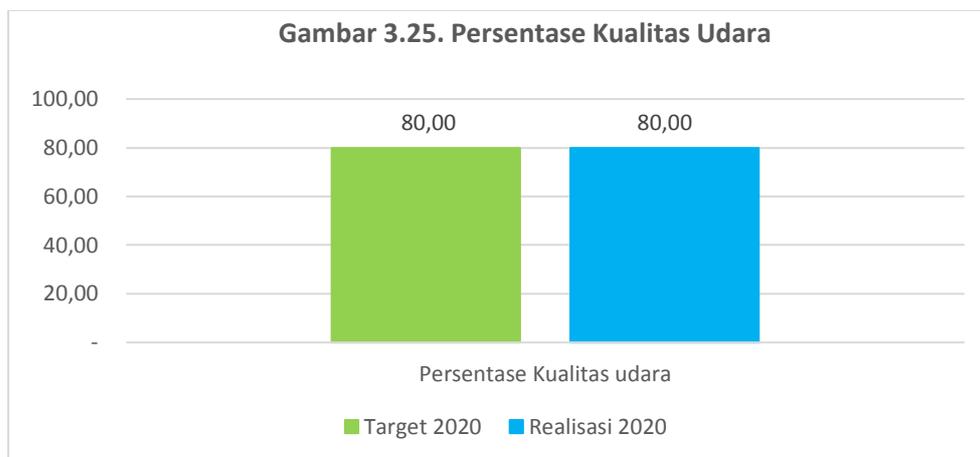
Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.3

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase Kualitas udara	%	65	70	75	80	80	100	85	94,12
2	Persentase kualitas air	%	65	70	75	80	80	100	85	94,12
	Rata-rata Capaian Kinerja							100		

Terlihat dari tabel 3.6 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 1.3 terdapat 2 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kualitas udara

Target tahun 2020 Persentase Kualitas udara adalah 80% dan realisasi tahun 2020 sebesar 80% dengan tingkat capaian sebesar 100,0%.

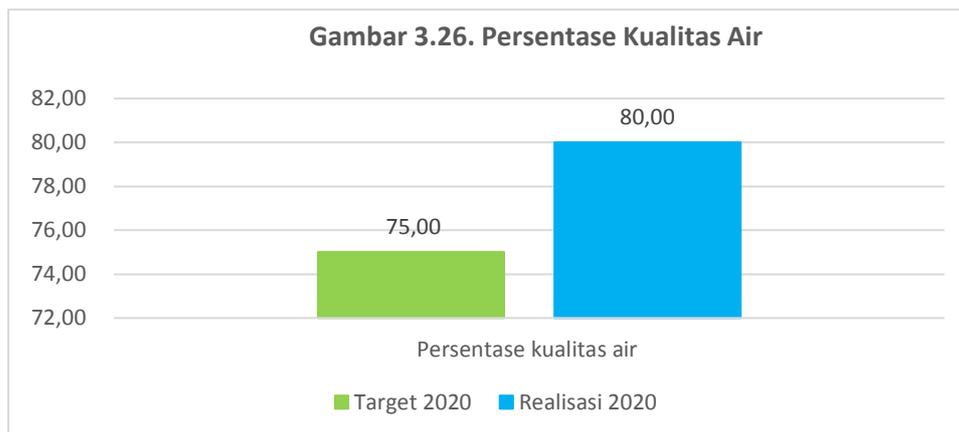


Program dan kegiatan pendukung indikator sasaran ini adalah Program **Peningkatan Pengendalian Polusi** kegiatan **Pengujian Polusi Udara Ambien**.

kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat polutan bagi lingkungan udara kota Dumai. Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 53.350.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.960.554,- atau sebesar 84,27%, dari dana yang dianggarkan tersebut telah dilakukan pengujian sample di 4 titik lokasi yang ada di kota Dumai hasil pengujian dari beberapa parameter tersebut didapat tingkat polutan di kota Dumai tidak ada yang melebihi nilai baku mutu.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kualitas Air

Target tahun 2020 Persentase kualitas air adalah 80% dan realisasi tahun 2020 sebesar 80% dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

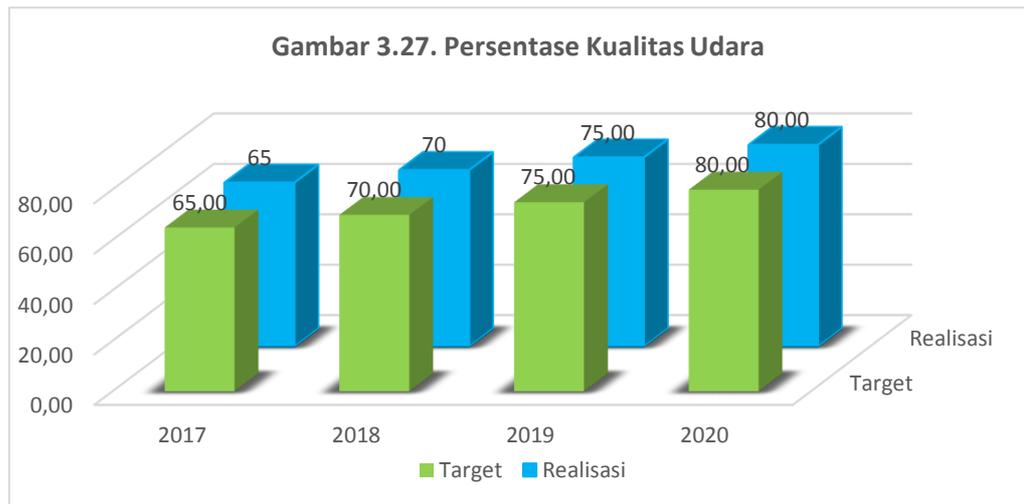


Program dan kegiatan pendukung indikator sasaran ini adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air. Kegiatan pengendalian pencemaran bertujuan sebagai acuan untuk menentukan kelas air di kota Dumai, dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan serta tersedianya data pemantauan kualitas air yang optimal. Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 102.200.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 72.499.606,- atau 70.94% dengan target keluaran tercapainya target pelayanan pencegahan pencemaran air. Artinya dengan anggaran yang disediakan dengan realisasi keuangan kegiatan ini dapat berjalan optimal sehingga hasil pengujian (lima) sample pada kualitas air. Terhadap air sungai, air drainase, air sumur, air laut, air hujan. Hasil analisa terhadap sample yang dilakukan didapati hasil pengujian kualitas air sungai

Dari beberapa parameter tidak ditemukannya sample yang melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

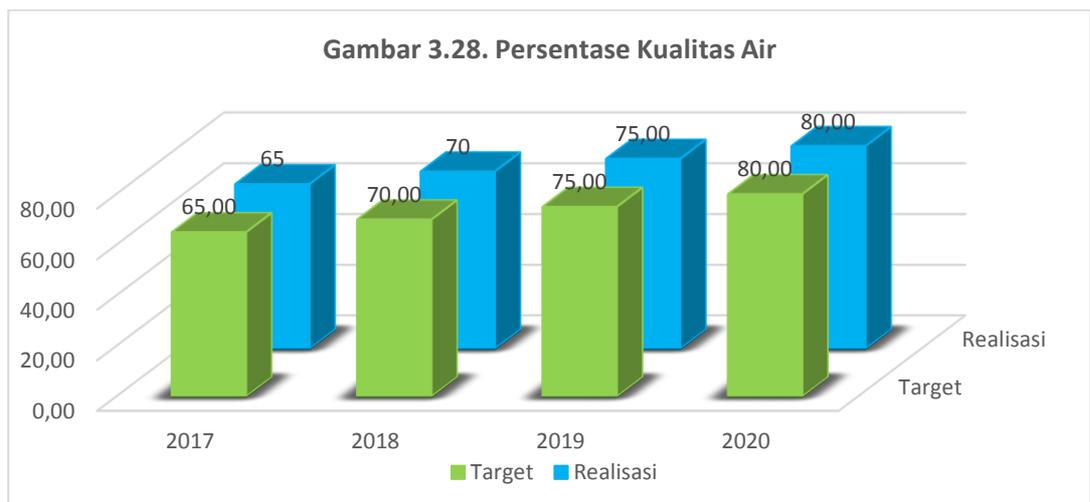
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kualitas udara

Realisasi Pada tahun 2019 Persentase Kualitas udara adalah sebesar 75%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase Kualitas udara meningkat menjadi sebesar 80%.



b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kualitas air

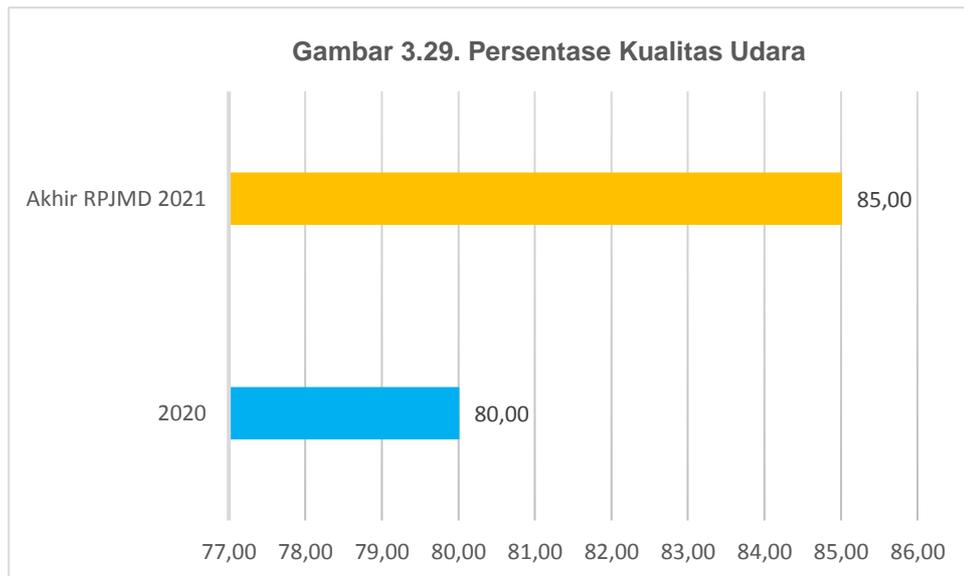
Realisasi Pada tahun 2019 Persentase kualitas air adalah sebesar 75%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase kualitas air meningkat menjadi 80%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

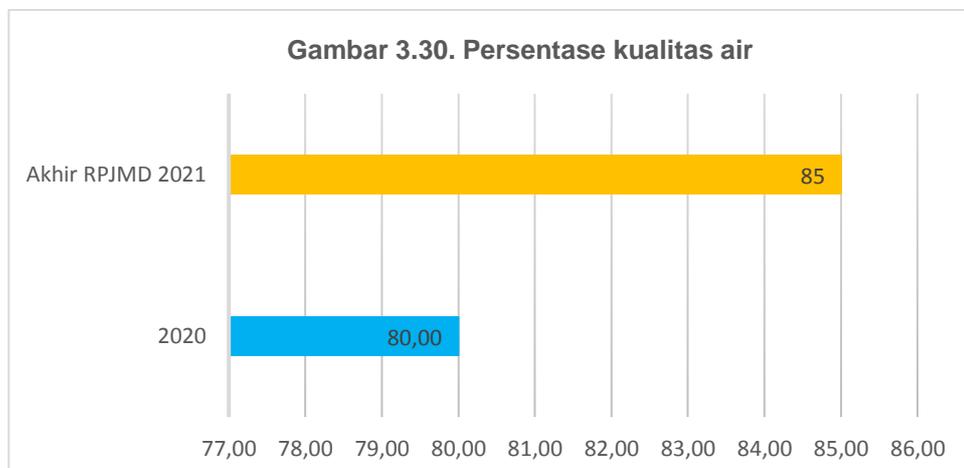
a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kualitas udara

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 85%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2020 sebesar 80% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 94,12 %.



b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kualitas air

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 85%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2020 sebesar 80% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 94,12%.



Misi 2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing

Pencapaian misi Kedua ini melalui 3 (tiga) Tujuan dan 6 (enam) sasaran strategis, 4 (empat) indikator Tujuan, 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 2

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

Tujuan2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip,. Untuk mengukur Tujuan 2 ini terdapat 2 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.7 di bawah ini :

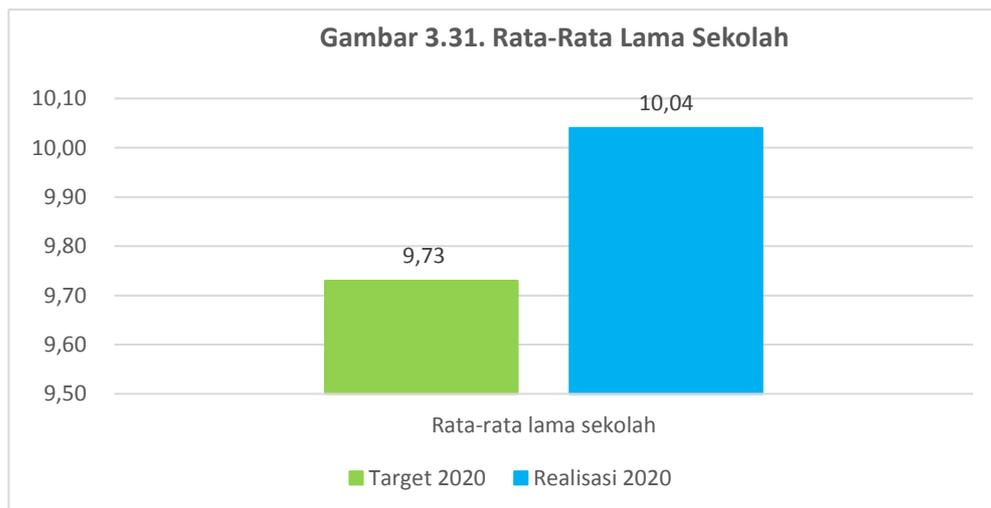
Tabel 3.7. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 2.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2020 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,58	9,67	9,84	9,73	10,04	103,19	9,77	102,76
2	Harapan lama sekolah	Tahun	12,75	12,97	12,98	13,45	12,40	92,19	13,68	90,64
	Rata-rata Capaian Kinerja							97,69		

Terlihat dari tabel 3.7 diatas pada Misi Kedua tujuan 2 ini 2 (dua) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan :**Rata-rata lama sekolah**

Target tahun 2020 Rata-rata lama sekolah adalah 9,73 tahun dan realisasi tahun 2020 sebesar 10,04 tahun dengan tingkat capaian sebesar 103,19%.



Salah satu variabel dari komponen IPM yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di Kota Dumai.

**Tabel 3.8. RATA – RATA LAMA SEKOLAH (RLS)
KOTA DUMAI TAHUN 2020**

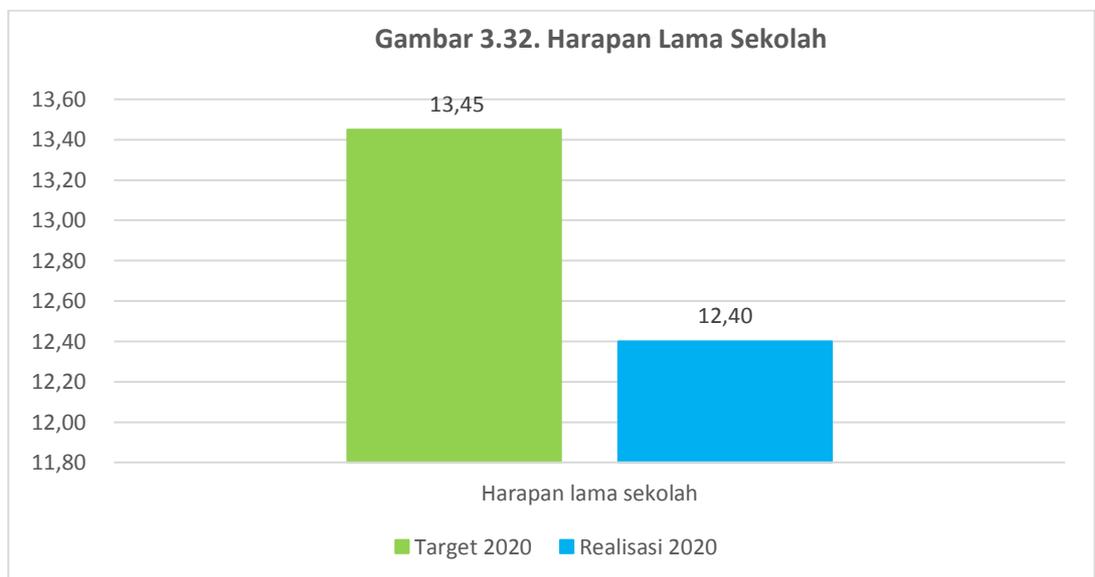
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)				KETERANGAN
Jumlah Penduduk	Tamatan Terakhir	Konversi Tamatan (Tahun)	Jumlah Tahun	
	TAMAT SD	6	279,018	Rata Rata Lama Sekolah = 10,04 Tahun
34,202	SLTP	9	307,818	
66,743	SLTA	12	800,916	
1,698	DIP II	14	23,772	
5,407	DIP III	15	81,105	
9,535	STR I	16	152,560	
389	STR II	17	6,613	
9	STR III	18	162	
164,486			1,651,964	
Rata-rata lama sekolah			10.04	

Rata-rata lama sekolah Kota Dumai pada tahun 2019 adalah sebesar 10,04 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7 tahun atau lebih) di Kota Dumai dapat menyelesaikan sekolah sampai kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas/SMA. Sehingga untuk mencapai target rata-rata lama bersekolah 9 tahun sudah terpenuhi. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai masih akan melakukan upaya agar penduduk kota Dumai dimasa yang akan datang dapat menyelesaikan Pendidikan sampai dengan SMA.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program BOS. Dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak meningkatkan rata-rata lama sekolah.

b. Indikator Kinerja Tujuan : **Harapan lama sekolah**

Target tahun 2020 Harapan lama sekolah adalah 13,45 tahun dan realisasi tahun 2020 sebesar 12,40 tahun dengan tingkat capaian sebesar 92,19 %.



Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi Harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak

tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Tujuan Harapan Lama Sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Angka harapan lama sekolah dapat kita lihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.9. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)				KETE RANGAN
Umur (th)	Jumlah Penduduk (Pi)	Jumlah Penduduk yang bersekolah (Ei)	Rasio (Ei/Pi)	
7	5393	6379	1.18	
8	5373	6251	1.16	
9	5298	6384	1.21	
10	5174	6565	1.27	
11	5011	6033	1.20	
12	4856	5064	1.04	
13	4734	4651	0.98	
14	4643	4540	0.98	
15	4534	4586	1.01	
16	4399	4548	1.03	
17	4368	3898	0.89	
18	4496	1561	0.35	
19	4721	404	0.09	
20	4895		0.00	
21	5006		0.00	
22	5156		0.00	
23	5366		0.00	
24	5566		0.00	
25	5744		0.00	
Harapan lama sekolah			12.40	Harapan Lama Sekolah = 12,40 tahun

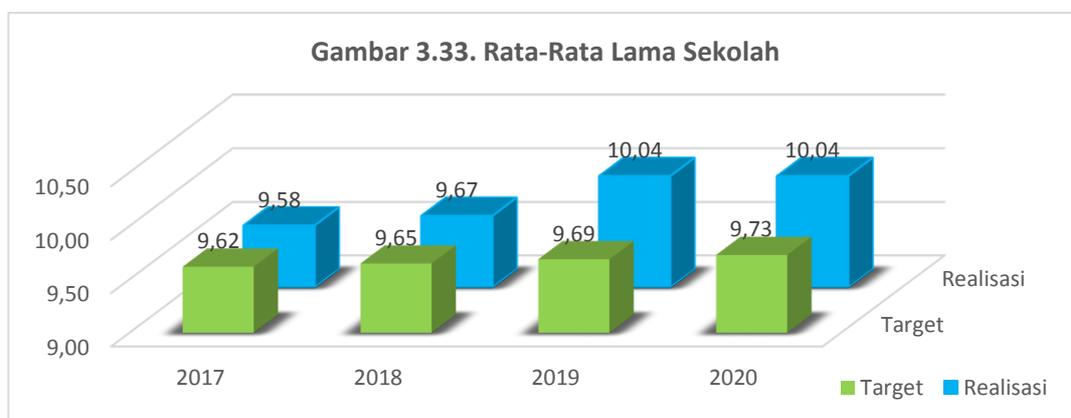
Belum tercapainya target angka HLS Kota Dumai terjadi karena dua faktor diantaranya adalah permasalahan ekonomi dan motivasi keluarga. Masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah cenderung memiliki minat terhadap pendidikan yang rendah. Biaya transportasi dan biaya peralatan sekolah dianggap masih terlalu tinggi untuk diwujudkan. Selain itu tingkat kepercayaan terhadap lembaga pendidikan juga mempengaruhi motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya, terutama untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dua hal tersebut berkolaborasi menjadi sebuah siklus, perekonomian yang masih rendah ditambah dengan kurangnya motivasi belajar dari keluarga sehingga orang tua menginginkan anaknya bekerja lebih dini, inilah yang mengakibatkan menurunnya angka HLS.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program Pendidikan anak usia dini. Program tersebut harus lebih dioptimalkan lagi. Untuk mencapai target angka harapan lama sekolah perlu dilakukan sosialisasi dan motivasi pendidikan serta aktifitas pemberdayaan masyarakat sehingga harapan lama sekolah di Kota Dumai meningkat.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

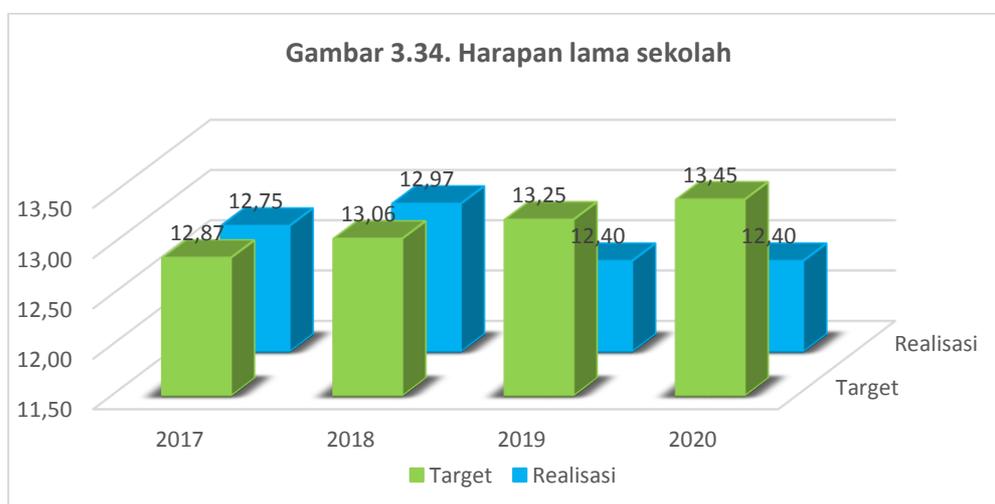
a. Indikator Kinerja Tujuan : **Rata-rata lama sekolah**

Realisasi Pada tahun 2019 Rata-rata lama sekolah adalah sebesar 10,04 tahun, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Rata-rata lama sekolah naik menjadi 10,07 tahun.



b. Indikator Kinerja Tujuan : **Harapan lama sekolah**

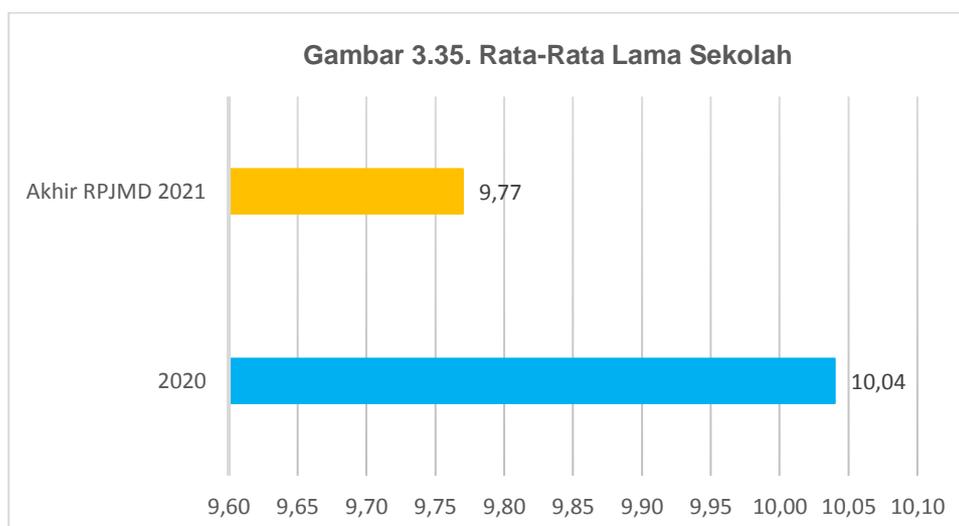
Realisasi Pada tahun 2019 Harapan lama sekolah adalah sebesar 12,40 tahun, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 13,12 tahun.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

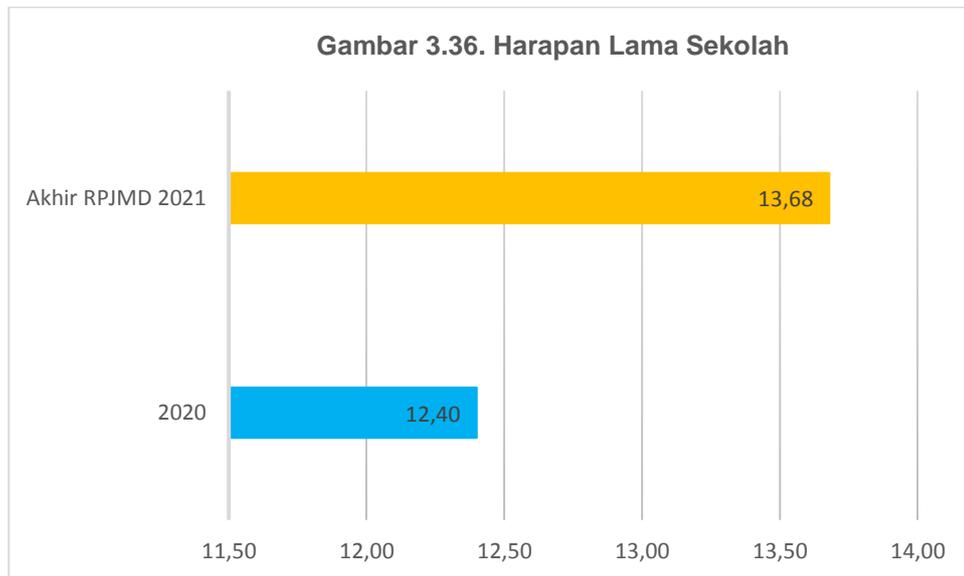
a. Indikator Kinerja Tujuan : **Rata-rata Lama Sekolah**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 9,77 tahun, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 10,07 tahun dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 103,07 %.



b. Indikator Kinerja Tujuan : **Harapan Lama Sekolah**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 13,68 tahun, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 13,12 tahun dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 95,91 %.



Sasaran Strategis 2.1

Meningkatnya partisipasi pendidikan

Sasaran strategis 2.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan**”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**.

Untuk mengukur sasaran misi Kedua ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.10. berikut dibawah ini :

Tabel 3.10. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Angka melek huruf	%	99,53	99,46	95,7	99,47	99,43	99,96	99,48	99,95

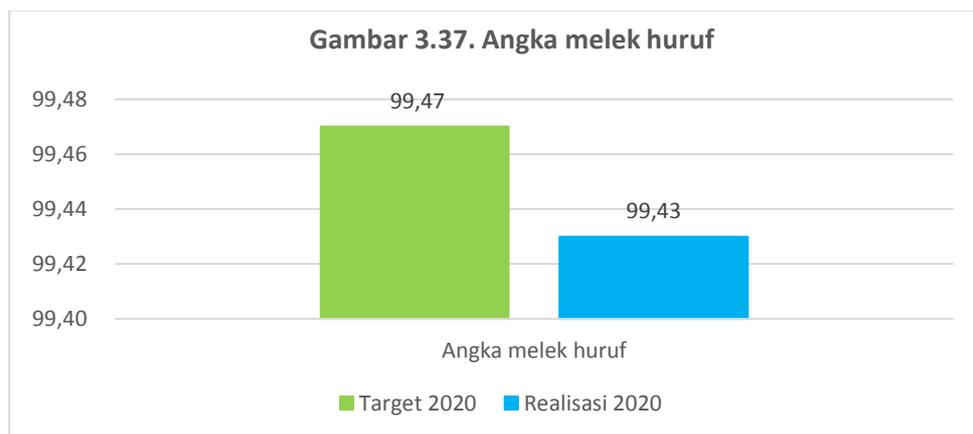
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	107,33	99,74	98,93	99,92	99	99,08	100	99,00
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100,89	93,19	84,19	99,26	83,24	83,86	100	83,24
	Rata-rata Capaian Kinerja							94,30		

Terlihat dari tabel 3.10 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 2.1 terdapat 3 (tiga) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka melek huruf**

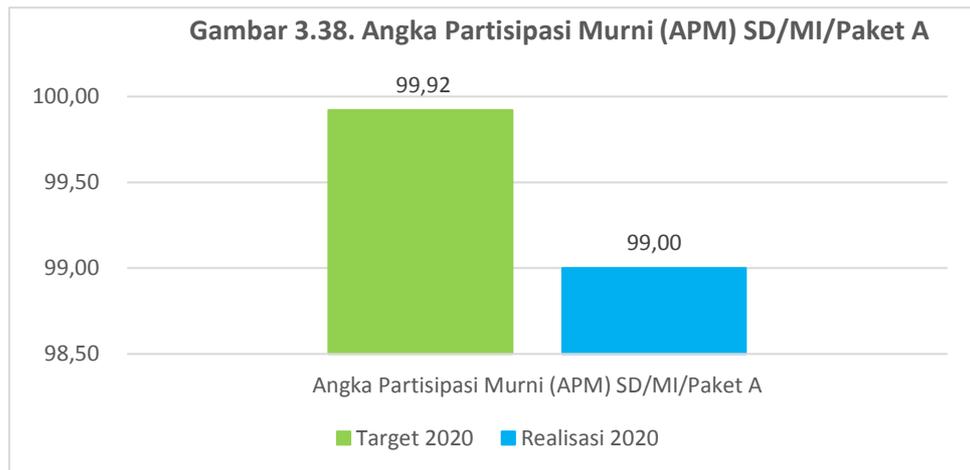
Target tahun 2020 Angka melek huruf adalah 99,47% dan realisasi tahun 2020 sebesar 99,43% dengan tingkat capaian sebesar 99,96%.



Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak meningkatkan angka melek huruf yaitu penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SD dan jenjang SMP. Selain itu untuk penduduk yang putus sekolah, pada program ini terdapat kegiatan penyelenggaraan Paket A dan Paket B untuk menekan angka buta huruf.

b. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A**

Target tahun 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A adalah 99,92% dan realisasi tahun 2020 sebesar 98,00% dengan tingkat capaian sebesar 99,08%.



Target Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A yang menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia SD/MI/Paket A yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 7-12 Tahun. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pencapaian target tersebut dikarenakan beberapa tahun terakhir pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi dan pengetatan aturan usia masuk sekolah. Sebagaimana diketahui dari tahun ke tahun usia masuk sekolah pendidikan dasar cenderung semakin cepat. Menurut data tahun 2016 siswa baru yang memasuki sekolah SD di tingkat pertama atau calon siswa yang mendaftar masuk SD atau sederajat lebih hampir 15% belum mencukupi umur 7 tahun. Bahkan masih ada yang belum mencapai umur 6 tahun.

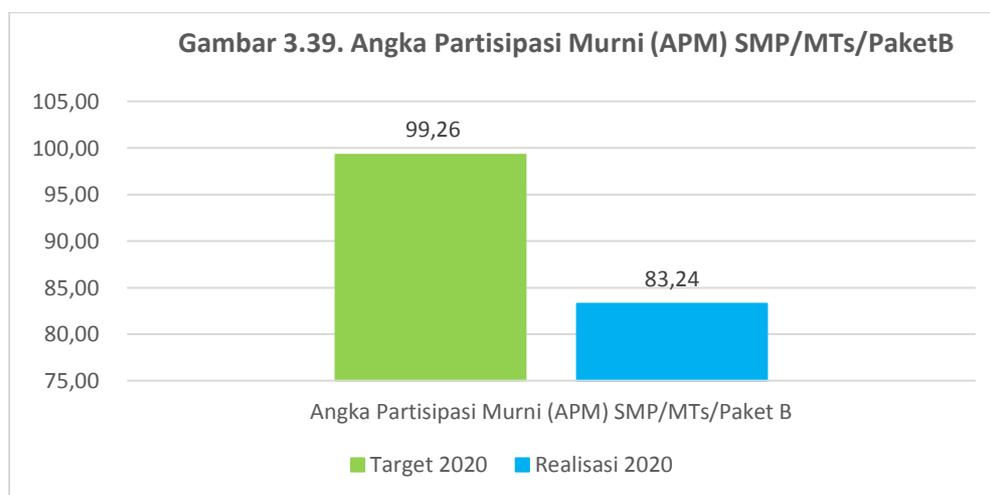
Hal ini pada dasarnya diharapkan peserta didik dapat mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu sesuai dengan kematangan psikologi perkembangan anak dan sesuai juga dengan lingkungan pendidikan yang diterimanya. Namun di sisi lain dapat dikatakan bahwa jika banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya meskipun secara usia belum cukup, yang seringkali diasumsikan seiring dengan perkembangan tingkat ekonomi sebuah keluarga atau masyarakat.

Namun tentu saja selain berpengaruh terhadap kesiapan siswa tersebut dalam mengikuti pendidikan secara mental dan emosional, hal ini juga mempengaruhi angka partisipasi murni, dimana indikator ini membandingkan siswa SD/ sederajat yang berumur 7-12 tahun (bukan seluruh siswa SD/ sederajat) dengan penduduk usia sekolah 7-12 tahun.

Hal ini didukung oleh surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan umur calon peserta didik bagi sekolah pada saat penerimaan siswa baru. Dan diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Hal ini dipandang penting karena jika aturan umur tidak secara ketat dilakukan pada tingkat SD/ sederajat akan mempengaruhi APM di tingkat pendidikan selanjutnya.

c. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**

Target tahun 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B adalah 99,26% dan realisasi tahun 2020 sebesar 83,24% dengan tingkat capaian sebesar 83,86 %.



Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yang menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia SMP/MTs/Paket B yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 13-15 Tahun Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di

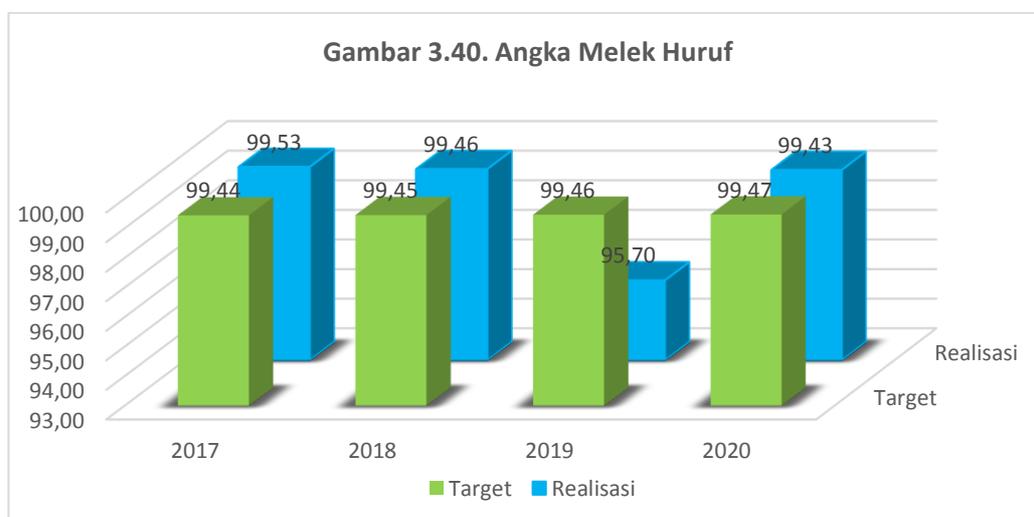
suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sama seperti APM SD/MI/SDLB/ Paket A, pencapaian target tersebut dapat berhasil dikarenakan beberapa tahun terakhir pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi dan pengetatan aturan usia masuk sekolah yang dimulai dari pendidikan anak usia dini. Hal ini tentu saja selain berpengaruh terhadap APM di tingkat pendidikan selanjutnya. Diharapkan upaya sosialisasi dan pengetatan usia sekolah ini dapat tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

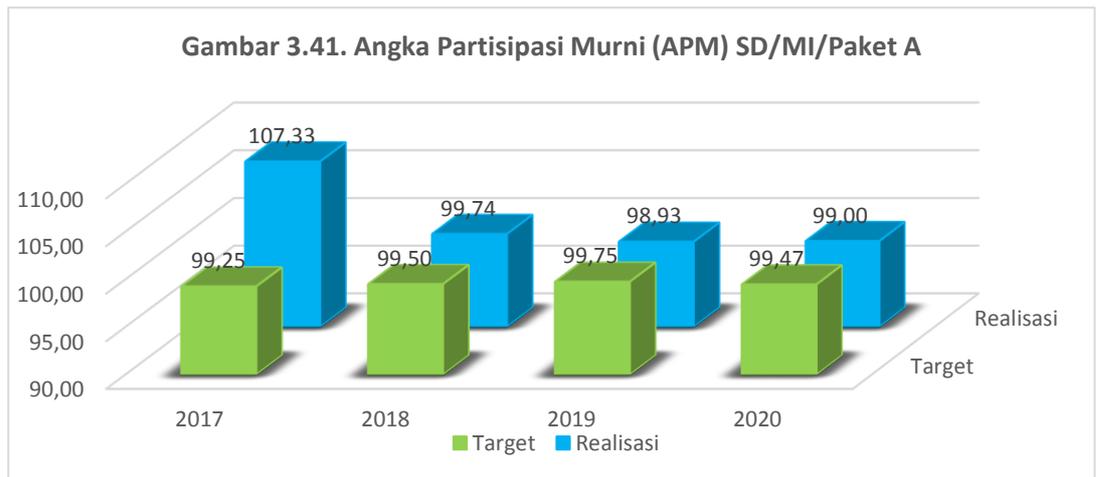
a. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka melek huruf**

Realisasi Pada tahun 2019 Angka melek huruf adalah sebesar 95,70%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Angka melek huruf menurun menjadi sebesar 99,43%.



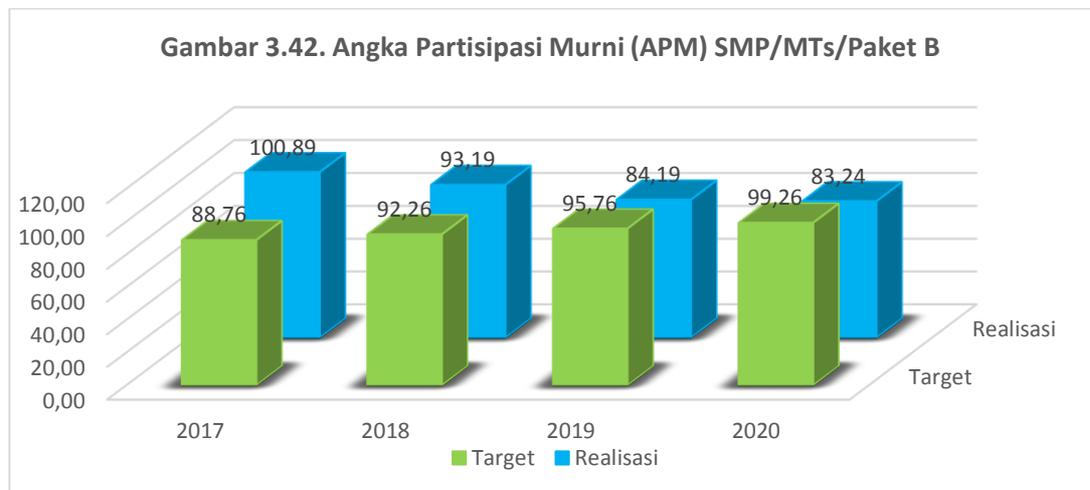
b. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A**

Realisasi Pada tahun 2019 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A adalah sebesar 98,93%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A menurun menjadi 99,08%.



c. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**

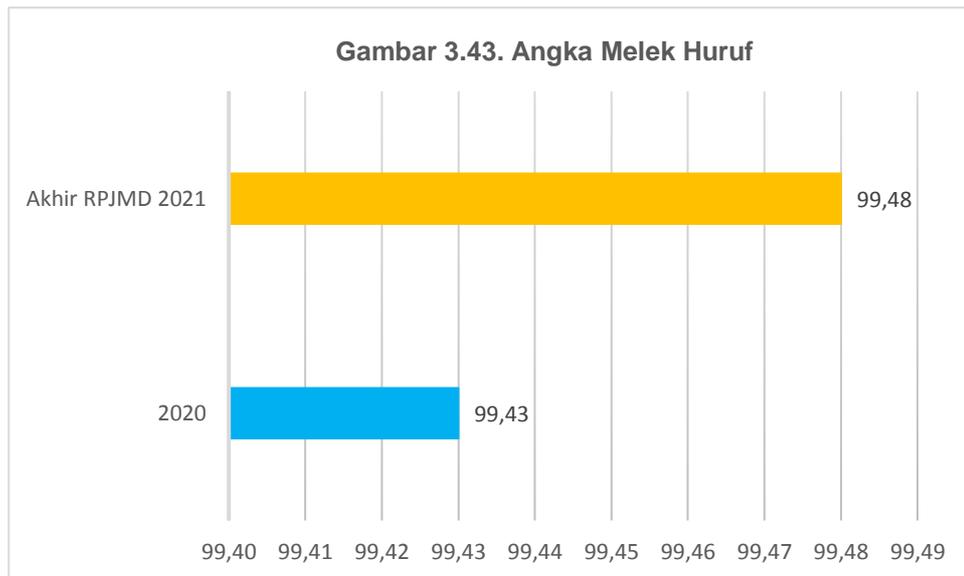
Realisasi Pada tahun 2019 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B adalah sebesar 84,19%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B menurun menjadi 83,24%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

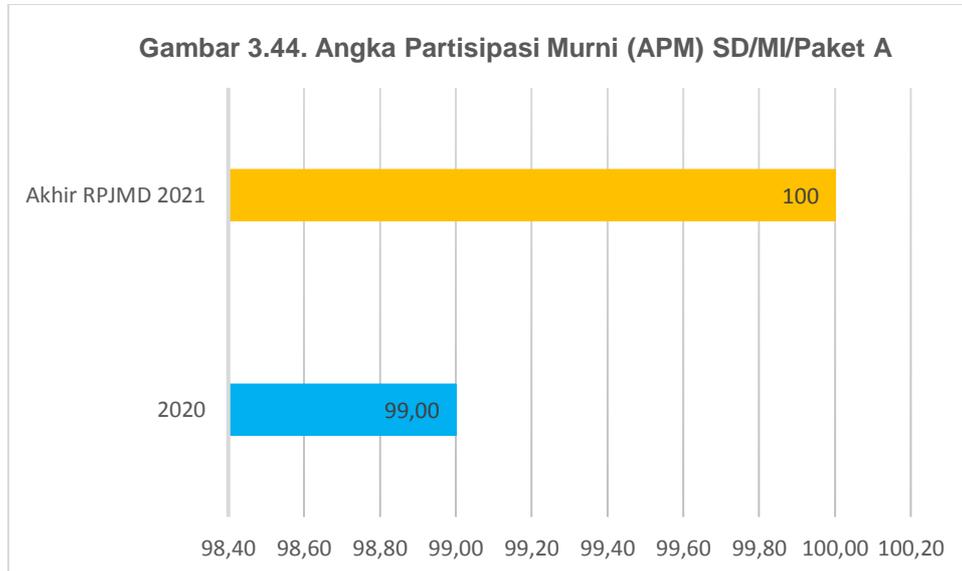
a. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka melek huruf**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 99,48%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2020 sebesar 99,43% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 99,95 %.



b. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A**

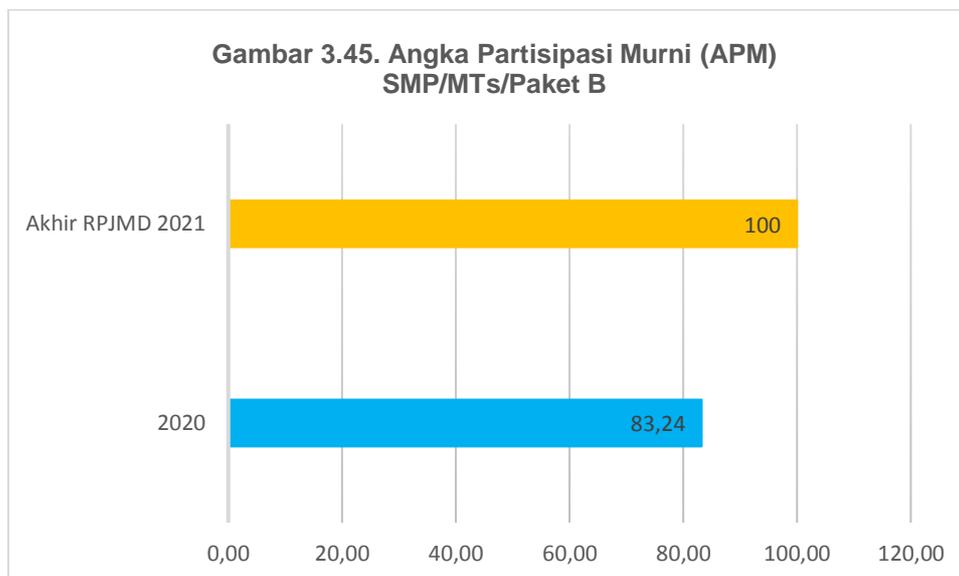
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2020 sebesar 99,00% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 99,00%.



c. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2020 sebesar 83,24%

dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 83,24 %.



Sasaran Strategis 2.2

Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar

Sasaran strategis 2.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan”**. Sasaran ini didukung OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mengukur sasaran 2.2 ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.11. berikut di bawah ini :

Tabel 3.11. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.2

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	99,98	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja							100		

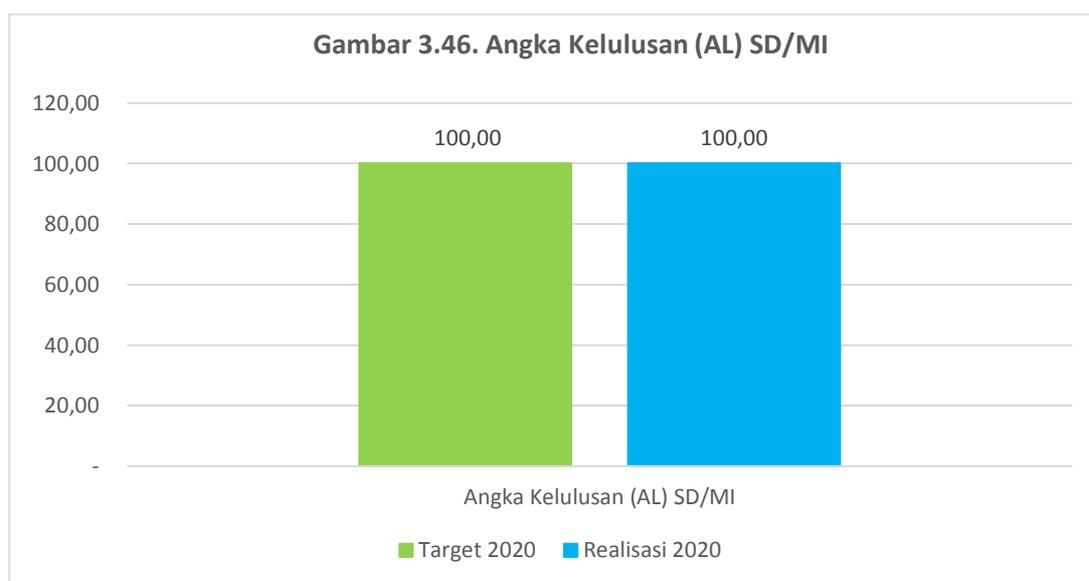
Terlihat dari tabel 3.11 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran

Strategis 2.2 terdapat 2 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Target tahun 2020 Angka Kelulusan (AL) SD/MI adalah 100% dan realisasi tahun 2020 sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100,0%.

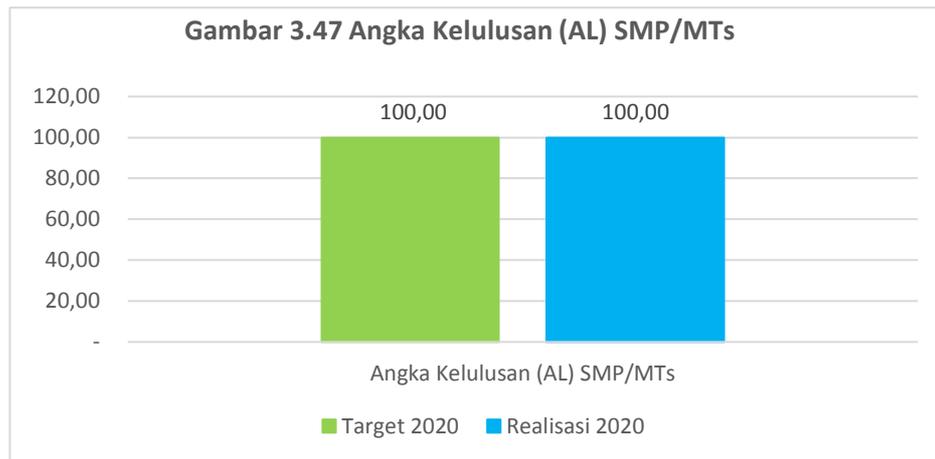


Indikator sasaran Tingkat kelulusan Pendidikan dasar menunjukkan persentase jumlah peserta didik pada jenjang Pendidikan dasar yang lulus pada tahun ajaran 2019/2020. Target tahun 2020 adalah sebesar 100% adapun realisasi tahun 2020 sebesar 100% yang berarti capaian sudah memenuhi target yaitu sebesar 100%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pencapaian target tersebut dapat berhasil dikarenakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang mendukung peningkatan kompetensi peserta didik. Diharapkan upaya-upaya ini dapat tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

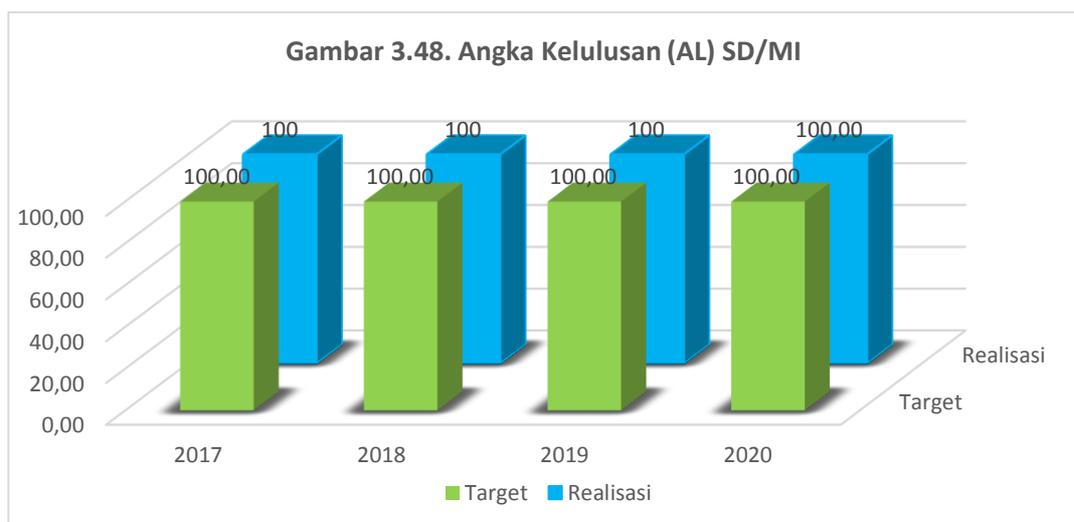
Target tahun 2020 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs adalah 100% dan realisasi tahun 2020 sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100 %.



Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pencapaian target tersebut dapat berhasil dikarenakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang mendukung peningkatan kompetensi peserta didik. Diharapkan upaya-upaya ini dapat tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Realisasi Pada tahun 2019 Angka Kelulusan (AL) SD/MI adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Angka Kelulusan (AL) SD/MI tetap sebesar 100%.



b. Indikator Kinerja Tujuan : Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

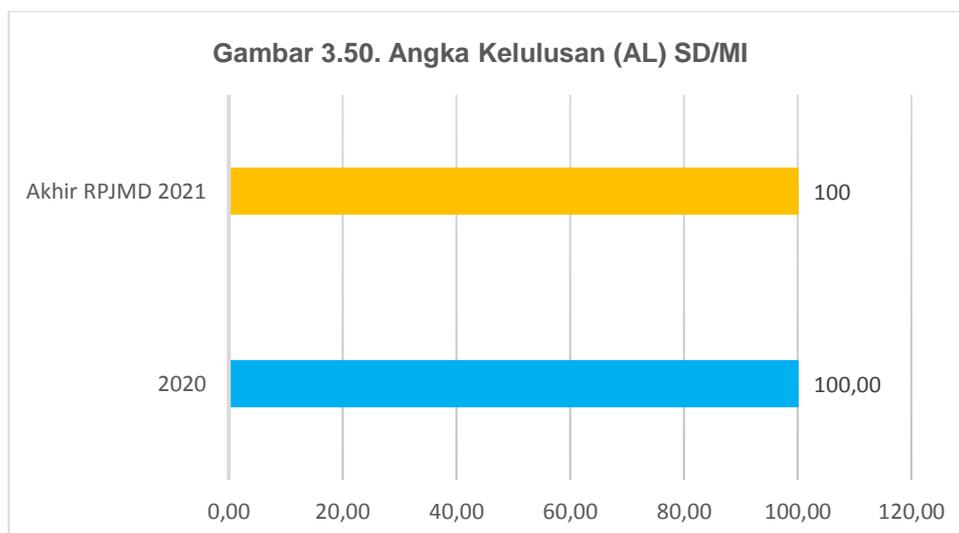
Realisasi Pada tahun 2019 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs menurun menjadi 100%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

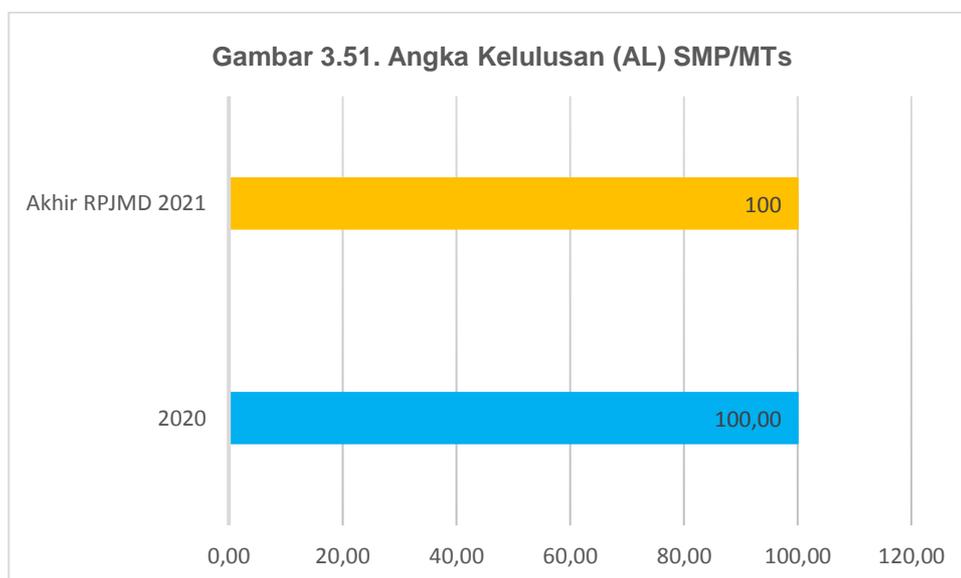
a. Indikator Kinerja Tujuan : Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100 %.



b. Indikator Kinerja Tujuan : Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100%.



Sasaran Strategis 2.3

Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar

Sasaran strategis 2.3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan”**.

Sasaran ini didukung OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 2 (Dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.12 di bawah ini :

Tabel 3.12. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.3

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0,403264	0,4062500	0,353380	0,2770833	0,267016	96,37	0,2770833	96,37

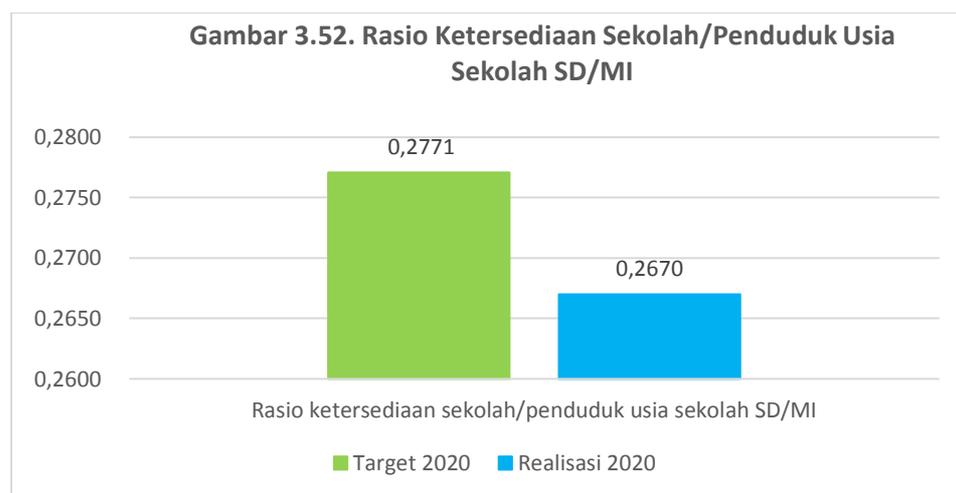
2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0,334456	0,5166898	0,358449	0,3701389	0,207378	56,03	0,3701389	56,03
	Rata-rata Capaian Kinerja							76,20		

Terlihat dari tabel 3.12 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 2.3 terdapat 2 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI

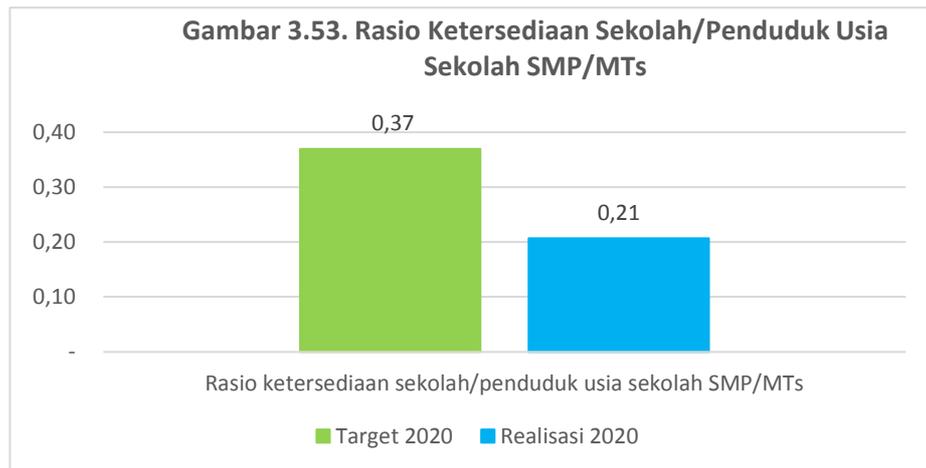
Target tahun 2020 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 0,277083 dan realisasi tahun 2020 sebesar 0,267016 dengan tingkat capaian sebesar 96,37%.



Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan penambahan unit sekolah baru dengan memperhatikan kebutuhan sekolah pada wilayah yang jauh dari sekolah untuk memenuhi rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah ini.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs

Target tahun 2020 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs adalah 0,370139 dan realisasi tahun 2020 sebesar 0,207378 dengan tingkat capaian sebesar 56,03%.

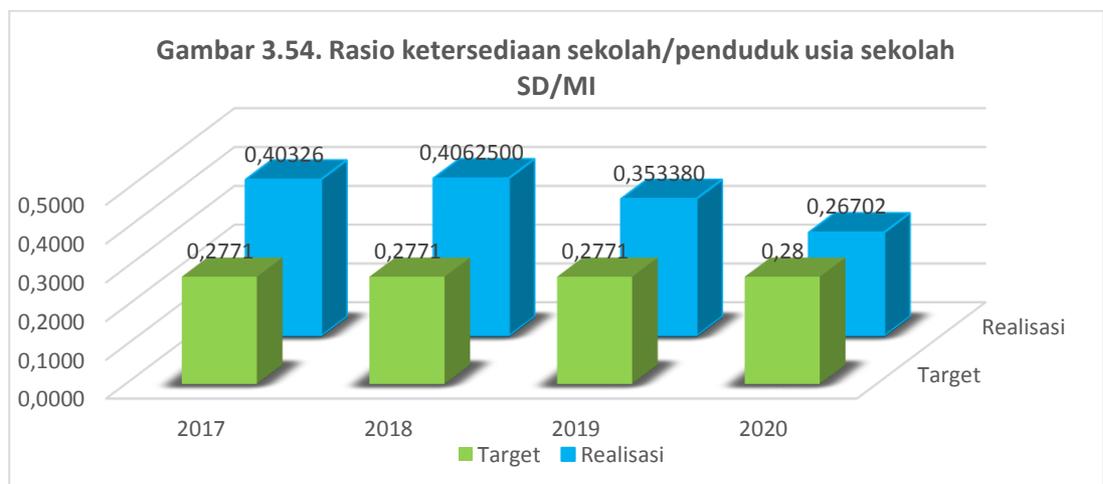


Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Diharapkan pada tahun berikutnya dapat dilakukan penambahan unit sekolah baru dengan memperhatikan kebutuhan sekolah pada wilayah yang jauh dari sekolah untuk memenuhi rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

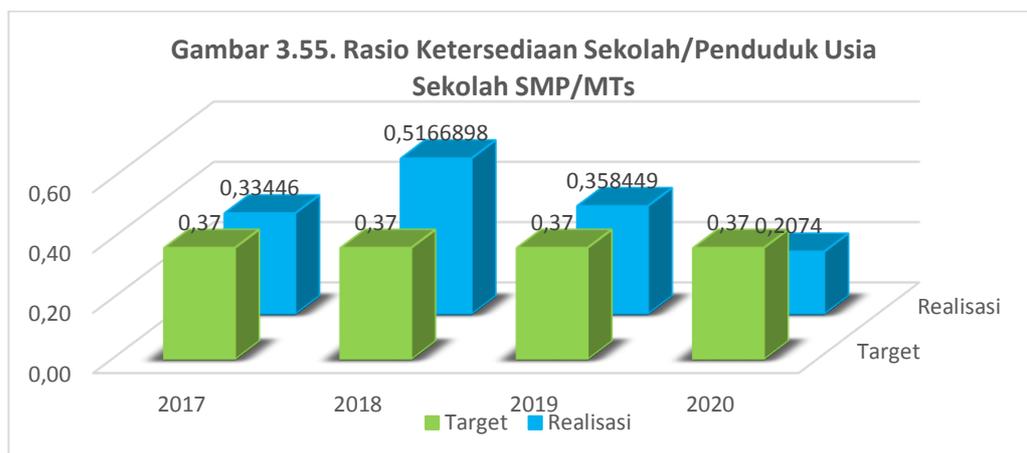
a. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI

Realisasi Pada tahun 2019 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah sebesar 0,353380 sedangkan realisasi pada tahun 2020 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menurun sebesar 0,267016.



- b. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs

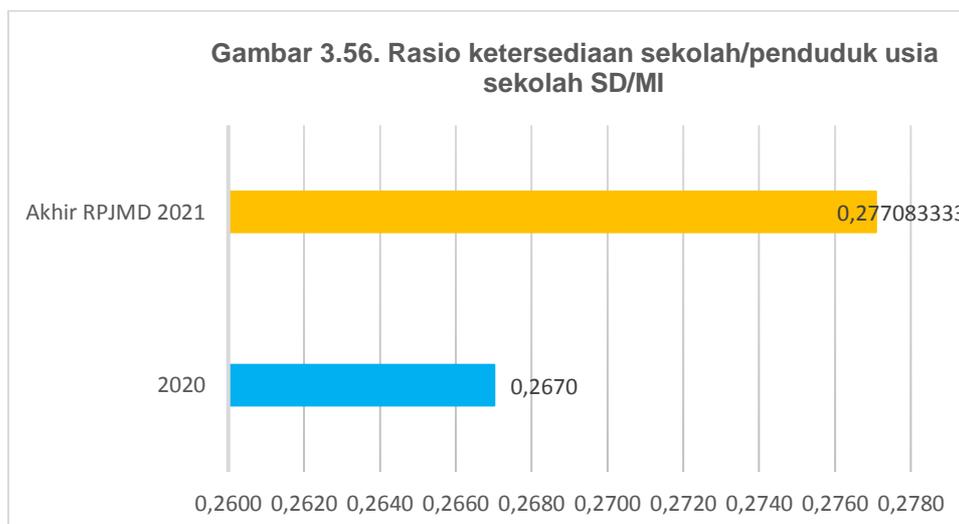
Realisasi Pada tahun 2019 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs adalah sebesar 0,3584. sedangkan realisasi pada tahun 2020 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs menurun menjadi 0,207378.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

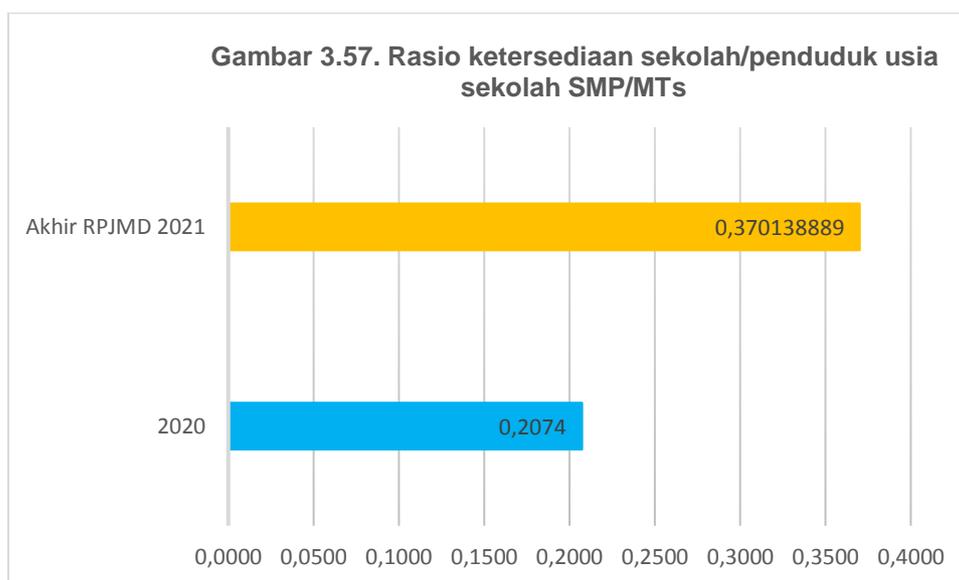
- a. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 0,27708, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2020 sebesar 0,267016 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 127,96,37 %.



b. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 0,37014 realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2020 sebesar 0,207378 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 56,03%.



Tujuan 3

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Tujuan 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk mengukur Tujuan 3 ini terdapat 1 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.13 berikut di bawah ini :

Tabel 3.13. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 3.

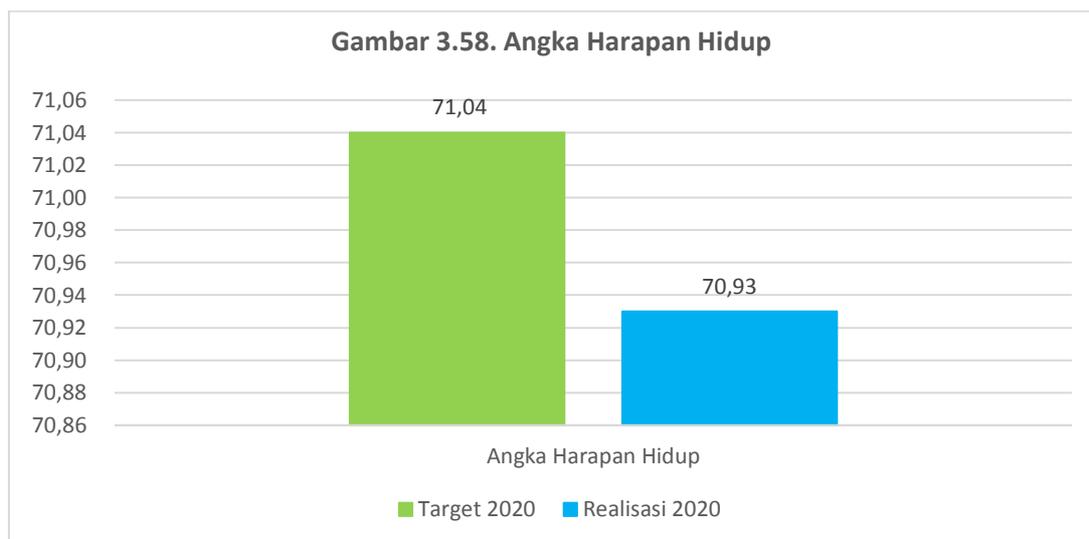
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,31	70,37	71,2	71,04	70,93	99,85	71,04	99,85
	Rata-rata Capaian Kinerja							99,85		

Terlihat dari tabel 3.13 diatas pada Misi Kedua tujuan 3 ini 1 (satu) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Tujuan : Angka Harapan Hidup

Target tahun 2020 Angka Harapan Hidup adalah 71,04 tahun dan realisasi tahun 2020 sebesar 70,93 tahun dengan tingkat capaian sebesar 99,85%.



Mulai tahun 2018 karena ada perubahan metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), maka Badan Pusat Statistik Pusat telah merilis data IPM dengan menggunakan metode baru. Dengan diterapkannya metode baru dalam menghitung IPM menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah dibandingkan dengan IPM metode lama termasuk Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH).

Pada tahun 2020 angka harapan hidup waktu lahir (umur harapan hidup) di Kota Dumai sebesar 70,93 tahun. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 yakni sebesar 70,82 tahun terlihat ada sedikit peningkatan angka harapan hidup waktu lahir. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian. Pencapaian Angka Harapan Hidup waktu lahir di Kota Dumai tahun 2020 dapat di lihat pada Tabel 3.14 berikut ini :

Tabel 3.14. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai Dari Tahun 2014 sampai dengan 2020

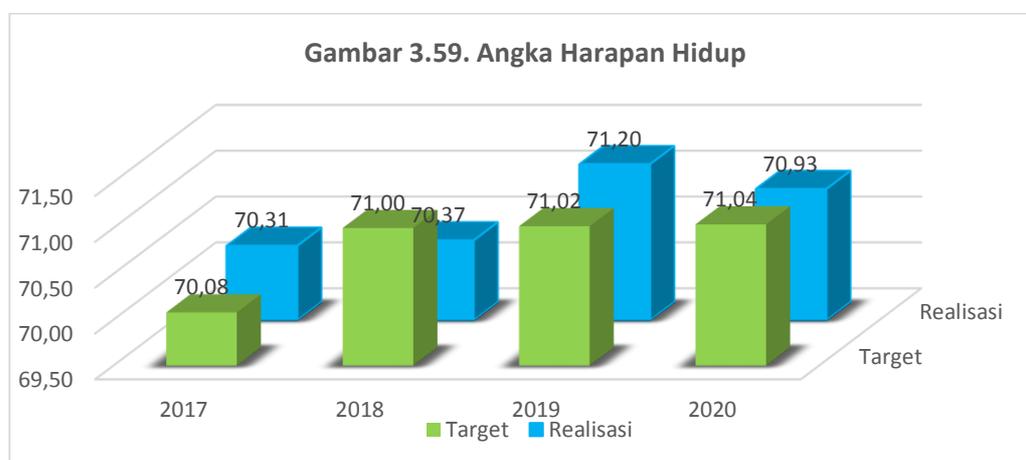
No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2014	70,59	70,76	70,05
2.	2015	70,78	70,93	70,25
3.	2016	70,90	70,97	70,31
4.	2017	71,06	70,99	70,37
5.	2018	71,20	71,19	70,55
6.	2019	71.38	71.48	70,82
7.	2020	71.47	71.60	70.93

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2020 (AHH," Life Expectancy of Population")

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Angka Harapan Hidup

Realisasi Pada tahun 2019 Angka Harapan Hidup adalah sebesar 71,20 tahun, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 70,93 tahun.

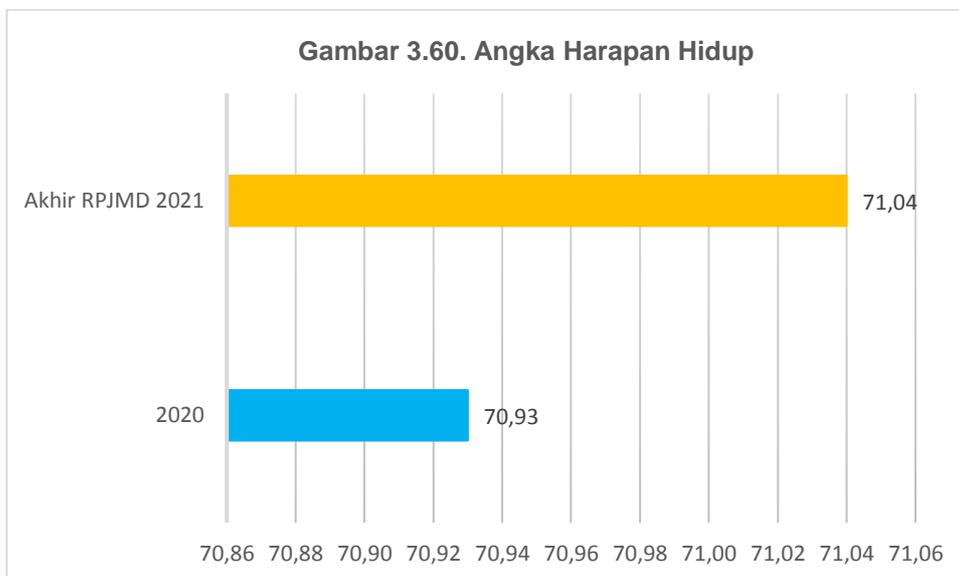


3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Angka Harapan Hidup

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 71,04 tahun, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar

70,93 tahun dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 99,85 %.



Sasaran Strategis 3.1

Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Sasaran strategis 3.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”**. Sasaran ini didukung OPD Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 3 (Tiga) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.15 berikut di bawah ini :

Tabel 3.15. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1

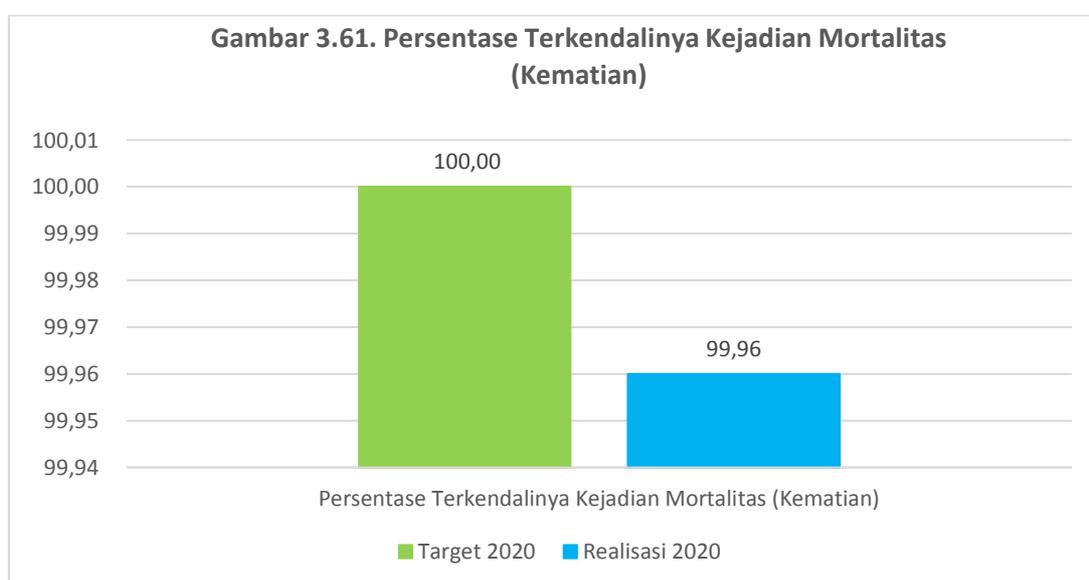
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas	%	95,28	99,77	100	100	99,96	99,96	100	99,96
2	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas	%	99,68	99,26	100	100	48,24	48,24	100	48,24
3	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja							82,73		

Terlihat dari tabel 3.15 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 3.1 terdapat 3 (tiga) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Terkendalnya Kejadian Mortalitas (Kematian)

Target tahun 2020 Persentase Terkendalnya Kejadian Mortalitas (Kematian) adalah 100% dan realisasi tahun 2020 sebesar 99,96% dengan tingkat capaian sebesar 99,96%.



Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran menurunnya Mortalitas (angka kematian) pada tahun 2020 adalah sebesar 99,96%, dimana angka mortalitas terdiri dari:

1) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 60 kasus dari 8.168 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 7,35 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

2) Angka kematian Balita

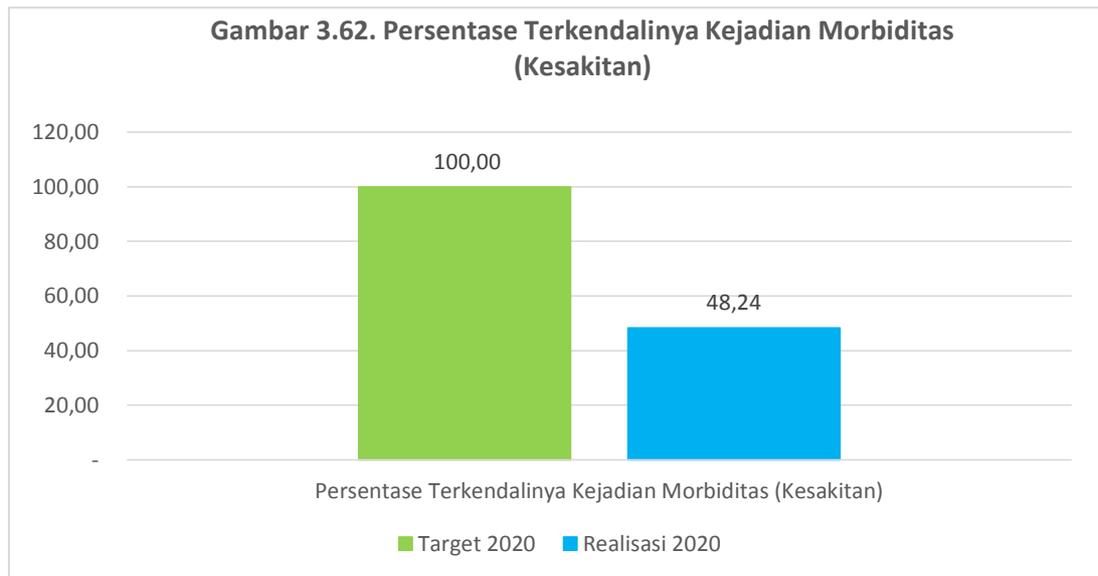
Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 72 kasus dari 8.168 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2020 di Kota Dumai sebesar 8,81 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

3) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 3 kasus dari 8.168 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2020 di Kota Dumai sebesar 36,73 per 100.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)

Target tahun 2020 Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan) adalah 100% dan realisasi tahun 2020 sebesar 48,24% dengan tingkat capaian sebesar 48,24%.



Terkendalinya kejadian morbiditas (Kesakitan) terdiri dari:

1) Angka Kesakitan Malaria

Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 202 kasus kesakitan. Dari 202 kasus yang ada terdapat 2 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,01 per 1.000 penduduk. Target kinerja Angka Kesakitan Malaria atau API (*Annual Parasite Incidence*) Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 1 per 1.000 penduduk, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

2) Angka kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2020 dari total 338 penderita TB Paru BTA+ yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 225 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ adalah sebesar 66,57%. Target kinerja Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 88%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 75,65% (baik).

3) Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

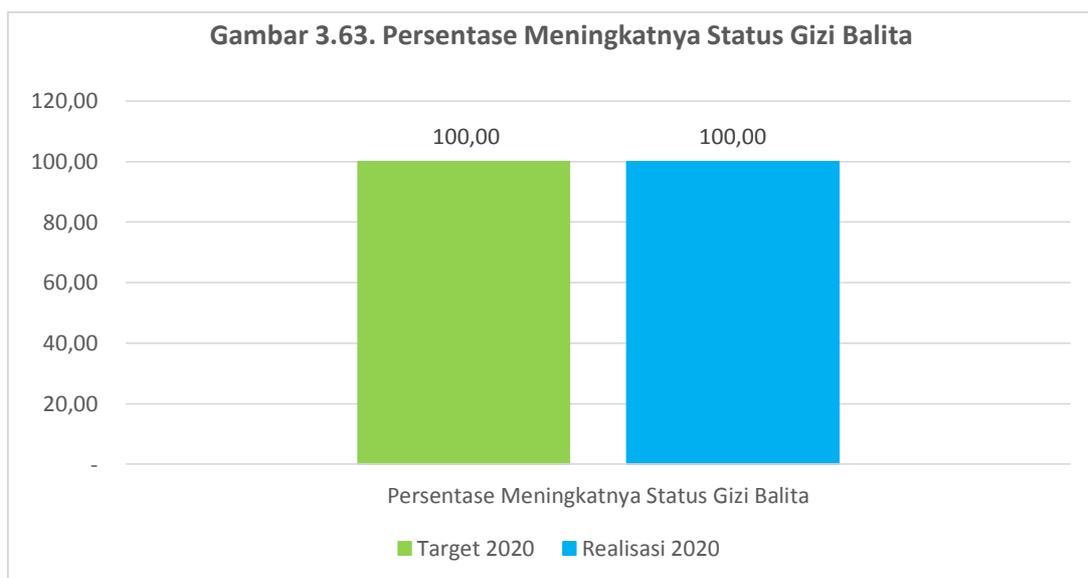
Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 481 kasus yang terdiri dari 459 kasus lama dan 22 kasus baru yang ditemukan tahun 2020. Dari 481 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 161 orang sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 320 orang, Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko pada tahun 2020 adalah sebesar 2,03% (jumlah penduduk beresiko HIV sebanyak 15.764 orang). Target kinerja Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar <1%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar - 3%. (kurang)

4) Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2020 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 359 kasus atau IR = 114,27 per 100.000 penduduk dengan angka kematian sebanyak 1 orang atau CFR = 0,3 %. Target kinerja Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 55 per 100.000 penduduk, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar - 7,76% (kurang).

c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita

Target tahun 2020 Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita adalah 100% dan realisasi tahun 2020 sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100 %.



Target kinerja Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 2%, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Persentase Balita Dengan Gizi Buruk adalah sebesar 0,01%. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) \leq 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)

Realisasi Pada tahun 2019 Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian) adalah sebesar 100%, realisasi pada tahun 2020 Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian) naik menjadi sebesar 99,96%.



Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran menurunnya Mortalitas (angka kematian) pada tahun 2020 adalah sebesar 99,96%, dimana angka mortalitas terdiri dari:

1) Angka Kematian Bayi

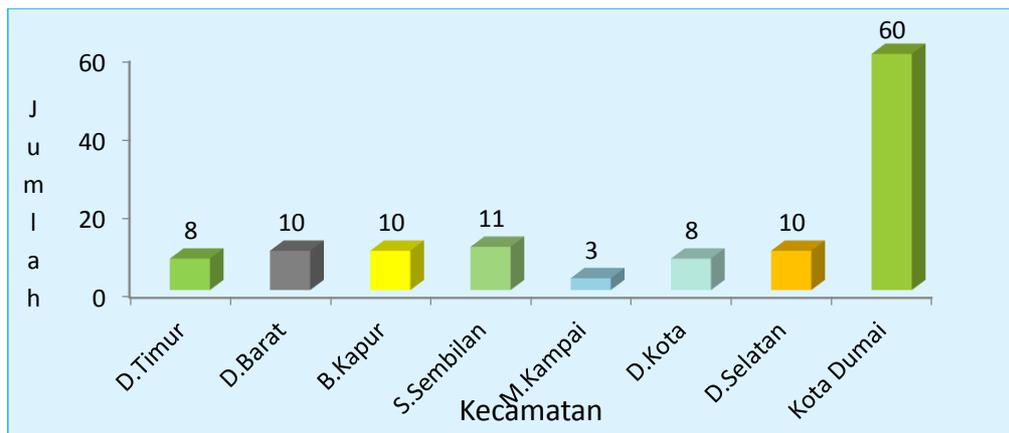
Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 60 kasus dari 8.168 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 7,35 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 dimana angka kematian bayi sebesar 7,22 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2020 yakni 19 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Tahun 2016 sampai dengan 2020 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 3.64.1 berikut ini :



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Sungai Sembilan yakni sebanyak 11 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Dumai Selatan, masing-masing sebanyak 10 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.64.2 berikut ini :

Gambar 3.64.2
Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan
di Kota Dumai tahun 2020



Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Asfiksia dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

2) Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 72 kasus dari 8.168 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2020 di Kota Dumai sebesar 8,81 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 dimana angka kematian balita sebesar 9,22 per 1000 kelahiran hidup, maka angka tersebut mengalami sedikit penurunan. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2020 yakni 26 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti

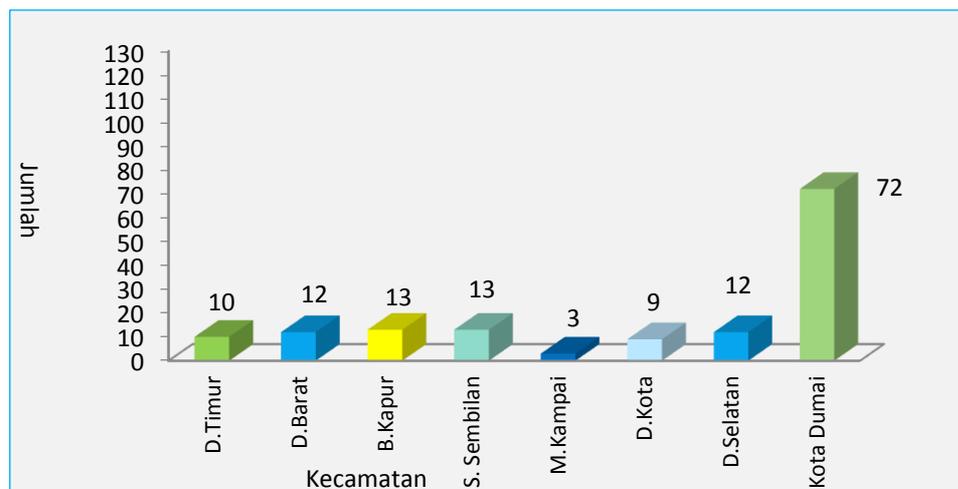
tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita dan Tahun 2016 sampai dengan 2020 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 3.64.3 berikut ini :

Gambar 3.64.3
Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai
dari Tahun 2016 sampai dengan 2020



Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Sungai Sembilan, masing-masing sebanyak 13 kasus disusul dengan Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Selatan, masing-masing sebanyak 12 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.64.4 berikut ini :

Gambar 3.64.4.
Jumlah Kematian Balita Berdasarkan Kecamatan
di Kota Dumai Tahun 2020



Penyebab kematian balita masih didominasi oleh Asfiksia dan BBLR.

3) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 3 kasus dari 8.168 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2020 di Kota Dumai sebesar 36,73 per 100.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

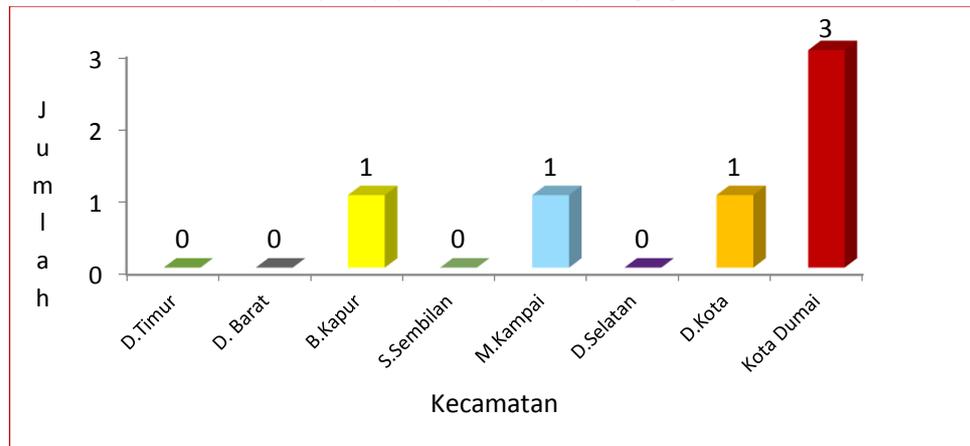
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019, di mana angka kematian ibu sebesar 124,55 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat adanya penurunan jumlah kematian ibu pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2020 yakni 102 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Pencapaian Angka Kematian Ibu dari tahun 2016 sampai dengan 2020 Kota Dumai dapat di lihat pada grafik 3.64.5 berikut ini :

Gambar 3.64.5
Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai
dari Tahun 2016 sampai dengan 2020



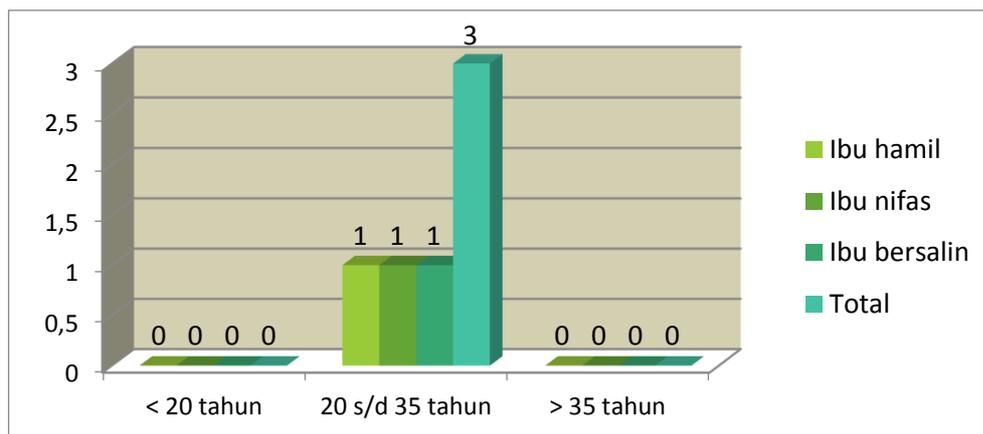
Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu tersebar merata di 3 Kecamatan masing-masing 1 kasus yakni di Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Medang Kampai, seperti terlihat pada grafik 3.64.6 berikut ini :

Gambar 3.64.6.
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan
di Kota Dumai Tahun 2020



Penyebab kematian ibu terbanyak adalah karena hipertensi/preeklamsi dalam kehamilan sebanyak 2 kasus disusul dengan perdarahan sebanyak 1 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu seluruhnya terjadi pada kelompok umur 20-34 tahun yakni sebanyak 3 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, kasus kematian tersebar merata masing-masing 1 kasus pada kelompok ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3.64.7.
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu
dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2020



- b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)

Realisasi Pada tahun 2019 Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan) adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan) meningkat menjadi 48,24%.



Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran menurunnya Morbiditas (angka kesakitan) pada tahun 2020 adalah sebesar 48,24%, dimana angka morbiditas terdiri dari:

1) Angka Kesakitan Malaria

Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 202 kasus kesakitan. Dari 202 kasus yang ada terdapat 2 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,01 per 1.000 penduduk. Target kinerja Angka Kesakitan Malaria atau API (*Annual Parasite Incidence*) Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 1 per 1.000 penduduk, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 di mana *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,01 per 1.000 penduduk, maka angka *Annual Parasite Incidence* (API) tersebut statis. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2020 yakni 1 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita Malaria

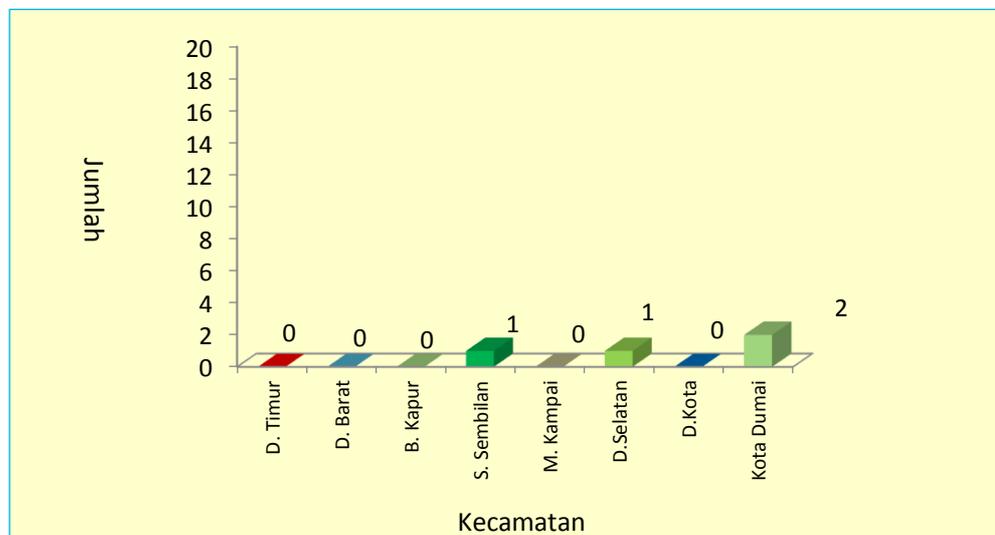
(100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari grafik 3.65.1 dibawah ini :

Gambar 3.65.1
Pencapaian Angka Kesakitan Malaria
Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif ditemukan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Sembilan yakni Puskesmas Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Selatan yakni Puskesmas Bumi Timah, masing-masing sebanyak 1 kasus. Hal tersebut disebabkan tingginya mobilitas penduduk baik warga lokal maupun warga pendatang dari luar Kota Dumai dan pembukaan lahan perkebunan yang berpotensi berkembangnya nyamuk malaria seperti terlihat pada grafik 3.65.2 berikut ini:

Gambar 3.65.2. Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020

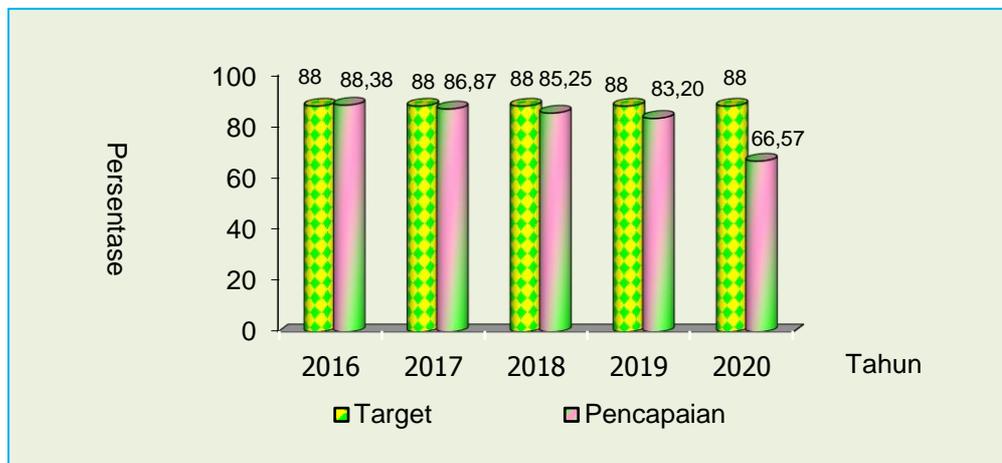


2) Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2020 dari total 338 penderita TB Paru BTA+ yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 225 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ adalah sebesar 66,57%. Target kinerja Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 88%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 75,65% (baik).

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 sebesar 83,20%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+. Demikian juga bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ tahun 2020 belum mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari grafik 3.65.3 berikut ini :

Gambar 3.65.3.
Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +
Kota Dumai dari tahun 2016 sampai dengan 2020

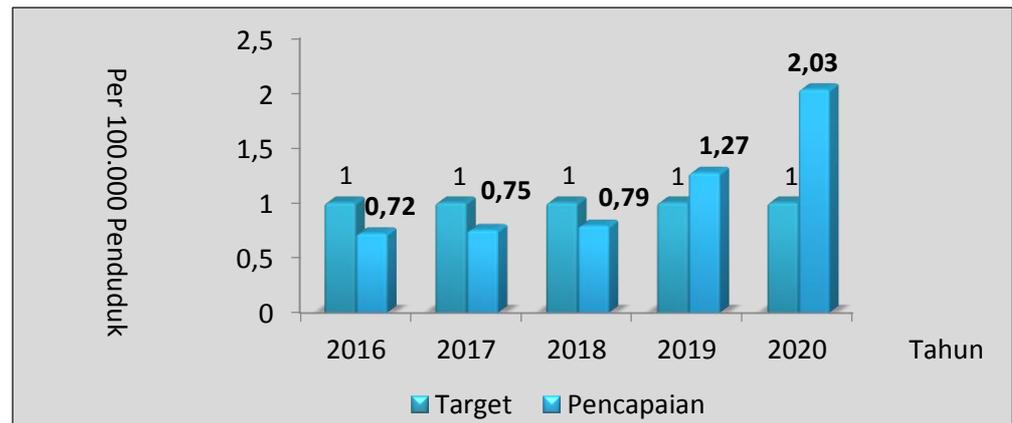


3) Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 481 kasus yang terdiri dari 459 kasus lama dan 22 kasus baru yang ditemukan tahun 2020. Dari 481 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 161 orang sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 320 orang, Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk

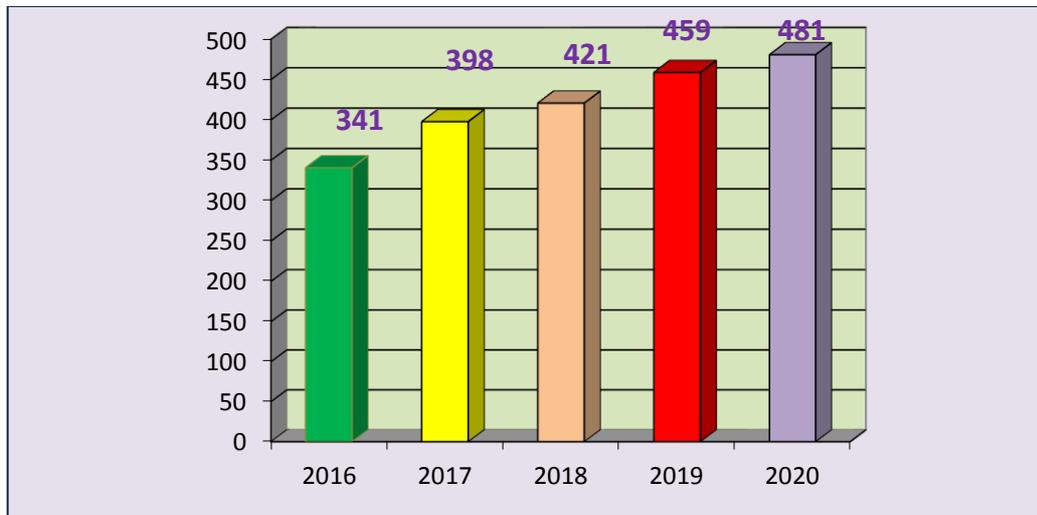
beresiko pada tahun 2020 adalah sebesar 2,03% (jumlah penduduk beresiko HIV sebanyak 15.764 orang). Target kinerja Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar <1%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar - 3%. (kurang).

Gambar 3.65.4.
Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko
Kota Dumai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020



Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 1,27%, maka terlihat ada peningkatan angka prevalensi pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2020 sebesar <1%, maka pencapaian tersebut melebihi target. Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai.

Gambar 3.65.5.
Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai
Dari Tahun 2016 s/d 2020



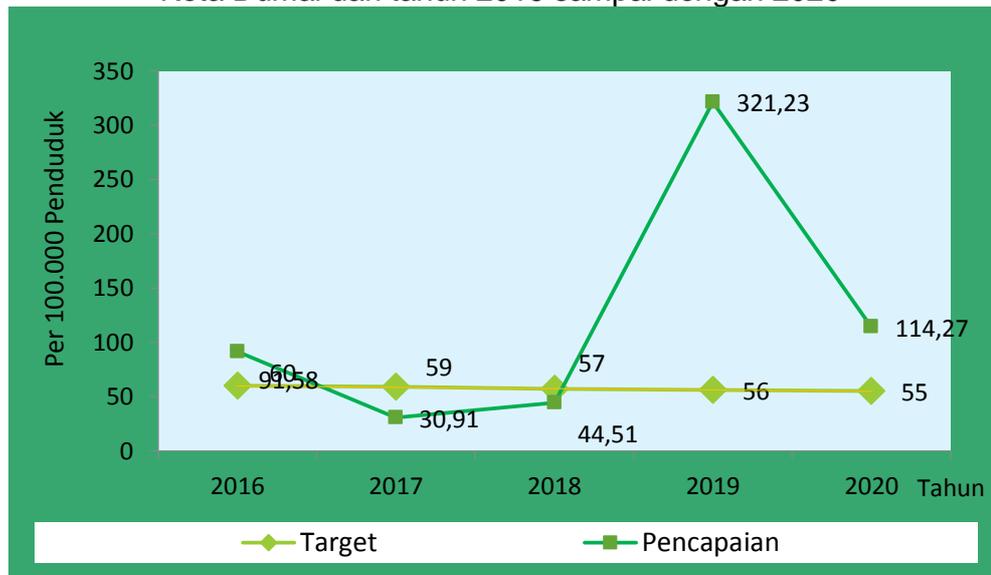
4) Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2020 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 359 kasus atau IR = 114,27 per 100.000 penduduk dengan angka kematian sebanyak 1 orang atau CFR = 0,3 %. Target kinerja Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) Kota Dumai pada tahun 2020 adalah sebesar 55 per 100.000 penduduk, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar - 7,76% (kurang).

Bila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 992 kasus atau IR= 321,23 per 100.000 penduduk dengan kematian sebanyak 3 orang atau CFR = 0,3%, maka ada penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue. Namun, bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai yaitu 55 per 100.000 penduduk, maka angka tersebut telah melebihi target indikator Kota Dumai (yang berarti tingkat pencapaiannya buruk). Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti ±80% penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan

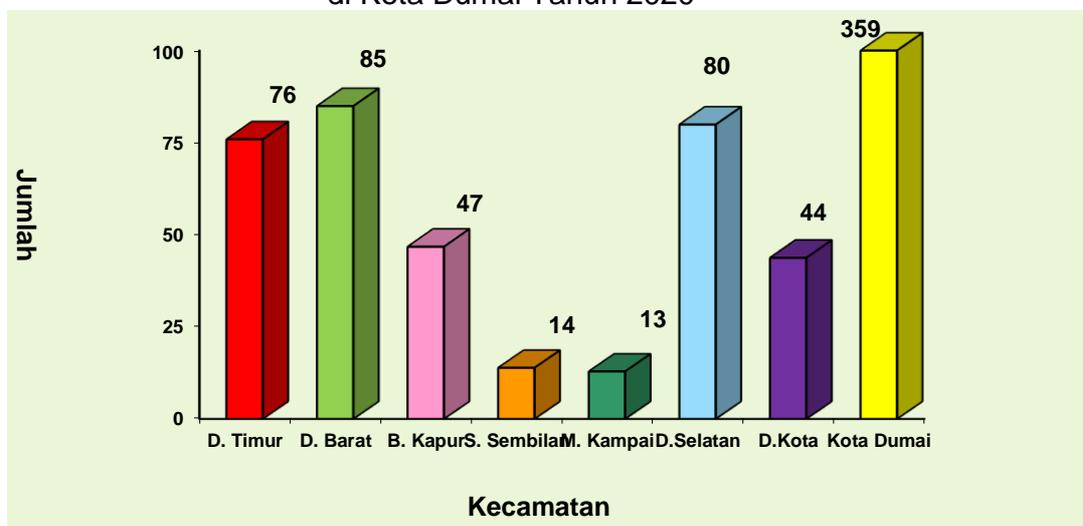
data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

Gambar 3.65.6.
Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2016 sampai dengan 2020



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Barat yakni sebanyak 85 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 80 kasus, seperti terlihat pada gambar 3.65.7 berikut ini :

Gambar 3.65.7.
Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2020



Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah Infektif (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi infektif dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas daerah penyemprotan atau radius 200 M2 dan dilakukan di 250 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

- c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita
 Realisasi Pada tahun 2019 Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita tetap 100%.

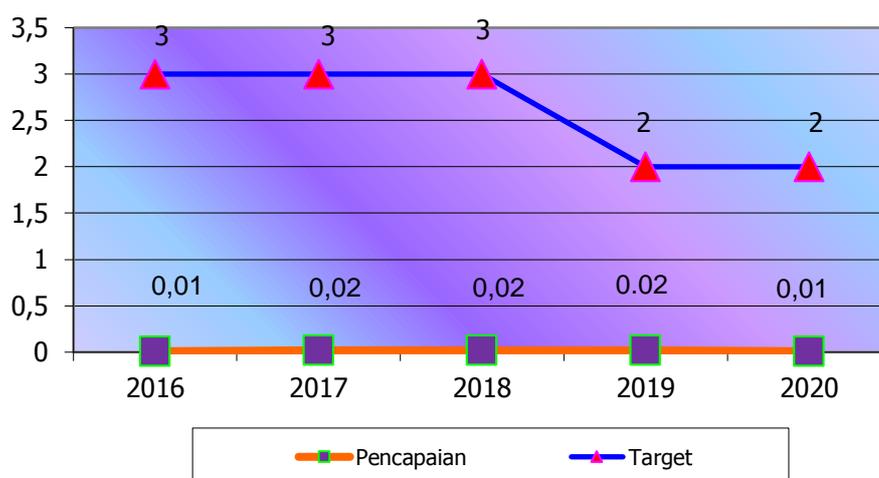


Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh

status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) \leq 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%. Namun mulai tahun 2016, sudah ditemukan kasus balita dengan gizi buruk. Hal ini berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2016, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk. Pada tahun 2020 ditemukan 3 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti (1 kasus), dan Bukit Kayu Kapur (2 kasus). Bila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 7 kasus, maka ada penurunan kasus gizi buruk pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2020 yakni sebesar 2%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

Gambar 3.66.1
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk
Kota Dumai dari Tahun 2016 sampai dengan 2020

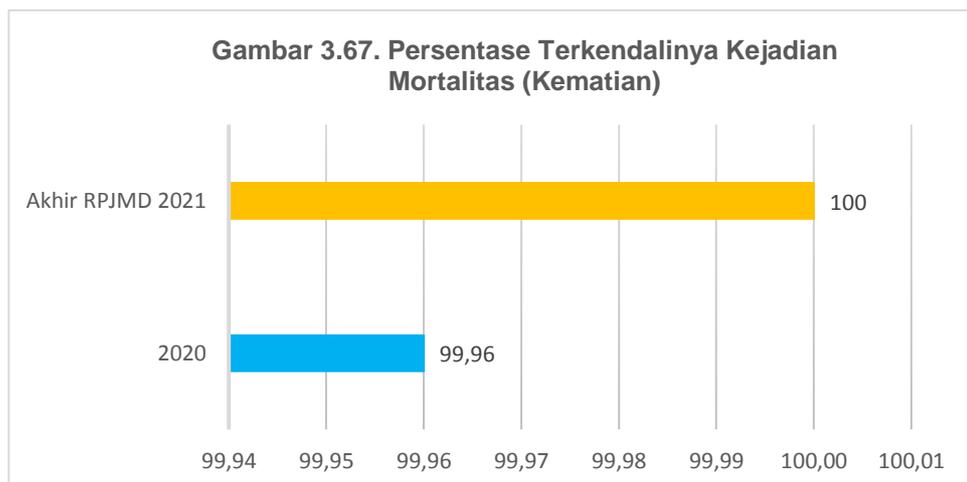


Keseluruhan kasus gizi buruk sudah diintervasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu selama 90 hari, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

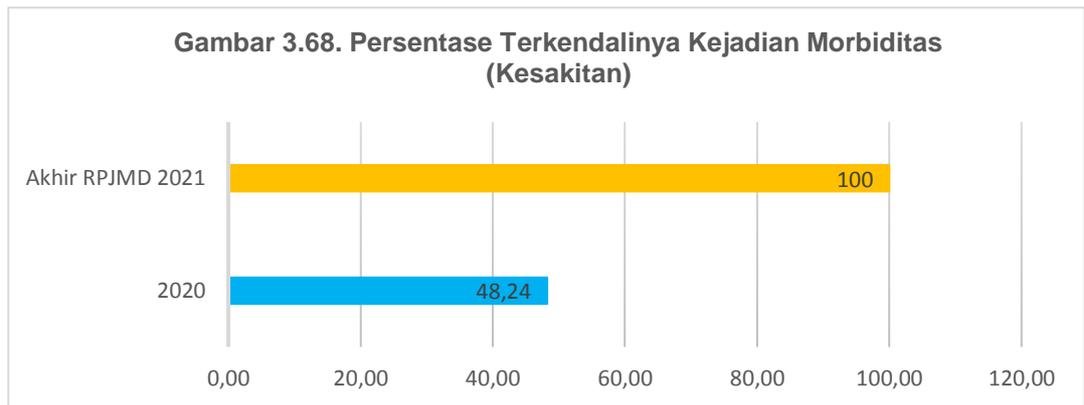
a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 99,96 %.



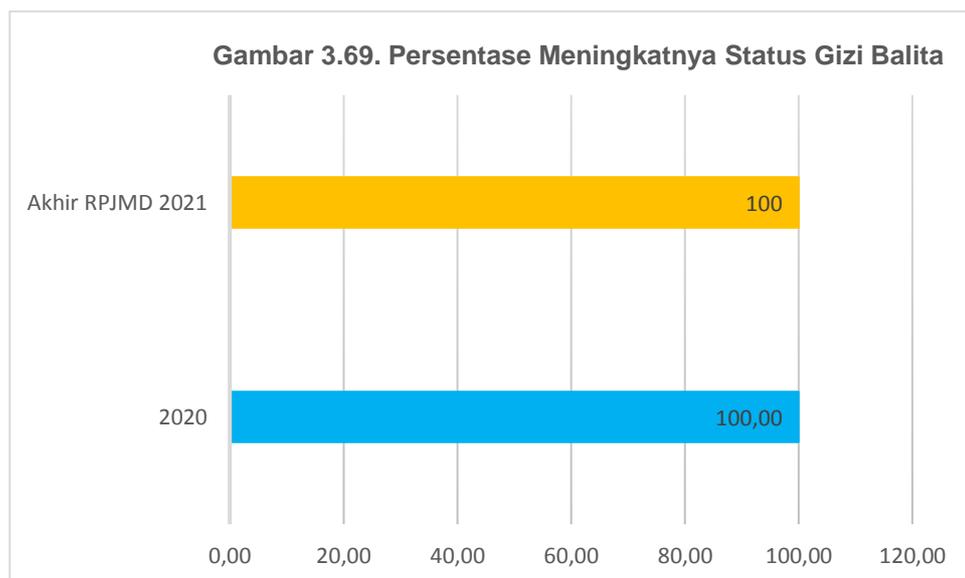
b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 48,24% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 48,24%.



c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100%.



Sasaran Strategis 3.2

Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Sasaran strategis 3.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 2 (Dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja

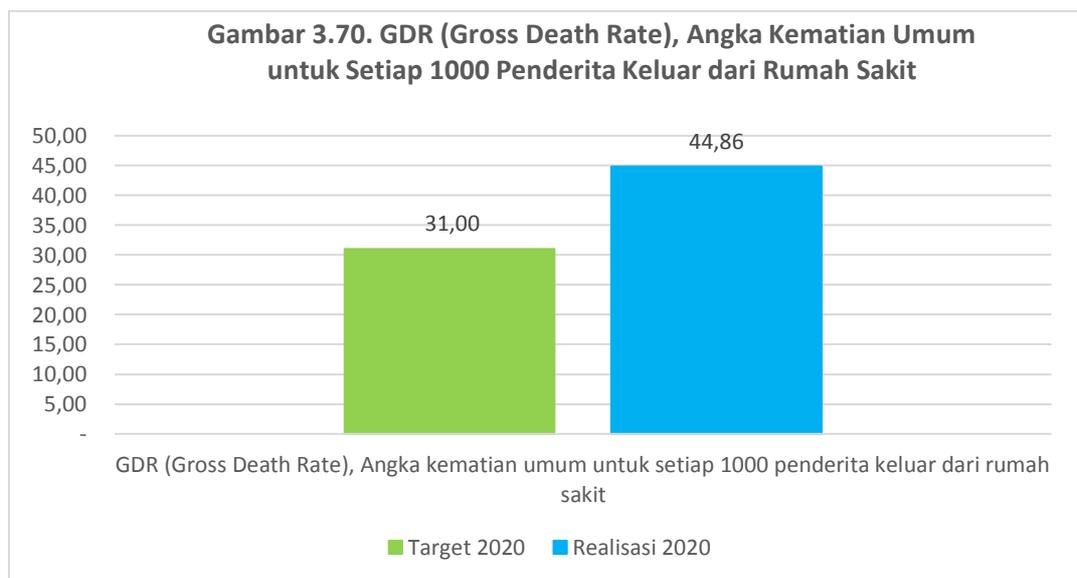
sasaran yang tersaji pada tabel 3.16 berikut ini :

Tabel 3.16. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	34,31	31,55	36,88	31	44,86	55,29	31	55,29
2	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	65.146	65.960	147.659	169.887	158.823	93,49	192.887	82,34
Rata-rata Capaian Kinerja								74,39		

Terlihat dari tabel 3.16 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 3.2 terdapat 2 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita
Target tahun 2020 GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita adalah 31% dan realisasi tahun 2020 sebesar 44,86% dengan tingkat capaian sebesar 55,29%.



GDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderitakeluar. Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksannya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Dimana angka kematian umum untuk setiap penderita keluar Rumah sakit Umum Daerah Kota Dumai sebesar 44,86 0/00 dengan capaian 55,29% dari indeks perencanaan sebesar 31 0/00, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien yang keluar Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai setiap 1000 pasien melebihi ambang batas yg RSUD tetapkan. Tapi apabila dilihat dari ketentuna DEPKES 2005 kasus tersebut masi dapat di tolerasi dengan standar ideal GDR adalah kurang dari 45 kasus dari 1000 pasien keluar.

- b. Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis

Target tahun 2020 Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis adalah 169.887 orang dan realisasi tahun 2020 sebesar 158.823 orang dengan tingkat capaian sebesar 93,49 %.



Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 158.823 orang yang terdiri dari Peserta PBI APBN sebanyak 74.766 orang dan peserta PBI APBD sebanyak 84.057 orang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai pada tahun 2020 yakni sebanyak 169.887 orang,

maka telah terealisasi sebesar 93,49% yang artinya hampir mencapai target. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 151.547 orang, maka jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis mengalami peningkatan. Namun bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 dimana persentase pencapaian penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebesar 103,17%, terlihat ada penurunan pencapaian target pada tahun 2020.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu.

Tabel 3.17
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Rawat Jalan (Masyarakat Miskin)
Kota Dumai Tahun 2020

No	Puskesmas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dumai Kota	6.836	9.520	16.356
2	Dumai Barat	3.564	5.960	9.524
3	Bukit Kapur	2.591	4.598	7.189
4	Sungai Sembilan	3.630	7.382	11.012
5	Medang Kampai	2.277	3.504	5.781
6	Bumi Ayu	4.545	7.928	12.473
7	Jaya Mukti	7.591	12.608	20.199
8	Bukit Timah	1.770	3.360	5.130
9	Purnama	3.425	7.316	10.741
10	Bukit Kayu Kapur	2.387	4.185	6.572
Jumlah		38.616	66.361	104.977

Tabel 3.18
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Rawat Inap
(Masyarakat Miskin) Kota Dumai Tahun 2020

No	Puskesmas	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bukit Kapur	28	62	90
2	Medang Kampai	7	51	58
3	Sungai Sembilan	112	190	302
Jumlah		147	303	450

Tabel 3.19
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Rujukan
(Masyarakat Miskin) Kota Dumai Tahun 2020

No	Puskesmas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dumai Kota	697	1.009	1.706
2	Dumai Barat	340	431	771
3	Bukit Kapur	260	397	657
4	Sungai Sembilan	262	487	749
5	Medang Kampai	102	128	230
6	Bumi Ayu	595	867	1.462
7	Jaya Mukti	868	1.369	2.237
8	Bukit Timah	150	272	422
9	Purnama	245	364	609
10	Bukit Kayu Kapur	196	299	495
Jumlah		3.715	5.623	9.338

Sampai dengan tahun 2020 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS baik itu sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN dan PBI APBD) ada sebanyak 158.823 orang, dan Non PBI (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/mandiri dan bukan pekerja) ada sebanyak 109.859 orang, sehingga total peserta Jaminan Kesehatan Kota Dumai ada sebanyak 268.682 orang. Dengan demikian pencapaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai sebesar 85,52% dan persentase capaian kinerja adalah sebesar 95.02% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 151.547 orang, maka jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) mengalami peningkatan pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 90%, maka angka tersebut belum mencapai target yang artinya Kota Dumai belum mencapai Universal Health Coverage (UHC). Hal tersebut dikarenakan dana yang tersedia masih terbatas dan data kependudukan yang tidak valid.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

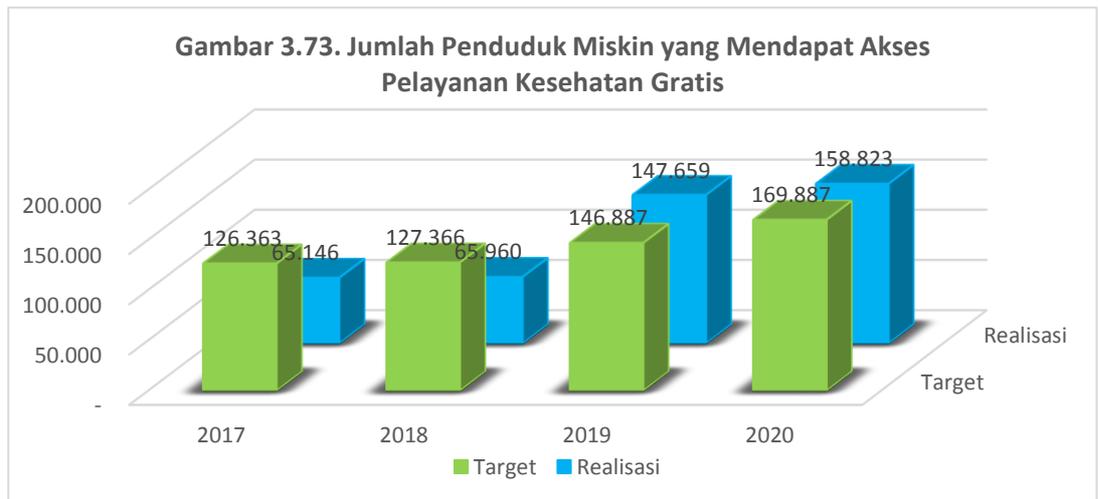
a. Indikator Kinerja Tujuan : GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita

Realisasi Pada tahun 2019 GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita adalah sebesar 36,88%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita dapat ditekan menjadi sebesar 44,86%.



b. Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis

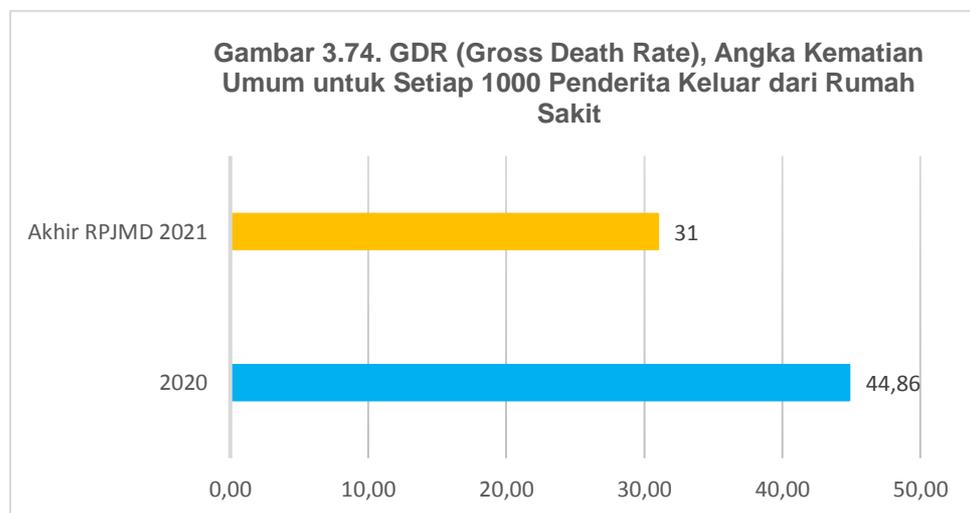
Realisasi Pada tahun 2019 Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis adalah sebesar 147.659 orang sedangkan realisasi pada tahun 2020 Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis menurun menjadi 158.823 orang.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita

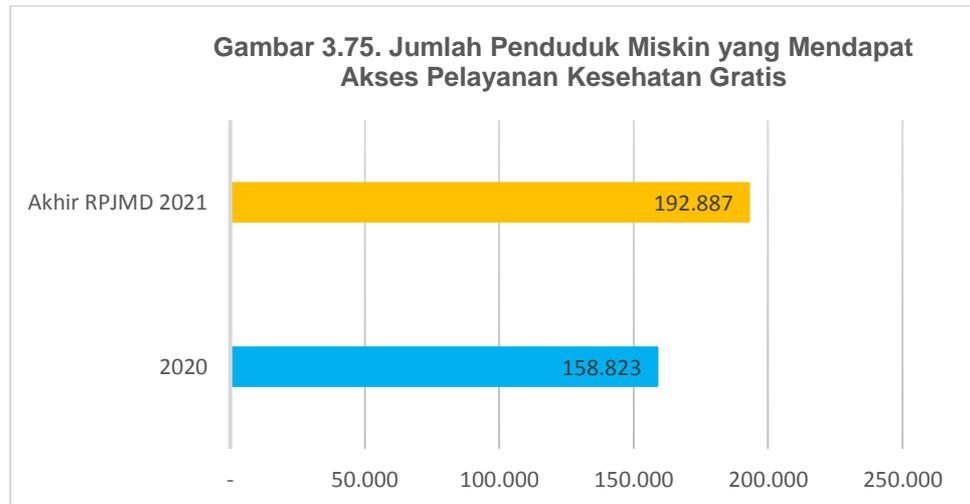
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 31%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 44,86% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 55,29 %.



b. Indikator Kinerja Sasaran : Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis

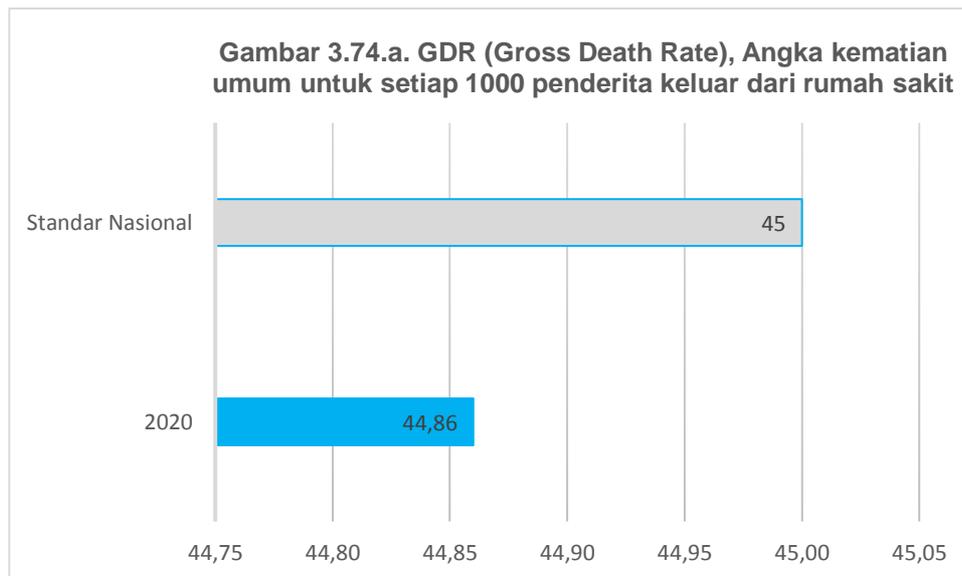
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 192.887 orang, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar

158.823 orang dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 82,34%.



4. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada);
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita

Realisasi GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita sebesar 44,86% dan Standar Nasional adalah sebesar 45%. Berdasarkan ketentuan DEPKES 2005 kasus tersebut masi dapat di tolerasi dengan standar ideal GDR adalah kurang dari 45 kasus dari 1000 pasien keluar.



Tujuan 4

Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga

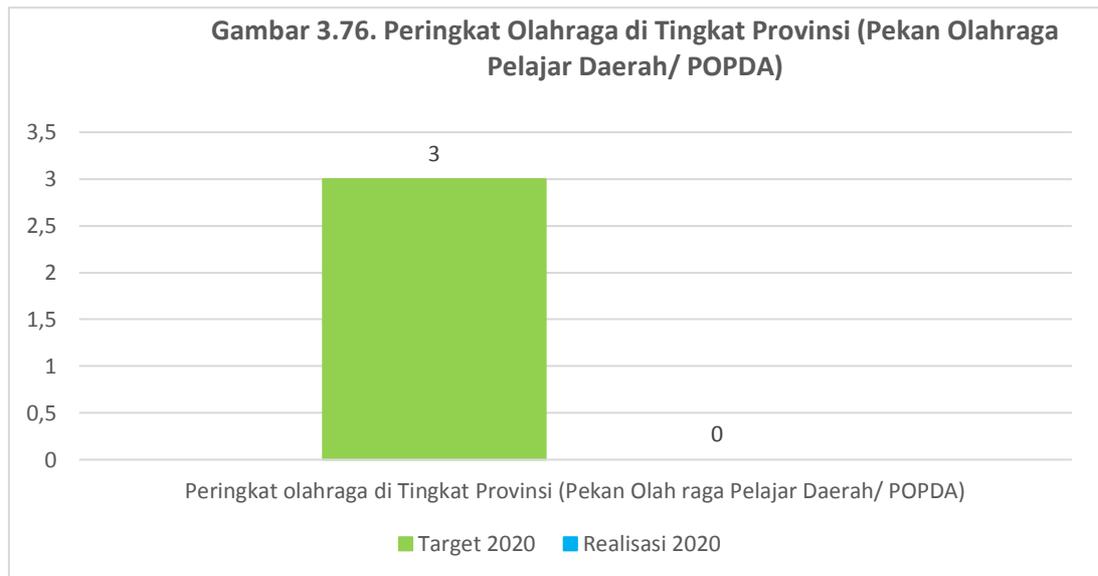
Tujuan4 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing”.Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Untuk mengukur Tujuan 2 ini terdapat 2 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.20 berikut di bawah ini :

Tabel 3.20. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 4.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	-	10	0	3	-	--	3	-1333,33
	Rata-rata Capaian Kinerja							--		

Terlihat dari tabel 3.20 diatas pada Misi Kedua tujuan 4 ini 1 (satu) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)
Target tahun 2020 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA) adalah peringkat 3 dan realisasi tahun 2020 tidak ada peringkat dengan tingkat capaian sebesar 0%.

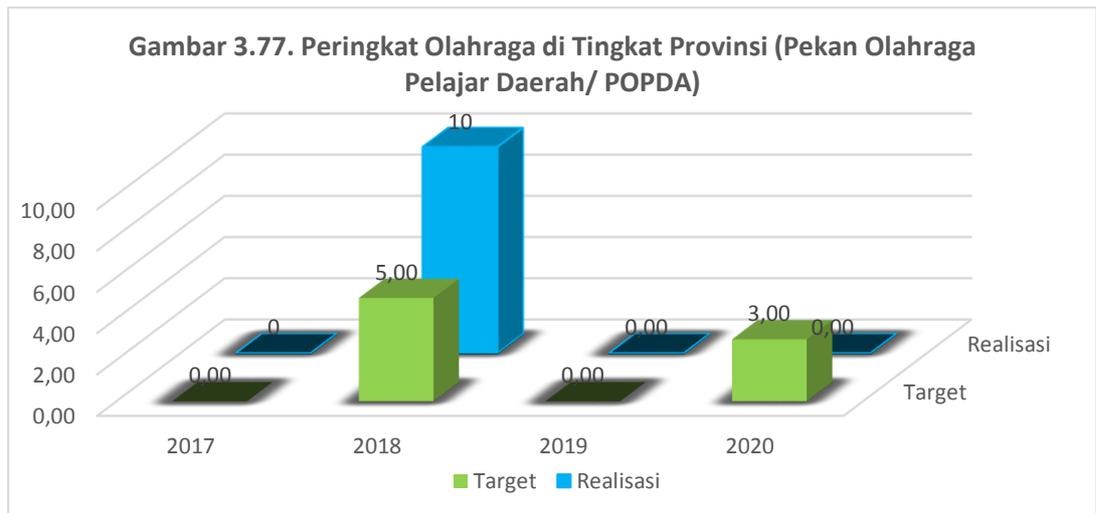


Pada tahun 2018 Kota Dumai mendapat peringkat ke-10 dari 12 Kabupaten/Kota yang mengikuti POPDA tersebut, hal ini sangat jauh dari target yang diinginkan pada Tahun 2018 yaitu peringkat ke-5 dan terjadi penurunan pada 2 tahun sebelumnya dimana Dumai mendapatkan peringkat 7. Hal ini disebabkan sangat sedikitnya cabor yang dikirim dari cabor yang diperlombakan karena terbatasnya anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pekan Olahraga Pelajar Daerah tersebut hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran.

Dan pada tahun 2020, kota Dumai menargetkan peringkat 3, dan pada tahun 2020 terjadi wabah covid 19, sehingga dilakukan refocusing anggaran dan meniadakan kegiatan tersebut.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)

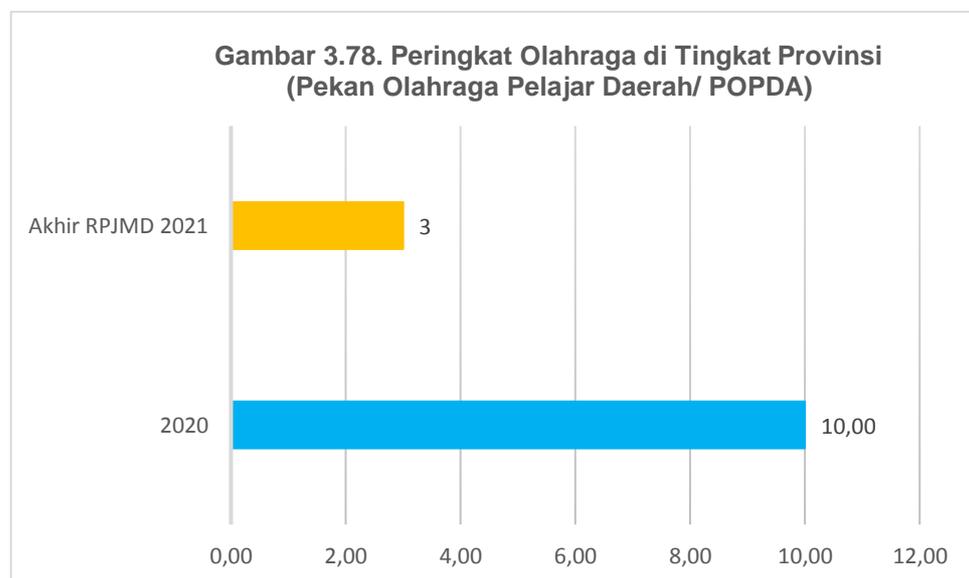
Realisasi pada tahun 2019 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA) adalah peringkat 0. Realisasi Pada tahun 2020 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA) tidak ada diselenggarakannya Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19, sehingga ditiadakan dan anggaran difocusing dan menjadi Rp. 0.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 adalah peringkat 3, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 adalah peringkat 10 (pada tahun 2018), didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar -133,33 %.



Sasaran Strategis 4.1

Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga

Sasaran strategis 4.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga”**.

Sasaran ini didukung OPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata. Untuk mengukur misi kedua ini terdapat 1 (Satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.21 berikut di bawah ini :

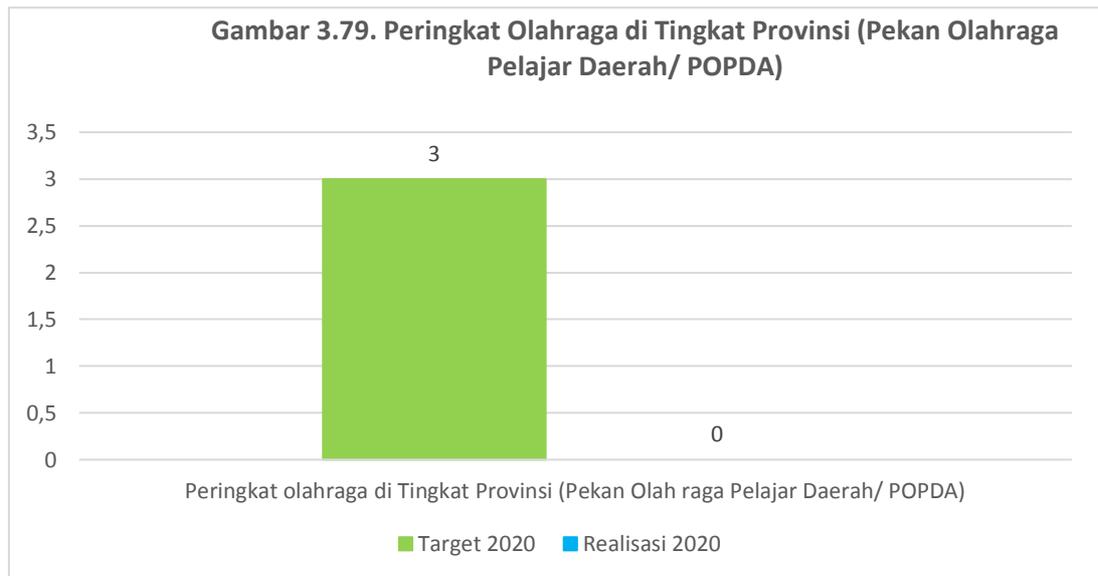
Tabel 3.21. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	-	10	-	3	-	--	3	-133,33
	Rata-rata Capaian Kinerja							--		

Terlihat dari tabel 3.21 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 4.1 terdapat 1 (Satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)

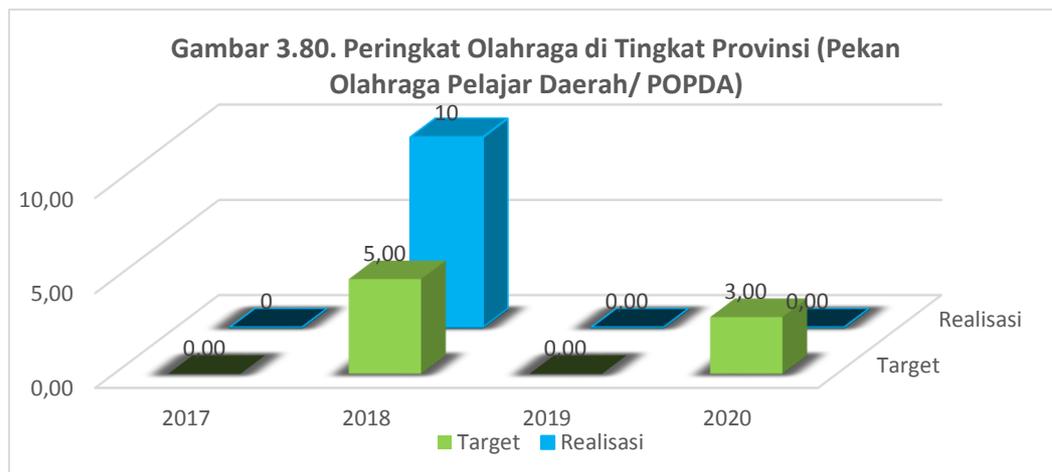
Target tahun 2020 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA) adalah peringkat 3, dan realisasi tahun 2020 adalah tanpa peringkat dengan tingkat capaian sebesar 0%.



Pada tahun 2018 Kota Dumai mendapat peringkat ke-10 dari 12 Kabupaten/Kota yang mengikuti POPDA tersebut, hal ini sangat jauh dari target yang diinginkan pada Tahun 2018 yaitu peringkat ke-5 dan terjadi penurunan pada 2 tahun sebelumnya dimana Dumai mendapatkan peringkat 7. Hal ini disebabkan sangat sedikitnya cabor yang dikirim dari cabor yang diperlombakan karena terbatasnya anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pekan Olahraga Pelajar Daerah tersebut hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran.

Dan pada tahun 2020, kota Dumai menargetkan peringkat 3, dan pada tahun 2020 terjadi wabah covid 19, sehingga dilakukan refocusing anggaran dan meniadakan kegiatan tersebut.

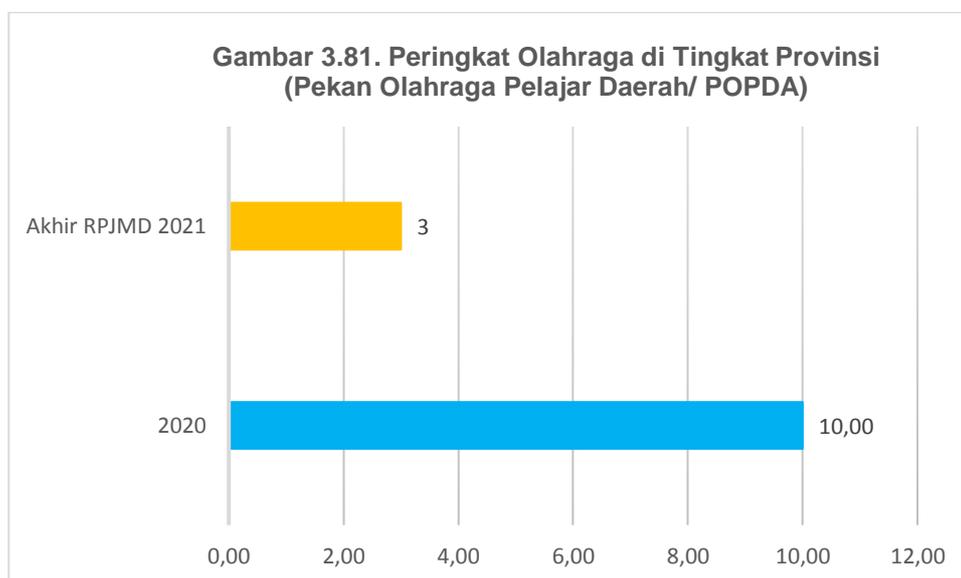
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)
 Realisasi pada tahun 2019 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA) adalah peringkat 0. Realisasi Pada tahun 2020 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA) tidak ada diselenggarakannya Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19, sehingga ditiadakan dan anggaran difocusing dan menjadi Rp. 0



3. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Sasaran : Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 adalah peringkat 3, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2020 adalah peringkat 10 (pada tahun 2018) didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar -133,33 %.



Misi 3. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Pencapaian misi ketiga ini melalui1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) sasaran

strategis, 2 (dua) indikator Tujuan, 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 5

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

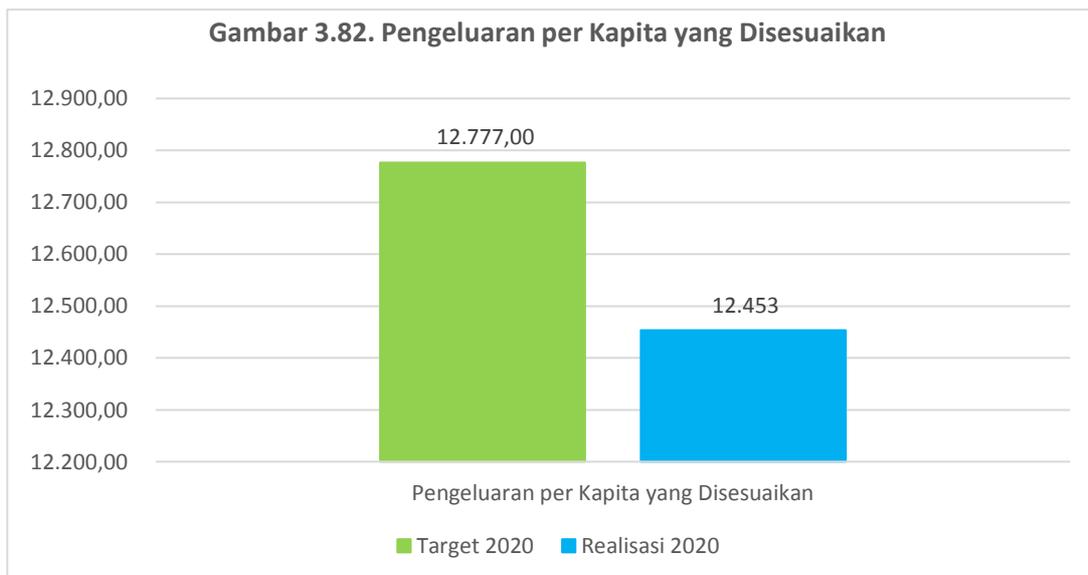
Tujuan 5 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 3 “Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk mengukur Tujuan 5 ini terdapat 2 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.22 berikut di bawah ini

Tabel 3.22. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 5.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Rp. 000	11.531	11.699	12.453	12.777	12.453	97,46	13.176	94,51
2	PDRB per kapita	Rp. 000	73.314,21	75.100,09	117.198,83	115.496,86	117.198	101,47	121.044,95	96,82
	Rata-rata Capaian Kinerja							99,47		

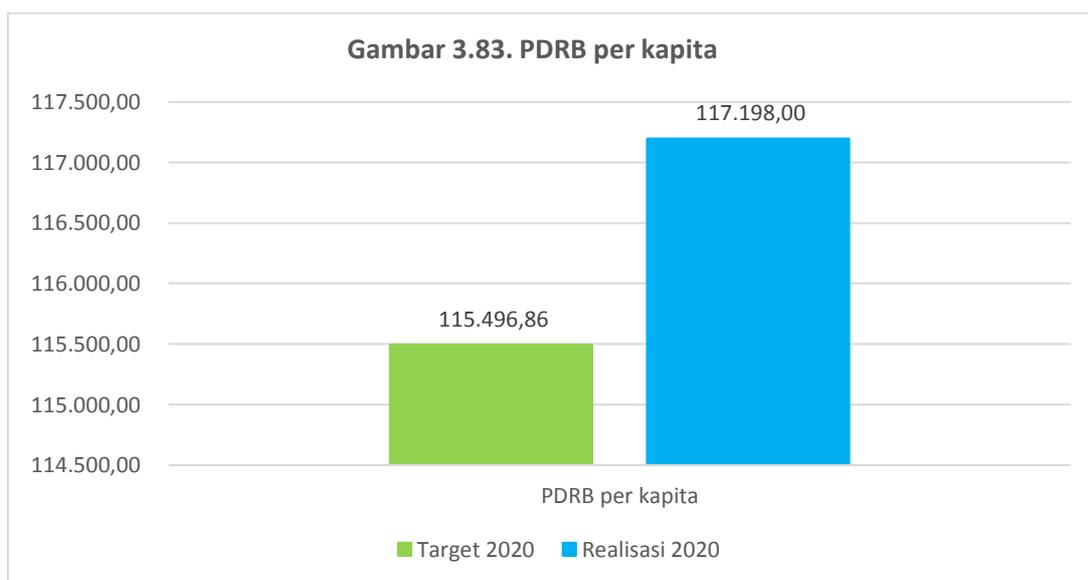
Terlihat dari tabel 3.22 diatas pada Misi Ketiga, tujuan 5 ini 2 (dua) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan
Target tahun 2020 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan adalah Rp. 12.777.000 dan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 12.453.000 dengan tingkat capaian sebesar 97,46 %.



b. Indikator Kinerja Tujuan : PDRB per kapita

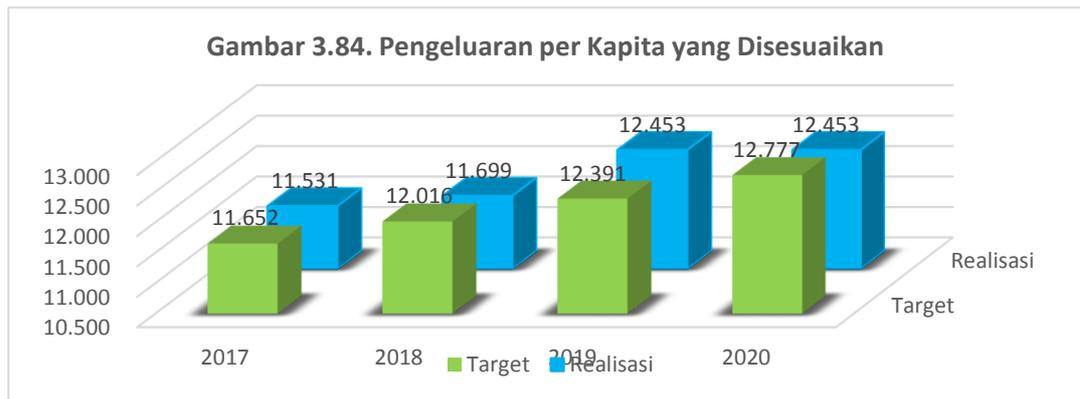
Target tahun 2020 PDRB per kapita adalah Rp. 115.496.860 dan realisasi tahun 2020 sebesar Rp117.198.000 dengan tingkat capaian sebesar 101,47 %.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

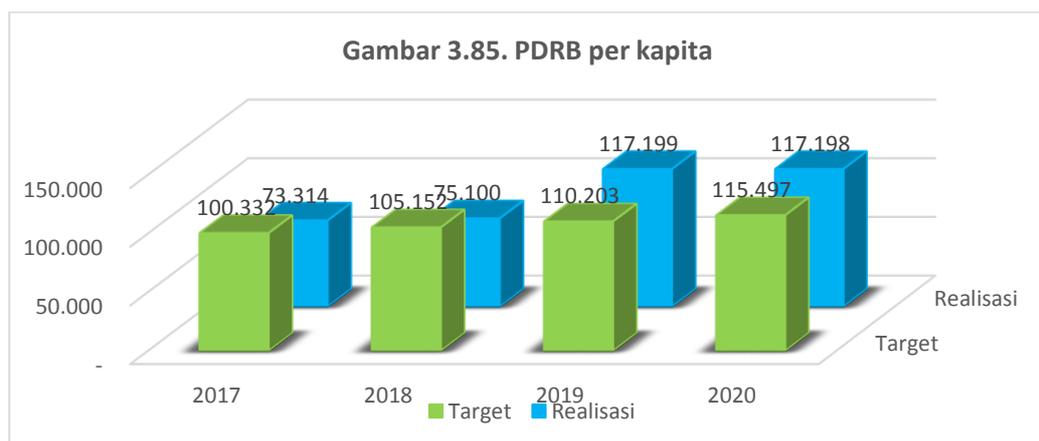
a. Indikator Kinerja Tujuan : Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan

Realisasi Pada tahun 2019 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan adalah sebesar Rp. 12.453.000,00, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan meningkat menjadi Rp. 12.453.000,00



b. Indikator Kinerja Tujuan : PDRB per kapita

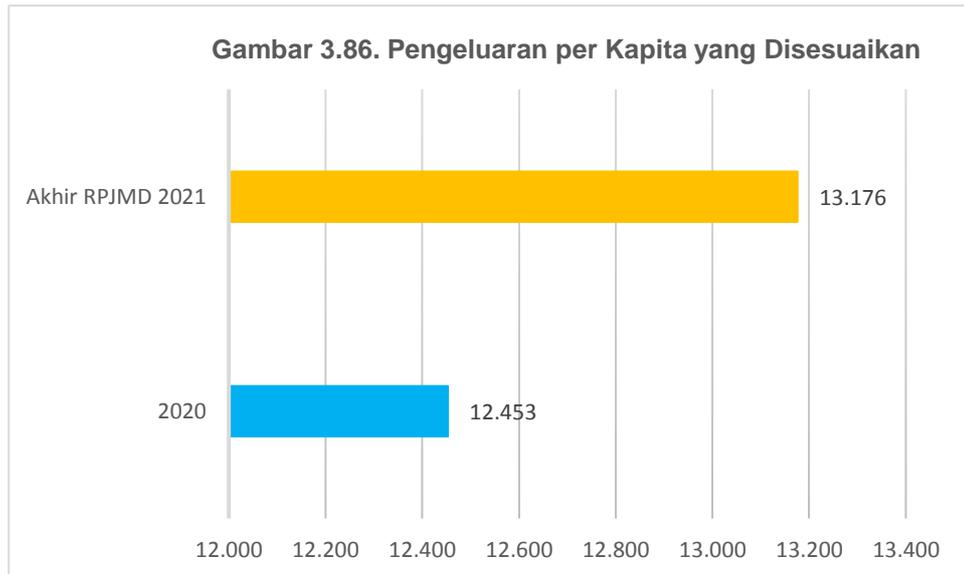
Realisasi Pada tahun 2019 PDRB per kapita adalah sebesar Rp. 117.198.830. Sedangkan realisasi pada tahun 2020 PDRB per kapita naik menjadi Rp. 117.198.000.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

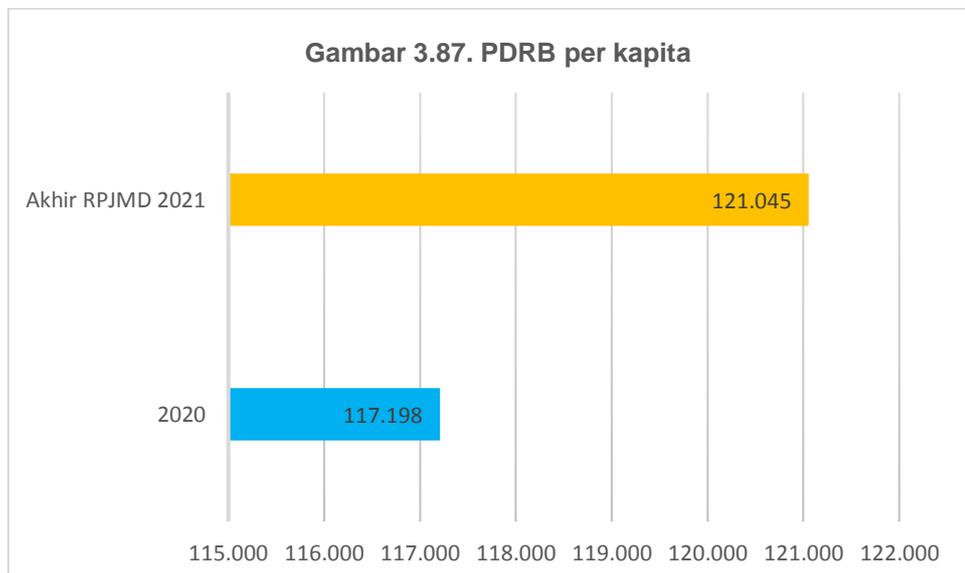
a. Indikator Kinerja Tujuan : Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar Rp. 13.176.000, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 12.453.000 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 4,51%.



b. Indikator Kinerja Tujuan : PDRB per kapita

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar Rp. 121.044.950, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 117.198.830 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 96,82%.



Sasaran Strategis 5.1

Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat

Sasaran strategis 5.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**”. Sasaran ini didukung OPD Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk mengukur sasaran misi ketiga ini terdapat 1 (Satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.23 berikut di bawah ini

Tabel 3.23. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.1

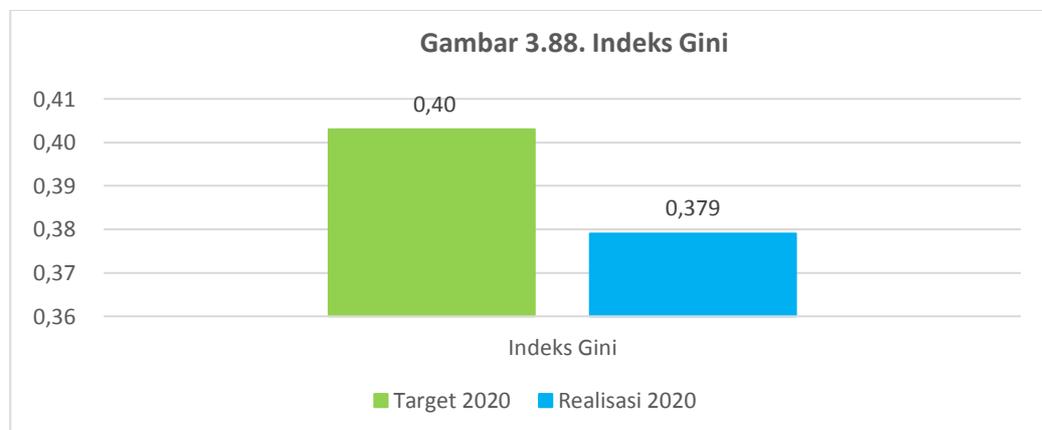
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Indeks Gini	Indeks	0,45	0,39	0,34	0,403	0,38	105,96	0,4	105,25
	Rata-rata Capaian Kinerja							105,96		

Terlihat dari tabel 3.23. diatas pada Tujuan lima ini sasaran Strategis 5.1 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Gini

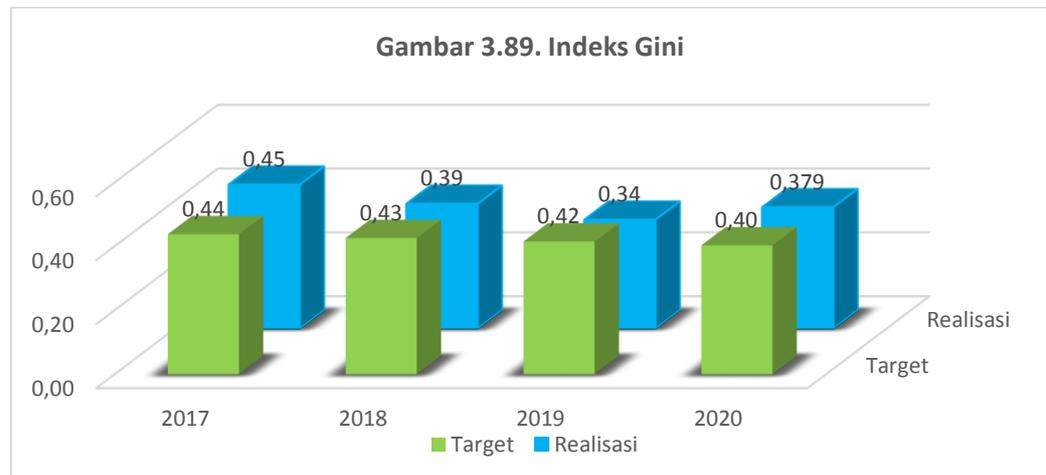
Target tahun 2020 Indeks Gini adalah 0,403 dan realisasi tahun 2020 sebesar 0,379 dengan tingkat capaian sebesar 105,96%.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Gini

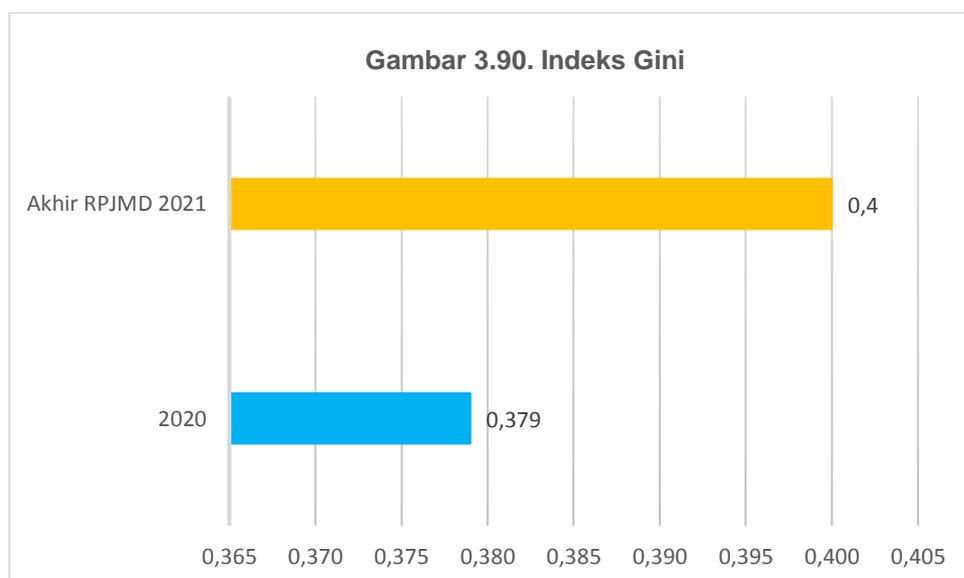
Realisasi Pada tahun 2019 Indeks Gini adalah sebesar 0,34, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Indeks Gini dapat ditekan menjadi sebesar 0,379.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Gini

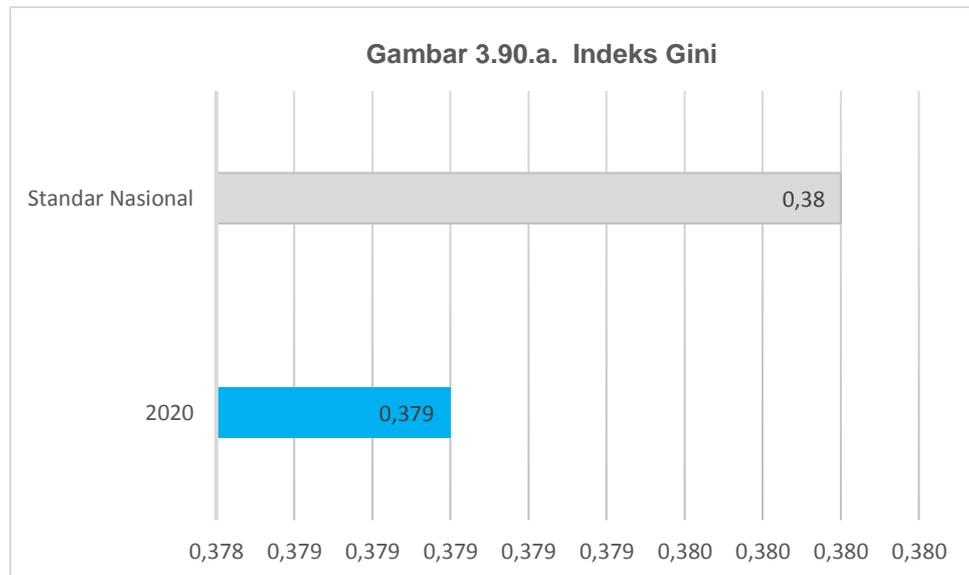
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 0,4 realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 0,379 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 105,25%.



4. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada);

a. Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Gini

Realisasi Indeks Gini sebesar 0,379 dan Standar Nasional adalah 0,38 adalah ketimpangan rendah. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, pasal 46 Ayat c, berbunyi “penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,375 - 0,380 (nol koma tiga tujuh lima sampai dengan nol koma tiga delapan nol);”.



Koefisien Gini (Gini Ratio) atau Indeks Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistik Italia, Corrado Gini, dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya, *Variabilità e mutabilità*. Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin

mendekati satu. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini (Susanti et al 2007) adalah sebagai berikut:

- a. Lebih kecil dari 0. 4: tingkat ketimpangan rendah
- b. Antara 0.4-0.5: tingkat ketimpangan moderat
- c. Lebih tinggi dari 0.5: tingkat ketimpangan tinggi

Sasaran Strategis 5.2

Menurunnya persentase penduduk miskin

Sasaran strategis 5.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**. Untuk mengukur sasaran misi ketiga ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.24 berikut di bawah ini :

Tabel 3.24. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.2

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Tingkat Kemiskinan	%	4,74	3,71	3,56	4,42	3,16	128,51	4,34	117,97
	Rata-rata Capaian Kinerja							128,51		

Terlihat dari tabel 3.24 diatas pada Tujuan Kelima ini sasaran Strategis 5.2 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

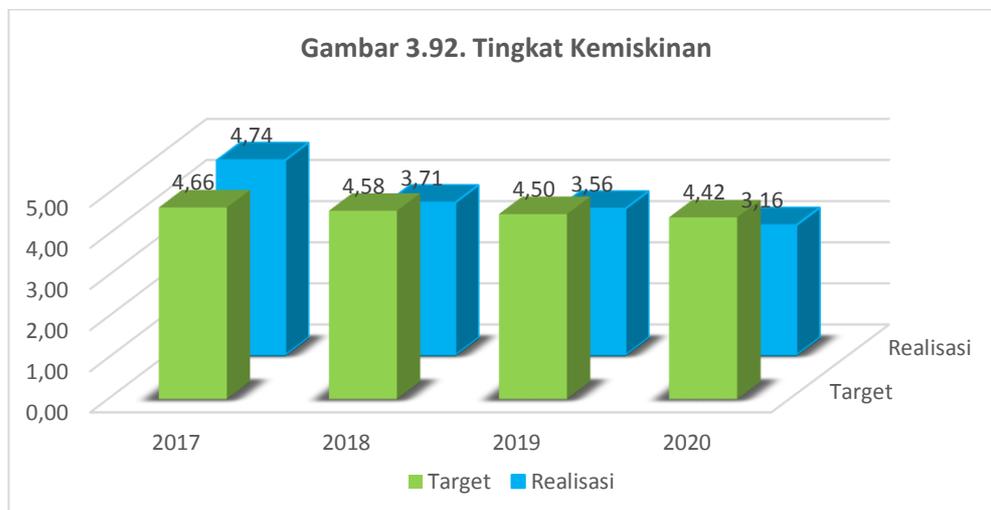
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Tingkat Kemiskinan
Target tahun 2020 Tingkat Kemiskinan adalah 4,42% dan realisasi tahun 2020 sebesar 3,16% dengan tingkat capaian sebesar 128,51%.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Tingkat Kemiskinan

Realisasi Pada tahun 2019 Tingkat Kemiskinan adalah sebesar 3,56%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Tingkat Kemiskinan dapat ditekan menjadi 3,16%.

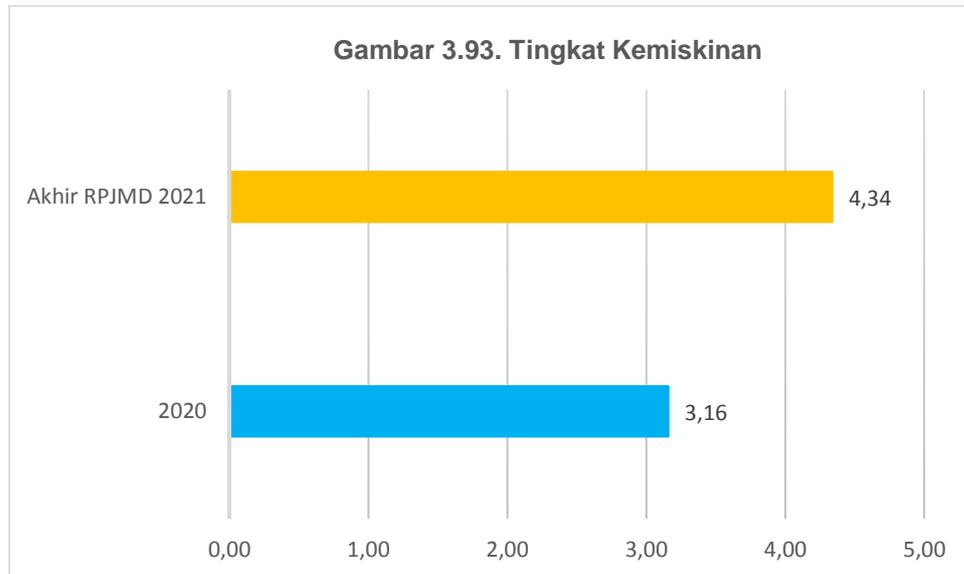


3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Tingkat Kemiskinan

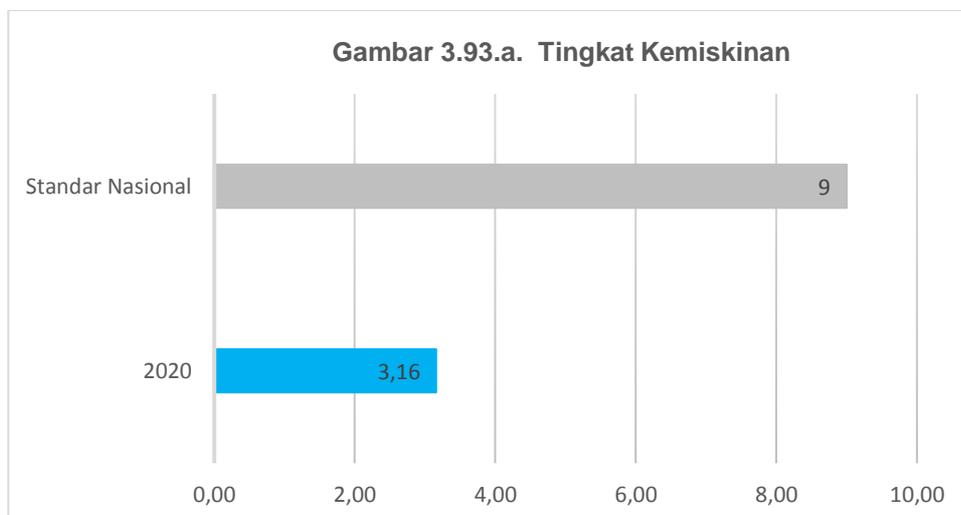
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 4,34%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 3,16%

dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 127,19%.



4. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada);
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Tingkat Kemiskinan

Realisasi Tingkat kemiskinan sebesar Kota Dumai sebesar 3,56 dan Standar Nasional adalah 1 digit atau < 9%. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, pasal 46 Ayat a, berbunyi “penurunan kemiskinan menjadi 8,5% -9,0% (delapan koma lima persen sampai dengan sembilan koma nol persen)”.



Sasaran Strategis 5.3

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

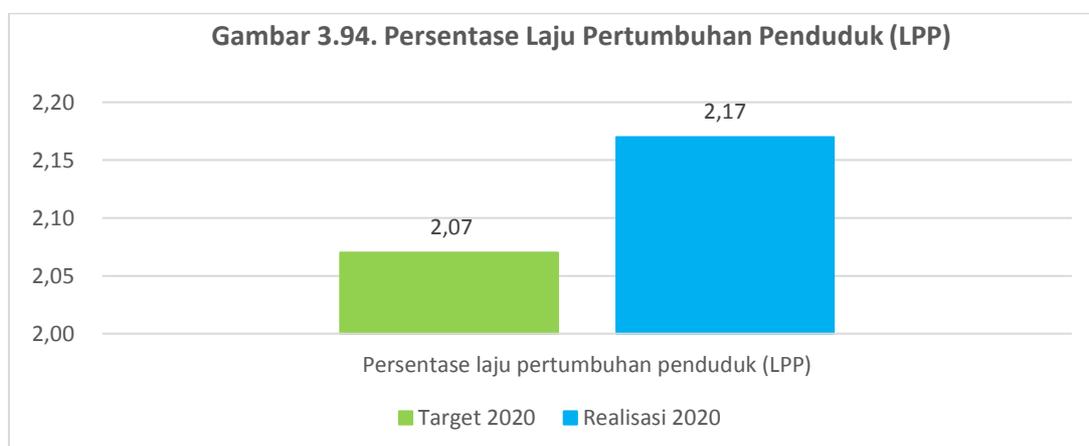
Sasaran strategis 5.3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Sasaran ini didukung OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.25 berikut dibawah ini :

Tabel 3.25. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.3

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,96	1,08	1,19	2,07	2,17	95,17	2,068	95,07
	Rata-rata Capaian Kinerja							95,17		

Terlihat dari tabel 3.25 diatas pada Tujuan Kelima ini sasaran Strategis 5.3 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)
Target tahun 2020 Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah 2,07% dan realisasi tahun 2020 sebesar 2,17% dengan tingkat capaian sebesar 95,17%.



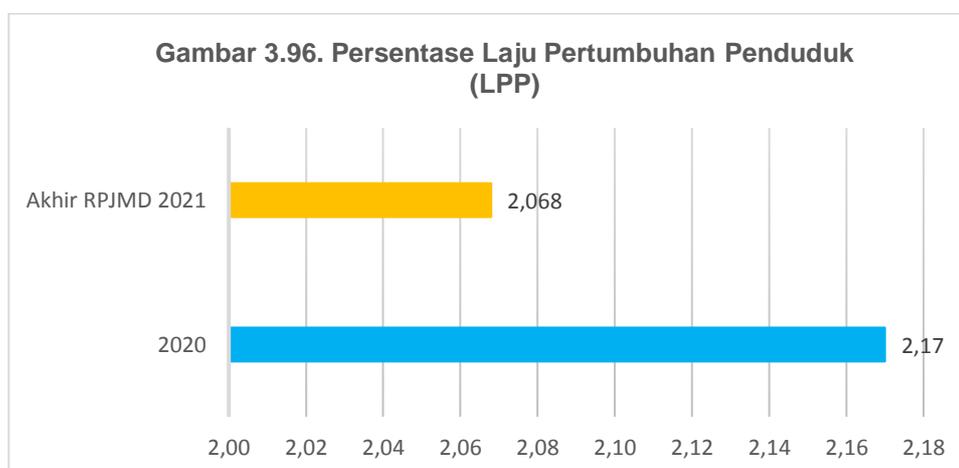
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)
Realisasi Pada tahun 2019 Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah sebesar 1,19%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) menjadi 2,17%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 2,068%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 2,17% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 95,07%.



Sasaran Strategis 5.4

Meningkatnya lapangan kerja.

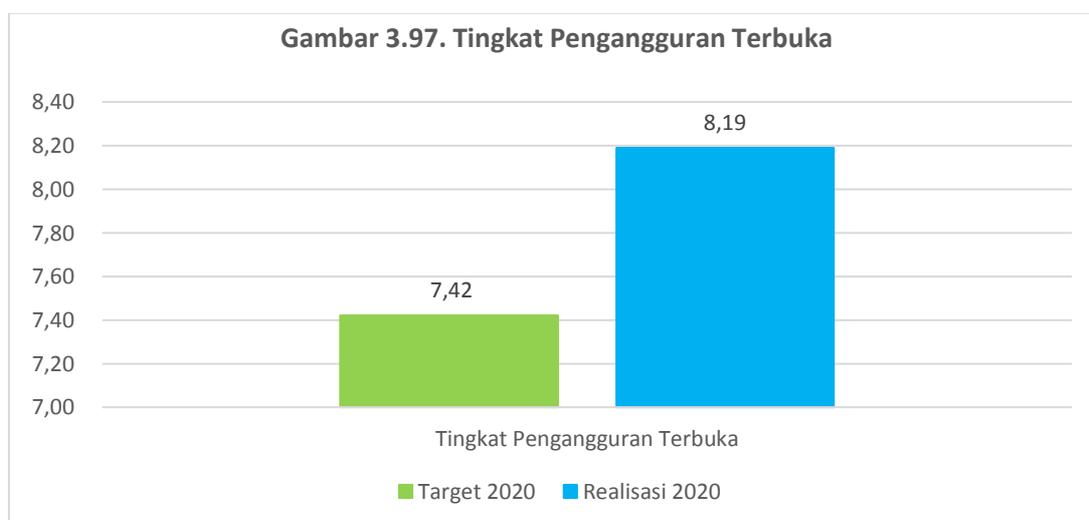
Sasaran strategis 5.4 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Sasaran ini didukung OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk mengukur sasaran misi ketiga ini terdapat 1 (Satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.26 berikut di bawah ini :

Tabel 3.26. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.4

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11,23	8,94	6,47	7,42	8,19	89,62	6,98	82,66
	Rata-rata Capaian Kinerja							89,62		

Terlihat dari tabel 3.26 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 5.4 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka
Target tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 7,42% dan realisasi tahun 2020 sebesar 8,19% dengan tingkat capaian sebesar 89,62%.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk pelaksanaan Program ini pada Tahun 2020 di Anggaran Rp. 0,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja

Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah Tenaga Kerja yang terampil dan memiliki keahlian serta bersertifikasi dengan target 80 orang Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- dan atau sebesar 0%.

b) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Untuk pelaksanaan program ini pada Tahun 2020 di Anggaran sebesar Rp. 150.150.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp.144.188.400,- atau sebesar 96,03% adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program Peningkatan Kesempatan kerja adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja

Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal Sesuai Kepres RI No. 04 Tahun 1980 dengan target 50 Perusahaan, Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.350.000,- atau sebesar 80,76%, kegiatan ini merupakan sesuai Perda 10 tahun 2004 tentang Tenaga kerja dan Permen 39 Tahun 2016 tentang penempatan Tenaga Kerja.

2) Kegiatan Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja

Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan, Data Informasi pasar Kerja dan Implementasi ISO 9001-2015 dengan target 12 bulan, anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.838.400,- atau sebesar 100%.

c) Program Kanajemen Pelayanan Tenaga Kerja

Untuk pelaksanaan program ini pada Tahun 2020, di Anggarkan sebesar Rp. 29.448.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 28.668.500,- atau sebesar 97,35% adapun kegiatan dari pelaksanaan program manajemen pelayanan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

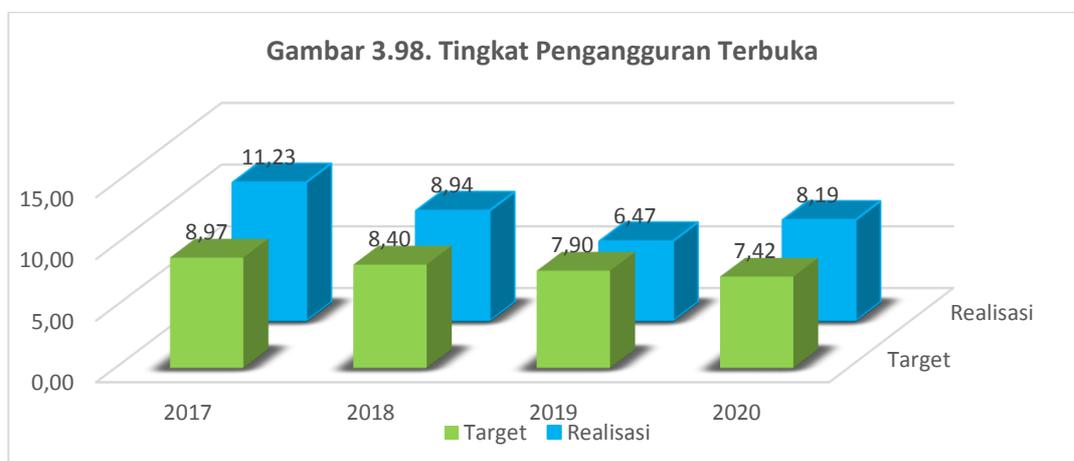
1) Kegiatan Pembinaan Dewan Pengupahan

Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah rapat rutin dewan pengupahan Kota Dumai dengan target 5 kali rapat anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.448.500,- terealisasi sebesar Rp. 28.668.500,- dan atau sebesar 97,35%, Kegiatan ini merupakan Penetapan UMK Kota Dumai yang ditanda tangani Gubernur Riau.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka

Realisasi Pada tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar 6,47%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka tetap dapat ditekan menjadi 8,19%.

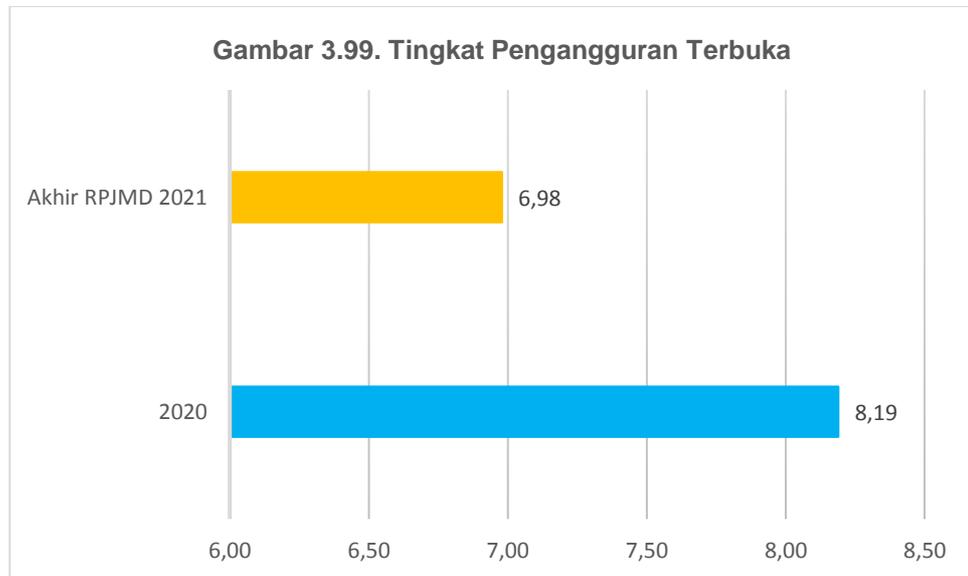


3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 6,98%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 8,19%

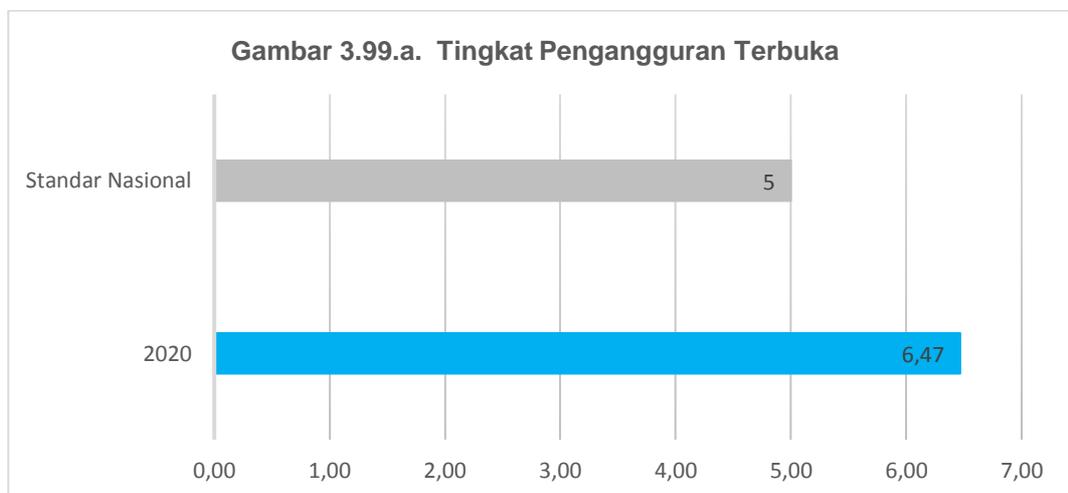
dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 82,66 %.



4. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada);

a. Indikator Kinerja Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka

Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar Kota Dumai sebesar 6,47 dan Standar Nasional adalah 4,8% - 5%. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, pasal 46 Ayat b, berbunyi “tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,8% - 5,0% (empat koma delapan persen sampai dengan lima koma nol persen);”.



Misi 4. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan

Pencapaian misi keempat ini melalui 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis, 1 (satu) indikator Tujuan, 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 6

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tujuan 6 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 4 “Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kec. Dumai Barat, Kec. Dumai Timur, Kec. Bukit Kapur, Kec. Medang Kampai, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Dumai Kota, Kec. Dumai Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah. Untuk mengukur Tujuan 6 ini , terdapat 1 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.27 berikut di bawah ini :

Tabel 3.27. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 6.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,59	84,57	83,82	80	80,09	100,11	81,5	98,27
	Rata-rata Capaian Kinerja							100,11		

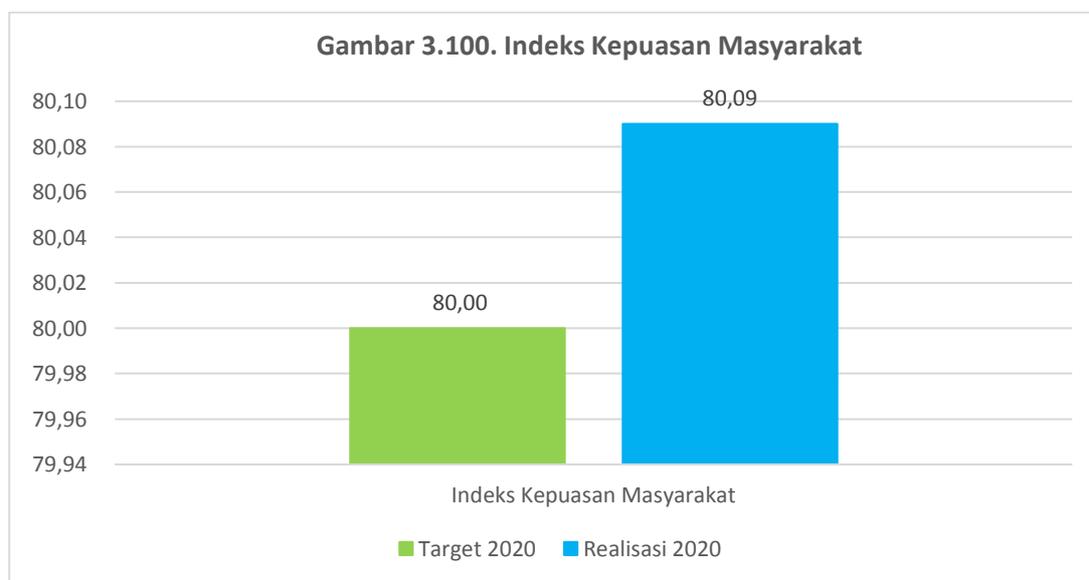
Terlihat dari tabel 3.27 diatas pada Misi Keempat tujuan 6 ini 1 (satu)

indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 80 dan realisasi tahun 2020 sebesar 80,09 dengan tingkat capaian sebesar 100,11%.



Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan prima yang menunjang percepatan investasi dan penanaman modal. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran adalah “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan” dengan 1 (satu) indikator kinerja “*Indeks Kepuasan Masyarakat*” dimana target dari indikator sasaran ini pada tahun 2020 yaitu dengan angka indeks 80 dan capaian kinerja sasaran sebesar 100,11% pada angka indeks 80,09.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu.

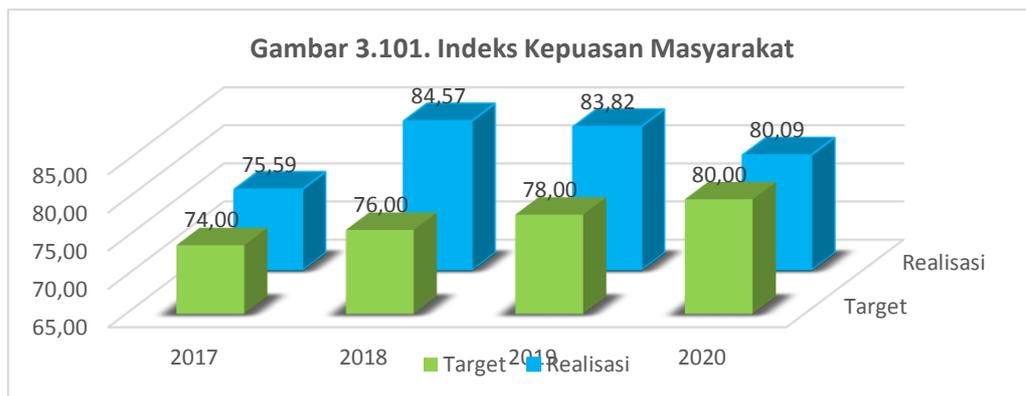
Capaian indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” diperoleh dari hasil pengukuran berdasarkan 9 Unsur Prinsip Pelayanan Publik. Angka Indeks sebesar 80,09 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan “B” dengan kategori penilaian BAIK, karena berada pada nilai interval Indeks Kepuasan Masyarakat dalam nilai 76,61 – 88,30. Hasil yang ingin dicapai pada

kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini bertujuan agar tersedianya data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

Usaha yang dilakukan sebagai upaya memberikan kepuasan kepada “pelanggan” dalam hal pelayanan publik melalui One Stop Service (OSS) pengelolaan pelayanan 64 jenis izin, masih mempunyai kekurangan-kekurangan, sebagaimana yang masih dirasakan oleh beberapa responden/masyarakat selaku penerima layanan. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik tentunya harus adanya kerjasama yang baik antar personil pelaku pelayanan yang ada pada DPMPTSP Kota Dumai, serta adanya dukungan dari Kepala Daerah dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

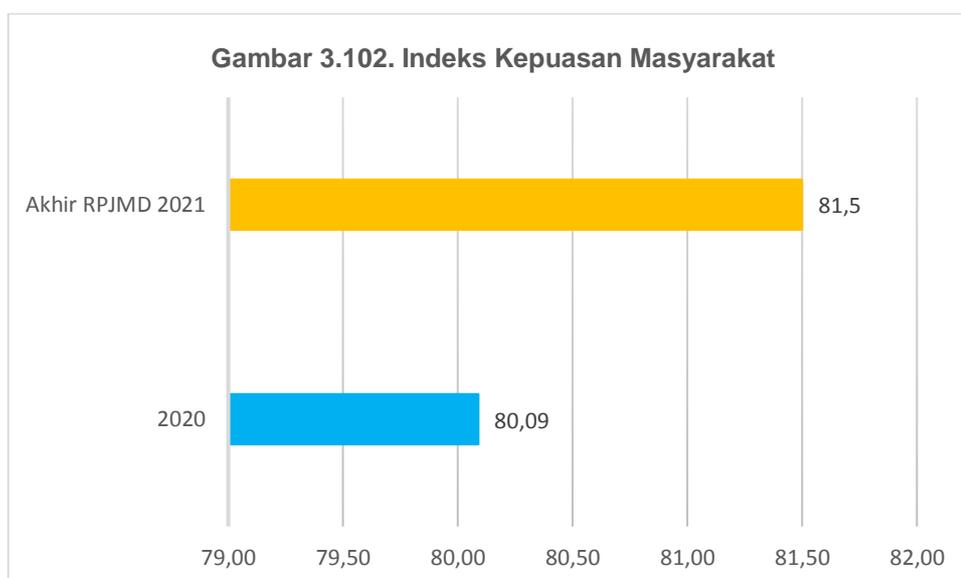
Perhatian dari Instansi dan pihak terkait dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan DPMPTSP Kota Dumai dalam rangka peningkatan pelayanan tersebut. Melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diharapkan kinerja para aparatur pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dapat terukur dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan. Selain itu Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat
Realisasi Pada tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 83,82 sedangkan realisasi pada tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat menurun menjadi 80,09.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 81,5, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 80,09 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021 sebesar 98,27%**.



Sasaran Strategis 6.1

Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik

Sasaran strategis 6.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan "Meningkatkan kualitas pelayanan publik". Sasaran ini didukung OPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Daerah, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kec. Dumai Barat, Kec. Dumai Timur, Kec. Bukit Kapur, Kec. Medang Kampai, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Dumai Kota, Kec. Dumai Selatan. Untuk mengukur misi keempat ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.28 berikut di bawah ini :

Tabel 3.28. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1

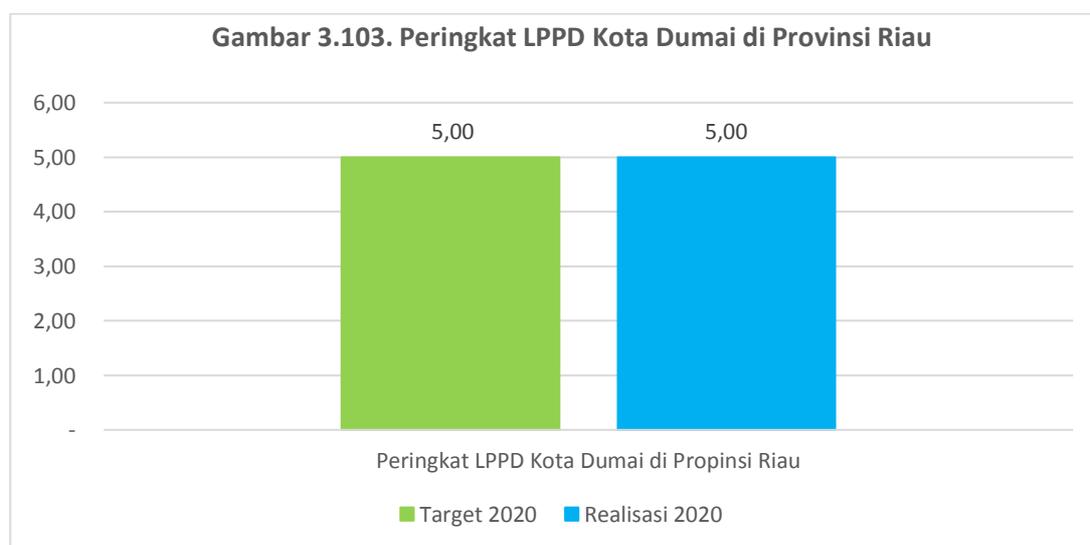
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	8	8	5	5	5	100,00	4	75,00
	Rata-rata Capaian Kinerja							100		

Terlihat dari tabel 3.28 diatas pada Tujuan Keenam ini sasaran Strategis 6.1 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau

Target tahun 2020 Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau adalah peringkat 5 dan realisasi tahun 2020 adalah peringkat 5 dengan tingkat capaian sebesar 100%.

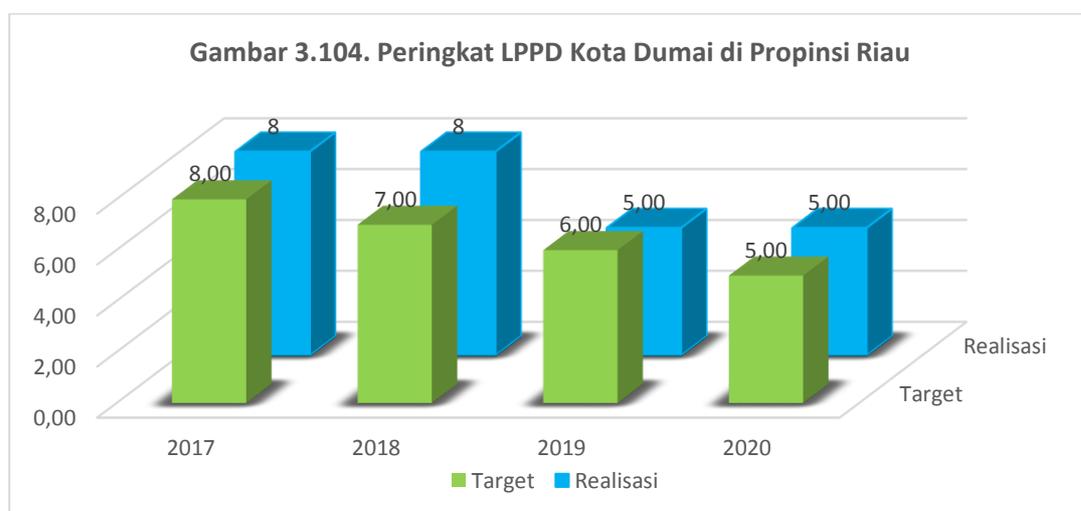


Kegiatan pendukung sasaran ini adalah Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD);

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Sasaran : Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau

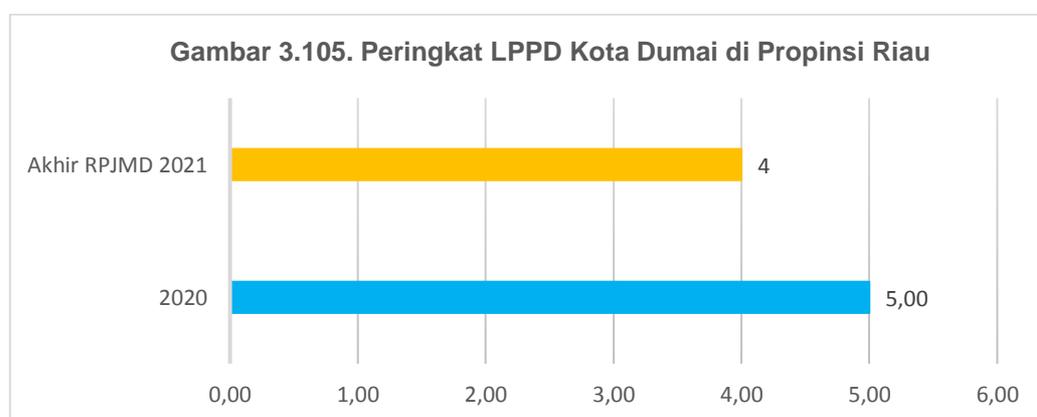
Realisasi Pada tahun 2019 Peringkat LPPD Kota Dumai di Provinsi Riau adalah peringkat 5, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau tetap peringkat 5



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Sasaran : Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 peringkat 4, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 adalah peringkat 5 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 75 %.



Sasaran Strategis 6.2

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran strategis 6.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan publik”.

Sasaran ini didukung OPD secara terpadu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mengukur misi keempat ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.29 berikut di bawah ini:

Tabel 3.29. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2

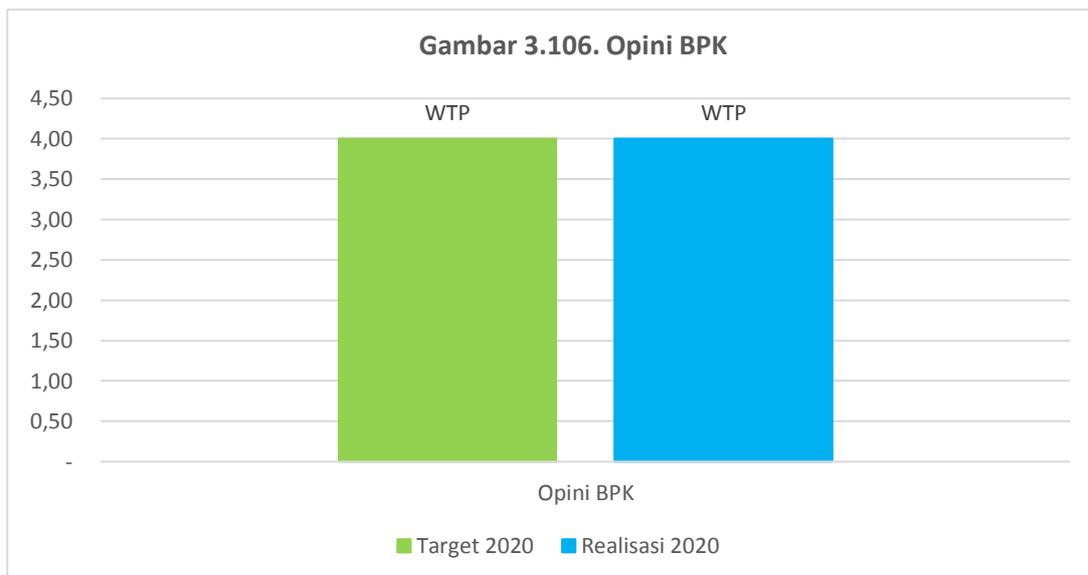
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Opini BPK	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
2	Nilai Akuntabilitas	Nilai	CC	CC	B	B	B	100	B	100
	Rata-rata Capaian Kinerja							100		

Terlihat dari tabel 3.29 diatas pada Tujuan Ke enam ini sasaran Strategis 6.2 terdapat 2 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Tujuan : Opini BPK

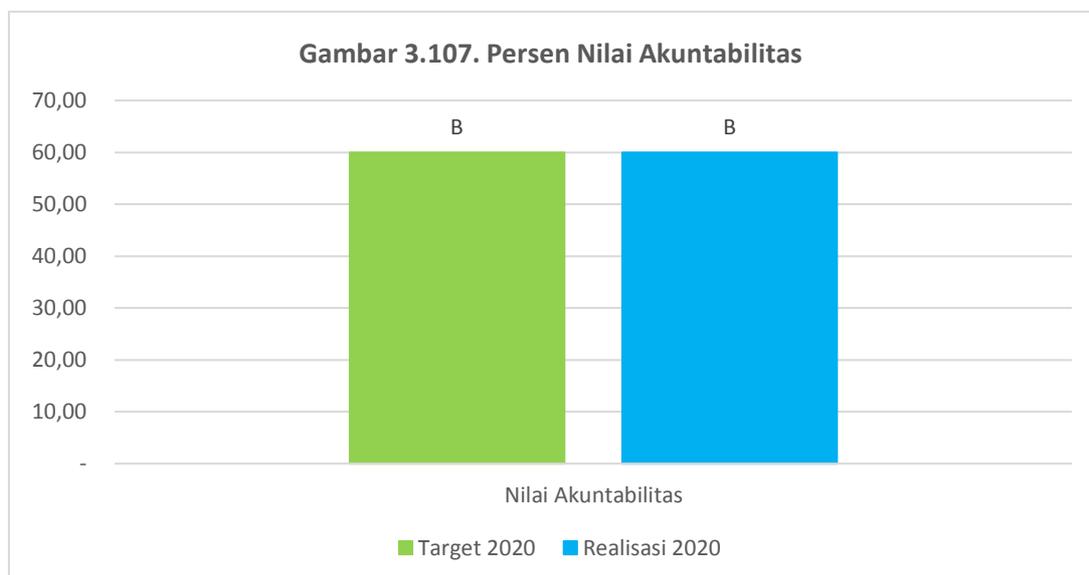
Target tahun 2020 Opini BPK adalah WTP atau 4 dan realisasi tahun 2020 adalah WTP atau 4 dengan tingkat capaian sebesar 100%. Hasil ini melebihi dari target yang ditetapkan. Untuk skor nilai Opini BPK sebagai berikut: Opini WTP Nilai 4; Opini WDP Nilai 3; Opini TMP Nilai 2 dan Opini Tidak Wajar Nilai 1.



b. Indikator Kinerja Tujuan : Nilai Akuntabilitas

Target tahun 2020 Nilai Akuntabilitas adalah B atau >60 dan realisasi tahun 2020 adalah B atau >60 dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

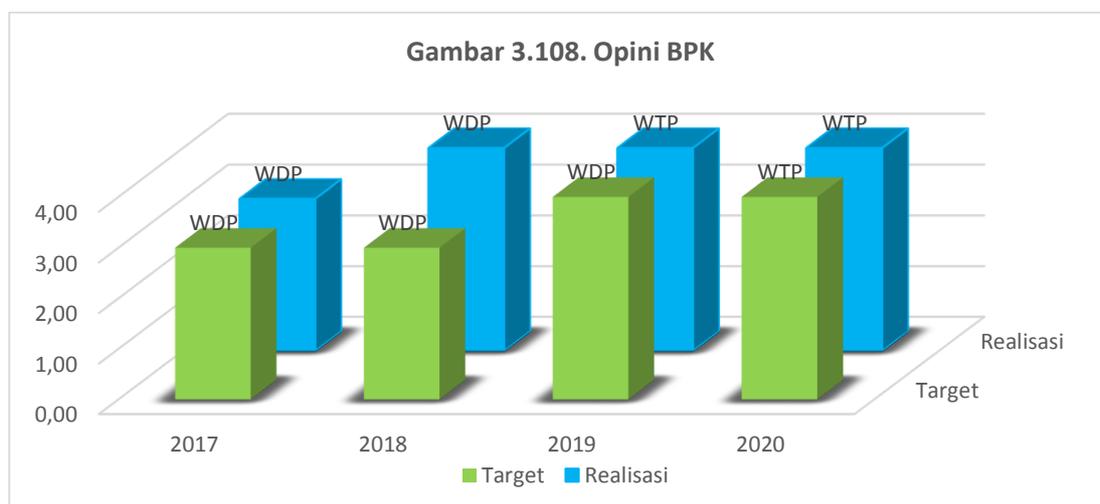
Untuk standar penilaian kategori SAKIP dan Range Nilai : Kategori AA dengan rang nilai 90-100, Kategori A dengan rang nilai 80-90, Kategori BB dengan rang nilai 70-80, Kategori B dengan rang nilai 60-70, Kategori CC dengan rang nilai 50-60, Kategori C dengan rang nilai 30-50 dan Kategori D dengan rang nilai 0-30.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

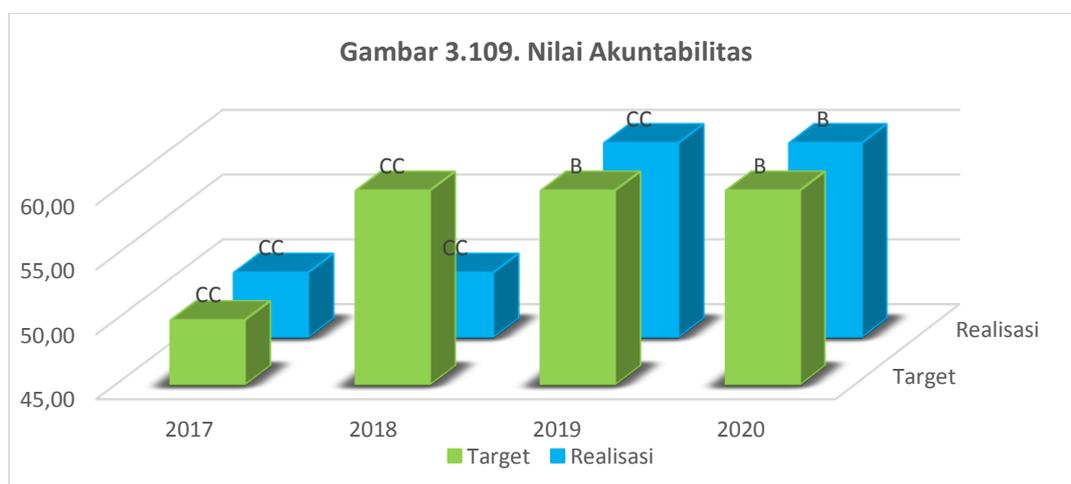
a. Indikator Kinerja Tujuan : Opini BPK

Realisasi Pada tahun 2019 Opini BPK adalah WTP atau 3, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Opini BPK meningkat menjadi WTP atau 3.



b. Indikator Kinerja Tujuan : Nilai Akuntabilitas

Realisasi Pada tahun 2019 Nilai Akuntabilitas adalah sebesar B atau >60 sedangkan realisasi pada tahun 2020 Nilai Akuntabilitas Tetap B atau >60

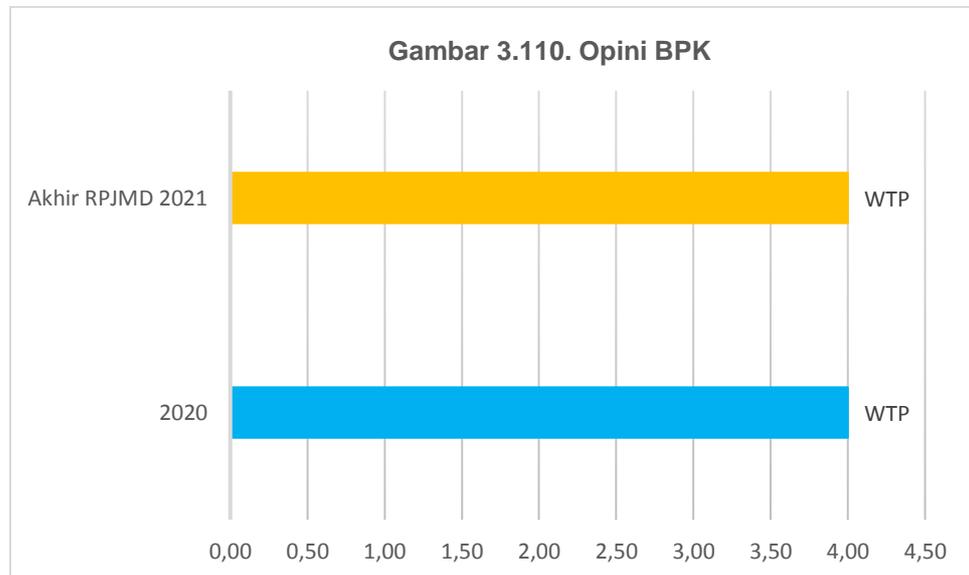


3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : BPK

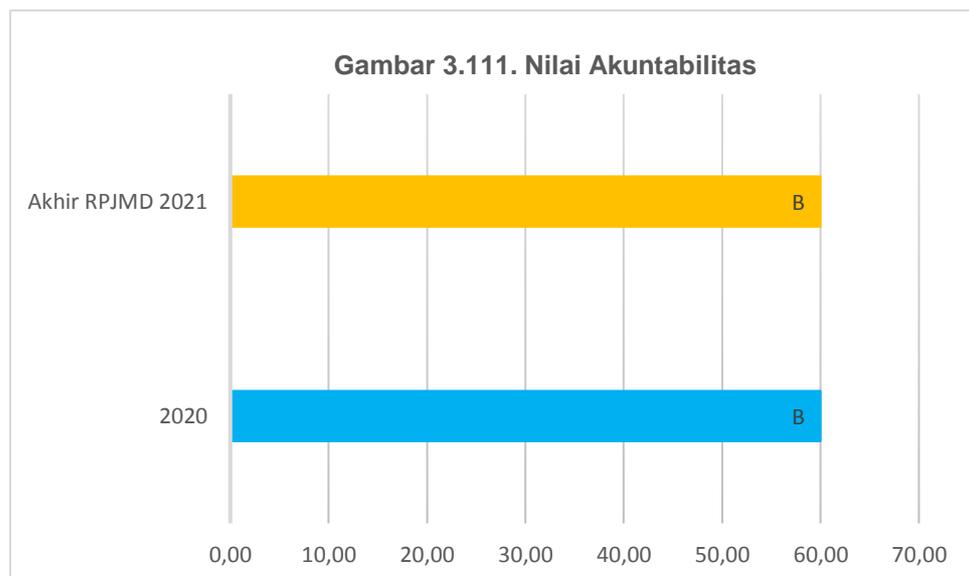
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 adlah WTP atau 4 , realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 adalah WTP atau 4

dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100 %.



b. Indikator Kinerja Tujuan : Nilai Akuntabilitas

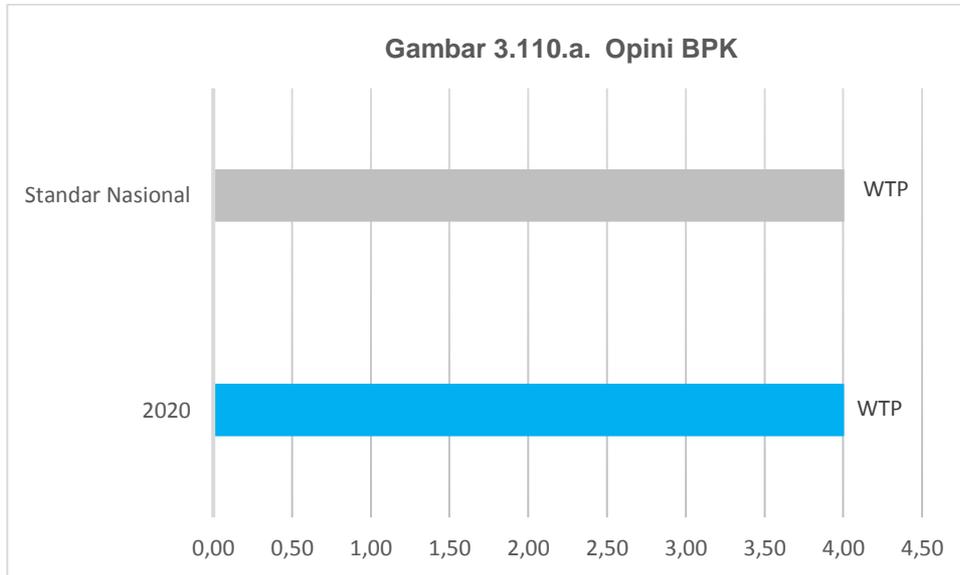
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 adalah B atau >60 realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 adalah B atau >60 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100%.



4. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada);

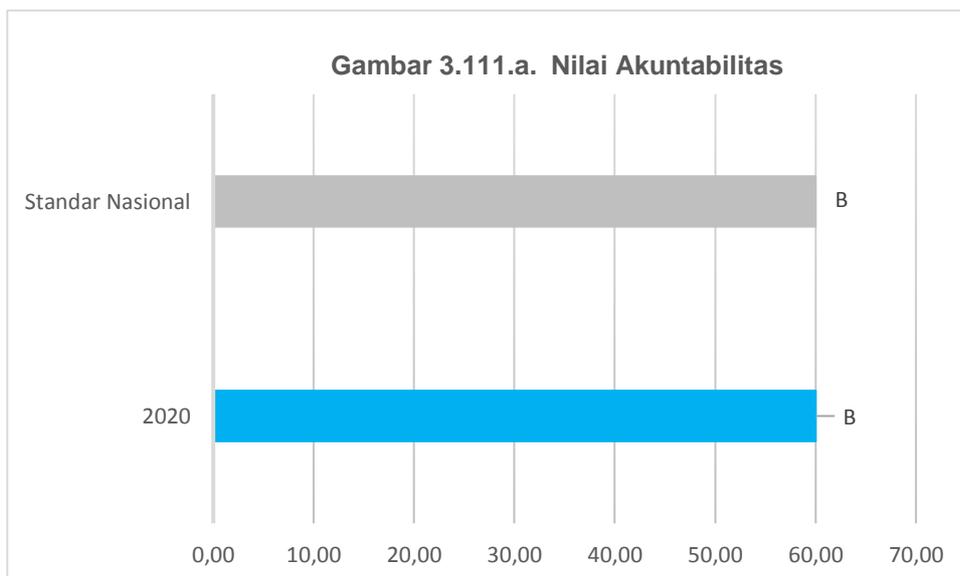
a. Indikator Kinerja Sasaran : Opini BPK

Realisasi Opini BPK Kota Dumai mendapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Standar Nasional adalah WTP.



b. Indikator Kinerja Sasaran : Nilai Akuntabilitas

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kota Dumai mendapat nilai B dan Standar Nasional adalah B.



Misi 5. Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan

Pencapaian misi kelima ini melalui 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis, 1 (satu) indikator Tujuan, 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 7

Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal

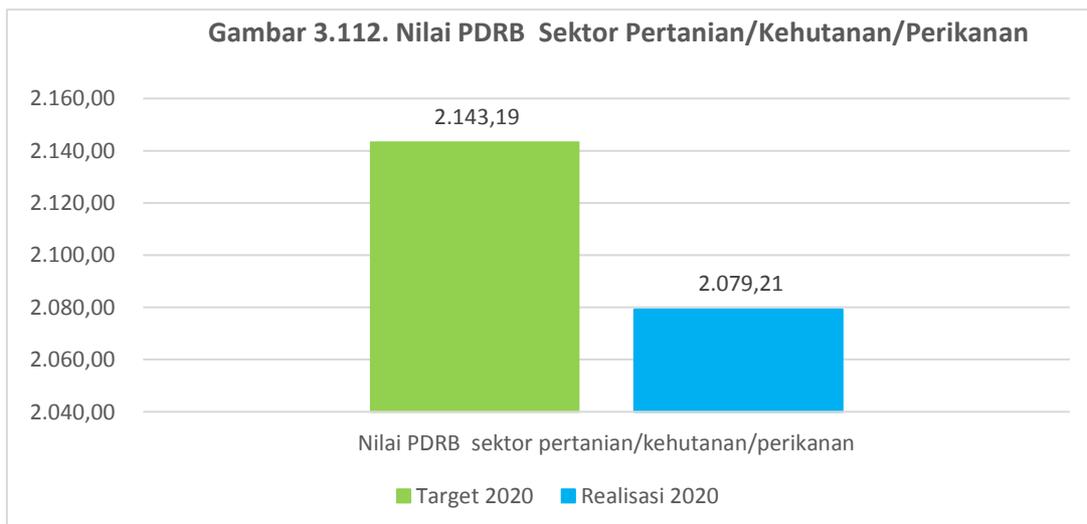
Tujuan 7 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 5 “Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan. Untuk mengukur Tujuan 7 ini terdapat 1 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.30 berikut di bawah ini :

Tabel 3.30. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 7.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Rp. Milyar	1.687,38	1.807,38	1.929,04	2.143,19	2.079,21	97,01	2.275,14	91,39
	Rata-rata Capaian Kinerja							97,01		

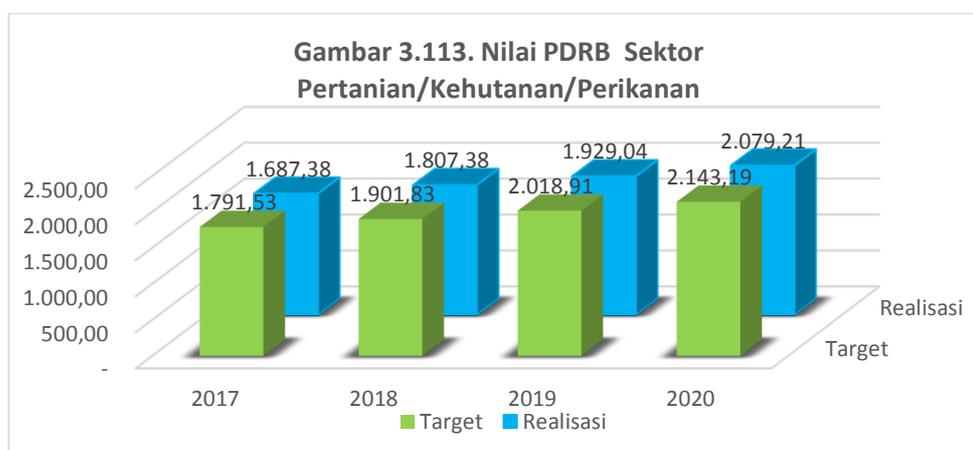
Terlihat dari tabel 3.30 diatas pada Misi Kedua tujuan 7 ini 1 (satu) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Nilai PDRB sektor pertanian/ kehutanan/ perikanan
Target tahun 2020 Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan adalah Rp. 2.143,19 Milyar dan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 2.079,21 Milyar dengan tingkat capaian sebesar 97,01%.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

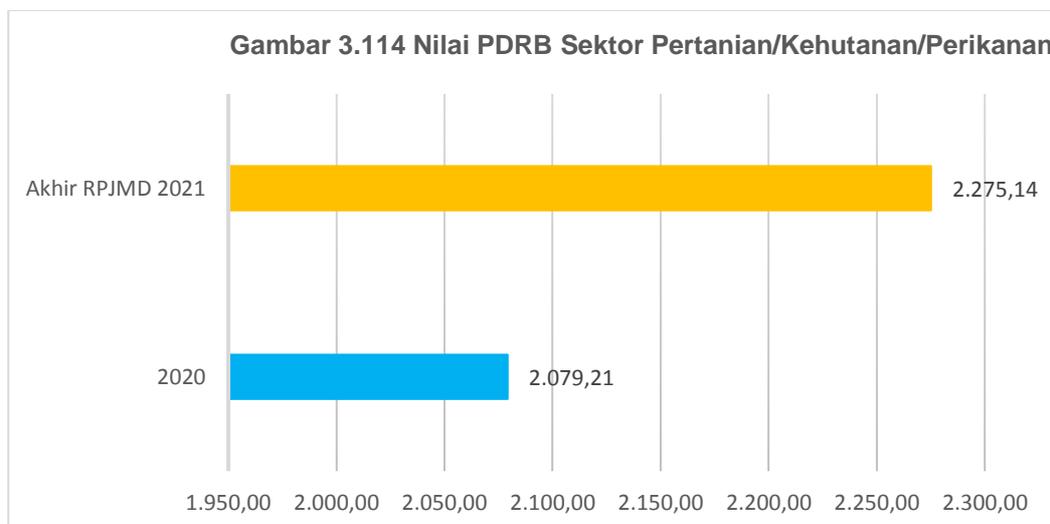
- a. Indikator Kinerja Tujuan : Nilai PDRB sektor pertanian/ kehutanan/ perikanan Realisasi Pada tahun 2019 Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan adalah sebesar Rp. 1.929,04 Milyar, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan meningkat Rp. 2.079,21 Milyar.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Nilai PDRB sektor pertanian/ kehutanan/ perikanan Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 adalah Rp. 2.275,14 Milyar, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020

sebesar Rp. 2.079,21 Milyar dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 91,39%.



Sasaran Strategis 7.1

Meningkatnya pendapatan petani

Sasaran strategis 7.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan. Untuk mengukur misi kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.31 berikut di bawah ini :

Tabel 3.31. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.1

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	343,44	243,77	252,31	210,3	236,43	112,43	223,24	105,91
	Rata-rata Capaian Kinerja							112,43		

Terlihat dari tabel 3.31 diatas pada Tujuan Ketujuh ini sasaran Strategis 7.1 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Tujuan : Pendapatan perkapita petani

Target tahun 2020 Pendapatan perkapita petani adalah Rp. 210,3 juta dan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 236,43 Juta dengan tingkat capaian sebesar 112,43%.

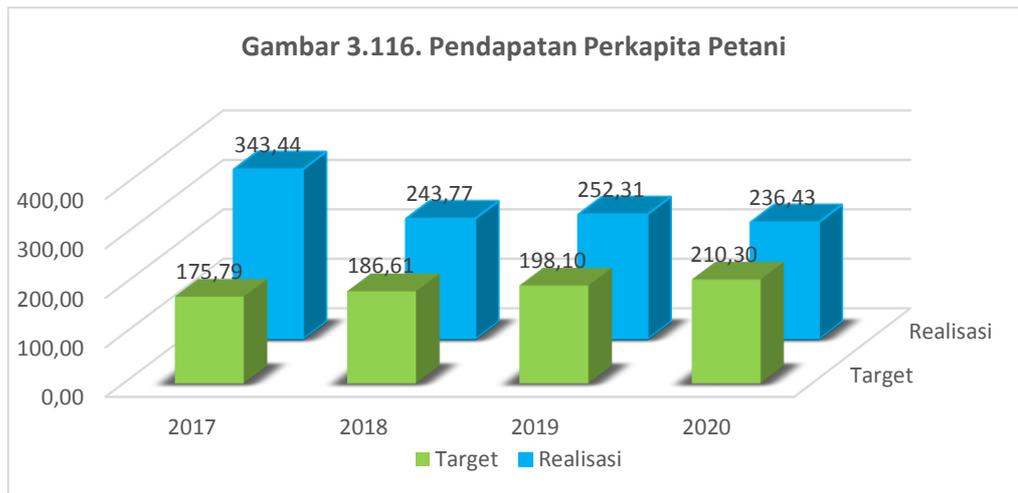


Sasaran pendapatan perkapita Petani dilaksanakan melalui program Peningkatan Kesejahteraan petani. jumlah dari kelompok tani di Kota Dumai yang diberikan bantuan baik sarana produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, lahan pekarangan maupun peternakan dan juga pelatihan/magang. Target yang ingin dicapai Kota Dumai pada tahun 2020 yakni 159 Kelompok. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 sebanyak 173 Kelompok atau tercapai 100 %. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan. Kedua kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis dan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, sasaran ini juga didukung oleh kegiatan pada program lain yang mendukung secara tidak langsung .

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Pendapatan perkapita petani

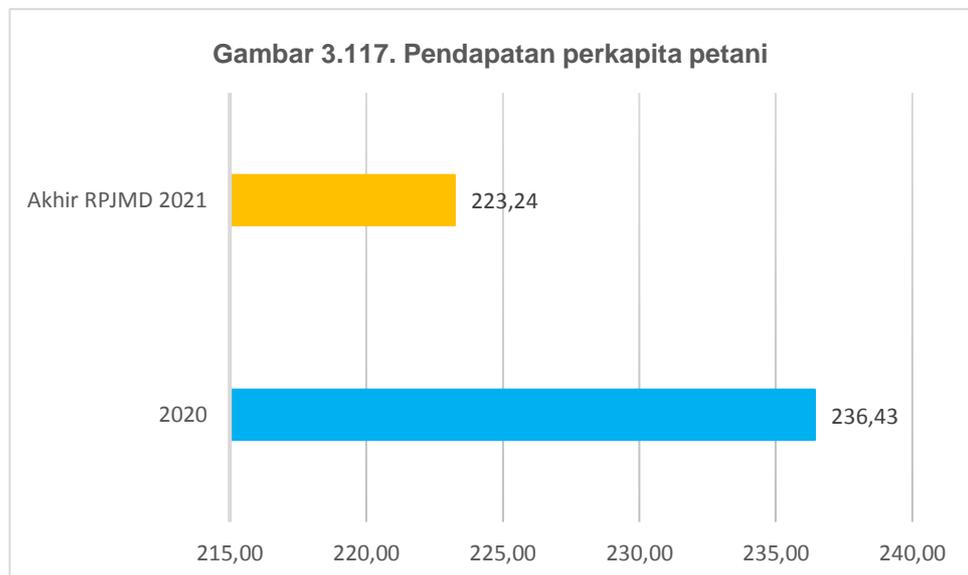
Realisasi Pada tahun 2019 Pendapatan perkapita petani adalah sebesar Rp.252,31 Juta, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Pendapatan perkapita petani menurun sebesar Rp. 236,43 Juta.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Pendapatan perkapita petani

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar Rp. 223,24 Juta, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 236,43 Juta dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 105,91%. Dimana realisasi telah melampaui target jangka menengah akhir tahun 2021.



Sasaran Strategis 7.2

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

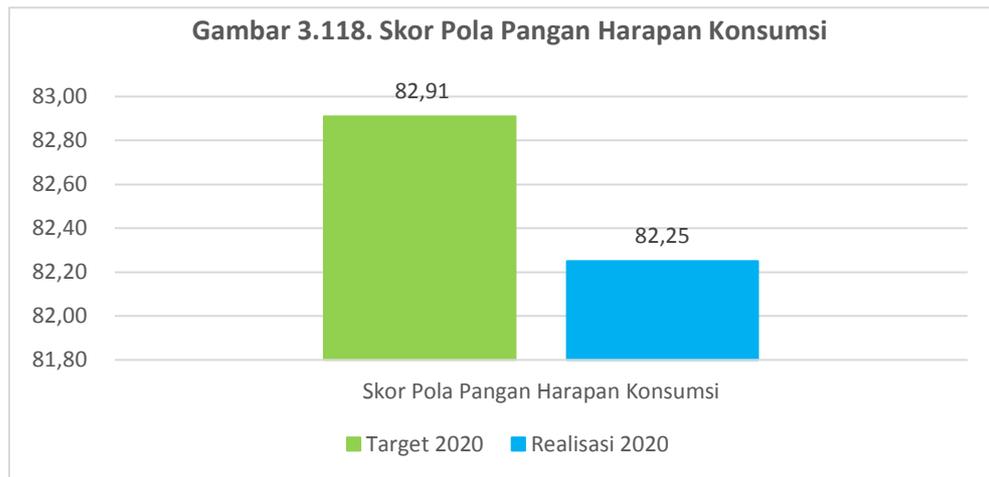
Sasaran strategis 7.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal**”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan. Untuk mengukur sasaran misi kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.32 berikut dibawah ini :

Tabel 3.32. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.2

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	81,70	82,10	82,00	82,91	82,25	99,20	83,74	98,22
	Rata-rata Capaian Kinerja							99,20		

Terlihat dari tabel 3.32 diatas pada Tujuan Ketujuh ini sasaran Strategis 7.2 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
Target tahun 2020 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi adalah 82,91 dan realisasi tahun 2020 sebesar 82,25 dengan tingkat capaian sebesar 99,20.%.

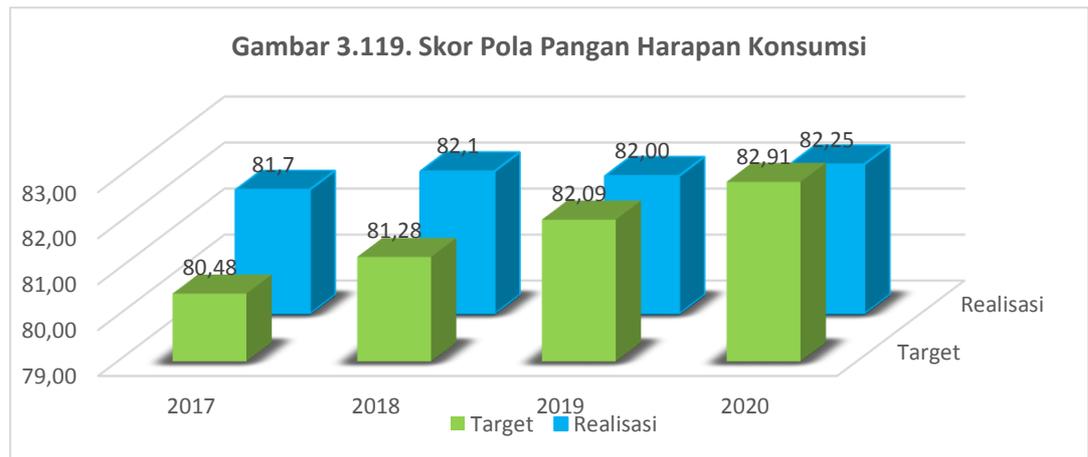


Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat ini dilaksanakan melalui program pembangunan peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan). Sasaran ini mempunyai indikator kinerja yakni ; Angka Kecukupan Protein.

Standar untuk konsumsi gizi dan protein nasional dengan Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gr/kapita/hari. Sedangkan target yang ingin dicapai Kota Dumai pada tahun 2020 yakni Angka Kecukupan Protein sebesar 52 gr/kapita/hari.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan. Keempat kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan, Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

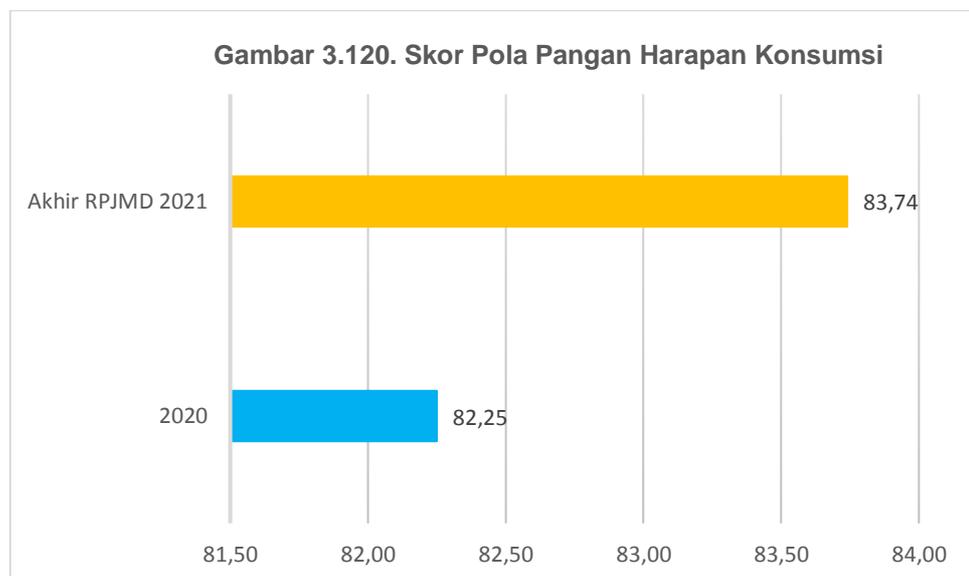
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
 Realisasi Pada tahun 2019 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi adalah sebesar 82,00, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi meningkat sebesar 82,25.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 83,74 realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 82,25% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 98,22%.



Misi 6. Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah

Pencapaian misi keenam ini melalui 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis, 1 (satu) indikator Tujuan, 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 8

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

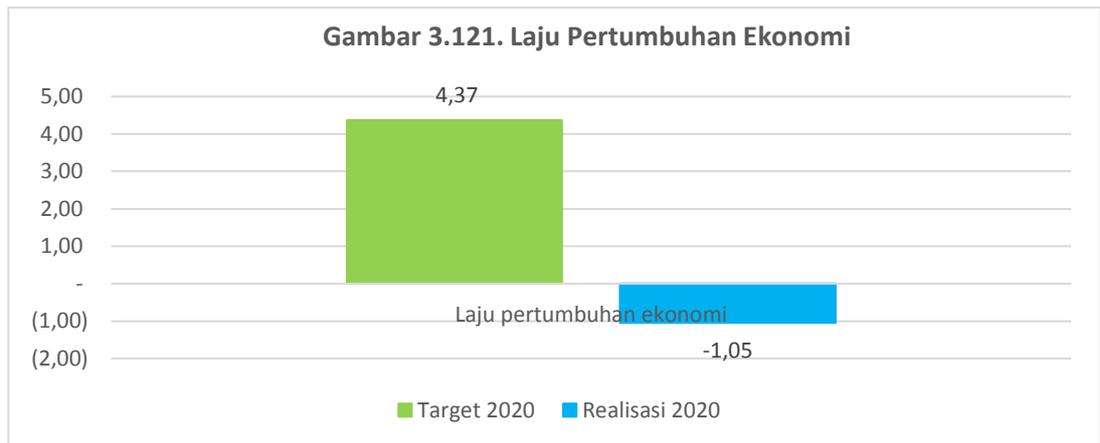
Tujuan 8 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 6 “Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Industri, Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mengukur Tujuan 8 ini terdapat 1 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.33 di bawah ini :

Tabel 3.33. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 8.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,18	4,45	5,61	4,37	-1,05	-24,03	4,42	126,92
	Rata-rata Capaian Kinerja							-24,03		

Terlihat dari tabel 3.33 diatas pada Misi Keenam tujuan 8 ini 1 (satu) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

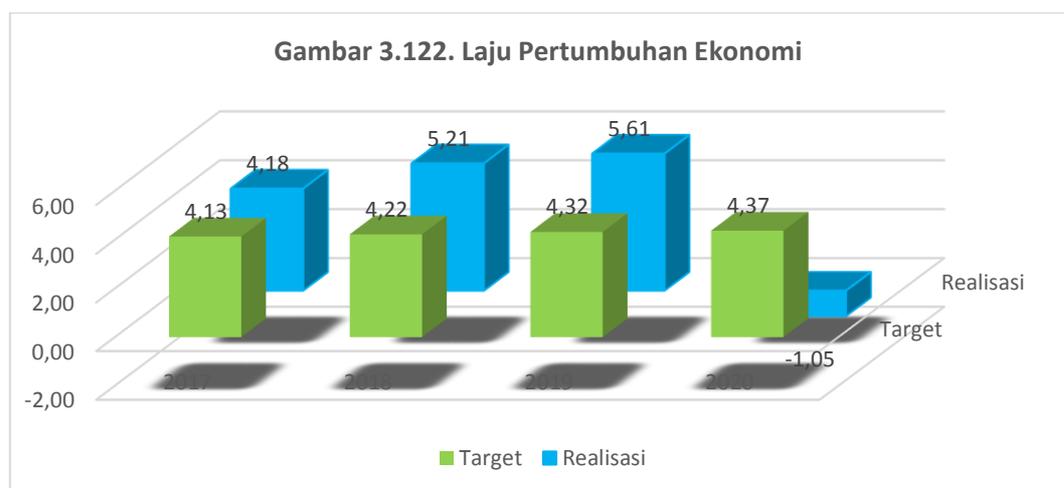
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Laju pertumbuhan ekonomi
Target tahun 2020 Laju pertumbuhan ekonomi adalah 4,37% dan realisasi tahun 2020 sebesar -1,05% dengan tingkat capaian sebesar -24,03%.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Laju pertumbuhan ekonomi

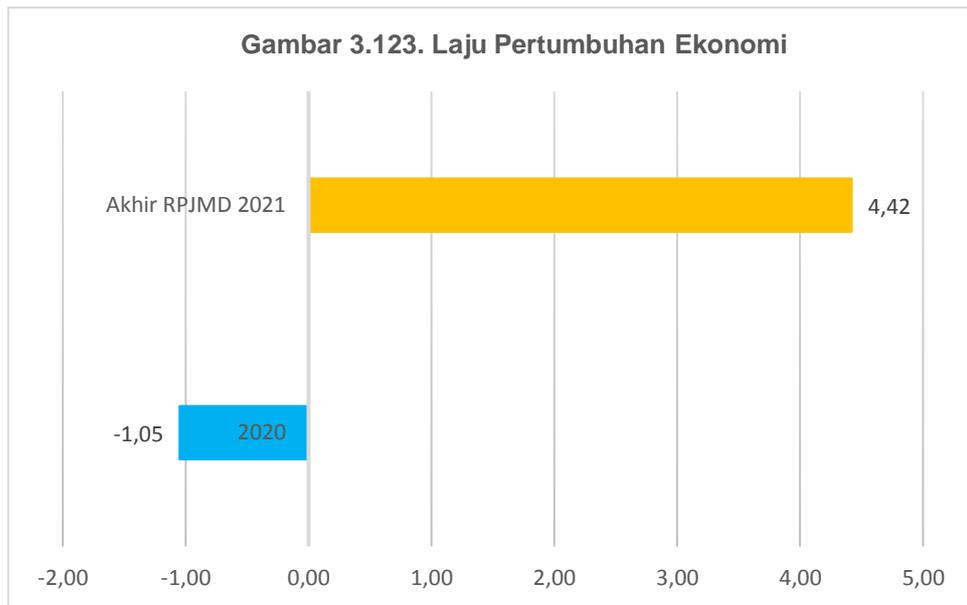
Realisasi Pada tahun 2019 Laju pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,61%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi -1,05%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Laju pertumbuhan ekonomi

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 4,42%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar -1,05% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar -23,76%.



Sasaran Strategis 8.1

Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah

Sasaran strategis 8.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi”**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk mengukur sasaran misi ketiga ini terdapat 2 (Dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.34 berikut dibawah ini :

Tabel 3.34. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8.1

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	20,47	19,84	15,87	21,46	14,48	67,47	21,47	67,44
2	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	53,93	54,75	57,74	54,65	59,97	109,73	54,85	109,33
	Rata-rata Capaian Kinerja							88,60		

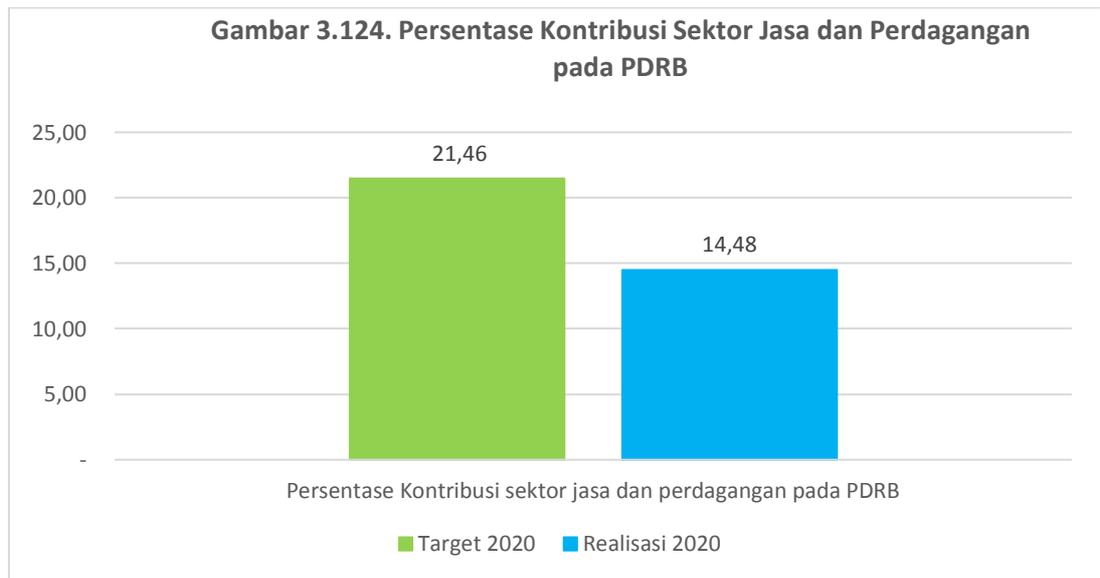
Terlihat dari tabel 3.34 diatas pada Tujuan Kedelapan ini sasaran

Strategis 8.1 terdapat 2 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

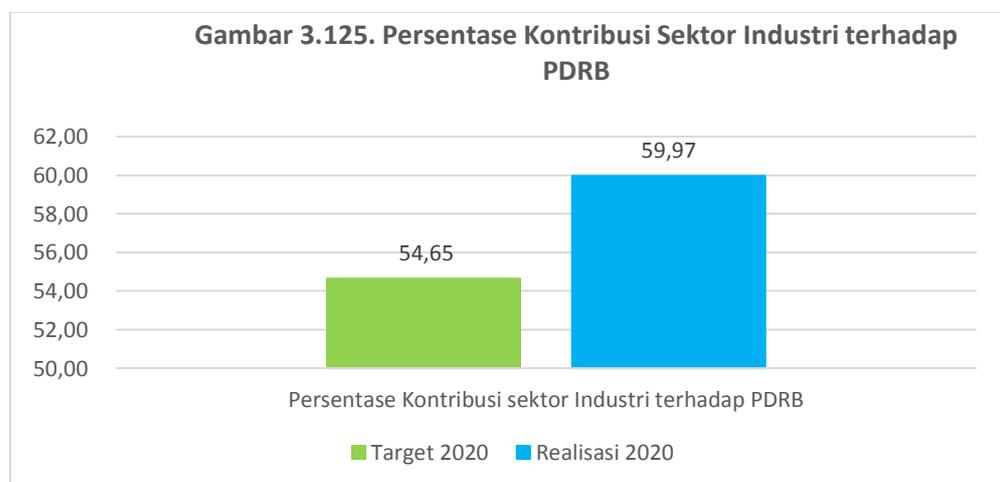
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

- a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB

Target tahun 2020 Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB adalah 21,46% dan realisasi tahun 2020 sebesar 14,48% dengan tingkat capaian sebesar 67,47%.



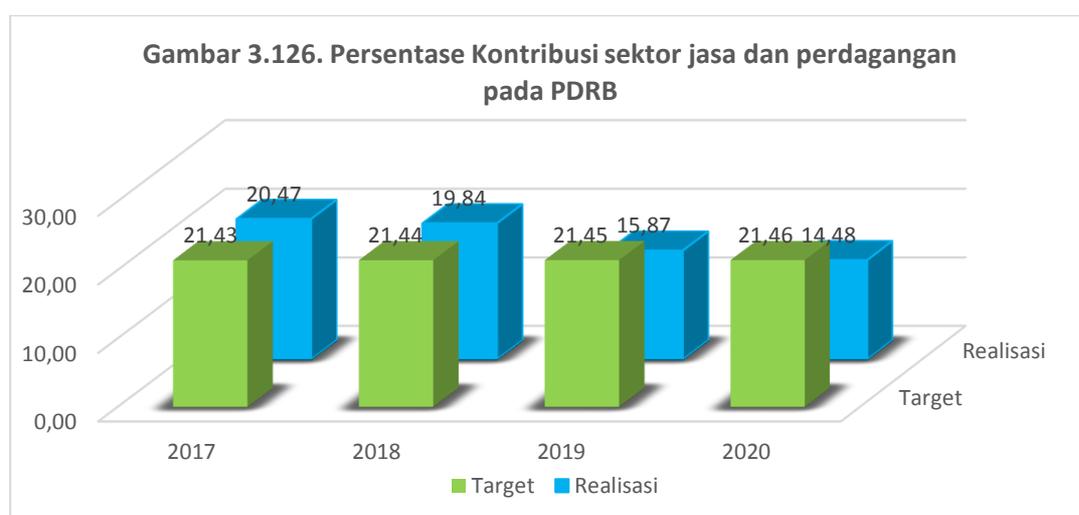
- b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Target tahun 2020 Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB adalah 54,65% dan realisasi tahun 2020 sebesar 59,97% dengan tingkat capaian sebesar 109,73%.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

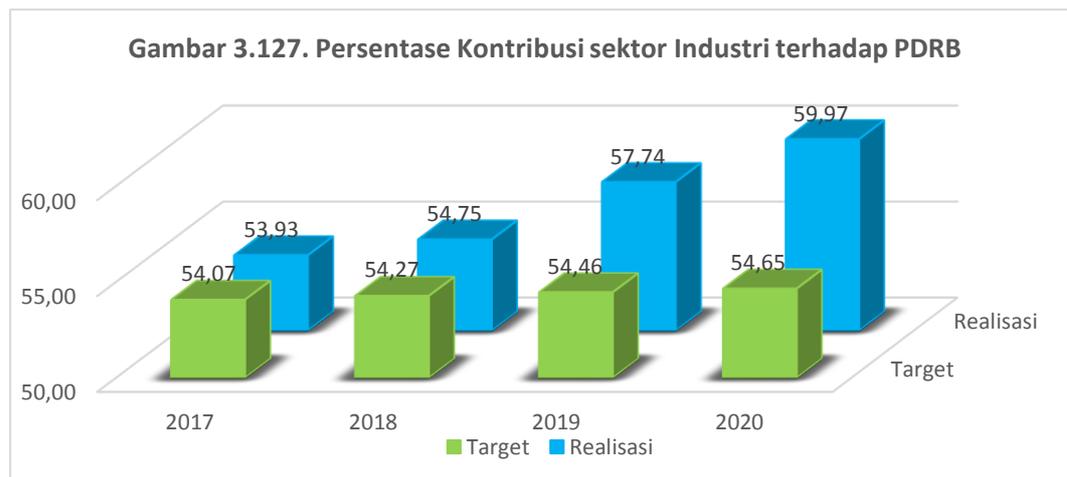
a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB

Realisasi Pada tahun 2019 Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB adalah sebesar 15,87%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB menurun menjadi 14,48%



b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

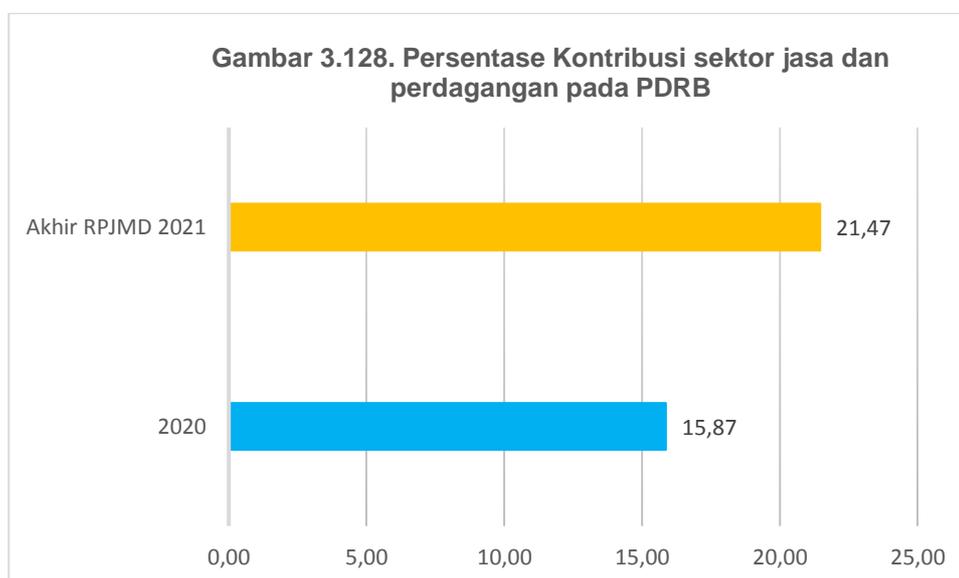
Realisasi Pada tahun 2019 Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB adalah sebesar 57,74%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB meningkat menjadi 59,97%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB

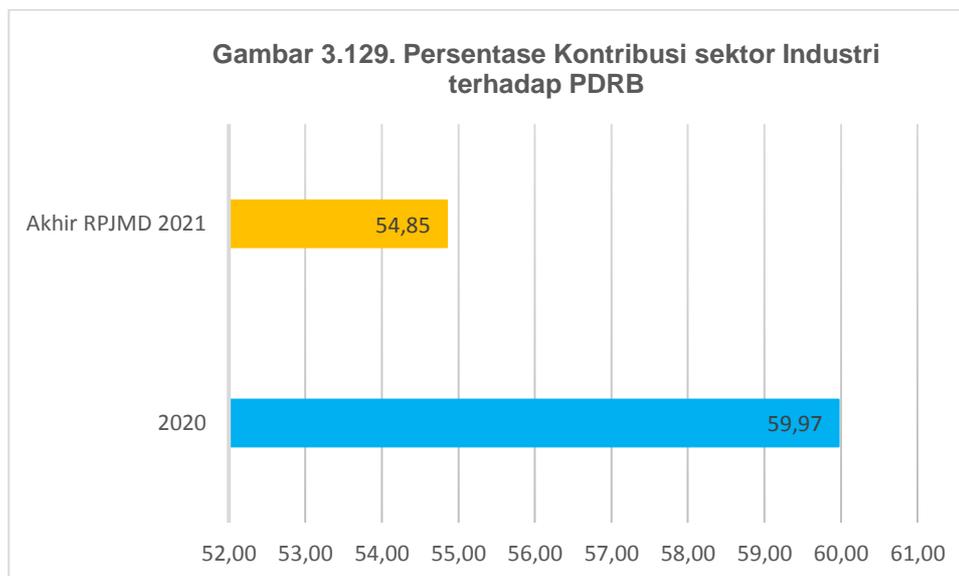
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 21,47%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 15,87% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 73,91%.



b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 54,85%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 59,97%

dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 105,28%.



Sasaran Strategis 8.2

Meningkatnya investasi di Kota Dumai

Sasaran strategis 8.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi”**. Sasaran ini didukung OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.35 berikut di bawah ini :

Tabel 3.35. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8.2

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	4.398.108.780.000	2.006.313.400.000	5.937.390.800.000	6.022.113.766.368	12.961.297.980.000	215,23	6.142.556.041.695	211,01
	Rata-rata Capaian Kinerja							215,23		

Terlihat dari tabel 3.35 diatas pada Tujuan Kedelapan ini sasaran Strategis 8.2 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan

tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Target tahun 2020 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) adalah Rp. 6.022.113.766.368 dan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 12.961.297.980.000 dengan tingkat capaian sebesar 215,23%.



Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya penanaman modal yang ditanamkan suatu perusahaan/investor, untuk pembangunan proyek investasi berdasarkan izin prinsip yang dimilikinya. Nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mengacu pada periode pelaporan. (Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM No. Peraturan BKPM Nomor 14 tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran adalah Meningkatnya investasi di Kota Dumai dengan 1 (satu) indikator kinerja “*Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)*”. Target dari indikator sasaran adalah sebesar Rp. 6.022.113.766.368,- dengan realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar Rp. 12.961.297.980.000,- atau sebesar 215,23%. Selama sampai dengan triwulan IV tahun 2020 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 7.117.105.500.000,- dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 5.844.192.480.000,- mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 118,30% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Realisasi Pada tahun 2019 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) adalah sebesar Rp. 5.937.390.800.000, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) menurun menjadi Rp. 12.961.297.980.000.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 1Rp. 6.142.556.041.695 . realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 12.961.297.980.000, dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 211,01%.



Misi 7. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu

Pencapaian misi ketujuh ini melalui 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis, 1 (satu) indikator Tujuan, 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 9

Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini

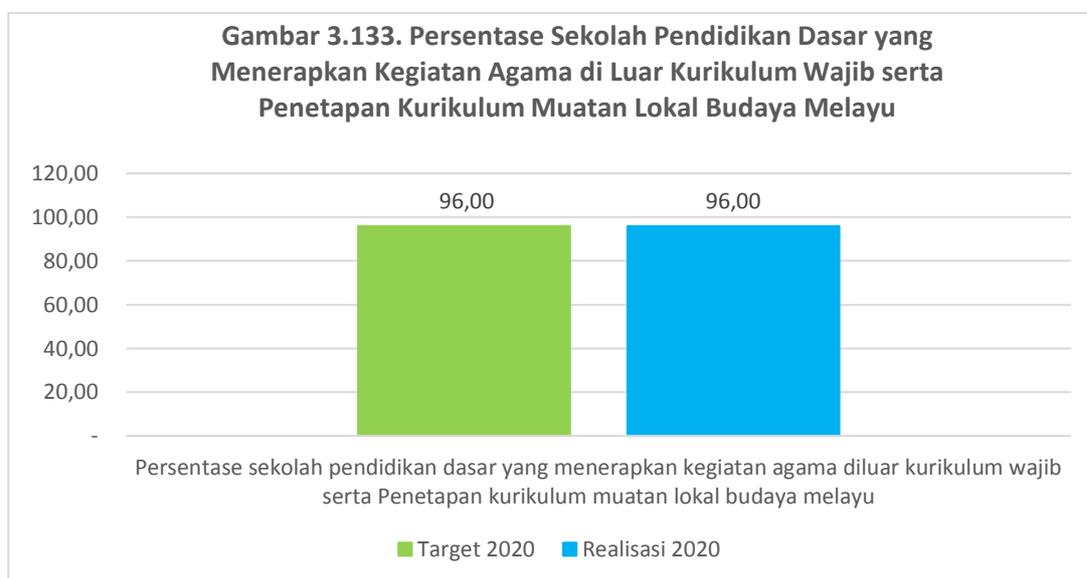
Tujuan 9 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 7 “Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur Tujuan 9 ini terdapat 1 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.36 berikut di bawah ini :

Tabel 3.36. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 9.

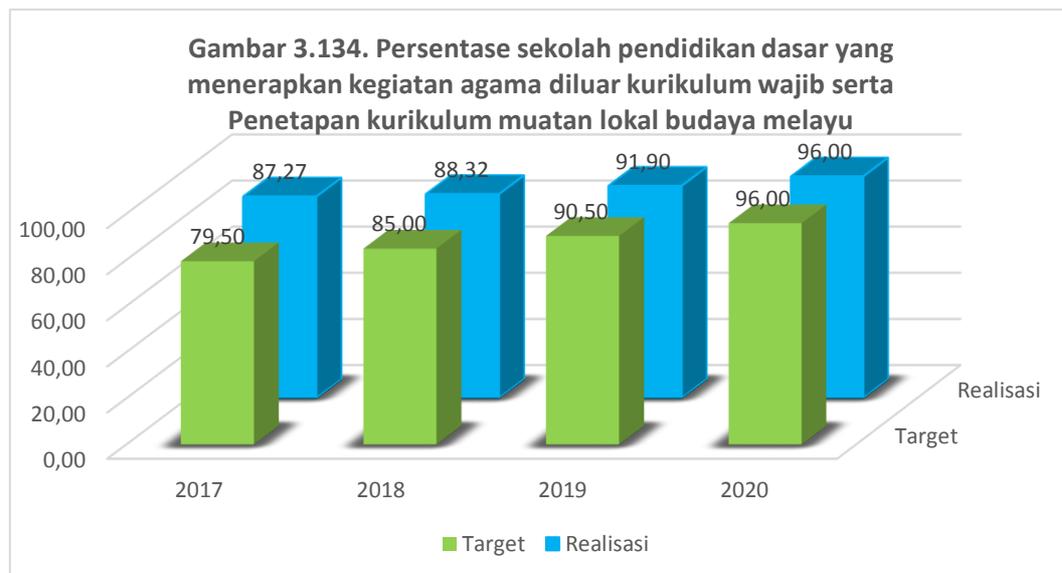
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	87,27	88,32	91,90	96	96	100	100	96
	Rata-rata Capaian Kinerja							100		

Terlihat dari tabel 3.36 diatas pada Misi Ketujuh tujuan 9 ini 1 (satu) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu
Target tahun 2020 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu adalah 96% dan realisasi tahun 2020 sebesar 96% dengan tingkat capaian sebesar 100%.



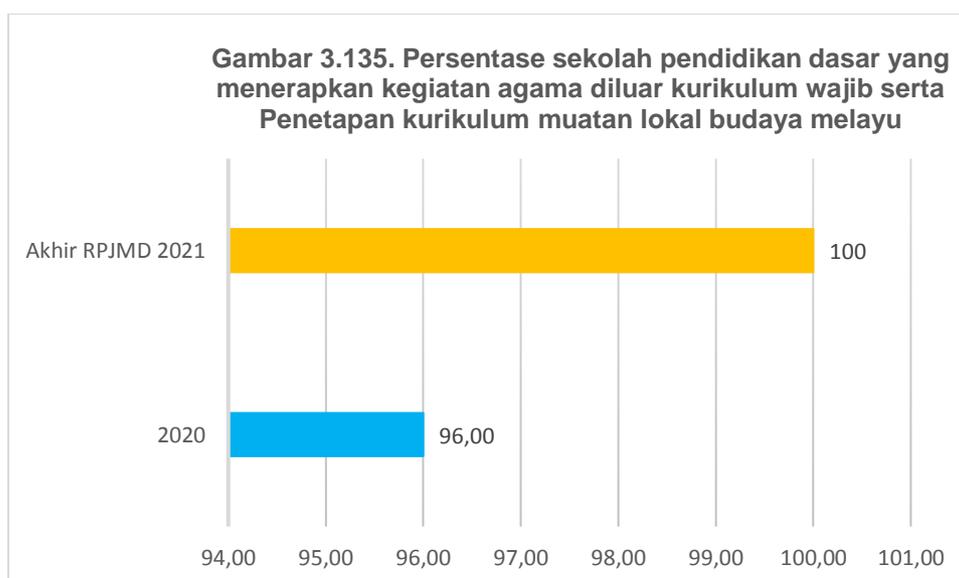
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu
Realisasi Pada tahun 2019 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu adalah sebesar 91,90%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu menurun menjadi 96%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 96% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 96 %.



Sasaran Strategis 9.1

Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar

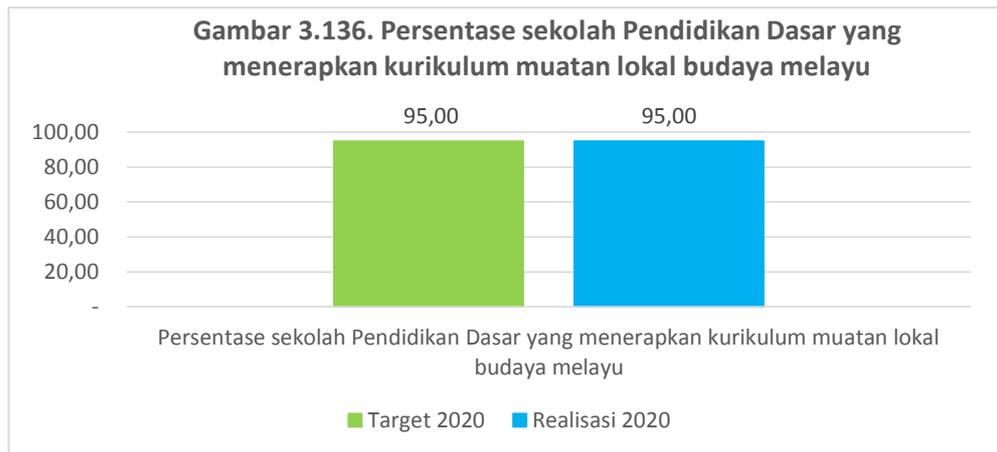
Sasaran strategis 9.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata. Untuk mengukur sasaran 9.1 ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.37 berikut dibawah ini:

Tabel 3.37. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9.1

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	97,14	98,1	100	95	95	100	100	95
	Rata-rata Capaian Kinerja							100		

Terlihat dari tabel 3.37 diatas pada Tujuan Kesembilan ini sasaran Strategis 9.1 terdapat 1 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu
Target tahun 2020 Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu adalah 95% dan realisasi tahun 2020 sebesar 95% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

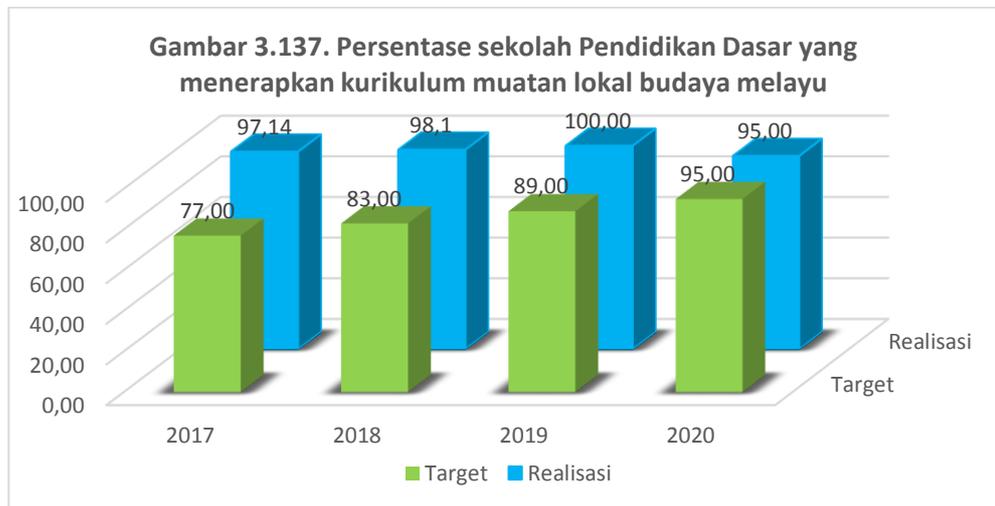


Muatan Lokal Budaya Melayu Riau adalah mata pelajaran yang berisikan budaya Melayu Riau yang meliputi sejarah, sistem nilai, kebiasaan hidup berpola atau tradisi dan karya masyarakat Melayu Riau yang diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Pengembangan budaya melayu di Kota Dumai baik dalam tatanan Pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian. Dalam dunia Pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis perlu implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan, realisasi implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 95% sekolah pada jenjang Pendidikan dasar sudah mengimplementasikan budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar. Pada tahun 2020 realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 95%, hal ini dapat dikatakan baik karena persentasi capaian melebihi target yang ditetapkan.

Program pendukung pada indikator ini adalah program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya, serta dengan keluarnya Peraturan Walikota Dumai nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kota Dumai.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu

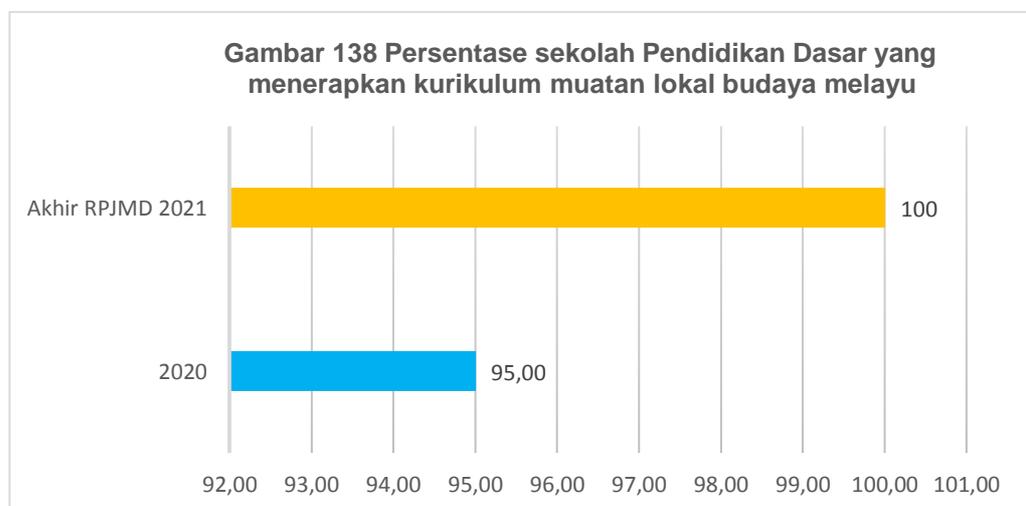
Realisasi Pada tahun 2019 Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu meningkat sebesar 95%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 95% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 95%.



Sasaran Strategis 9.2

Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar

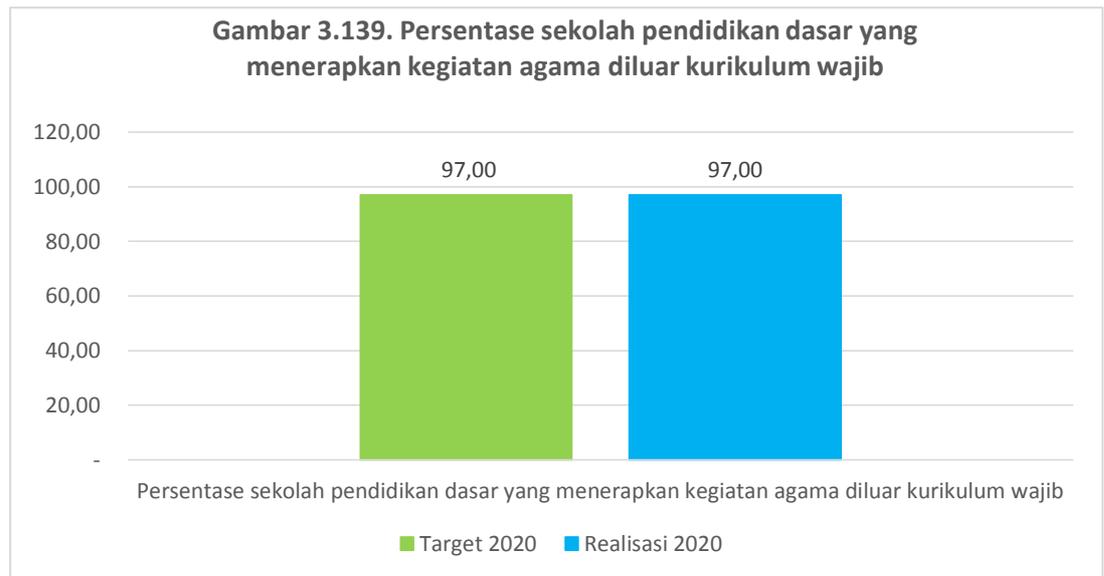
Sasaran strategis 9.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini”. Sasaran ini didukung OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretariat Daerah. Untuk mengukur sasaran misi ke empat ini terdapat 1 (Satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.38 berikut dibawah ini:

Tabel 3.38. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9.2

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	79,20	80,37	83,80	97	97	100	100	97
	Rata-rata Capaian Kinerja							100		

Terlihat dari tabel 3.38 diatas pada Tujuan Kesembilan ini sasaran Strategis 9.2 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib
Target tahun 2020 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib adalah 97% dan realisasi tahun 2020 sebesar 97% dengan tingkat capaian sebesar 100%.



Budaya melayu sangat melekat dengan islam, dalam pembangunan masyarakat harus juga berbasis nilai-nilai agama. Pengembangan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai sejak dini, sekolah juga memegang peranan penting dalam hal ini. Pada tahun 2019 realisasi penerapan nilai-nilai agama dalam Pendidikan dasar adalah sebesar 83,80% sedangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 97% sekolah pada jenjang Pendidikan dasar menerapkan nilai-nilai agama. Realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar 97% yang dapat dikatakan baik. Program pendukung pada indikator ini adalah program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh berbagai pihak baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dan Sekolah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, untuk indikator kinerja yang belum tercapai diantaranya adalah pada urusan kebudayaan. Untuk selanjutnya diharapkan indikator-indikator ini dapat dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib

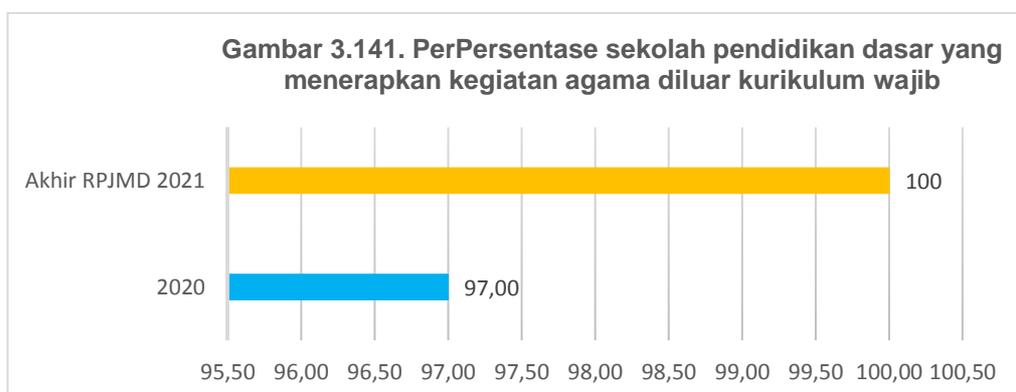
Realisasi Pada tahun 2019 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib adalah sebesar 83,80%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib meningkat menjadi 97%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 97% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2020 terhadap RPJMD 2021** sebesar 97%.



B. 1. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja dari:

1. Pada Sasaran 1.1 : Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:

a. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan dengan target 2020 sebesar 10.015 SR dan realisasi sebesar 6.611 SR dengan tingkat capaian kinerja sebesar 66,01%.

Kegiatan pendukung sasaran ini adalah Pembangunan Infrastruktur Air Bersih, Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum, dan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa. Indikator Kinerja ini belum mencapai target dikarenakan Kapasitas produksi tahun 2020 belum bisa meningkat dikarenakan program NUWSP SPAM Dumai yg dilaksanakan oleh PU Provinsi baru dilaksanakan tahun 2020 dan target penyelesaian di tahun 2021 bulan 6, program SPAM Regional DUROLIS juga masih dalam tahap konstruksi jaringan distribusi utama ke arah Kota Dumai, sedangkan Program KPBU tahap 1B akan dilaksanakan di bulan maret tahun 2021 dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2021,

Upaya perbaikan Kedepannya:

Akan menggesa program KPBU 1 B (akan menambah 200 liter per detik), NUWSP (akan menambah 50 liter per detik) dan SPAM Durolis (akan menambah 150 liter per detik) diharapkan selesai akhir tahun 2021 yang akan diserahkan Kota Dumai pada awal tahun 2022.

2. Pada Sasaran 1.2 : Meningkatnya infrastruktur perkotaan, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:

a. Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan, dengan target 2020 sebesar 3,5% dan realisasi sebesar 0,26% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 7,43%.

Untuk melaksanakan indikator sasaran maka dilaksanakan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini

bertujuan untuk membangun jalan lingkungan dan drainase. (semenisasi dan infrastruktur lainnya). Jumlah Ruas jalan sesuai dengan Keputusan Walikota nomor 613/DPUPR/2017 berjumlah 2569 ruas jalan (gang dan jalan), dan ruas yang memiliki lebar lebih kecil atau sama dengan 3 meter yang diasumsikan merupakan kewenangan OPD DPRKP dan UPT DPUPR berjumlah 1542 ruas jalan (60% dari 2569 ruas jalan). Tahun 2020 jumlah kegiatan infrastruktur yang terlaksana berjumlah 4 paket dengan kondisi refocusing anggaran penanggulangan akibat bencana covid-19, sehingga terjadi pengurangan paket pekerjaan infrastruktur. Realisasi IKU-nya 0,26 % dengan realisasi capaian 7,4 %. Hal ini disebabkan oleh Refocusing Anggaran.

Upaya perbaikan Kedepannya:

Akan berupaya berkoordinasi dengan OPD DPRKP dan UPT DPUPR serta berupaya membangun jalan lingkungan dan drainase. (semenisasi dan infrastruktur lainnya).

- b. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dengan target 2020 sebesar 58,26% dan realisasi sebesar 33,48% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 57,47%.

Refocusing Anggaran pada Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini bertujuan untuk membangun jalan lingkungan dan drainase. (semenisasi dan infrastruktur lainnya).

Upaya perbaikan Kedepannya:

Akan berupaya meningkatkan pembangunan jalan dan drainase pada tahun kedepannya dengan penambahan anggaran yang optimal.

- c. Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat, dengan target 2020 sebesar 2,85% dan realisasi sebesar 0% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0%.

Untuk mencapai indikator sasaran direncanakan untuk pembangunan sanitasi selama 5 (tahun) berjumlah 40 unit dalam bentuk IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++. Pada Tahun 2020 tidak ada kegiatan

pembangunan IPAL, Tangki septik komunal dan MCK ++, Dinas Perkim membangun Tangki Septik Individu sebanyak 483 unit dengan penerima manfaat 1954 jiwa sehingga realisasi IKU sebesar 0 %.

Upaya perbaikan Kedepannya:

IPAL komunal merupakan skala kota yang merupakan kewenangan PUPR, sedangkan IPAL individual merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman. Dan kedepannya pada tahun Depan berupaya untuk bersinergis dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Pada Sasaran 2.3 : Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:

- a. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs dengan target 2020 sebesar 0,3701389 dan realisasi sebesar 0,207378 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 56,03%.

Formula dari indikator ini sebanyak 38 sekolah Tingkat SMP dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun 18.324 jiwa, penyebab tidak tercapainya Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs adalah banyaknya penduduk pendatang dari luar kota Dumai dan keterbatasan ketersediaan sekolah.

Upaya perbaikan Kedepannya:

maka dipandang perlu untuk menambah bangunan baru gedung sekolah tingkat SMP.

4. Pada Sasaran 3.1 : Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:

- a. Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan), dengan target 2020 sebesar 100% dan realisasi sebesar 48,24% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 48,24%.

Rendahnya capaian Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan) dikarenakan beberapa komponen penilaian berupa masih ada sebanyak 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian

kinerjanya kurang yakni prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko dan angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk. Ke 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya kurang tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai mengingat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta tingginya mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota. Kondisi tersebut berpengaruh pada penyebaran penyakit HIV dan DBD yang berdampak pada tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan tersebut.

Upaya perbaikan Kedepannya:

Akan berupaya menekan pravelensi penderita HIV dengan melakukan deteksi dini dan melakukan foging serta melakukan sosialisasi 3M untuk menekan angka kesakitan DBD.

5. Pada Sasaran 3.2 : Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:

- a. GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit, dengan target 2020 sebesar 31% dan realisasi sebesar 44,86% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 55,29%.

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksannya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Dimana angka kematian umum untuk setiap penderita keluar Rumah sakit Umum Daerah Kota Dumai sebesar 44,86 0/00 dengan capaian 144,71% dari indeks perencanaan sebesar 31 0/00, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien yang keluar Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai setiap 1000 pasien melebihi ambang batas yg RSUD tetapkan. Tapi apabila dilihat dari ketentuna DEPKES 2005 kasus tersebut masih dapat di tolerasi dengan standar ideal GDR adalah kurang dari 45 kasus dari 1000 pasien keluar.

Upaya perbaikan Kedepannya:

Untuk menurunkan Angka Kematian Umum untuk setiap penderita keluar Rumah sakit Umum Daerah Kota Dumai akan dilakukan peningkatan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di kota Dumai kedepannya.

6. Pada Sasaran 4.1 : Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahragarakat, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:

- a. Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA), dengan target 2020 sebesar Peringkat 3 dan realisasi sebesar 0 dengan tingkat capaian kinerja 0%.

Refocusing Anggaran pada Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga menjadi Rp.0,- dan tidak diperbolehkan berkumpul dalam jumlah besar.

Upaya perbaikan Kedepannya:

Akan terus melakukan pembinaan kepada masyarakat olahraga.

7. Pada Tujuan 8: M, eningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:

- a. Laju Pertumbuhan ekonomi, dengan target 2020 sebesar 4,37% dan realisasi sebesar -1,05% dengan tingkat capaian -24,03%.

Adapun dengan terjadinya pandemi covid-19 dan diberlakukan pembatasan sosial skala besar berimbas terhadap perekonomian daerah.

Upaya perbaikan Kedepannya:

Berupauntuk mengurangi dampak covid-19 terhadap perekonomian, penanganan krisis kesehatan, pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respon atas menurunnya aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi khususnya sektor informal atau UMKM.

8. Pada Sasaran 8.1 : Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:

- b. Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB, dengan target 2020 sebesar 21,46 dan realisasi sebesar 14,48 dengan tingkat capaian 67,47%.

Adapun dengan terjadinya pandemi covid-19 dan diberlakukan pembatasan sosial skala besar berimbas terhadap sektor perdagangan.

Upaya perbaikan Kedepannya:

Berupaya untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

B. 2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.39. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran		Capaian Kinerja %	Capaian Keuangan %	Efisiensi %
1		2	3	4
Visi Terwujudnya masyarakat dumai yang makmur dan madani pada Tahun 2021				
Misi 1 Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar				
Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	66,01	90,39	9,61
Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	113,93	96,46	3,54
Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	100,00	99,70	0,30
Misi 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing				
Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	100,00	97,85	2,15

Sasaran		Capaian Kinerja %	Capaian Keuangan %	Efisiensi %
1		2	3	4
Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	76,20	95,68	4,32
Sasaran 3.1	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	82,73	91,23	8,77
Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	74,39	91,26	8,74
Sasaran 4.1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	0,00	99,79	0,21
Misi 3 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan				
Sasaran 5.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	105,96	33,26	66,74
Sasaran 5.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	128,51	86,21	13,79
Sasaran 5.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	95,17	97,69	2,31
Sasaran 5.4	Meningkatnya lapangan kerja	89,62	96,25	3,75
Misi 4 Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan				
Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	100,00	91,10	8,90
Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	100,00	90,03	9,97
Misi 5 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan				
Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	112,43	97,49	2,51
Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	99,20	97,82	2,18

Sasaran		Capaian Kinerja %	Capaian Keuangan %	Efisiensi %
1		2	3	4
Misi 6 Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah				
Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	88,60	90,24	9,76
Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	215,23	98,13	1,87
Misi 7 Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu				
Sasaran 9.1.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	100,00	99,94	0,06
Sasaran 9.2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	100,00	92,32	7,68

Dari tabel 3.39 dapat dilihat efisiensi penggunaan sumberdaya yang besar pada :

- 1) Sasaran 1.2 Meningkatkan infrastruktur perkotaan dengan penghematan 3,54% mampu mencapai capaian kinerja sebesar 113,93%
- 2) Sasaran 5.1 Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat dengan penghematan sebesar 66,74% dengan capaian kinerja 105,96%
- 3) Sasaran 5.2 Menurunnya persentase penduduk miskin dengan penghematan sebesar 13,79% dengan capaian kinerja 128,51%.
- 4) Sasaran 7.1 Meningkatkan pendapatan petani dengan penghematan 2,51% mampu mencapai capaian kinerja sebesar 112,43%
- 5) Sasaran 8.2 Meningkatkan investasi di Kota Dumai dengan penghematan 1,87% mampu mencapai capaian kinerja sebesar 215,23%

Tabel 3.40. Efisiensi Anggaran Tahun 2020 Pemerintah Kota Dumai

TABEL EFISIENSI ANGGARAN

	TOTAL EFISIENSI HASIL ELIMINASI PROGRAM				
PERSENTASE EFISIENSI ANGGAR	-----	X			100%
	TOTAL ANGGARAN BELANJA NON PEGAWAI				

ISILAH KOLOM DI BAWAH INI

1.	TOTAL EFISIENSI HASIL ELIMINASI PROGRAM	=	Rp59.220.232.434	
2.	TOTAL ANGGARAN BELANJA NON PEGAWAI	=	Rp694.874.143.766	Isikan hanya angka saja
3.	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	=	9%	

*Mohon untuk mengisi sheet Rincian Eliminasi Program terlebih dahulu

** Mohon hanya mengisi data yang valid dan memiliki dokumen pendukung

3.41 Tabel Eliminasi Program

No	Nama Program	Nilai Efisiensi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.694.018.976,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.295.176.814,49
3	Program peningkatan disiplin aparatur	28.015.550,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	295.940.943,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99.842.830,00
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	42.758.249,00
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.313.708.646,66
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	414.175.487,00
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	27.907.317,00
10	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	36.037.000.000,00
11	Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa	30.150.000,00
12	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	4.116.000,00
13	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	272.606.970,00
14	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.705.383.523,00
15	Program Pengawasan Obat dan Makanan	26.497.500,00
16	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	52.071.000,00
17	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	96.163.880,00
18	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	26.458.175,00
19	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	561.676.878,00
20	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.836.246.955,00
21	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	392.640.864,00
22	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1.301.000,00
23	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	17.200.000,00

No	Nama Program	Nilai Efisiensi
24	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	67.360.000,00
25	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1.578.294.429,00
26	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	74.400.615,00
27	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di RSUD	391.158.943,00
28	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	(20.003.979.068,52)
29	Program pembangunan jalan dan jembatan	1.198.447.697,95
30	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.075.875.384,45
31	Program pembangunan turap/talud/bronjong	93.874.127,00
32	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	150.394.554,88
33	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	368.616.271,50
34	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1.692.046.911,88
35	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	0,00
36	Program Pengendalian Banjir	383.733.950,00
37	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	249.466.776,00
38	Program Perencanaan Tata Ruang	86.684.325,00
39	Program Pemanfaatan Ruang	56.838.000,00
40	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	47.535.000,00
41	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	3.462.316.669,00
42	Program Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata Air Daerah Imbuhan Air Tanah	19.791.700,00
43	Program Pengembangan Perumahan	45.006.949,00
44	Program Lingkungan Sehat Perumahan	331.397.449,00
45	Program pengelolaan areal pemakaman	77.432.710,00
46	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	707.836.715,00
47	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.163.603.741,00
48	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	0,00
49	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	2.227.000,00
50	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	318.236.950,00
51	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	0,00
52	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	2.986.551.905,00
53	Program pengembangan wawasan kebangsaan	190.363.841,00
54	Program pendidikan politik masyarakat	46.399.000,00
55	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	75.776.051,00
56	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	187.729.172,00
57	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	13.000,00
58	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	0,00
59	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	5.961.600,00
60	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	780.000,00
61	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16.178.444,00

No	Nama Program	Nilai Efisiensi
62	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	8.302.195,00
63	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	935.000,00
64	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	31.780.558,00
65	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	13.065.550,00
66	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	30.232.998,00
67	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	30.543.171,00
68	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	897.234,00
69	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	19.363,00
70	Program peningkatan pengendalian polusi	8.389.446,00
71	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	7.799.900,00
72	Program Penataan Administrasi Kependudukan	28.840.158,00
73	Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
74	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	31.081.934,00
75	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	10.852.383,00
76	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	81.206.440,00
77	Program Keluarga Berencana	15.282.024,00
78	Program pelayanan kontrasepsi	18.582.043,00
79	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	18.431.127,00
80	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	70.000,00
81	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1.552.019,00
82	Program Pengendalian Penduduk	7.173.460,00
83	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	205.474.516,34
84	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100.840.000,00
85	Program peningkatan pelayanan angkutan	15.550,00
86	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	16.322.000,00
87	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	815.000,00
88	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	7.529.972,00
89	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	0,00
90	Program kerjasama informasi dengan mass media	55.821.000,00
91	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	1.500.000,00
92	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	2.067.750,00
93	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	420.396.509,00
94	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	15.072.590,00
95	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	60.307.240,00

No	Nama Program	Nilai Efisiensi
96	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	897.096,00
97	Program peningkatan peran serta kepemudaan	470.000,00
98	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	4.850.000,00
99	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	7.930.000,00
100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	0,00
101	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.500.000,00
102	Program Pengembangan Nilai Budaya	14.404.486,00
103	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	25.188.651,00
104	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	14.250.000,00
105	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	180.760,00
106	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	1.530.000,00
107	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1.499.500,00
108	Program pengembangan budidaya perikanan	48.142.606,00
109	Program pengembangan perikanan tangkap	0,00
110	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	0,00
111	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	0,00
112	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	558.482.967,52
113	Program Pengembangan Kemitraan	308.000,00
114	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	19.064.750,00
115	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	42.906.010,00
116	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	36.696.797,00
117	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	10.207.750,00
118	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	2.860.000,00
119	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	13.200.000,00
120	Program peningkatan produksi hasil peternakan	4.100.000,00
121	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.225.750,00
122	Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan	175.961.310,00
123	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1.887.763.034,00
124	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	24.477.000,00
125	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	0,00
126	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	4.747.047,00
127	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	0,00
128	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	0,00
129	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	99.265.000,00
130	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	379.632.000,00
131	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	160.057.733,00
132	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	0,00
133	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	19.244.759,00
134	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	20.202.400,00
135	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	496.120.000,00

No	Nama Program	Nilai Efisiensi
136	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai	36.929.834,00
137	Program Reformasi Birokrasi	0,00
138	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	830.809.549,00
139	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	125.328.634,00
140	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	3.018.000,00
141	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	12.140.046,00
142	Program Pengembangan data/informasi	50.417.250,00
143	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	420.289.736,00
144	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	3.060.020,00
145	Program Kerjasama Pembangunan	31.013.473,00
146	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	724.225,00
147	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	43.945.442,00
148	Program perencanaan pembangunan daerah	350.725.900,00
149	Program perencanaan pembangunan ekonomi	44.977.562,00
150	Program perencanaan sosial dan budaya	7.462.200,00
151	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	904.500.615,00
152	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	619.917.040,00
		59.220.232.434,15

B. 3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2020

1. Pada Sasaran 1.1 : Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:
 - a. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan dengan target 2020 sebesar 10.015 SR dan realisasi sebesar 6.611 SR dengan tingkat capaian kinerja sebesar 66,01%. Indikator sasaran ini didukung oleh:
 - 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan pagu Rp. 17.582.788.530 dan realisasi Rp. 15.892.541.618 atau sebesar 90,39%.
2. Pada Sasaran 1.2 : Meningkatnya infrastruktur perkotaan, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:
 - a. Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan, dengan target 2020 sebesar 3,5% dan realisasi sebesar 0,26% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 7,43%. Didukung oleh :

- 1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan pagu Rp. 866.116.600 dan realisasi sebesar Rp. 808.823.000 atau 93,39%
 - b. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dengan target 2020 sebesar 58,26% dan realisasi sebesar 33,48% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 57,47%. didukung oleh :
 - 1) Program pembangunan jalan dan jembatan dengan pagu Rp. 64.059.968.911,12 Program Pengembangan Perumahan dengan pagu Rp. 158.304.000 dan realisasi sebesar Rp. 62.947.465.833 atau sebesar 98,26%.
 - c. Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat, dengan target 2020 sebesar 2,85% dan realisasi sebesar 0% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0%. Didukung oleh :
 - 1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan pagu Rp. 866.116.600 dan realisasi sebesar Rp. 808.823.000 atau 93,39%
3. Pada Sasaran 2.3 : Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:
- a. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs dengan target 2020 sebesar 0,3701389 dan realisasi sebesar 0,207378 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 56,03%. Didukung oleh:
 - 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan pagu Rp. 53.248.830.275 dan realisasi Rp. 50.949.162.728 atau 95,68%.
4. Pada Sasaran 3.1 : Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:
- a. Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan), dengan target 2020 sebesar 100% dan realisasi sebesar 48,24% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 48,24%. Didukung oleh:
 - 1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan pagu Rp. 1.053.615.000 dan realisasi Rp. 491.938.122 atau sebesar 49,69%

5. Pada Sasaran 3.2 : Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:
 - a. GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit, dengan target 2020 sebesar 31% dan realisasi sebesar 44,86% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 55,29%. Didukung oleh:
 - 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu Rp. 38.144.662.280 dan realisasi Rp. 32.524.526.278 atau 85,27%.
6. Pada Sasaran 4.1 : Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahragarakat, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:
 - a. Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA), dengan target 2020 sebesar Peringkat 3 dan realisasi sebesar 0 dengan tingkat capaian kinerja 0%. Didukung oleh:
 - 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan Pagu Rp. 0 dan realisasi Rp. 0 atau 0%.
7. Pada Sasaran 8.1 : Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah, dengan Indikator Kinerja Utama antara lain:
 - a. Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB, dengan target 2020 sebesar 21,46 dan realisasi sebesar 14,48 dengan tingkat capaian kinerja 67,47%. Didukung oleh:
 - 1) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan pagu Rp. 87.524.000 dan realisasi Rp. 86.507.384 atau sebesar 98,84%

C. Realisasi Anggaran

**Tabel 3.42. Realisasi Anggaran sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja 2020
Pemerintah Kota Dumai**

Tujuan/Sasaran	Program	Anggaran			
		Pagu Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan %	
1	2	3	4	5 =4/3	
Misi 1 Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar					
Tujuan 1	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar				
Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	17.582.788.530	15.892.541.618	90,39
		Jumlah	17.582.788.530	15.892.541.618	90,39
Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	158.304.000	119.747.000	75,64
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	866.116.600	808.823.000	93,39
		Program pembangunan jalan dan jembatan	64.059.968.911,00	62.947.465.833	98,26
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	7.477.352.550	6.401.477.166	85,61
		Program pengendalian banjir	3.698.425.240	3.314.691.290	89,62
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2.162.325.750	1.975.573.424	91,36
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	11.446.785.175	11.241.310.659	98,20
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	525.000.000	424.160.000	80,79

Tujuan/Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan %
1		2	3	4	5 =4/3
		Pogram peningkatan pelayanan angkutan	939.277.550	939.262.000	100,00
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.817.900.000	1.801.578.000	99,10
		Program pengelolaan areal pemakaman	276.807.250	204.429.260	73,85
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.934.350.400	2.926.550.500	99,73
		Program Perencanaan Tata Ruang	700.000.000	614.470.817	87,78
		Program Pemanfaatan Ruang	258.200.000	201.362.000	77,99
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	120.000.000	72.465.000	60,39
		Jumlah	97.440.813.426	93.993.365.949	96,46
Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.670.248.900	5.661.603.200	99,85
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	15.800.000	15.780.637	99,88
		Program peningkatan pengendalian polusi	53.350.000	44.960.554	84,27
		Jumlah	5.739.398.900	5.722.344.391	99,70
Misi 2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing					
Tujuan 2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan				
Sasaran 2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.410.966.350	1.368.208.101	96,97
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.237.066.630	1.209.159.313,00	97,74
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	105.427.700	101.311.700	96,10
		Jumlah	2.753.460.680	2.678.679.114	97,28
Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar				

Tujuan/Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan %
1	2	3	4	5 =4/3	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	18.345.740.360	17.951.539.873	97,85
		Jumlah	18.345.740.360	17.951.539.873	97,85
Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	53.248.830.275	50.949.162.728,00	95,68
		Jumlah	53.248.830.275	50.949.162.728	95,68
Tujuan 3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
Sasaran 3. 1	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.009.131.950	957.060.950	94,84
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	62.236.000	60.935.000	97,91
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	46.535.000	29.335.000	63,04
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	14.674.932.466	13.160.546.511	89,68
		Program obat dan perbekalan kesehatan	10.571.820.995	10.299.214.025	97,42
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	265.062.500	238.565.000	90,00
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	492.694.500	466.236.325	94,63
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.053.615.000	491.938.122	46,69
		Jumlah	28.176.028.411	25.703.830.933	91,23
Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	38.144.662.280	32.524.526.278	85,27
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.559.147.500	3.473.899.979	97,60
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	356.361.000	34.500.000	9,68
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	44.811.806.169	42.762.511.740	95,43

Tujuan/Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan %
1		2	3	4	5 =4/3
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	471.110.914	396.710.299	84,21
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	10.327.904.600	9.946.720.657	96,31
		Jumlah	97.670.992.463	89.138.868.953	91,26
Tujuan 4	Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga				
Sasaran 4.1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	219.810.000	219.340.000	99,79
		Jumlah	219.810.000	219.340.000	99,79
Misi 3 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan					
Tujuan 5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Sasaran 5.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	629.928.000	209.531.491	33,26
		Jumlah	629.928.000	209.531.491	33,26
Sasaran 5.2	Menurunnya persentase penduduk miskin				
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	199.380.000	199.367.000	99,99
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	673.821.000	598044949	88,75
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	839.783.750	660.365.004	78,64
		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	138.211.000	138.211.000	100,00

Tujuan/Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan %
1		2	3	4	5 =4/3
		Jumlah	1.851.195.750	1.595.987.953	86,21
Sasaran 5.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Program Keluarga Berencana	1.287.693.627	1.272.411.603	98,81
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	646.294.298	630.115.854	97,50
		Program pelayanan kontrasepsi	165.580.500	146.998.457	88,78
		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	73.697.200	73.627.200	99,91
		Jumlah	2.173.265.625	2.123.153.114	97,69
Sasaran 5.4	Meningkatnya lapangan kerja	program peningkatan kesempatan kerja	150.150.000	144.188.400	96,03
		Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	29.448.500	28.668.500	97,35
		Jumlah	179.598.500	172.856.900	96,25
Misi 4 Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan					
Tujuan 6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik				
Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	122.060.000	121.329.730	99,40
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	340.810.000	307.202.760	90,14
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	195.108.000	163.327.442	83,71
		Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	91.118.000	78.052.450	85,66
		Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil	113.036.000	113.036.000	100,00
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.392.891.700	1.364.051.542	97,93

Tujuan/Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan %
1		2	3	4	5 =4/3
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2.179.279.650	2.129.660.835	97,72
		Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	814.954.150	496.717.200	60,95
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	903.368.690	816.634	0,09
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.237.300.000	1.202.725.000	97,21
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	29.475.000	29.475.000	100,00
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	321.203.400	318.976.400	99,31
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	232.022.000	218.050.600	93,98
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	451.438.400	420.310.210	93,10
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	646.294.298	630.115.854	97,50
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	342.937.095	334.634.900	97,58
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	46.875.000	45.940.000	98,01
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	372.000.000	358.050.000	96,25
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	714.001.750	713.933.750	99,99

Tujuan/Sasaran	Program	Anggaran		
		Pagu Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan %
1	2	3	4	5 =4/3
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	19.687.500	19.687.500	100,00
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	633.600.000	618.300.000	97,59
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	895.500.000	895.500.000	100,00
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	15.000.000	12.400.000	82,67
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	421.110.000	421.110.000	100,00
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	885.900.000	885.900.000	100,00
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	44.348.000	44.348.000	100,00
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	342.022.000	331.622.000	96,96
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	370.173.000	370.173.000	100,00
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	33.933.810	32.158.310	94,77
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	443.280.000	443280000	100,00
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	870300000	870.300.000	100,00
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.000.000	48.229.000	96,46
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	507.850.000	504.050.000	99,25
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	1.015.676.000	1.012.726.000	99,71

Tujuan/Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan %
1		2	3	4	5 =4/3
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	11.785.000	11.785.000	100,00
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	551.335.000	435.410.200	78,97
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	914.100.000	914.100.000	100,00
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	19.630.000	19.630.000	100,00
		Jumlah	18.591.403.443	16.937.115.317	91,10
Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	19.368.000	19.368.000	100,00
		Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	1.627.980.000	1.007.002.160	61,86
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.429.980.680	2.040.669.000	83,98
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	198.378.020	195.318.000	98,46
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	237.748.968	205.365.872	86,38
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.399.240.936	5.979.261.005	93,44
		program perbaikan sistem administrasi kearsipan	97.884.900	96.385.400	98,47
		program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan	25.000.000	24.819.240	99,28

Tujuan/Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan %
1		2	3	4	5 =4/3
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.459.772.100	4.452.242.128	99,83
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	16.577.753	16.577.753	100,00
		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	1.903.080.410	1.847.259.410	97,07
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	7.346.056.600	6.515.247.051	88,69
		Program perencanaan pembangunan daerah	1.228.326.879	944.807.179	76,92
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	99.002.481	94.065.370	95,01
		Program perencanaan sosial dan budaya	278.574.700	271.112.500	97,32
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.173.609.163	3.757.467.813	90,03
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	31.500.000	27.800.000	88,25
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	321.203.400	318.976.400	99,31
		Jumlah	30.893.284.990	27.813.744.281	90,03
Misi 5 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan					
Tujuan 7	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal				
Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	483.162.950	464.098.200	96,05
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2.213.349.861	2.176.653.064	98,34
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	507.235.000	497.027.250	97,99

Tujuan/Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan %
1		2	3	4	5 =4/3
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	343.925.000	341.257.875	99,22
		Program pengembangan budidaya perikanan	1.040.303.000	991.160.394	95,28
		Program pengembangan perikanan tangkap	110.575.000	110.575.000	100,00
		Jumlah	4.698.550.811	4.580.771.783	97,49
Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	2.071.933.234	2.029.027.224	97,93
		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	40.800.000	40.800.000	100,00
		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	99.610.000	99.610.000	100,00
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	363.000.000	349.800.000	96,36
		Jumlah	2.575.343.234	2.519.237.224	97,82
Misi 6 Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah					
Tujuan 8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi				
Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	128.816.145	104.339.145	81,00
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	87.524.000	86.507.384	98,84
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	44.802.500	44.802.500	100,00
		Jumlah	261.142.645	235.649.029	90,24

Tujuan/Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan %
1		2	3	4	5 =4/3
Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	159.150.000	156.177.410	98,13
		Jumlah	159.150.000	156.177.410	98,13
Misi 7 Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu					
Tujuan 9	Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini				
Sasaran 9.1.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Program pengembangan Kemitraan	543.715.000	543.407.000	99,94
		Jumlah	543.715.000	543.407.000	99,94
Sasaran 9.2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.955.950.000	1.891.940.000	96,73
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.693.270.000	1.476.966.159	87,23
		Jumlah	3.649.220.000	3.368.906.159	92,32

D. Penjabaran Realisasi Anggaran berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja 2020

1. Sasaran 1.1. Meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 17.582.788.530,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 15.892.541.618,00 atau sebesar 90,39%.

1) Kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.485.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.

7.431.525.871,00 dan atau sebesar 99,29% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan dengan target 60 KM atau capaian realisasi 100 %.

2) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 18.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 atau sebesar 100,00% adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Saluran Irigasi yang yang dipelihara 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100 %.

3) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Pintu Air

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.434.780.331,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.244.772.800,00 dan atau sebesar 86,76% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pintu Air yang dipeliharadengan target 16 Unitatau capaian realisasi 100 %.

4) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.080.112.700,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 954.477.700,00 dan atau sebesar 88,37% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkandengan target 1000 M atau capaian realisasi 100 %.

5) Kegiatan Pembangunan infrastruktur Air Bersih

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 7.564.895.499,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.243.765.247,00 dan atau sebesar 82,54% adapun indikator kinerja keluaran adalah Masyarakat yang terlayani air bersihdengan target 50075 Jiwa atau capaian realisasi 44 %.: Kapasitas produksi tahun 2020 belum bias meningkat dikarenakan program NUWSP SPAM Dumai yg dilaksanakan oleh PU Provinsi baru dilaksanakan tahun 2020 dan target penyelesaian di tahun 2021 bulan 6, program SPAM Regional DUROLIS juga masih dalam tahap konstruksi jaringan distribusi utama ke arah Kota Dumai, sedangkan Program KPBU tahap 1B akan dilaksanakan di bulan maret tahun 2021 dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2021, NUWSP nantinya nambah 50 liter per detik, KPBU tahap

1B nantinya nambah 200 liter per detik, SPAM Regional Durolis nantinya akan diterima 150 liter per detik yang akan diterima Kota Dumai pada awal tahun 2022.

2. Sasaran 1.2. Meningkatnya infrastruktur perkotaan

Dinas Perumahan dan Permukiman

a. Program Pengembangan Perumahan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 158.304.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 119.747.000,- atau 75,64 %.

- 1) Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu ini di anggarkan dana sebesar Rp. 158.304.000,- dan telah di pergunakan sebesar Rp. 119.747.00,- atau realisasi sebesar 75,64% dengan indikator Jumlah Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.

b. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 866.116.600,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 808.823.000,- atau 93,39 %.

- 1) Kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur

Kegiatan pembangunan / peningkatan infrastruktur ini di anggarkan dana sebesar Rp. Rp. 866.116.600,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 808.823.000,- atau 93,39%. Dengan indikator Persentase infrastruktur lingkungan kawasan pemukiman yang layak dan baik.

c. Program pengelolaan areal pemakaman

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 276.807.250,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 204.429.260,- atau sebesar 73,85 %.

- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Kegiatan sarana dan prasarana pemakaman dianggarkan dana sebesar Rp. 276.807.250,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 204.429.260,-.atau realisasi sebesar 73,85 %. Adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Perencanaan Tata Ruang

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 700.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 614.470.817,00 atau sebesar 87,78 %.

1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 328.439.063,00 dan atau sebesar 82,11% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen penyusunan RDTR dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

2) Kegiatan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 286.031.754,00 dan atau sebesar 95,34% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Tahunan dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

b. Program Pemanfaatan Ruang

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 258.200.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 201.362.000,00 atau sebesar 77,99%.

1) Kegiatan Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen TABG dengan target 48 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

2) Kegiatan Survey/ Pemetaan / Pengukuran Pemanfaatan Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 68.200.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.050.000,00 dan atau sebesar 44,06% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Survey Pemetaan dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

- 3) Kegiatan Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 90.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 71.312.000,00 dan atau sebesar 79,24% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah peserta sosialisasi IMB dengan target 50 Orang atau capaian realisasi 100 %.

c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 120.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 72.465.000,00 atau sebesar 60,39%.

- 1) Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 72.465.000,00 dan atau sebesar 60,39 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen pengawasan IMB dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

d. Program pembangunan jalan dan jembatan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 64.059.968.911,12 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 62.947.465.833,00 atau sebesar 98,26%.

- 1) Kegiatan Pembangunan Jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 62.267.774.911,12 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 61.168.689.633,00 dan atau sebesar 98,23% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang jalan yang dibangun dengan target 10 Km atau capaian realisasi 100%.

- 2) Kegiatan Pembangunan Jembatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.600.410.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.597.749.000,00 dan atau sebesar 99,83% adapun indikator kinerja keluaran

adalah Jumlah jembatan yang dibangun dengan target 12 Unit atau capaian realisasi 67%.

3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 191.784.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 181.027.200,00 dan atau sebesar 94,39% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan bulanan kegiatan dengan target 5 Laporan atau capaian realisasi 100 %.

e. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 7.477.352.550,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.401.477.166,00 atau sebesar 85,61%.

1) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.446.448.450,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.890.236.766,00 dan atau sebesar 89,79% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara dengan target 1200 M atau capaian realisasi 100%

2) Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.030.904.100,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.511.240.400,00 dan atau sebesar 74,41% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran drainase yang dipelihara dengan target 2,1 KM atau capaian realisasi 70%.

f. Program Pengendalian Banjir

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 3.698.425.240,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.314.691.290,00 atau sebesar 89,62% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 3.060.465.190,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.820.641.290,00 dan atau sebesar 79,68% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah panjang Bantaran dan Tanggul Sungai yang di peliharadengan target 500 M atau capaian realisasi 100 %.

- 2) Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 83.030.050,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 dan atau sebesar 0% adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang daerah tangkapan air yang mengendalikan banjir dengan target 100 M atau capaian realisasi 0 %. Tidak tercapainya target kinerja dikarenakan adanya refofusing anggaran pada kegiatan ini.

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 554.930.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 494.050.000,00 dan atau sebesar 89,03% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengendali Banjir yang di bangun dengan target 2 Unit atau capaian realisasi 100 %.

g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 2.162.325.750,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.975.573.424,00 atau sebesar 91,36% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.100.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.380.000,00 dan atau sebesar 45,84% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 1 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karena tidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.
- 2) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 17.150.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.874.500,00 dan atau sebesar 45,92% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 1 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karena tidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.
- 3) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 51.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.043.924,00 dan atau sebesar 98,13% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0 %.Kegiatan ini tidak mencapai target karenatidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.

4) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.001.479.250,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 857.680.000,00 dan atau sebesar 85,64% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 100%.

5) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.020.406.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.013.815.000,00 dan atau sebesar 99,35% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 83%.

6) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.750.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.960.000,00 dan atau sebesar 22,80% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0%.Kegiatan ini tidak mencapai target karenatidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.

7) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 34.440.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.820.000,00 dan atau sebesar 98,20% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karenatidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.

Dinas Perhubungan

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 11.446.785.175,00,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.241.310.659,- atau 98,20%.

- 1) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan
Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 435.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 434.403.000,00 atau 99,86 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) adalah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang berupa :
 - a. DED Pembuatan Pelataran Parkir Pelabuhan Penumpang Bandar Sri Junjungan;
 - b. DED Dermaga Beton;
 - c. Evaluasi Kinerja Terminal Bus;
 - d. Study LHR di Kota Dumai (Evaluasi Kinerja Ruas Jalan Kota Dumai);
 - e. Perencanaan Pembangunan Gedung PJU DISHUB;
 - f. Perencanaan Pengadaan Partisi Kantor Dinas Perhubungan;
 - g. Study Kelayakan (FS) Pembangunan Pos Pembantu UPT. Perparkiran.
- 2) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Sektor Perhubungan
Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 38.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.31.200.000,00 atau 82,11 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) adalah Jumlah Koordinasi Kebijakan di Bidang Perhubungan yaitu Forum LLAJ.
- 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 152.580.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar sebesar Rp. 151.380.000,00 atau 99,21 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) adalah Jumlah Dokumen Data dan Informasi sektor Perhubungan yang berupa :
 - a. Survei Inventarisasi Perlengkapan Prasarana Jalan di Kota Dumai;
 - b. Survei Inventarisasi Pembangunan Prasarana Transportasi di Kota Dumai.
- 4) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat, Laut dan Udara

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 10.821.205.175,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar sebesar Rp. 10.624.327.659,00 atau 98,18% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Jumlah Terminal Angkutan Darat, Laut dan Udara yang terkelola.

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 525.000.000,00,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 424.160.000,00,- atau 80,79 % .

1) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 149.600.000,00 atau 99,73 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara.

2) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rambu, marka jalan, traffic light, warning light, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 375.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 274.560.000,- atau 73,22% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini Jumlah rambu, marka jalan, zebra cross, traffic light dan warning light yang dipelihara.

c. Pogram peningkatan pelayanan angkutan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 939.277.550,0,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 939.262.000,00,- atau 99,99%.

1) Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 939.277.550,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 939.262.000,00 atau 99,99 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Jumlah Pelayanan dinas perhubungan yang optimal. Sedangkan indikator kinerja keluaran (Output) nya berupa peningkatan pelayanan melalui penyediaan tenaga teknis kontrak.

- 2) Kegiatan penyelenggaraan, pengendalian, dan pengamanan angkutan lebaran, natal, dan tahun baru

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 0,00 dan realisasi keuangan Rp. 0,00. Anggaran pada kegiatan ini tidak Terealisasi disebabkan refocusing anggaran dan anjuran dari pemerintah untuk mematuhi protocol kesehatan, sehingga event besar nasional ini tidak dapat direalisasikan anggarannya. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Jumlah Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

d. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.817.900.000,00,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.801.578.000,00,- atau 99,10%. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

- 1) Kegiatan pengadaan rambu lalu lintas

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 600.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 598.710.000,00 atau 99,78 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Lengkap dan Memadai demi menciptakan ketertiban berlalu lintas, yang berupa tersedianya rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya yang memadai demi menciptakan ketertiban berlalu lintas.

- 2) Kegiatan pengadaan marka jalan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 627.200.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 626.099.000,00 atau 99,82 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Jumlah marka jalan yang terbangun guna terciptanya lalu lintas yang tertib, aman, lancar, teratur dan terkendali keluaran kegiatan ini yaitu :

- a. Pengecatan dan Pembuatan Marka Jalan Parkir di UPT. Perparkiran Khusus;
- b. Pengecatan dan Pembuatan Marka Jalan Gunung Merapi;
- c. Pengecatan dan Pembuatan Marka Jalan Bukit Datuk;
- d. Pengecatan dan Pembuatan Marka Jalan Abdurrahkhan;

- e. Pengecatan dan Pembuatan MarkaJalan Teratai;
 - f. Pengecatan dan Pembuatan MarkaJalan Budi Kemuliaan;
 - g. Pengecatan dan Pembuatan MarkaJalan Syech Umar;
 - h. Pengecatan dan Pembuatan MarkaJalan Kesuma.
- 3) Kegiatan operasi penertiban dan penegakan hukum
- Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 165.100.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 152.495.000,00 atau 92,37% dari anggaran. Adapun indikator kinerja hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah Jumlah Operasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang LLAJ. Sedangkan indikator kinerja keluaran (Output) berupa pelaksanaan operasi penertiban lalu lintas dan Angkutan Umum, yaitu :
- a. Patroli Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas di persimpangan, pasar dan lokasi sekolah pada pagi dan siang hari;
 - c. Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Hari-hari Besar.
- 4) Kegiatan Pengadaan *Traffic Light* dan *Warning Light*
- Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 336.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 334.824.000,00 atau 99,65 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Lokasi *Traffic Light* dan *Warning Light* yang dipasang yaitu berupa kegiatan :
- a. Pengadaan Lampu *Warning Tiang* di Kecamatan Dumai Kota;
 - b. Pengadaan Lampu *Warning Tiang* di Kecamatan Dumai Selatan;
 - c. Pengadaan Lampu *Warning Tiang* di Kecamatan Dumai Timur.
- 5) Kegiatan Pembangunan Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan
- Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 89.600.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 89.450.000,00 atau 99,83 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya Median Jalan dan Pulau Jalan yang terbangun yaitu berupa pengadaan median/kanstin di bundaran putri tujuh. Median/kanstin dimaksud sangat diperlukan guna peningkatan aspek keamanan berkendara di lokasi bundaran putri tujuh yang selama ini tidak dalam keadaan baik.

Dinas Lingkungan Hidup

a. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.934.350.400 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.926.550.500 atau 99,70%.

1) Pengembangan Taman Rekreasi

Pada Kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 263.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 261.595.000,- atau sebesar 99,47% telah mencapai yang diinginkan yaitu tercapainya penataan taman-taman di dalam kota dan tertatanya pedestrian di taman bukit gelanggang dan terpeliharanya taman kota dan jalur hijau

2) Pemeliharaan RTH

Pada Kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.671.350.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.664.955.500,- atau sebesar 99,76%%, telah mencapai target yang diinginkan yaitu Terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota sehingga tercapai keindahan kota.

3. Sasaran 1.3. Meningkatnya kualitas lingkungan

Dinas Lingkungan hidup

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.670.248.900 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.661.603.200 atau 99,85%.

1) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.670.248.900,- dan realisasi keuangan Rp. 5.661.603.200,- atau 99,85 % . telah mencapai target yang diinginkan yaitu meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat.

b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 15.800.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.780.637 atau 99,88%.

1) Pengembangan data dan informasi lingkungan

kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkna informasi terkait dokumen pengelolaan Lingkungan hidup. Pada Kegiatan ini anggaran Rp. 15.800.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 15.780.637,- atau 99,88%. Kegiatan ini

menghasilkan buku data dan buku laporan yang disebut buku status lingkungan hidup Kota Dumai

c. Program peningkatan pengendalian polusi

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 53.350.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 44.960.554 atau 84,27%.

1) Pengujian polusi udara ambien

kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 53.350.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.960.554,- atau sebesar 84,27%, dari dana yang dianggarkan tersebut telah dilakukan pengujian sample di 4 titik lokasi yang ada di kota Dumai hasil pengujian parameter didapat tingkat plutan di kota Dumai tidak ada yang melebihi nilai baku mutu(kategori baik)

4. Sasaran 2.1. Meningkatnya partisipasi pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. **1.410.966.350,00** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **1.368.208.101,00** atau 96,97%.

1) Penambahan ruang kelas sekolah

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 185.300.000,00,- dan realisasi keuangan Rp. 185.300.000,00,- atau 100%.

Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator Bertambahnya ruang kelas yang dibangun.

2) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 292.471.000,00,- dan realisasi keuangan Rp. 292.371.000,00,- atau 99,97%. Tingkat capaian sebesar 100%

dengan indikator kinerja keluaran terpenuhinya ruang kelas yang direhabilitasi

3) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 75.990.900,00,- dan realisasi keuangan Rp. 61.615.849,00 atau 81,08%. Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Peningkatan prestasi guru yang naik kepangkatan melalui ptk

- 4) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 76.830.000,00,- dan realisasi keuangan Rp. 76.788.876,00,- atau 99,95%. Kegiatan Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersusunnya Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD.

- 5) Penyediaan Dukungan Operasional TK Negeri

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 780.374.450,00,- dan realisasi keuangan Rp. 752.132.376,00,- atau 96,38%. Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional TK Negeri tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Penyediaan dukungan operasional Tk Negeri

b. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. **1.237.066.630,00** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **1.209.159.313,00** atau 97,74%.

- 1) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 442.541.750,00,- dan realisasi keuangan Rp. 433.858.443,00,- atau 98,04%. Kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Pembaharuan data siswa dapat update setiap bulan

- 2) Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 623.800.000,00,- dan realisasi keuangan Rp. 609.315.240,00,- atau 97,68%. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Peserta yang mengikuti kegiatan.

- 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 170.724.880,00,- dan realisasi keuangan Rp. 165.985.630,00 atau 97,22%. Kegiatan monitoring,

evaluasi dan pelaporan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran terdatanya jumlah sarana dan prasarana sekolah

Dinas Perpustakaan dan Arsip

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. **105,427,700.00** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **101,311,700.00** atau 96.10%.

- 1) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah.

Dengan anggaran sebesar Rp. 25,427,700.00,- dan terealisasi Rp. 22,071,700.00,- atau 86.80%. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah jumlah perpustakaan yang dibina dengan target 4 perpustakaan atau terealisasi sebesar 98.41%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun dengan target 22.000 pengunjung tetapi hanya terealisasi dengan jumlah pengunjung sebanyak 9.032 pengunjung dikarenakan terjadinya pandemic covid19 sehingga adanya larangan berkumpul difasilitas umum.

- 2) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50,000,000.00,- dan realisasi Rp. 50,000,000.00,- atau 100.00%. *Out put* dari kegiatan ini adalah jumlah lomba yang diadakan dengan target sebanyak 4 (empat) kegiatan lomba namun tidak terealisasi dikarenakan terjadinya refocusing anggaran karena pandemic covid sehingga adanya larangan berkumpul ditempat keramaian sehingga anggaran pada kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan untuk mempublikasikan, mempromosikan perpustakaan umum daerah Kota Dumai Sedangkan *out come* dari kegiatan ini adalah Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 22.000 pengunjung dan teralisasi 9.032 pengunjung.

- 3) Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30,000,000.00,- dan realisasi Rp. 29,240,000.00,- atau 97.47%. *Out put* dari kegiatan ini adalah jumlah koleksi perpustakaan yang dirawat dengan target sebanyak 200 eks dan teralisasi sebanyak 200 eks atau 100%.Sedangkan *out come* dari kegiatan ini

adalah Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahunan terealisasi sebesar 9.032 pengunjung.

- 4) Pengembangan otomasi perpustakaan (teknologi informasi perpustakaan)
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.0,- dan realisasi Rp.0,- atau 0%.

5. Sasaran 2.2. Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar

a. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 18.345.740.360,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 17.956.639.873,00 atau 97,88%.

- 1) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi SD
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 317.407.500,00 dan realisasi Rp. 272.021.700,00,- atau 85,70%. Kegiatan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kompetensi tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Terpenuhi kompetensi guru untuk kurikulum.
- 2) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.576.000.000,00,- dan realisasi Rp. 15.257.600.000,00,- atau 97,96%.
- 3) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.195.200.000,00,- dan realisasi Rp. 1.189.000.000,00,- atau 99,48%.
- 4) Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SMP
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 137.360.000,00,- dan realisasi Rp. 132.081.365,00 atau 96,16%.
- 5) Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SD
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 517.176.600,00,- dan realisasi Rp. 512.466.600,00 atau 99,09%.

- 6) Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah dan Kurikulum bagi Pendidik Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 602.596.260,00,- dan realisasi Rp. 593.470.208,00 atau 98,49%.

6. Sasaran 2.3. Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. **53.248.830.275,00** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **50.949.162.728,34** atau 95,68%.

- 1) Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,00 dan realisasi Rp. 75.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran terbangunnya ruang unit kesehatan sekolah.
- 2) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SD
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 585.000.000,00,- dan realisasi Rp. 585.000.000,00 atau 100%. Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Jumlah perpustakaan SD yang dibangun.
- 3) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 247.437.600,00,- dan realisasi Rp. 246.356.000,00 atau 99,56%. Kegiatan pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tercapainya Perhitungan Indikator SPM di Pendidikan Dasar di Kota Dumai.
- 4) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 86.097.750,00,- dan realisasi Rp. 85.972.800,00 atau 99,85%. Kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar tingkat capaian sebesar 100%

dengan indicator kinerja keluaran Meningkatnya kesadaran pendidikan bagi stakeholder dan penyusunan profil pendidikan Kota Dumai.

5) Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6834328975,- dan realisasi Rp. 6639588964 atau 97,15%. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1 sampai dengan SMPN 12 tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Yang Efisien.

6) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.634.000.000,00 dan realisasi Rp. 1.627.500.000,00 atau 99,60%. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran terpenuhinya jumlah rumah dinas guru/Penjaga sekolah SD yang dibangun.

7) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 380.523.000,00,- dan realisasi Rp. 380.523.000,00 atau 100.00%. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran terpenuhinya jumlah rumah dinas guru/Penjaga sekolah SMP yang dibangun.

8) Penambahan ruang guru sekolah Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.025.000.000,00,- dan realisasi Rp. 1.025.000.000,00 atau 100,00%.

Kegiatan penambahan ruang guru sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran bertambahnya ruang guru sekolah tingkat SD.

9) Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.340.000.000,00 dan realisasi Rp. 2.340.000.000,00 atau 100%.

Kegiatan penambahan ruang kelas sekolah tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Meningkatnya jumlah ruang kelas sekolah tingkat SD yang dibangun.

10) Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 193.960.800,00,- dan realisasi Rp. 193.960.800,00 atau 100,00%. Kegiatan penambahan ruang kelas sekolah tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Meningkatnya jumlah ruang kelas sekolah tingkat SMP yang dibangun.

11) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.718.375.000,00,- dan realisasi Rp. 1.718.375.000,00 atau 100%. Kegiatan pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Jumlah laboratorium dan pratikum tingkat SMP yang dibangun.

12) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.786.000.000,00 dan realisasi Rp. 1.779.190.300,00 atau 99,62%. Kegiatan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Terpenuhinya kebutuhan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir tingkat SD.

13) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.739.500.000,00 dan realisasi Rp. 1.736.666.000,00 atau 99,84%. Kegiatan pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Terpenuhinya kebutuhan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir tingkat SMP.

14) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 244.632.500,00,- dan realisasi Rp. 174.260.000,00 atau 71,23%. Kegiatan penyelenggaraan ujian nasional Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% walaupun ujian nasional tidak diselenggarakan karena Pandemi Covid 19. Realisasi anggaran tetap digunakan untuk biaya operasional Ujian Nasional Tingkat SD seperti biaya cetak ijazah dan cetak SKHUN Tingkat SD.

15) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 83.662.000,00,- dan realisasi Rp. 81.822.000,00 atau 97,80%. Kegiatan penyelenggaraan ujian nasional Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% walaupun ujian nasional tidak diselenggarakan karena Pandemi Covid 19. Realisasi anggaran tetap digunakan untuk biaya operasional Ujian Nasional Tingkat SMP seperti biaya cetak ijazah dan cetak SKHUN Tingkat SMP

16) Pembangunan gedung sekolah Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 115.000.000,00,- dan realisasi Rp. 115.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan Pembangunan gedung sekolah tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran jumlah gedung sekolah tingkat SD yang dibangun.

17) Pembangunan gedung sekolah Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.249.000.000,00,- dan realisasi Rp. 1.246.159.000,00 atau 99,77%. Kegiatan Pembangunan gedung sekolah tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran jumlah gedung sekolah tingkat SMP yang dibangun.

18) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.950.924.250,00,- dan realisasi Rp. 3.948.195.000,00 atau 99,93%. Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi tingkat SD

19) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 905.823.200,00 dan realisasi Rp. 849.827.000,00 atau 93,82%. Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi tingkat SMP

20) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.326.902.000,00 dan realisasi Rp. 2.307.381.750,00 atau 99,16%. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah ruangan sekolah yang Rehabilitasi.

21) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 833.000.000,00,- dan realisasi Rp. 833.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah ruangan sekolah yang Rehabilitasi.

22) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 137.721.700,00,- dan realisasi Rp. 98.627.700,00 atau 71,61%.

Kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Terlaksananya pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa tingkat SD.

23) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 86.840.000,00 dan realisasi Rp. 51.090.000,00 atau 58,83%. Kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Terlaksananya pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa tingkat SMP.

24) Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SD.

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.000.500.000,00 dan realisasi Rp. 6.751.218.483,47 atau 96,44%. Kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SD capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran terbangunan bangunan sekolah tingkat SD dalam kondisi baik.

25) Rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.420.500.000,00 dan realisasi Rp. 1.418.154.900,00 atau 99,83%. Kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah tingkat SMP capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran terbangunan bangunan sekolah tingkat SMP dalam kondisi baik

26) Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar.

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,00 dan realisasi Rp. 0,00 atau 0%. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar tingkat capaian sebesar 0% dengan indicator kinerja keluaran terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan sekolah dasar.

27) Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 36.361.500,00 dan realisasi Rp. 31.001.500,00 atau 85,26%. Kegiatan penyelenggaraan ujian kesetaraan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran terselenggaranya ujian kesetaraan di Kota Dumai.

28) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.185.000.000,00 dan realisasi Rp. 2.184.686.026,00 atau 99,99%. Kegiatan pengadaan buku – buku dan alat tulis siswa tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran terpenuhinya pengadaan buku – buku dan alat tulis siswa.

29) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.010.250.000,00 dan realisasi Rp. 11.472.550.153,87 atau 95,52%. Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator kinerja keluaran Tercukupinya kebutuhan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Tingkat SD.

30) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.987.490.000,00,- dan realisasi Rp. 1.939.015.251,00 atau 97,56%. Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran Tercukupinya kebutuhan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Tingkat SMP

7. Sasaran 3.1. Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan

a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.009.131.950,- Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 957.060.950,- atau sebesar 94,84%.

1) Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 269.588.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 237.208.000,- atau sebesar 87,99% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif 10 kelurahan dan orientasi/refresing

dalam peningkatan kapasitas kader posyandu semuanya mencapai cakupan 0% dari realisasi target kinerja.

2) Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup bersih dan sehat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 668.943.950,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 649.252.950,- atau sebesar 97,06% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah lomba posyandu teladan dan jumlah sekolah yang dilakukan penyuluhan tentang kawasan tanpa rokok semuanya mencapai cakupan 0% dari realisasi target kinerja

3) Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 70.600.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 70.600.000 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinannya 20 orang, jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 20 tempat, jumlah puskesmas yang melakukan aplikasi SDMK 10 puskesmas, dan jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan 9 orang dengan realisasi sebesar 100%.

b. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 62.236.000 Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 60.935.000 atau sebesar 97,91%.

1) Kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 3.081.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 3.000.000 atau sebesar 97,37% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak 10 puskesmas dengan realisasi sebesar 100%.

2) Kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 59.155.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 57.935.000 atau sebesar 97.94% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak 1 kali dengan realisasi 100%.

c. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.46.535.000,- Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.29.335.000,- atau sebesar 63,04% yang dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

1) Kegiatan pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.46.535.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.29.335.000,- atau sebesar 63,04% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas pengelola program lansia dengan realisasi semuanya sebesar 100% dan jumlah pelaksanaan pertemuan ilmiah peningkatan kualitas hidup lansia dengan realisasi 0%

d. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 14.674.932.466,- Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 13.160.546.511,- atau sebesar 89,68%.

1) Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 41.775.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 35.100.000,- atau sebesar 84.02%. pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan 100%, jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan 50%, jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan, dan jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan 100% dan jumlah dokumen rencana aksi 2 dokumen dengan realisasi 50% dari target kinerja.

2) Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 27.950.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 21.800.000 atau sebesar 78.00%. Diatas pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan, jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan per tahun semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

3) Kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 317.075.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 277.926.935,- atau sebesar 87.65%. Pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan, jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan, jumlah dokumen informasi ringkas kesehatan yang dihasilkan, jumlah puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan sistem informasi kesehatan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

4) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 31.525.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 21.037.000,- atau 66.73%. Pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan kematian yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan tahunan yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan dan jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

5) Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.864.718.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.601.575.703,- atau sebesar 85.89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

6) Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Barat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.100.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 949.006.599 atau sebesar 86.27%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

7) Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.330.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.126.798.817 atau sebesar 84.72%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah

pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

8) Kegiatan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 2.230.431.960 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.064.640.828 atau sebesar 92.57%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

9) Kegiatan BLUD Puskesmas Medang Kampai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 922.500.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 873.833.941 atau sebesar 94.72%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

10) Kegiatan BLUD Puskesmas Bumi Ayu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.105.404.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.010.521.711 atau sebesar 91.42%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

11) Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Timah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 551.536.356 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 532.123.952 atau sebesar 96.48%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

12) Kegiatan BLUD Puskesmas Jaya Mukti

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 2.327.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.196.276.617 atau sebesar 94.38%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

13) Kegiatan BLUD Puskesmas Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.140.928.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.050.898.743 atau sebesar 92.11%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja

14) Kegiatan BLUD Bukit Kayu Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.684.088.650 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.399.005.165 atau sebesar 83.07%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas 12 bulan dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

e. Program obat dan perbekalan kesehatan

Pada anggaran untuk program ini sebesar Rp.10.571.820.995,-. Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.10.299.214.025,- atau sebesar 97,42% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Pada kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp.10.571.820.995,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.10.299.214.025,- atau sebesar 97,42%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dengan realisasi sebesar 100%.

f. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 265.062.500 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 238.565.000 atau sebesar 90,00%.

1) Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 265.062.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 238.565.000 atau sebesar 90,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah apotik yang diawasi dan di bina 30 sarana, jumlah toko obat yang diawasi dan dibina 30 sarana, jumlah IRTP yang diawasi dan dibina 50 sarana, jumlah toko makanan-minuman yang diawasi dan dibina 30 sarana dan jumlah puskesmas yang diawasi dan dibina 10 puskesmas semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja

g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 492.694.500,- Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 466.236.325,- atau sebesar 94,63%.

1) Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 492.694.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 466.236.325,- atau sebesar 94,63%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan 2 dokumen, dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan 2 dokumen, dokumen pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi di puskesmas yang dihasilkan 2 dokumen dan jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pos ukk yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja

h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.053.615.000,- Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 491.938.122,- atau sebesar 46,69%.

1) Kegiatan penyemprotan/*fogging* sarang nyamuk

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 418.895.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 203.200.000,- atau sebesar 48,51%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan fogging fokus sebanyak 224 semuanya mencapai cakupan 34.82% dari realisasi target kinerja.

2) Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 166.080.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 159.834.000 atau sebesar 96,24%. Adapun indikator kinerja keluaran untuk jumlah ketersediaan insektisida DBD 50 liter dan jumlah ketersediaan swing fog 3 unit semuanya mencapai cakupan 100 % dari realisasi target kinerja.

3) Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 81.490.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 24.004.122 atau sebesar 29,46%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan

catch up campaign campak SD di 117 SD dan pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah dengan realisasi semuanya sebesar 0%.

- 4) Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 211.250.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 71.600.000,- atau sebesar 33,89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaannya larvasidasi massal 2 kali dengan realisasi 0%, jumlah pelaksanaan penemuan BTA(+) TB Paru 10 puskesmas dengan realisasi 100% dan, pelaksanaan penanggulangan penyakit IMS dan HIV/AIDS 10 puskesmas dengan realisasi 100% dari realisasi target kinerja.
- 5) Kegiatan peningkatan imunisasi
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 88.900.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 26.700.000,- atau sebesar 33,89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan pengelolaan rantai penyimpanan vaksin 12 bulan dengan realisasi 100%,
- 6) Kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 87.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 6.600.000,- atau sebesar 7,59%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB 200 kasus dengan capaian 12%

8. Sasaran 3.2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Dinas Kesehatan

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada tahun 2020 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 38.144.662.280,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 32.524.526.278,- atau sebesar 85,27%.

- 1) Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.552.138.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 16.335.061.252,- atau sebesar 98,69%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pelaksanaan pelayanan JKN di puskesmas dan pembinaan pelayanan jaminan kesehatan dengan realisasi sebesar 100%.

- 2) Kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 7.480.845.280,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 7.101.008.324,- atau sebesar 94,92%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini jumlah pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya, dengan realisasi semuanya sebanyak 100%
- 3) Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 15.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 15.800.000 atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pertemuan diseminasi TPG Puskesmas, bidan koordinator dan lintas program dan pelacakan kasus balita BGM, gizi kurang dan gizi buruk dengan realisasi semuanya 100%.
- 4) Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 304.094.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 158.176.752,-, atau sebesar 52,02%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah tata laksana ibu hamil resiko tinggi/komplikasi dan jumlah supervise fasilitatif kesehatan ibu dengan realisasi semuanya 100%.
- 5) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan khusus
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 2.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.000.000,- atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah sekolah yang dilakukan penjangkaran kesehatan dengan realisasi semuanya 0%.
- 6) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 8.686.061.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 8.069.266.900,-, atau sebesar 92,90%. Adapun indikator keluaran kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan pembinaan manajemen puskesmas dengan realisasi 100%, jumlah pelaksanaan pembinaan perkesmas kewilayahan dengan realisasi 0 %, jumlah puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi puskesmas dengan realisasi 0% dan Jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas dengan realisasi 100%.

- 7) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 30.150.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.150.000,- atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah sarana pelayanan kesehatan di RS,Rad, Lab yang dibina, pelaksanaan sistem pelaporan SIMRS, pelaksanaan pelayanan kesehatan dokter spesialis ke puskesmas, dan pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan rumah sakit kota Dumai semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja
- 8) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Kota
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.700.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.258.419.050,- atau sebesar 36.92% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%
- 9) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dumai Barat
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.325.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.27.733.000,- atau sebesar 8.53% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan

kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%.

10) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.440.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.73.907.000,- atau sebesar 16.80% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

11) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Sembilan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.623.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.132.300.000,- atau sebesar 21.24% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

12) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Medang Kampai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.350.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.6.650.000,- atau sebesar 1.90% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

13) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bumi Ayu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.620.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.31.420.000,- atau sebesar 5.07% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

14) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Timah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.350.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.91.325.000,- atau sebesar 26.09% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan

dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%.

15) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jaya Mukti

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.810.574.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.82.100.000,- atau sebesar 10.13% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%.

16) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.400.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.39.576.500,- atau sebesar 9.89% dari anggaran. Adapaun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan

orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

- 17) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bukit Kayu Kapur
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.455.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.69.632.500,- atau sebesar 15.30% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil, jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin, jumlah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah pelayanan kesehatan balita, jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, jumlah pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis, dan jumlah pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dengan realisasi semuanya 100%

Rumah Sakit Umum Daerah

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk program ini, jumlah anggaran sebesar Rp 3.599.147.500 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 3.473.899.979 atau 98,00%.

- 1) Pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.599.147.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.473.899.979,- atau 98,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Terpenuhinya Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja

b. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 356.361.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 34.500.000 atau 10,00%.

- 1) Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar Pelayanan Kesehatan
Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 356.361.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 34.500.000,- 10,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Akreditasi Rumah Sakit mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja. Adapun kecilnya realisasi

anggaran di akibatkan oleh pandemic covid 19 yang tidak memungkinkan mengadakan kegiatan survey akreditasi di RSUD Kota Dumai.

c. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 44,811.806.169,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 42.762.511.740,- atau 95.43%.

- 1) Pada kegiatan Pembangunan rumah sakit dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.816.083.559,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.485.997.000,- atau 91,00%,.
- 2) Pada kegiatan Pengadaan alat-alat rumah sakit dialokasikan anggaran sebesar Rp. 23.676.131.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.635.270.122,- atau 100%,
- 3) Pada kegiatan Pengadaan obat-obatan rumah sakit dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.693.730.810,- dengan realisasi sebesar Rp.12.630.449.603,- atau 100%.
- 4) Pada kegiatan pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah di alokasikan anggaran sebesar Rp. 1.575.000.000,- dengan realisasi Rp. 471.000.000,- atau 30%.
- 5) Pada kegiatan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit, anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.99.520.850,- atau 100%;
- 6) Pada kegiatan Pengadaan bahan bahan logistik rumah sakit sebesar Rp.2.618.860.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.591.616.165,- atau 99%
- 7) Pada kegiatan Pengadaan logistik keperawatan rumah sakit sebesar Rp.332.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 319.658.000,- atau 96%

d. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 471.110.914 dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 396.710.299 ,- atau 84 %.

- 1) Pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit dialokasikan anggaran sebesar Rp. 471.110.914,- dengan realisasi sebesar Rp. 396.710.299,- atau 84 %.

e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD 10.327.904.600,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 9,946.720.657 atau 96,31%.

- 1) Pada kegiatan Pelayanan tenaga para medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.204.130.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.834.628.000,- atau 96,38%.

- 2) Pada kegiatan Pelatihan dan pendidikan tenaga keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dialokasikan anggaran sebesar Rp. 123.774.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 112.092.657,- atau 91%.

9. Sasaran 4.1. Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

a. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pada tahun 2020 jumlah anggaran Rp. 219.810.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 219.340.000,- atau sebesar 99,79%.

1) Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Paskibraka

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 58.802.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 58.662.000,- dan atau sebesar 99,76% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah anggota pengibar bendera pada peringatan HUT RI di Kota Dumai dengan target 40 orang.

2) Kegiatan Seleksi dan pembinaan pemuda marchingband

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 161.008.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 160.678.000,- dan atau sebesar 99,80% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta marchingband yang dilatih dengan target 80 orang dengan realisasi 69 orang atau capaian realisasi 86%.

10. Sasaran 5.1. Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pada tahun 2020, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 629.928.000,00,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 209.531.491,00,- atau 33,26%.

1) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.212.570.000,00 (Dua ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.209.531.491,00 (Dua ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu

rupiah) atau 98,57%. Adapun indikator kinerja adalah terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dengan target 70 % atau capaian realisasi 100%.

2) Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.417.358.000,00 (Empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.0,00 (rupiah) atau 0%. Adapun indikator kinerja adalah Pelatihan Pengembangan usaha dan pelaporan bagi koperasi, Pelatihan kewirausahaan/management perkoperasian bagi koperasi dan pelatihan pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro target 47 orang atau capaian realisasi 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan adanya wabah covid-19.

11. Sasaran 5.2. Menurunnya persentase penduduk miskin

Dinas Sosial

a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 199.380.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 199.367.000,- atau 99,99%.

1) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.

Indikator kinerja kegiatannya adalah Jumlah peningkatan kualitas SDM yang menjadi mitra kerja sosial dengan target 190 Orang. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 199.380.000,- dengan realisasi Rp. 199.367.000,-Atau 99,99%. Kegiatan ini merupakan peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menjadi mitra kerja Dinas Sosial Kota Dumai.

b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pada tahun 2020, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 673.821.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 598.044.949,- atau 88.75%.

1) Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator kinerja kegiatannya yaitu tersedianya data PMKS dan PSKS dengan target 19.922 KK, anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 430.276.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 410.789.949,- atau 95,47% dari anggaran. Kegiatan ini merupakan verifikasi Basis Data Terpadu (BDT).

- 2) Kegiatan Pengembangan pendampingan Program Keluarga Harapan
Indikator kinerja kegiatannya yaitu tersedianya data dan pendampingan terhadap penerima PKH dengan target 6.186 KK jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 243.545.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 187.255.000,- atau setara dengan 76.89%. Kegiatan ini merupakan kegiatan Pemerintah pusat yang dilaksanakan setiap tahunnya.

c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pada tahun 2020, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 839.783.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 660.365.004,- atau 78,64%.

- 1) Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
Indikator kinerja kegiatannya adalah Jumlah PMKS yang dilayani paska kejadian darurat dengan target 200 KK. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.193.508.750,- dengan realisasi Rp. 189.875.000,-atau 98,12%. Kegiatan ini merupakan Penanganan dan Pemberian bantuan sosial terhadap korban bencana.
- 2) Kegiatan Penanggulangan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
Indikator kinerja kegiatannya adalah berkurangnya masyarakat gangguan jiwa di Kota Dumai dengan target 50 Orang. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.259.000.000,- dengan realisasi Rp. 124.560.004,- atau 48,09%. Kegiatan ini merupakan Penanganan dan pengiriman pasien gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Riau.
- 3) Kegiatan perlindungan Sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan.
Indikator kinerja kegiatannya adalah terlaksananya kegiatan penanganan TKI bermasalah, orang terlantar dan korban tindak kekerasan dengan target 100%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.167.790.000,- dengan realisasi Rp.156.940.000,- atau 93,53%. Kegiatan ini merupakan penanganan dan pendampingan melalui Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC) yang ditangani langsung oleh Pekerja Sosial.
- 4) Kegiatan Pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sosial masyarakat.
Indikator kinerja kegiatannya adalah terlaksananya bantuan pangan non tunai (BPNT) pada masyarakat dengan target 8.481 KK. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.219.485.000,- dengan realisasi

Rp.188.990.000,- atau 86.11%. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT).

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 138.211.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 138.211.000, - atau sebesar 100%.

1) Kegiatan Pembinaan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Indikator kinerja kegiatannya yaitu terlaksananya pembinaan UMKM yang Produktif disetiap Kecamatan dengan target 7 kecamatan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 138.211.000,- terealisasi sebesar Rp. 138.211.000,-.

12. Sasaran 5.3. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

a. Program Keluarga Berencana

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Rp. 1.287.693.627,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.272.411.603,- atau sebesar 98,81 %.

1) Kegiatan Pembinaan keluarga berencana

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.838.627,- terealisasi sebesar Rp. 25.778.000,- atau sebesar 99,77%. Terlaksananya Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kota Dumai dengan target 12 bulan dan Terbinanya kelompok kegiatan dengan target 7 Kecamatan atau capaian realisasi 7 Kecamatan atau 100%.

2) Kegiatan Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.123.545.000,- terealisasi sebesar Rp 1.108.885.000,- atau sebesar 98,70%. Indikator kegiatan yaitu Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas PP dan KB dengan target 89 Unit atau capaian realisasi 89 Unit atau 98,70%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan sarana dan prasarana penyuluhan KB.

3) Kegiatan Dukungan media KIE dan manajemen BOKB

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 138.310.000,- terealisasi sebesar Rp. 137.748.603,- atau sebesar 99,59%. Adapun Indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Manajemen BOKB dan Penyediaan Media KIE yang dilaksanakan dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.

b. Program pelayanan kontrasepsi

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Rp. 165.580.500 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 146.998.457,- atau sebesar 88,78%.

1) Kegiatan Pengadaan alat kontrasepsi

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 95.298.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.684.118,- atau 84,66%. Indikator kegiatan Tersedianya obat-obatan dan alat kontrasepsi bagi Faskes dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%. Kegiatan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengelola alokon di faskes, sehingga diharapkan akan tercipta pencatatan dan pelaporan yang tertib dan akurat

2) Kegiatan Pelayanan konseling KB

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.582.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.021.125,- atau 91,89%. Indikator kegiatan Terselenggaranya Konseling KB Bagi Pasangan Usia Subur dengan target 75% atau capaian realisasi 70% atau 93,33%. Tujuan dari Kegiatan ini adalah meningkatkan cangkupan pelayanan KB dengan metode kontrasepsi mantap di Kota Dumai serta mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan berkualitas. Pelaksanaan pelayanan KB MOP dilaksanakan di RS Prima Pekanbaru dengan jumlah akseptor 10 orang.

3) Kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 38.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.293.214,- atau 96,36%. Indikator kegiatan Terselenggaranya kegiatan Pelayanan KB dengan target 4 Moment atau capaian realisasi 2 Moment atau 50%.

c. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Pada tahun 2030, jumlah anggaran untuk Rp. 73.697.200 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 73.627.200,- atau sebesar 99,91%.

- 1) Kegiatan Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 73.697.200,- terealisasi sebesar Rp. 73.627.200,- atau sebesar 99,91%. Indikator kegiatan yaitu Terlaksananya ajang prestasi remaja (kelompok PIK) tingkat Kota Dumai dengan target 20 Kelompok atau capaian realisasi 20 Kelompok atau 100%. Kegiatan ini meliputi Kegiatan AKR (Ajang Kreatifitas Remaja) dan Pemilihan Duta GenRe tingkat Kota Dumai.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

d. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Rp. 646.294.298,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 630.115.854,- atau sebesar 97,50 %.

- 1) Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.32.068.341,- dan terealisasi sebesar Rp.31,468,341.- atau 98,13% dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender, dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, terlaksananya pendataan gender dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, serta terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi perempuan dengan target 1 kegiatan namun tidak bisa terealisasi karena adanya pandemi covid-19 sehingga pagu anggaran untuk kegiatan tersebut harus dirasionalisasikan.
- 2) Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.39.940.144,- dan terealisasi sebesar Rp.37,031,000,- atau 92,72% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terselenggaranya pembinaan Forum Anak Kota Dumai dengan target kinerja 50 orang dan terealisasi sebanyak 50 orang atau 100%. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan capaian kota layak anak.

- 3) Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.193.535.000,- dan terealisasi sebesar Rp.189,717,000,- atau 98,03% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu terselenggaranya pembinaan sekolah ramah anak dengan target kinerja 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 prang atau 100%, terselenggaranya Pembinaan puskesmas ramah anak dengan target kinerja 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang atau 100%, terselenggaranya Rakor Kota Layak Anak dengan target kinerja 50 dan terealisasi sebanyak 50 atau 100%.
- 4) Kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Anggaran yang tersedia sebesar Rp.149.693.800,- dan terealisasi sebesar Rp.142,834,500,- atau 95,42% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan target 80 kasus dan terealisasi sebanyak 80 kasus atau 100%. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 5) Kegiatan pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak
Anggaran yang tersedia sebesar Rp.98.702.100,- dan terealisasi sebesar Rp.98,582,100,- atau 99,88% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terselenggaranya bimbingan teknis replikasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dengan target kinerja 50 orang dan terealisasi 50 orang atau 100%, terselenggaranya bimtek pembinan aktifis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dengan target kinerja 250 orang dan terealisasi sebanyak 250 orang atau 100%.
- 6) Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak
Anggaran yang tersedia sebesar Rp 36.283.313,- dan terealisasi sebesar Rp.36,011,313,- atau 99.25% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %, serta tersedianya media informasi dengan target 75% dan terealisasi 75 %. Pendataan gender dan anak di Kota Dumai melibatkan seluruh Perangkat Daerah yang ada dengan harapan dapat menghasilkan data terpilah sebagai

pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender.

- 7) Kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.96.071.600,- dan terealisasi sebesar Rp.94,471,600,- atau 98,33 % dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100 %. Pelaksanaan pengarusutamaan gender memerlukan prasyarat-prasyarat tertentu yaitu berupa adanya prasyarat awal, komponen kunci dan keluaran (output) untuk menjadi dasar bagi terlaksananya pengarusutamaan gender.

13. Sasaran 5.4. Meningkatnya Lapangan Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. program peningkatan kesempatan kerja

Pada Tahun 2020, jumlah Anggaran Rp.150.150.000,-, dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 144.188.400,- atau sebesar 96,03%

1) Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp30.150.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp24.350.000,- dan atau sebesar 80,76%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Kepres RI No. 04 Tahun 1980 dengan target 50 Perusahaan atau capaian realisasi 100%.

2) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp120.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp119.838.400,- dan atau sebesar 99,87%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Data Informasi asar Kerja dan Implementasi ISO 9001-2015 dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

b. Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 29.448.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 28.668.500,- atau sebesar 97,35%

2) Kegiatan Pembinaan Dewan Pengupahan

Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 29.448.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.668.500,- dan atau sebesar 97,35%, adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah rapat rutin Dewan Pengupahan Kota Dumai dengan target 5 kali atau capaian realisasi 100%.

14. Sasaran 6.1. Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 122.060.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 121.329.730 atau sebesar 99,40 %.

1) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 122.060.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 121.329.730,-. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan target 1 aplikasi atau capaian realisasi 100%.

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 340.810.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 307.202.760,- atau sebesar 90,14%.

1) Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.442.760,- atau sebesar 99,98%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah terselenggaranya pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

2) Kegiatan Pengawasan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan.

Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.800.000,- atau sebesar 96,24%. Adapun

indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya peningkatan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan dengan target 15 berkas atau capaian realisasi 26,67%.

3) Kegiatan Survey Penerbitan Perizinan.

Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 297.060.0000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 237.260.000,- atau sebesar 79,87%.

Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah izin usaha yang akan diterbitkan dengan target 3.390 izin. Untuk tahun 2020 terdiri dari 28159 jumlah pemohon yang masuk dan mendaftar melalui sistem perizinan berusaha secara online (OSS) pada tahun 2020 dan berdasarkan dari hasil survey, maka capaian realisasi perizinan berusaha seluruh sektor yang terbit melalui sistem perizinan berusaha secara online terintegrasi untuk wilayah Kota Dumai berjumlah 1.071 perizinan atau sebesar 31,59%.

Sekretariat Daerah

a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 195.108.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 163.327.442 atau 83,71%.

1) Kegiatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.136.737.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.104.956.888,- atau dengan persentase 76,76%. Adapun indikator kinerja terbitnya sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Dumai sebanyak 16 persil dari target 10 persil dengan capaian kinerja 100%.

2) Kegiatan Inventarisasi, Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 58.371.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 58.370.554,- atau dengan persentase 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah

jumlah data/persil tanah asset Pemerintah Kota Dumai sebanyak 49 persil dari target 15 persil dengan capaian kinerja 100%.

b. Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 91.118.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 78.052.450 atau 85,66%.

1) Kegiatan Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan

Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. Rp.91.118.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 78.052.450,- atau dengan persentase 85,66%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah konflik/permasalahan tanah di Daerah Kota Dumai yang terfasilitasi/terselesaikan yaitu realisasi data penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 5 kasus dari target dan realisasi 5 kasus dengan capaian kinerja adalah 100%.

c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 232.022.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 218.050.600 atau 93,98%.

1) Kegiatan Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.27.676.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. Rp.22.830.000,- atau 82,49%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase meningkatnya posyandu aktif di Kota Dumai dengan target 196 posyandu aktif dan realisasi 196 posyandu aktif atau dengan persentase capaian kinerja adalah 100%.

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.204.345.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.195.220.600,- atau 95,53%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) Kota Dumai adalah lomba Pelaksanaan Kegiatan Jambore Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau dengan capaian kinerja 100%.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) Kota Dumai dengan target 41 PKK dan realisasi 41 PKK. Kegiatan PKK ini dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kota Dumai melalui pembinaan-pembinaan PKK yang

berada di 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan dengan capaian kinerja dengan persentase 100%.

d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 451.438.400 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 420.310.210 atau 93,10%.

1) Kegiatan Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.242.131.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 223.321.000,- atau 92.23%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota Dumai, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun 2020 dengan target dan realisasi 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%.

2) Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.16.418.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.218.000,- atau 92.69%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah informasi dan edukasi teknologi tepat guna dengan target dan persentase kinerja 100% yaitu lomba inovasi teknologi tepat guna tingkat Kota Dumai pada tahun 2020.

3) Kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.138.790.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.137.271.210,- atau 98,91%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah kegiatan peningkatan kinerja melalui evaluasi perkembangan kelurahan. Adapun tingkat pencapaian kegiatan evaluasi perkembangan kelurahan tingkat Kota Dumai Tahun 2020 adalah dengan realisasi 100%. Tujuan evaluasi perkembangan kelurahan ini adalah memberdayakan masyarakat dengan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di kelurahan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 113.036.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 113.036.000 atau 100%

1) Pendataan akta kelahiran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 71.246.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 71.246.000,- (100%) dengan indikator kinerja keluaran persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran sebesar 97% dan terealisasi 89% (92%), dan persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 45% dan terealisasi 35% (78%).

2) Penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 41.790.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.790.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran jumlah dokumen Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen (100%).

b. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.392.891.700 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.364.051.542 atau 97,93%.

1) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.483.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.258.700,- (99,21%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah laporan informasi data kependudukan sebanyak 2 (dua) laporan dan terealisasi 2 (dua) laporan (100%).

2) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.530.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.530.000,- (100%) dengan indikator kinerja keluaran persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 83% dan terealisasi 92,32% (111,23%).

3) Pengembangan data base kependudukan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.600.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 99,50% dengan indikator kinerja keluaran *updating data base* kependudukan dengan target 12 (dua belas) bulan dan terealisasi 12 (dua belas) bulan (100%).

4) Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 22.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.800.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 34,21% dengan indikator kinerja keluaran jumlah Laporan Kependudukan yang dapat diakses masyarakat sebanyak 1 (satu) laporan dan terealisasi 1 (satu) laporan (100%).

- 5) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat (DAK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 24.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.000.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 100% dengan indikator kinerja keluaran jumlah kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang disosialisasikan sebanyak 1 (satu) kebijakan dan terealisasi 1 (satu) kebijakan (100%).

- 6) Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 312.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 306.600.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 98,27% dengan indikator kinerja keluaran Persentase kepengurusan dokumen kependudukan yang dilayani sebesar 100% dan terealisasi 100% (100%).

- 7) Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 651.705.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 644.652.500,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 98,92% dengan indikator kinerja keluaran Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan sebesar 12% dan terealisasi 12,32% (103%).

- 8) Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 650.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 65% dengan indikator kinerja keluaran Jumlah sistem yang dikelola untuk pemanfaatan data kependudukan sebanyak 1 (satu) sistem dan terealisasi 1 (satu) sistem (100%).

- 9) Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 204.273.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 203.960.342,-. Tingkat

pencapaian terealisasi sebesar 99,85% dengan indikator kinerja keluaran Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan adminduk sebanyak 11 (sebelas) kali dan 15 (lima belas) kali (136,36%)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 2.179.279.650,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.129.660.835,- atau 97,72 %:

1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 129.990.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 121.075.635,- atau 93,14% dengan indikator keluaran jumlah peralatan dan mesin serta mobil pemadam kebakaran yang diservis dengan target kinerja keluaran 14 unit dan terealisasi 100%.

2) Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 559.889.650,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.519.185.200,- atau 92,73% dengan indikator keluaran jumlah cakupan wilayahpenanggulangan bahaya kebakaran dengan target kinerja keluaran 7 kecamatan terealisasi 100%.

3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.489.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.489.400.000,-atau 100% dengan indikator keluaran Jumlah peralatan dan mesin pemadam kebakaran dengan target kinerja keluaran 1 unit dan terealisasi 100%.

b. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 814.954.150,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 496.717.200,- atau 60,95%

1) Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 814.954.150,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 496.717.200,- atau 60,95% dengan indikator keluaran jumlah kejadian penanganan bencana, target kinerja keluaran 150 kali kejadian (hotspot) realiasi 70 kali kejadian (hotspot)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 903.368.690,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 816.634.151,00 atau sebesar 90,40%.

1) Kegiatan penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 31.939.000,00 terealisasi sebesar Rp 19.122.000,00 atau sebesar 59,87%. Indikator kinerja kegiatannya yaitu meningkatnya koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah sebanyak 33 orang. Kegiatan ini terdiri dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Tim Pusat Komunikasi dan Informasi dalam meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini elemen masyarakat terhadap ATHG Stabilitas Daerah.

2) Kegiatan pemantauan kegiatan dan aktifitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 34.470.000,00 terealisasi sebesar Rp 31.350.000,00 atau sebesar 90,95%. Indikator kinerja kegiatannya yaitu terpantaunya aktivitas dan kegiatan ormas dan LSM selama 12 bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau aktivitas dan kegiatan Ormas atau Lembaga oleh Tim Pendataan dan Pemantauan Ormas dan LSM.

3) Kegiatan pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah

Indikator kinerja kegiatannya yaitu tersedianya data tentang aktivitas orang asing dan tenaga kerja asing selama 12 bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 48.470.000,00 terealisasi sebesar Rp 24.937.000,00 atau sebesar 51,45%. Kegiatan ini bertujuan untuk mendata aktifitas orang asing dan Tenaga Kerja Asing oleh Tim Pendataan dan Pemantauan Orang Asing.

- 4) Kegiatan rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah
Indikator kinerja kegiatannya yaitu rencana dan kebijakan pencegahan dan penyelesaian konflik dengan target 10 bulan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 403.582.040,00 terealisasi sebesar Rp 379.750.000,00 atau sebesar 94,09%. Kegiatan ini merupakan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- 5) Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 384.907.650,00 terealisasi sebesar Rp 361.475.151,00 atau sebesar 93,91%. Indikator kinerja kegiatannya yaitu meningkatnya koordinasi Forkopimda dengan target kinerja selama 8 bulan.

Satuan Polisi Pamong Praja

a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ini sebesar Rp. 1.237.300.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.202.725.000,- atau sebesar 97,21%.

1) Pengamanan dan Penertiban

dialokasikan dana sebesar Rp. 210.850.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 199.200.000,- Atau sebesar 94,47%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pengamanan dan Penertiban dari target 6 kali 6 kali atau capaian kinerja 100%.

2) Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

dialokasikan dana sebesar Rp. 1.026.450.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.003.525.000,- Atau sebesar 97,76%.

b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ini sebesar Rp. 29.475.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp29.475.000,- atau 100%.

- 1) Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan Non Perizinan di Kota Dumai, dialokasikan dana sebesar Rp. 29.485.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 29.475.000 atau sebesar 100%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan Non Perizinan di Kota Dumai dengan target Pengawasan sebesar 100 pengusaha terealisasi juga 100 pengusaha dengan capaian kinerja 100%.

c. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan ini sebesar Rp. 321.203.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 318.976.400,- atau sebesar 99,30%.

- 1) Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat, dialokasikan dana sebesar Rp. 321.203.400 dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp 318.976.400 atau sebesar 99,30%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat dari target 1 kali terealisasi sebanyak 1 kali atau capaian kinerja 100%.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pada tahun 2020, jumlah Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2020 sebesar Rp.646.294.298,- dan terealisasi sebesar Rp. 630,115,854,- atau 97,40%.

- 1) Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.32.068.341,- dan terealisasi sebesar Rp.31,468,341.- atau 98,13% dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender, dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, terlaksananya pendataan gender dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, serta terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi perempuan dengan target 1 kegiatan namun tidak bisa terealisasi karena adanya pandemi covid-19 sehingga pagu anggaran untuk kegiatan tersebut harus dirasionalisasikan.
- 2) Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak .

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.39.940.144,- dan terealisasi sebesar Rp.37,031,000,- atau 92,72% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terselenggaranya pembinaan Forum Anak Kota Dumai dengan target kinerja 50 orang dan terealisasi sebanyak 50 orang atau 100%. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan capaian kota layak anak.

- 3) Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.

Anggaran yang tersedia sebesar Rp.193.535.000,- dan terealisasi sebesar Rp.189,717,000,- atau 98,03% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu terselenggaranya pembinaan sekolah ramah anak dengan target kinerja 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 prang atau 100%, terselenggaranya Pembinaan puskesmas ramah anak dengan target kinerja 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang atau 100%, terselenggaranya Rakor Kota Layak Anak dengan target kinerja 50 dan terealisasi sebanyak 50 atau 100%.

- 4) Kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Anggaran yang tersedia sebesar Rp.149.693.800,- dan terealisasi sebesar Rp.142,834,500,- atau 95,42% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan target 80 kasus dan terealisasi sebanyak 80 kasus atau 100%. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 6) Kegiatan pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak

Anggaran yang tersedia sebesar Rp.98.702.100,- dan terealisasi sebesar Rp.98,582,100,- atau 99,88% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terselenggaranya bimbingan teknis replikasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dengan target kinerja 50 orang dan terealisasi 50 orang atau 100%, terselenggaranya bimtek pembinan aktifis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dengan target kinerja 250 orang dan terealisasi sebanyak 250 orang atau 100%.

- 7) Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak

Anggaran yang tersedia sebesar Rp 36.283.313,- dan terealisasi sebesar Rp.36,011,313,- atau 99.25% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %, serta tersedianya media informasi dengan target 75% dan terealisasi 75 %. Pendataan gender dan anak di Kota Dumai melibatkan seluruh Perangkat Daerah yang ada dengan harapan dapat menghasilkan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender.

8) Kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG

Anggaran yang tersedia sebesar Rp.96.071.600,- dan terealisasi sebesar Rp.94,471,600,- atau 98,33 % dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100 %. Pelaksanaan pengarusutamaan gender memerlukan prasyarat-prasyarat tertentu yaitu berupa adanya prasyarat awal, komponen kunci dan keluaran (output) untuk menjadi dasar bagi terlaksananya pengarusutamaan gender.

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 342.937.095 dan terealisasi sebesar Rp. 334,634,900 atau sebesar 97,58 %.

1) Kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 105.595.270,- terealisasi sebesar Rp.105,227,500,- atau 99,65 % dengan indikator keluaran dari kegiatan ini adalah pelatihan keterampilan pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebanyak 50 orang, dan terealisasi sebanyak 50 orang atau 100 %. Tujuan kegiatan ini untuk mempersiapkan perempuan korban kekerasan dalam rangka terintegrasi sosial, yakni proses persiapan agar mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan beban bagi masyarakat dilingkungannya.

2) Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Anggaran yang tersedia sebesar Rp.27.004.400,- terealisasi sebesar Rp.27.004.400,- atau 100 % dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dengan target kinerja sebanyak 120 orang, namun tidak bisa terealisasi karena situasi pandemic covid-19 yang melanda tanah air bahkan dunia.

- 3) Kegiatan workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga

Anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.034.425,- dan terealisasi sebesar Rp. 10,020,000,- atau 98,86 % dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100%. Tujuan kegiatan ini dilakukan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai kepala keluarga, serta untuk meningkatkan peranan perempuan sebagai kepala keluarga.

- 4) Kegiatan pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Anggaran yang tersedia sebesar Rp.200.303.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 192,383,000,- atau 96,05 % dengan indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pembinaan tim KDRT di kelurahan dengan target kinerja sebanyak 20 kelurahan dan terealisasi 20 kelurahan atau 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan sasaran Satuan Tugas PPPA dan tenaga pendamping di UPT sebanyak 20 orang serta pembinaan Satuan Tugas PPPA terkait Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di 20 kelurahan, dan monitoring evaluasi Satuan Tugas PPPA di 7 kecamatan.

c. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 46.875.000 dan terealisasi sebesar Rp. 45,940,000 atau 98,01 %.

- 1) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Anggaran yang tersedia sebesar Rp.27.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26,740,000,- atau 97,68 % dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan dengan target kinerja 40 organisasi, dan terlaksananya peringatan hari kartini dan hari ibu dengan target kinerja sebanyak 2 kegiatan. Untuk kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena situasi pandemic covid-19 yang melanda tanah air bahkan dunia.

- 2) Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.6.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6,000,000,- atau 97,56 % dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) dengan target kinerja 10 kelurahan dan terealisasi sebanyak 10 kelurahan atau sebesar 100 %, dan terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dengan target kinerja 7 kecamatan dan terealisasi sebanyak 1 kecamatan atau sebesar 14,29 %. Tidak terlaksananya kegiatan tersebut disebabkan oleh adanya pandemic covid-19 yang melanda tanah air bahkan dunia.

Kecamatan Dumai Timur

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 633.600'000,-,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 618.300.000,- atau 97,59 % yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- 1) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0 atau 0 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

- 2) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 0 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 0.- atau 0 %.

- 3) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Binjai Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 199.200.000.- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 194.400.000.- atau 97.59%
- 4) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Batrem Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 73.800.000.- Dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 72.000.00.- atau 97.56 %
- 5) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Jaya Mukti Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 163.200.000.- Dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 159.300.000.- atau 97.61%
- 6) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Palas Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 61.800.000.- Dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 60.300.000.- atau 97.57%
- 7) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Buluh Kasap Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 135.600.000.- Dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 132.300.000.- atau 97.57%
- 8) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Usila Teluk Binjai Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.000.000.- Dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 7.000.000.- atau 77,78%

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 895.500.000.- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 895.500.000.- atau 100.00 %

- 1) Pembinaan LPMK dan RT
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.600.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 9.600.000,- atau 100.00 %.
- 2) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Binjai
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 195.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 195.900.000,- atau 100.00 %.
- 3) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Batrem
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 156.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 156.900.000,- atau 100.00 %.
- 4) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Jaya Mukti

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 219.300.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 219.300.000,- atau 100.00 %.

5) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Palas

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 141.300.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 141.300.000,- atau 100.00 %.

6) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Buluh Kasap

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 172.500.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 172.500.000,- atau 100.00 %.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 12.400.000,- atau 82 %

1) Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar 15.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 12.400.000,- atau 0.82 %

Kecamatan Dumai Barat

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 393.585.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi sebesar Rp. 372.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 358.050.000,- atau 96,25 % yang dialokasikan melalui Kegiatan :

1) Penilaian kinerja unit pelayanan publik.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 21.585.000,-. Namun setelah APBD Perubahan menjadi Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan dengan realisasi 0%.

1) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan STDI

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 96.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 92.400.000,- atau

- 96,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan STDI dengan realisasi 96,25%.
- 2) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pangkalan Sesai
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 84.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 80.850.000,- atau 96,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Pangkalan Sesai dengan realisasi 96,25%.
 - 3) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Purnama
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 115.500.000,- atau 96,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Purnama dengan realisasi 96,25%.
 - 4) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bagan Keladi
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 72.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 69.300.000,- atau 96,25%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Bagan Keladi dengan realisasi 96,25%.

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 711.724.750,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 714.001.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 713.933.750,- atau 99,99% yang dialokasikan melalui kegiatan :

- 1) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan STDI
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 151.961.250,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 152.423.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 152.406.250,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan STDI dengan realisasi 100%.
- 2) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pangkalan Sesai.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 167.942.750,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah

menjadi sebesar Rp. 168.470.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 168.453.750,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Pangkalan Sesai dengan realisasi 100%.

3) **Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Purnama.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 239.859.500,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 240.684.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 240.667.500,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Purnama dengan realisasi 100%.

4) **Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan Keladi.**

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 151.961.250,-. Namun setelah APBD Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 152.423.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 152.406.250,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Bagan Keladi dengan realisasi 100%.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini di APBD Murni sebesar Rp. 110.851.500,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 19.687.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 19.687.500,- atau 100% yang dialokasikan melalui kegiatan :

1) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 49.950.000,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 19.687.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 19.687.500,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tim penggerak PKK yang dibina Kecamatan dan kelurahan dengan realisasi 100%.

2) Pembinaan PKK Kelurahan Purnama.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Murni sebesar Rp. 60.901.500,-. Namun setelah APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 0,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun

indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tim penggerak PKK yang dibina kelurahan dengan realisasi 0%.

Kecamatan Bukit Kapur

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 421.110.000,- (empat ratus dua puluh satu juta seratus ribu sepuluh Ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.421.110.000,- (empat ratus dua puluh satu juta seratus ribu sepuluh Ribu rupiah) atau 100 %

1) Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah) atau 100%.

2) Penilaian kinerja unit pelayanan publik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. Rp.13.110.000,- (Tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.13.110.000,- (Tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) atau 100%.

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.885.900.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.885.900.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau 100 %.

1) Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.885.900.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.885.900.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau 100%.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.44.348.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.44.348.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau 100%

1. Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.44.348.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.44.348.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau 100%.

Kecamatan Medang Kampai

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 342.022.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 331.622.000,- atau 96,97%.

1) Kegiatan pembinaan pos pelayanan Terpadu

Indikator kinerja kegiatan yaitu 100% dengan realisasi 80% anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 327.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 317.200.000 atau sebesar 96,82%. Adapun Indikator kinerja keluaran terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kecamatan dan honorarium tenaga kader posyandu selama 12 bulan dan terealisasi sebanyak 11 bulan.

2) Kegiatan penilaian kinerja unit pelayanan publik

Indikator kinerja kegiatan yaitu 100% dengan realisasi 80% anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.422.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.422.000 atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai sebanyak 4 Kelurahan dan terealisasi 4 Kelurahan.

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 370.173.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 370.173.000,- atau 100%.

1) Kegiatan pembinaan LPMK dan RT

Indikator kinerja kegiatan yaitu 100% dengan target 70% anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 370.173.000,- terealisasi sebesar Rp. 370.173.000 atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluaran tersedianya honorarium LPMK dan RT se Kecamatan medang kampai dan

terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurusan LPMK dan RT dengan target kinerja dalam 12 bulan.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 33.933.810,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 32.158.310,- atau 94,76%.

1) Kegiatan pembinaan PKK Kecamatan

Indikator kinerja kegiatan yaitu 94,76% dengan target 80% anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.933.810,- terealisasi sebesar Rp 32.158.310,atau sebesar 94,76%. Adapun Indikator kinerja keluaran Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat dengan target kinerja dalam 1 Lembaga.

Kecamatan Sungai Sembilan

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 443.280.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 443.280.000,- atau 100.00%.

1) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 23.280.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 23.280.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 5 Kelurahan dengan dan terealisasi 5 Kelurahan atau 100%.

2) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Penyembal

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja kelurahan adalah jumlah kader posyandu balita dan usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

3) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bangsal Aceh

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.60.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja kelurahan adalah Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

- 4) **Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Lubuk Gaung**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.84.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 84.000.000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja kelurahan adalah Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- 5) **Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Basilam Baru**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.156.000.000,-dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 156.000.000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja kelurahan adalah Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- 6) **Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Batu Teritip**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja kelurahan adalah Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 870.300.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 870.300.000,- atau 100,00%.

- 1) **Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Penyembal**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 180.300.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 180.300.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Tanjung Penyembal yang dibina selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.
- 2) **Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bangsal Aceh**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 117.900.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 117.900.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah

Jumlah Pengurus LPMK dan RT Bangsal Aceh yang dibina selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

3) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Lubuk Gaung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 234.900.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 234.900.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Lubuk Gaung yang dibina selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

4) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Basilam Baru

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 211.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 211.500.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Basilam Baru yang dibina selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

5) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Batu Teritip

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 125.700.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 125.700.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Batu Teritip yang dibina selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 48.229.000,- atau 96,46%

1) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.229.000,- atau 96,46%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah TP PKK yang dibina Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 6 TP PKK dan terealisasi 6 TP PKK atau 100%

Kecamatan Dumai Kota

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 507.850.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 504.050.000,- atau 99,25 %

1) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 4.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 4.800.000,- atau 100 %.

2) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 20.950.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 20.950.000,- atau 100 %.

3) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Dumai Kota

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 117.660.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 117.660.000,- atau 100 %.

4) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Rimba Sekampung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 117.460.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 115.500.000,- atau 98,33 %.

5) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sukajadi

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 117.460.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 117.460.000,- atau 100 %.

6) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bintan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 75.260.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 73.500.000,- atau 97,66 %.

7) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Laksamana

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 54.060.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 53.980.000,- atau 99,85 %.

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.015.676.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 1.012.726.000,- atau 99,71 %.

1) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 100.776.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 99.926.000,- atau 98,46 %.

2) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Dumai Kota

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 163.300.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 163.300.000,- atau 100 %.

3) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Rimba Sekampung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 237.100.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 236.850.000,- atau 99,89 %.

4) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sukajadi

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 228.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 228.650.000,- atau 99,89 %.

5) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bintan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 187.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 187.900.000,- atau 100 %.

6) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Laksamana

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 96.800.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 97.700.000,- atau 99,08 %.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 11.785.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 11.785.000,- atau 100 %.

1) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.990.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 9.990.000,- atau 100 %.

2) Pembinaan PKK Kelurahan Rimba Sekampung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.795.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 1.795.000,- atau 100 %.

Kecamatan Dumai Selatan

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 551.335.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 435.410.200,- atau 78,97%.

1) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.640.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 5.640.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di kecamatan dengan realisasi 100%.

2) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 16.345.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 16.345.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba pada Kecamatan Dumai Selatan dengan realisasi 100%.

3) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Ratu Sima

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 138.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 115.500.000,- atau 83,33%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Ratu Sima dengan realisasi 83,33%.

4) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Datuk

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 111.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 67.225.200,- atau 60,56%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bukit Datuk dengan realisasi 60,56%.

5) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bumi Ayu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 97.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 80.550.000,- atau 82,87%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bumi Ayu dengan realisasi 82,87%.

6) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mekar Sari

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 99.150.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 80.850.000,- atau 81,54%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Mekar Sari dengan realisasi 81,54%.

7) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 83.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 69.300.000,- atau 83,09%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bukit Timah dengan realisasi 83,09%.

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 914.100.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 914.100.000,- atau 100%.

1) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 189.100.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 189.100.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima dengan realisasi 100%.

2) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 267.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 267.600.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk dengan realisasi 100%.

3) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 165.550.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 165.550.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu dengan realisasi 100%.

4) Pembinaan LPMK dan RT Mekar Sari

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 134.150.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 134.150.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari dengan realisasi 100%.

5) Pembinaan LPMK dan RT Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 157.700.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 157.700.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah dengan realisasi 100%.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 19.630.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 19.630.000,- atau 100%.

1) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 9.230.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 9.230.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di kelurahan dan kecamatan dengan realisasi 100%.

2) Pembinaan PKK Kelurahan Mekar Sari

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 10.400.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 10.400.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kelurahan Mekar Sari dengan realisasi 100%.

15. Sasaran 6.2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

Pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 1.627.980.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.007.002.160,- atau sebesar 61.86%.

1) Seleksi penerimaan calon ASN

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 424.599.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 384.385.500,- atau 90.53% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelamar calon ASN yang mengikuti seleksi target 4000 orang dan terealisasi 4000 orang atau 100%;

2) Penempatan jabatan fungsional

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.208.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.208.000,- atau 100,00% dengan

indikator kinerja keluaran adalah jumlah SK penempatan jabatan fungsional target 80 SK dan terealisasi 136 SK atau 170,00%;

3) Pengelolaan pemberhentian ASN

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.650.000,- atau 100,00% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah SK pemberhentian ASN yang terselesaikan target 110 SK dan terealisasi 110 SK atau 100,00%;

4) Pembinaan Korps Profesi ASN

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.140.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.700.000,- atau 6.76% dengan indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya kegiatan HUT Korps Profesi ASN target 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan atau 100,00%. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan secara visual;

5) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis ASN

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.48.889.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.889.000,- atau 100,00% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang mengusulkan kenaikan pangkat target 700 orang dan terealisasi 760 orang atau 108,57%;

6) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 240.592.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 212.60.260,- atau 88.37% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah data/informasi PNS Kota Dumai target 4000 orang dan terealisasi 4000 orang atau 100%;

7) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 551.000,- atau 18.37% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang menerima penghargaan target 200 orang dan terealisasi 374 orang atau 187%;

8) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 83.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.000.000,- atau 46.99% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN Kota Dumai yang mendapatkan bantuan tugas belajar target 1 orang dan terealisasi 1 orang atau 100%;

9) Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.766.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.766.000,- atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang mengikuti pelatihan kepemimpinan target 0 orang dan terealisasi 0 orang atau 0% dikarenakan tidak ada pengiriman peserta disebabkan terjadinya refocusing anggaran. Sebelum terjadinya refocusing sudah terealisasinya anggaran dikarena sudah melakukan perjalanan dinas konsultasi pelaksanaan kegiatan di tempat rencana pelaksanaan kegiatan;

10) Pelaksanaan sumpah/janji PNS

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.530.000,- atau 64.16% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang melaksanakan sumpah/janji target 180 orang dan terealisasi 188 orang atau 104,44%;

11) Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 134.954.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 132.200.000,- atau 97.96% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersusun dan tertatanya arsip data ASN Kota Dumai target 4000 PNS dan terealisasi 4000 orang atau 100%;

12) Seleksi/uji kompetensi PNS

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 501.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.918.400,- atau 4.77% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang mengikuti uji kesehatan jasmani dan rohani target 5 orang dan terealisasi 4 orang atau 80,00%.

13) Pengelolaan kinerja ASN

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 79.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.712.000,- atau 99.64% dengan indikator kinerja keluaran adalah terinventarisirnya penilaian prestasi kerja ASN Kota Dumai dengan target 4.000 orang dan terealisasi 4.000 orang atau 100% serta jumlah ASN yang mengikuti Bimtek target 80 orang dan terealisasi 80 orang atau 100%.

14) Pengembangan kompetensi aparatur

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.424.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.424.000,- atau 99.64% dengan indikator kinerja

keluaran adalah jumlah laporan hasil analisis kebutuhan kompetensi target 0 orang dan terealisasi 0 orang atau 0%.

15) Penempatan jabatan pimpinan tinggi dan administrasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 22.668.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.468.000,- atau 99.12% dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah SK penempatan jabatan pimpinan tinggi dan administrasi target 80 SK dan terealisasi 84 orang atau 105%.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 19.368.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.368.000,- atau 100%.

1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 204.932.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 172.959.281,- atau 84.40% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah aparatur yang mengikuti bimtek target 2 orang dan terealisasi 2 orang atau 100%.

Inspektorat

a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.2.429.980.680,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.040.669.000,- atau 83,98 %.

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.949.185.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 935.550.000,- atau 96,46 %. Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 74 LHP dan terealisasi 70 LHP atau 94,59 %, dijalankan melalui Pemeriksaan Reguler sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan serta melaksanakan pemeriksaan diluar PKPT yang telah diprogramkan yakni yang bersumber dari pemeriksaan Kasus/Khusus.

2) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bahwa sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI terlebih dahulu dilakukan Reviu oleh Inspektorat Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/ SJ tanggal 4 Maret 2016. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 211. 625.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 190.903.000,- atau 90,21 %. Indikator kinerja keluarannya adalah dokumen yang terdiri dari target 5 (lima) Dokumen yang direviu setiap tahunnya dan terealisasi adalah 4 (empat) Dokumen atau 80,00% dikarenakan waktu untuk mengevaluasi/mereviu sudah terlambat dan terbatasnya waktu.

3) *Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.215.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 172.500.000,- atau 80,23%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sebanyak 15 laporan dan terealisasi sebanyak 15 laporan atau 100%. Tercapainya target yang telah ditetapkan.

4) *Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar sebesar Rp.203.770.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.186.975.600,00 atau 91,75%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 2 (Dua) kali dan terealisasi 2 (Dua) kali atau 100%.

5) *Meneliti / Menilai Laporan Wajib LP2P*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.88.920.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 51.277.000,- atau 96,86%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase PNS yang menyampaikan

6) *Audit Khusus / Tertentu*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 31.440.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.300.000,- atau 13,68%. Adapun indikatornya adalah 1 Jumlah laporan Hasil

Pemeriksaan dan terealisasinya sebanyak 1 jumlah laporan Hasil Pemeriksaan sebesar 100%, kegiatan tersebut dilaksanakan di RSUD hanya pendampingan.

7) *Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.110.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 81.901.000,00 atau 74,46 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD, yang direncanakan sebanyak 35 OPD dan terealisasi 35 OPD atau 100%

8) *Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 37.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.30.350.000,- atau 81,80 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah penilaian mandiri yang dilaksanakan dengan target 8 OPD dan terealisasi 8 OPD atau terealisasi 100%

9) *Pengendalian Gratifikasi*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp87.450.000,00. dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 87.322.000,00 atau 99,85 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah Dokumen/ Laporan dilaksanakan dengan target 1 Laporan dan terealisasi 1 Laporan atau terealisasi 100%.

10) *Reviu Penyerapan Anggaran*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp0 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Triwulan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Kota Dumai dilaksanakan dengan target 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan atau terealisasi 100%.

11) *Rencana Aksi Pemberantasan korupsi Terintegrasi*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 58.995.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.211.000,- atau 81,72 %. Adapun indikator kinerja keluarannya Laporan

12) *Evaluasi Rencana Aksi Pemberantasan korupsi*

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 43.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 44.370.000,- atau 67,30 %. Adapun indikator kinerja keluaranya Laporan

13) Peningkatan Kapabilitas APIP

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 70.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 69.390.000,- atau 99 %. Adapun indikator kinerja keluaranya Laporan

14) Saber Pungli

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 21.850.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.590.000,- atau 98,81 %. Adapun indikator kinerja keluaranya Laporan

15) Survei Penilaian Integritas

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 18.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.800.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaranya Laporan

b. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp.198.378.020,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.195.318.000,- atau 98,46%.

1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar sebesar Rp.198.378.020,- dengan relisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 195.318.000,- atau 96,76%.Indikator kinerja kegiatan ini jumlah aparatur yang mengikuti Diklat JFA dari yang direncanakan sebanyak 40 orang dan terealisasi 40 orang atau tingkat capaian 100%.

Sekretariat Daerah

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 237.748.968 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 205.365.872 atau 86,38%.

1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.3.500.000,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.2.800.000,- atau dengan persentase sebesar 80%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan keuangan semester I Sekretariat Daerah tahun 2020 dengan target 1 laporan dan realisasi 1 laporan atau dengan persentase 100%.

2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.49.397.300,00,- dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp.48.197.300,00,- atau dengan persentase sebesar 97,57%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah Kota Dumai dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 laporan atau dengan persentase 100%.

3) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.124.585.872,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.105.945.872,- atau dengan persentase 85.04%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah peringkat LPPD Kota Dumai dengan target pada peringkat 5 pada tahun 2020. Target dan realisasi ini belum terpenuhi dikarenakan LPPD masih dalam penilaian di kantor pusat.

4) Kegiatan Laporan Penyusunan SPM

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.17.074.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.12.660.000,- atau dengan persentase 74,14%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah laporan pencapaian target SPM dengan persentase adalah dengan target urusan/ bidang dan realisasi adalah 6 bidang atau dengan capaian realisasi 100%.

5) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.43.190.996,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.35.762.700,- atau 82,80%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen yaitu laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2019 dan rencana kerja (Renja) Tahun 2021 dari target dan realisasi adalah 2 dokumen atau dengan realisasi capaian kinerja 100%.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 6.399.240.936,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.979.261.005,- atau 93,44%.

1) Penyusunan Standar Satuan Harga

Kegiatan penyusunan standar satuan harga, dianggarkan sebesar Rp. 154.440.000,- realisasi sebesar Rp. 154.210.000,- atau sebesar 99,85%. Kegiatan penyusunan standar satuan harga tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian adalah buku standar harga barang dan jasa sebanyak 1 laporan. Adapun hasil kegiatan penyusunan standar satuan harga berupa buku standarisasi harga satuan barang dan jasa untuk keperluan Pemerintah Kota Dumai yang merupakan pedoman penetapan harga barang dalam penyusunan APBD Tahun 2021.

2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dianggarkan sebesar Rp. 1.095.909.000,- realisasi sebesar Rp. 1.043.241.702,- atau 95,19%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD sebanyak 1 dokumen. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan produk hukum daerah yang mengatur tentang APBD Tahun 2021 yaitu Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

3) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dianggarkan sebesar Rp.178.006.000,- realisasi sebesar Rp. 119.311.000,- atau 67,03%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD sebanyak 1 dokumen. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD merupakan penjabaran secara terperinci dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Kegiatan ini

menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp. 582.720.000,- realisasi sebesar Rp. 532.810.000,- atau 91,43%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebanyak 1 dokumen. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD menghasilkan produk hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

5) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp. 239.400.000,- realisasi sebesar Rp. 209.843.775,- atau 87,65%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD sebanyak 1 dokumen. Kegiatan ini menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2020.

6) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dianggarkan sebesar Rp.519.727.000,- realisasi sebesar Rp. 504.787.100,- atau 97,13%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 Perda. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menghasilkan Peraturan Daerah

Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019.

7) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dianggarkan sebesar Rp.77.190.650,- realisasi sebesar Rp. 69.104.800,- atau 89,52%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 Perwa. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2019.

8) Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang semula dianggarkan pada APBD 2020 namun dirasionalisasi menjadi Rp. 0 pada APBD Perubahan 2020 dengan alasan adanya wabah pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

9) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah dianggarkan sebesar Rp. 7.800.000,- realisasi sebesar Rp. 7.800.000,- atau 100%. Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah jumlah peserta bimbingan teknis dan sosialisasi manajemen /aset barang milik daerah sejumlah 130 orang.

10) Inventarisasi Aset

Kegiatan inventarisasi Aset dianggarkan sebesar Rp. 229.256.000,- realisasi sebesar Rp. 226.887.000,- atau 98,97%. Kegiatan inventarisasi aset tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan dokumen

penelusuran gedung dan bangunan, penelusuran aset yang berasal dari dana APBN dan APBD Provinsi yang dihibahkan Pemerintah Kota Dumai sebanyak 2 dokumen. Kegiatan inventarisasi Aset menghasilkan dokumen penelusuran gedung/ bangunan yang pendanaannya bersumber APBD dan APBD Provinsi.

11) Pengamanan Barang Milik Daerah

Kegiatan pengamanan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 117.290.000,- realisasi sebesar Rp. 95.914.500,- atau 81,78%. Kegiatan pengamanan barang milik daerah pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan Peningkatan Pengamanan Fisik Terhadap Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang bertujuan melakukan. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang bertujuan melakukan pengamanan aset dengan tujuan sesuai peruntukannya dan penggunaannya.

12) Penertiban Aset

Kegiatan Penertiban Aset dianggarkan sebesar Rp.179.000.000,- realisasi sebesar Rp. 175.695.000,- atau 98,15%. Kegiatan penertiban aset tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah penertiban aset berupa barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan OPD Baru sebanyak 36 OPD. Kegiatan penertiban aset menghasilkan kegiatan penertiban aset terhadap 36 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Dumai dengan maksud menertibkan seluruh aset milik Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan peruntukannya.

13) Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kegiatan Pemutakhiran Data Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dianggarkan sebesar Rp. 32.040.000,- realisasi sebesar Rp. 0. Adapun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya wabah pandemi COVID-19 sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

14) Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp.108.500.400,- realisasi sebesar Rp.108.500.400,- atau 100%. Kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan

adalah pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan sejumlah 1 paket. Kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan Kota Dumai. Pengembangan kegiatan ini sejumlah 1 paket. Aplikasi SIMDA Keuangan merupakan aplikasi yang digunakan Pemerintah Kota Dumai dalam pengelolaan sistem informasi dan manajemen keuangan Kota Dumai dengan tujuan tertib administrasi keuangan.

15) Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah

Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 79.547.550,- realisasi sebesar Rp. 57.914.500,- atau 72,80%. Kegiatan penyusunan data administrasi keuangan daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah (1) Register SP2D BL dan BTL Perbulan sejumlah 1.500 lembar; (2) Buku pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD sejumlah 36 buku; (3) Register SP2D per SKPD sejumlah 3.500 lembar.

16) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan

Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan dianggarkan sebesar Rp. 228.263.112,- realisasi sebesar Rp. 216.141.312,- atau 94,69%. Kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah tahunan tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah jumlah laporan barang milik daerah tahunan sejumlah 1 laporan.

17) Rekonsiliasi Aset SKPD

Kegiatan Rekonsiliasi Aset SKPD dianggarkan sebesar Rp.200.196.000,- realisasi sebesar Rp. 186.797.000,- atau 93,31%. Kegiatan Rekonsiliasi Aset SKPD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah jumlah OPD yang dilaksanakan rekonsiliasi sejumlah 1 laporan. Kegiatan rekonsiliasi aset merupakan kegiatan rekon barang milik daerah diseluruh OPD yang ada di Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan pada 36 OPD yang ada di Kota Dumai. Tujuan dari kegiatan rekonsiliasi aset OPD yaitu agar pengelolaan daerah tepat waktu, akuntabel dan transparan.

18) Penilaian Aset/Barang Milik Daerah

Kegiatan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp.351.122.200,- realisasi sebesar Rp. 350.602.900,- atau 99,85%. Kegiatan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah sebesar 100%, dengan capaian kegiatan

terlaksananya penilaian terhadap BMD dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan sejumlah 1 laporan. Kegiatan penilaian aset/barang milik daerah merupakan kegiatan penilaian aset/barang milik daerah yang dilaksanakan pada 36 OPD yang ada di Kota Dumai. Penilaian aset/barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka penghapusan aset sehingga dilakukan penilaian aset terlebih dahulu termasuk juga appraisal aset.

- 19) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp. 156.550.000,- realisasi sebesar Rp.155.900.000,- atau 99,58%. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebesar 100% dengan capaian kegiatan jumlah pejabat pembantu pengelola barang milik daerah yang dikirim sejumlah 17 orang. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya pejabat pengelola barang milik daerah merupakan kegiatan yang mengirimkan pejabat pembantu pengelola barang milik daerah untuk mengikuti bimtek/sosialisasi terhadap aturan dibidang aset. Adapun kegiatan ini dengan mengirimkan sejumlah 17 orang yang dimaksudkan pejabat pembantu pengelola barang milik daerah memahami semua siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 20) Penyusunan standar biaya
Kegiatan Penyusunan standar biaya dianggarkan sebesar Rp.284.571.400,- realisasi sebesar Rp.270.942.650,- atau 95,21%. Kegiatan Penyusunan standar biaya sebesar 100% dengan capaian kegiatan buku standar biaya sejumlah 1 dokumen. Kegiatan penyusunan standar biaya menghasilkan buku standar biaya tahun anggaran 2021. Buku standar biaya tahun anggaran 2021 digunakan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.
- 21) Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp.141.958.000,- realisasi sebesar Rp.137.658.000,- atau 96,97%. Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD sebesar 100% dengan capaian kegiatan jumlah skpd dalam pertemuan rekonsiliasi yang dilaksanakan sejumlah 1 laporan. Kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD

dilaksanakan setiap bulannya kepada 36 SKPD yang ada di Kota Dumai. Kegiatan ini dimaksudkan mensinkronkan antara realisasi belanja dan pendapatan baik manual maupun by system sehingga sesuai antara keduanya.

22) Penyusunan Ketentuan-ketentuan Barang Milik Daerah

Kegiatan Penyusunan Ketentuan-ketentuan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp.90.600.000,- realisasi sebesar Rp.89.320.000,- atau sekitar 98,59%. Kegiatan Penyusunan Ketentuan-ketentuan Barang Milik Daerah sebesar 100% dengan 1(satu) laporan. Penyusunan Ketentuan-ketentuan Barang Milik Daerah.

23) Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD

Kegiatan Sosialisasi pedoman Penyusunan APBD yang dianggarkan pada APBD Tahun 2020 namun dirasionalisasi menjadi Rp. 0 pada APBD Perubahan 2020 dengan alasan dilarangnya segala bentuk kegiatan yang dapat membuat berkumpul orang ramai selama dampak pandemi COVID-19.

24) Rapat Kerja dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dianggarkan sebesar Rp. 235.000.000,- realisasi sebesar Rp.218.954.259,- atau seitar 93,17%. Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran sebesar 100% dengan 1 (satu) laporan.

25) Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung

Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.39.000.000,- realisasi sebesar Rp.38.979.500,- atau 99,95%. Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung sebesar 100% dengan capaian kegiatan Jumlah laporan rekonsiliasi belanja tidak langsung sejumlah 8 laporan. Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung dimaksudkan mensinkronkan antara pengeluaran yang sudah dikeluarkan baik manual maupun by system sehingga sesuai antara keduanya.

26) Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan Provinsi

Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan Provinsi dianggarkan sebesar Rp.92.596.000,- realisasi sebesar Rp.92.438.000,- atau 99,83%. Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan provinsi sebesar 100% dengan capaian kegiatan Data dana pusat dan provinsi sebanyak 1 laporan. Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana

Transfer Pusat dan Provinsi untuk mensinkronkan data dana transfer pusat dan provinsi baik sifatnya dana perimbangan maupun dana bagi hasil pajak dan non pajak.

27) Bimtek Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Kegiatan Bimtek Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang semula dianggarkan pada APBD Tahun 2020 namun dirasionalisasi sebesar Rp. 0 pada APBD Perubahan 2020 dengan alasan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan ini di masa pandemi COVID-19.

28) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp. 65.185.600,- realisasi sebesar Rp.64.955.000,- atau 99,65% Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai dengan capaian sebesar 100% dengan sasaran jumlah laporan keuangan akhir tahun kota Dumai sejumlah 1 laporan. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kota Dumai Tahun 2019 dalam rangka persiapan penyusunan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

29) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp. 20.733.600,- realisasi sebesar Rp. 16.633.600,- atau 80,23%. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai sebesar 100% dengan capaian kegiatan jumlah laporan keuangan semesteran kota Dumai sejumlah 1 laporan. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Dumai Tahun 2020.

30) Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai

Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp. 118.799.350,- realisasi sebesar Rp. 105.769.350,- atau 89,03%. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai realisasi fisik sebesar 100 % dengan capaian kegiatan jumlah laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah kota Dumai sejumlah 1 laporan. Kegiatan

Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR). Kegiatan TP-TGR dimaksudkan untuk penyelesaian kerugian negara.

31) Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Keuangan Serta Aset Daerah.

Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip keuangan serta aset daerah Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp.25.800.000,- realisasi sebesar Rp.24.600.000,- atau 95,35%. Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip keuangan serta aset daerah Kota Dumai realisasi fisik sebesar 100% dengan capaian kegiatan sejumlah 500 dokumen.

32) Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp.19.253.800,- realisasi sebesar Rp. 14.520.800,- atau 75,42%. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Dumai sebesar 100% dengan capaian kegiatan sejumlah 1 (satu) laporan.

33) Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja Semesteran I dan II Akhir Tahun Anggaran

Kegiatan Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja Semesteran I dan II Akhir Tahun Anggaran dianggarkan sebesar Rp.107.106.000,- realisasi sebesar Rp.82.696.983,- atau 77,21%. Kegiatan Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja Semesteran I dan II Akhir Tahun Anggaran sebesar 100% dengan capaian kegiatan sejumlah 1 (satu) laporan.

34) Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan pada APBD Tahun 2020 namun kemudian dirasionalisasi menjadi Rp. 0 pada APBD Perubahan 2020 dengan alasan masih belum keluarnya aturan dari Pemerintah Pusat berkaitan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan daerah.

35) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp.237.918.500,- realisasi sebesar Rp.228.573.500,- atau sekitar 96,07%.

Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebesar 100% dengan capaian kegiatan sejumlah 1 (satu) laporan.

36) Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBM

Kegiatan Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBM dianggarkan sebesar Rp.38.350.000,- realisasi sebesar Rp.32.348.900,- atau sekitar 84,35% kegiatan Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBM realisasi fisik sebesar 100% dengan capaian 2 (dua) Dokumen yaitu Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM).

37) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dianggarkan sebesar Rp. 345.410.774,- realisasi sebesar Rp.345.409.474,- atau 100%. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) sebesar 100%, dengan capaian kegiatan sistem informasi barang milik daerah (SIM-BMD) dan Entry SIMDA BMD sejumlah 1 paket. Kegiatan pengembangan sistem informasi barang milik daerah (SIMDA-BMD) merupakan kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Kota Dumai. Pengembangan kegiatan ini sejumlah 1 paket. Aplikasi SIMDA-BMD merupakan aplikasi yang digunakan Pemerintah Kota Dumai dalam pengelolaan sistem informasi dan manajemen barang milik daerah Kota Dumai dengan tujuan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 97,884,900.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 96,385,400.00 atau 98.47%.

1) *Pengumpulan Data;*

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 52.988.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.482.800,- atau sebesar 99.05%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah OPD yang diakuisisi dengan target 5 OPD terealisasi 100%.

Sedangkan Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase terpeliharanya dokumen/arsip yang tersimpan dengan target sebanyak 85%.

2) *Pengklasifikasian Data;*

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 44,896,600.00,- dan terealisasi sebesar Rp. 43,902,600.00,- atau sebesar 97.79%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah OPD yang diakuisisi dengan target 5 OPD terealisasi 100%. Sedangkan Outcome dari kegiatan ini adalah Persentase terpeliharanya dokumen/arsip yang tersimpan dengan target sebanyak 85%.

b. Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 25,000,000.00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24,819,240.00 atau 99,28%.

1) *Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah;*

Jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.819.240,- atau 99.28%, dengan Indikator Kinerja keluaran (*Out put*) dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya dokumen kearsipan Kota Dumai dengan realisasi 1 kali yang dipelihara atau terealisasi 100%, Sedangkan hasil (*Out come*) dari kegiatan ini adalah Persentase terpeliharanya dokumen/arsip yang tersimpan dengan target sebanyak 85%.

Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 4.459.772.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.452.242.128,- atau 99.83% melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.991.829.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 3.989.264.600,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 99,94 %;
- 2) Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.872.000,- (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 200.222.000,- (dua ratus juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 99,68%;

3) Kegiatan Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 43.575.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 42.850.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,34 %;

4) Kegiatan Pengelolaan website Pemko Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.910.000,- (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 14.240.685,- (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 95,51%;

5) Kegiatan Pengelolaan server dan aplikasi data center Pemko Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.985.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 30.213.743,- (tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar 97,51 %;

6) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Comand Center Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 100 %;

7) Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan e-Government

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 102.573.300,- (seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 101.223.300,- (seratus satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 98,68%

8) Kegiatan Penyelenggaraan dan percepatan tata kelola e-Government

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.227.800,- (empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 14.227.800,- (empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 100 %;

b. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 16.577.753,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.577.753,- atau 100% melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 16.577.753,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 16.577.753,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar 100%;

c. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Pada Tahun 2020, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.903.080.410,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.847.259.410,- atau 97.07% melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 294.270.377,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 282.610.377,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sebesar 96,04 %;

2) Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.561.000,- (empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 %;

3) Kegiatan Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 299.240.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 297.240.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,33%;

4) Kegiatan Penyebarluasan informasi hari-hari besar

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 96.715.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 96.715.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) atau sebesar 100%;

5) Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.906.048,- (delapan juta sembilan ratus enam ribu empat puluh delapan rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 8.906.048,- (delapan juta sembilan ratus enam ribu empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 100%;

6) Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.199.387.985,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.161.787.985,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 96,87%;

Sekretariat DPRD

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp. 7.346.056.600,- dengan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 6.515.247.051,- atau 88,69%.

1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.447.017.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.

1.243.613.844,- atau 85,94%. Adapun indikator kinerja keluarannya jumlah pembahasan pansus dalam pembahasan rancangan peraturan daerah yang disetujui menjadi peraturan daerah dengan target 8 pansus dan terealisasi 4 pansus atau 50%.

2) Hearing / Dialog dan Koordinasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 281.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 110.245.000,- atau 39,18%. Adapun indikator jumlah pertemuan atau dialog dengan stakeholder bersama DPRD Kota Dumai target 3 kegiatan dan realisasi terlaksana 1 kegiatan atau 33,33% dengan alasan kegiatan ini dilaksanakan pada saat masa pandemi Covid-19 yang masih belum memperbolehkan diadakannya pertemuan-pertemuan besar demi mengurangi penyebaran virus.

3) Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 131.120.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 52.213.000,- atau 39,82%. Adapun indikator kerjanya adalah jumlah alat kelengkapan DPRD yang melaksanakan rapat dengan target 100% dan terealisasi 100%.

4) Rapat – rapat Paripurna

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 569.480.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 330.107.812,- atau 57,97%. Adapun target indikator kinerja keluarannya adalah jumlah rapat paripurna DPRD Kota Dumai dengan target 33 Paripurna dan terealisasi 32 paripurna atau 96,9%.

5) Kegiatan Reses

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.353.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.327.615.135,- atau 98,06%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah reses yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Dumai dengan realisasi 2 kegiatan/masa sidang anggota DPRD kota Dumai.

6) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.730.179.443,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.690.538.908,- atau 97,71%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah anggota DPRD Kota Dumai yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan tingkat capaian 100% dengan alasan terlaksananya seluruh kegiatan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai.

7) Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 919.667.657,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 918.929.083,- atau 99,92%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah kabupaten/kota yang dikunjungi DPRD Kota Dumai dengan target 9 Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 9 Kabupaten/Kota atau 100% dengan alasan terlaksananya seluruh kunjungan kerja Komisi DPRD Kota Dumai.

8) Penyampaian Aspirasi Masyarakat secara Langsung

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.025.000,- atau 73,50%.

Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah penyerapan aspirasi masyarakat langsung kepada DPRD Kota Dumai dengan target kegiatan 5 pertemuan dengan realisasi 3 kegiatan dengan alasan kegiatan ini terlaksana ditengah kondisi yang masih marak dengan Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan terbatas.

9) Pengkajian, Penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS, RAPBD KUA – PPAS, RAPBD-P, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama beserta Pronosis.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 487.892.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.456.559.269,- atau 93,58%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah pembahasan KUA-PPAS / KUPA-PPAS, Perubahan, Perda RAPBD/P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama beserta Prognosis dan Tindak Lanjut LHP BPK RI dengan target 3 Perda dan realisasi 3 Perda atau 100%

10) Penyediaan Alat Kelengkapan DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 410.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 374.400.000,- atau 91,23%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah tenaga ahli, staf tenaga ahli, fraksi-fraksi, tenaga ahli fraksi DPRD Kota Dumai dengan target 8 fraksi dan realisasi 8 Fraksi atau 100% dengan alasan terlaksananya tenaga ahli untuk seluruh fraksi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Program perencanaan pembangunan daerah

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.228.326.879 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 944.807.179 atau 76,92%.

- 1) Kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dialokasikan dana sebesar Rp. 121.975.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 85.010.000,- atau 69,69% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah forum OPD yang dilaksanakan sebanyak 1 Forum.
- 2) Pada Kegiatan Penyusunan rancangan RPJMD dialokasikan dana sebesar Rp. 167.350.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 62.993.200,- atau 37,64% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen RPJMD sebanyak 1 Dokumen.
- 3) Pada Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD dialokasikan dan sebesar Rp. 210.550.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 154.520.700,- atau 73,39% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen RKPD dan dokumen perubahan RKPD yang disusun sebanyak 2 Dokumen.
- 4) Pada Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 145.580.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 123.005.000,- atau 84,49% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional sebanyak 3 Kali.

- 5) Pada Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 71.976.879,- dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 69.526.879,- atau 96,6% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen LKjIP yang disusun tepat waktu sebanyak 1 Dokumen.
- 6) Pada Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) dialokasikan dana sebesar Rp.65.500.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 60.000.000,- atau 91,6% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu sebanyak 1 Dokumen.
- 7) Pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dialokasikan dana sebesar Rp. 61.800.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 46.100.000,- atau 74,6% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen evaluasi RKPD sebanyak 4 Dokumen.
- 8) Pada Kegiatan Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksidaerah sustainable development goals dialokasikan dana sebesar Rp. 82.195.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 75.526.900,- atau 91,89% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s sebanyak 1 Dokumen.
- 9) Pada Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dialokasikan dana sebesar Rp. 106.750.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 100.750.000,- atau 94,38% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebanyak 1 Dokumen. Pada Kegiatan Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus dialokasikan dana sebesar Rp. 140.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 120.475.100,- atau 86,05% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus sebanyak 1 Dokumen.
- 10) Pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan dialokasikan dana sebesar Rp. 54.650.000,- dari dana yang dialokasikan

dapat direalisasikan Rp. 46.899.400,- atau 85,82% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan sebanyak 1 Dokumen.

b. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 99.002.481 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 94.065.370 atau 95,01%.

- 1) Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dialokasikan dana sebesar Rp. 99.022.481,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 94.065.370,- atau 95,01% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi sebanyak 1 Dokumen.

c. Program perencanaan sosial dan budaya

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 278.574.700 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 271.112.500 atau 97,32%.

- 1) Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dialokasikan dana sebesar Rp. 68.400.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 66.786.700,- atau 97,64% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya sebanyak 1 Dokumen.
- 2) Pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dialokasikan dana sebesar Rp. 40.050.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 37.580.000,- atau 93,83% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya sebanyak 1 Dokumen.
- 3) Pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dialokasikan dana sebesar Rp. 40.050.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 37.580.000,- atau 93,83% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya sebanyak 1 Dokumen. 98.840.200,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 96.222.400,- atau 97,35% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM sebanyak 1 Dokumen.

- 4) Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan dialokasikan dana sebesar Rp. 71.284.500,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 70.523.400,- atau 98,93% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur sebanyak 1 Dokumen.

Badan Pendapatan Daerah

a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.173.609.163 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.757.467.813 atau 90,03%.

1) Kegiatan Pemeliharaan SIMPATDA

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah tersedianya data wajib pajak daerah yang valid sebesar 90%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 510.124.775,- terealisasi sebesar Rp 462.110.141,-, atau sebesar 90,59%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 94,44% artinya tersedianya data wajib pajak daerah yang valid sebesar 85%.

2) Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah tercapainya sosialisasi pajak daerah melalui sarana promosi pajak sebanyak 3 media. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 276.259.000,- terealisasi sebesar Rp 198.971.000,-, atau sebesar 72,02%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tercapainya sosialisasi pajak daerah melalui sarana promosi pajak, yaitu : (1) iklan radio, (2) spanduk dan baleho yang dipasang pada panggung reklame yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai; (3) pengumuman melalui media cetak lokal dengan total sebanyak 3 (tiga) media.

3) Kegiatan Monitoring Penyampaian SPPT PBB

Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak dengan target 7 kecamatan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 438.566.200,- terealisasi sebesar Rp 403.136.200,-, atau sebesar

- 91,92%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya penyampaian SPPT PBB kepada wajib Pajak pada 7 kecamatan.
- 4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah
Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah monitoring dan evaluasi pendapatan daerah yang telah dilaksanakandengan target sebanyak 4 kali. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 103.014.000,- terealisasi sebesar Rp 73.671.000,-, atau sebesar 71,50%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran
100% artinya terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan daerah sebanyak 4 kali.
- 5) Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran dan tunggakan pajakdengan target 400 SKPD. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 276.460.000,- terealisasi sebesar Rp 214.780.000,-, atau sebesar 77,69%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran
161,25% artinya terpenuhinya target terlaksananya kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran dan tunggakan pajak sebanyak 645 SKPD dari target awal sebanyak 400 SKPD.
- 6) Kegiatan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah tersedianya Data Potensi wajib pajak daerah dengan target 3.000 WP/WR. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 236.772.500,- terealisasi sebesar Rp 235.237.548,-, atau sebesar
99,35%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 88,60% artinya tersedianya data potensi wajib pajak daerah sebanyak 2.658 WP/WR dari target awal sebanyak 3.000 WP/WR.
- 7) Kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai
Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah tersusunnya data penerimaan daerah dengan unit kerja penerima PAD yang valid dengan target 4 laporan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 175.732.000,- terealisasi sebesar Rp 155.882.726,-, atau sebesar 88,70%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran
100% artinya tersusunnya data penerimaan daerah dengan unit kerja

penerima PAD yang valid sebanyak 4 Laporan, yaitu Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2020.

8) Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak PBB P2

Indikator kinerja kegiatannya adalah Sosialisai pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat kota Dumai dengan target 7 Kecamatan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 125.459.538,- terealisasi sebesar Rp 125.459.538,-, atau sebesar 100 %. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya

Meningkatnya kesadaran WP untuk membayar PBB-P2 di 7 Kecamatan.

9) Kegiatan Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah

Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah berkas keberatan Pajak/Retribusi yang dilayani dengan target 35 berkas. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 88.824.050,- terealisasi sebesar Rp 54.300.000,-, atau sebesar

61,13%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 108,57% artinya terpenuhinya berkas keberatan Pajak/Retribusi yang dilayani sebanyak 38 berkas dari target awal sebanyak 35 berkas.

10) Kegiatan Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak

Indikator kinerja kegiatannya adalah persentase tercapainya pelayanan prima kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan target 100%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 627.969.250,- terealisasi sebesar Rp 607.504.273,-, atau sebesar 96,74%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tercapainya pelayanan prima kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100%.

11) Kegiatan Verifikasi Penetapan Pajak

Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah tercapainya verifikasi penetapan pajak daerah dengan target 200 WP. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 79.350.000,- terealisasi sebesar Rp 60.909.000,-, atau sebesar

76,76%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 101% artinya tercapainya Verifikasi penetapan Pajak Daerah sebanyak 202 WP dari target

awal sebanyak 200 WP.

12) Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak

Indikator kinerja kegiatannya adalah persentase pengawasan, penertiban dan penindakan objek pajak yang telah dilaksanakan dengan target 5 WP. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 146.740.000,- terealisasi sebesar Rp 138.264.800,-, atau sebesar 94,22%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran

120% artinya terlaksananya pengawasan, penertiban dan penindakan objek sebanyak 6 WP dari target 5 WP.

13) Kegiatan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah

Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah pemeriksaan Wajib Pajak Daerah yang telah dilakukan dengan target 3 kali. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 211.238.500,- terealisasi sebesar Rp 206.676.552,-, atau sebesar 97,84%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100 % artinya terpenuhinya target terlaksananya Pemeriksaan Wajib Pajak sebanyak 3 kali pemeriksaan, yaitu: (1) Pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), (2) Pemeriksaan Pajak Hotel, (3) Pemeriksaan Restoran dan Rumah Makan, dan (4) Pemeriksaan Pajak Hiburan.

14) Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah

Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait tata kelola pendapatan yang disusun dengan target 5 Perda. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 126.910.000,- terealisasi sebesar Rp 126.328.200,-, atau sebesar 99,54%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 60%.

15) Kegiatan Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi daerah

Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah terdistribusinya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dengan target 1.000 SKPD/SKRD. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 15.380.000,- terealisasi sebesar Rp 11.400.000,-, atau sebesar 74,12%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran

71,30% artinya terdistribusinya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak sebanyak 713 SKPD/SKRD dari target awal sebanyak 1.000

SKPD/SKRD.

16) Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar

Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah terlaksananya penilaian khusus Objek Pajak Non Standar dengan target 10 OP. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 306.040.400,- terealisasi sebesar Rp 295.565.874,-, atau sebesar 96,58%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 200% artinya terlaksananya Penilaian Khusus Objek Pajak Non Standar sebanyak 20 Objek Pajak dari target awal sebanyak 10 OP.

17) Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah tersedianya sarana promosi dan informasi dengan target 1 paket. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 3.000.000,- terealisasi sebesar Rp 70.000,-, atau sebesar 23,33%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% dengan tersedianya Sarana Promosi dan Informasi sebanyak 1 paket.

18) Kegiatan Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR

Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 dengan target 3 Kelurahan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 44.947.950,- terealisasi sebesar Rp 40.507.950,-, atau sebesar 90,06%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran

100% artinya Terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 pada 3 kelurahan di Kota Dumai, yaitu: (1) Kelurahan Ratu Sima, (2) Kelurahan Bukit Datuk, (3) Kelurahan Jaya Mukti,

19) Kegiatan Penerapan Sistem Online Pembayaran Pajak Daerah

Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah terwujudnya penerapan transaksi secara online kepada wajib pajak dengan target 100 WP. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 113.510.000,- terealisasi sebesar Rp

100.890.011,-, atau sebesar 88,88%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terwujudnya Terwujudnya ketaatan WP dalam melakukan pembayaran pajak dengan kemudahan pelaporan dan pembayaran melalui aplikasi berbasis Android

20) Kegiatan Penyusunan Prediksi Penerimaan Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah

Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah dokumen prediksi pendapatan yang disusun dengan target 2 dokumen. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp 90.990.000,-, atau sebesar

90,99%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersusunnya dokumen prediksi pendapatan sebanyak 2 dokumen, yaitu Dokumen Prediksi APBD Murni Tahun Anggaran 2021 dan Dokumen Prediksi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

21) Kegiatan Verifikasi BPHTB

Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah tersedianya data verifikasi BPHTB yang valid dengan target 150 OP. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 154.505.500,- terealisasi sebesar Rp 141.433.000,-, atau sebesar

91,54%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 53,33% artinya tersedianya data verifikasi BPHTB yang valid sebanyak 80 OP dari target awal sebanyak 150 OP.

22) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatannya adalah persentase barang milik perangkat daerah yang terinventarisir dengan baik dengan target 90%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 12.750.000,- terealisasi sebesar Rp 12.750.000,-, atau sebesar 100%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tercapainya Barang Milik Perangkat Daerah yang terinventarisir dengan baik sebanyak 90%.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 31.500.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.27.800.000 atau 88,25% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

1) Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Indikator kinerja kegiatannya yaitu terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kota Dumai dengan target 90%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 15.600.000,00 terealisasi sebesar Rp 13.920.000,00 atau sebesar

- 89,23%. Kegiatan ini bertujuan menciptakan kerukunan antar umat beragama di Kota Dumai melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- 2) Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Indikator kinerja kegiatannya yaitu terciptanya kerukunan antar suku di Kota Dumai dengan target 90%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 15.900.000,00 terealisasi sebesar Rp 13.920.000,00 atau sebesar 89,23%. Kegiatan ini bertujuan menciptakan kerukunan antar suku di Kota Dumai melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Satuan Polisi Pamong Praja

a. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 321.203.400 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 318.976.400 atau 99,31% dengan capaian indikator program yaitu peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan target sebesar 1 kali, dan terealisasi 1 kali atau 100%.

- 1) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat, dialokasikan dana sebesar Rp. . 321.203.400 dan terrealisasi sebesar Rp. 318.976.400 atau sebesar 99,31. Adapun capaian indikator (out put) dari target 1 kali terealisasi 1 kali atau 100%.

16. Sasaran 7.1. Meningkatnya pendapatan petani

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.483.162.950,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.464.098.200,00 atau 96,05% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- 1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.270.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.264.446.000,00 atau 97,94% dari anggaran. Adapun indikator kinerja

keluaran ; Jumlah kelompok tani yang terlatih dan dikembangkan sebanyak 15 Kelompok dengan realisasi 15 Kelompok.

2) Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 213.162.950,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 199.652.200,00 atau 93,66% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Jumlah peternak yang terlatih 75 KK dengan realisasi 75 KK Orang.

c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.213.349.861,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.176.653.064 atau 98,34% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.169.664.861,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.133.173.064,00 atau 98,32% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Jumlah penyediaan alat dan mesin pertanian 13 unit dengan realisasi 13 Unit, Pembangunan Box Culvert dan Dwiker 4 Unit dengan realisasi 4 Unit, Terlaksananya Land Clearing / Pembersihan Lahan di KPT 1 Kali dengan realisasi 1 Kali, Terlaksananya pembuatan saluran air/parit 1 unit dengan realisasi 1 kali, Terbangunnya saung/rumah istirahat dan kelengkapannya 1 unit dengan realisasi 1 unit, Terbangunnya tempat parkir mobil dan motor 1 unit dengan realisasi 1 unit, Terbangunnya saluran air (long storage) 1 unit dengan realisasi 1 unit, Pembangunan Irigasi Sumur Air Dangkal 4 Unit dengan realisasi 4 Unit, Tersedianya sarana dan prasarana alat mesin pertanian 39 unit dengan realisasi 39 unit. Realisasi hanya 76,27 % dikarenakan untuk pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal dari jumlah 5 unit hanya terlaksana 3 unit. 2 unit tidak terlaksana karena terkendala regulasi dan persyaratan kelompok tani penerima bantuan.

2) Kegiatan Penyuluh Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.43.685.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 43.480.000,00 atau 99,53% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ;

Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan 1 kali dengan realisasi 1 kali.

d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.507.235.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.497.027.250,00 atau 97,99% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

1) Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.27.200.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.780.000,00 atau 98,46% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Jumlah Bimtek / temu lapang / sosialisasi budidaya tanaman perkebunan 4 kali dengan realisasi 4 kali.

2) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 480.035.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 470.247.250,00

e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.343.925.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.341.257.875,00 atau 99,22% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.197.525.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.194.925.000,00 atau 98,68% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pertemuan bulanan, teknis dan penyusunan program penyuluhan 12 bulan dengan realisasi 12 bulan.

2) Kegiatan Penyuluhan dan Pedampingan Bagi Pertanian/Perkebunan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.146.400.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.146.332.875,00 atau 99,95% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pelatihan bagi pemuda tani/petani milenial 1 kali dengan realisasi 1 kali, Terlaksananya magang bagi pemuda tani / petani milenial 1 kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan.

Dinas Perikanan

a. Program pengembangan budidaya perikanan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.040.303.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 991.160.394,- atau sebesar 95,28%.

- 1) Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul
Anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 910.933.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 865.310.000,- atau 94,99 %. Kegiatan ini memiliki Tolak ukur hasil pekerjaan berupa produksi benih ikan sebanyak 500.000 ekor. Realisasi fisik telah dilaksanakan 128,32%, Produksi benih dicapai sebesar 641.580 ekor.
- 2) Kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Anggaran pada kegiatan sebesar 125.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 122.800.000 atau sebesar 98,08%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran terpenuhinya terpenuhinya operasional pembinaan pelaku usaha perikanan sebanyak 40 kali dan hasilnya mendapat pendampingan pada kelompok budidaya perikanan sebanyak 72 orang kali. Realisasi kegiatan berupa pendampingan tani pembudidaya 28 kelompok oleh 5 (lima) orang tenaga honorer perikanan dan PNS pada Bidang Budidaya, nilai produksi pada tahun 2020 sebesar 284,87 ton dari pembudidayaikan Kota Dumai, Secara rinci tercatat produksi perikanan air tawar (kolam dan keramba) sebesar 176,63 ton, produksi budidaya air payau 110,91 ton. Bila di bandingkan dengan target produksi budidaya perikanan tahun 2020, maka dapat disimpulkan telah tercapai 104,32%.
- 3) Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
Anggaran pada kegiatan sebesar 4.170.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 4.050.000 atau sebesar 97,12%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran Terlaksananya pemantauan usaha pembudidaya 31 kali dan hasilnya Realisasi kegiatan pemantauan usaha pembudidaya 31 kali, Secara rinci tercatat produksi perikanan air tawar (kolam dan keramba) sebesar 176,63 ton, produksi budidaya air payau 110,91 ton. Bila di bandingkan dengan target produksi budidaya perikanan tahun 2020, maka dapat disimpulkan telah tercapai 104,32%.

b. Program pengembangan perikanan tangkap

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.575.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.575.000,- atau sebesar 100%.

- 1) Kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Realisasi Keuangan Sampai dengan bulan Desember 2020, untuk pelaksanaan kegiatan adalah sejumlah Rp. Rp.100.575.000,- dan Realisasi serapan anggaran kegiatan sebesar Rp.100.575.000,- atau 100%. Pada kegiatan ini telah terlaksana 100% karena pada kegiatan ini merupakan honorarium tenaga pendamping bidang kenelayan sebanyak 3 orang, belanja operasional pembinaan untuk tenaga pendamping non PNS 240 orang/kali hasil kunjungan terhadap 30 KUB (Kelompok Usaha Bersama). Realisasi kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap hanya ada 18 kelompok yang masih aktif pelaksanaannya.
 - a) KUB Lomek, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
 - b) KUB Batu Karang, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
 - c) KUB Kuda Laut, berlokasi di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan.
 - d) KUB Nelayan Bersatu Jaya, berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan
 - e) KUB Terbit Fajar, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
 - f) KUB Nelayan Bakti, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
 - g) KUB Maju Jaya, berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan.
 - h) KUB Harapan Baru, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
 - i) KUB Basilam Pesisir, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
 - j) KUB Hiu Mas, berlokasi di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan

- k) KUB Muara Geniut, berlokasi di Kelurahan Geniot, Kecamatan Sungai Sembilan
- l) KUB Nelayan Tuna, berlokasi di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur
- m) KUB Teluk Makmur, berlokasi di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai.
- n) KUB Guntung Sejati, berlokasi di Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai
- o) KUB Nelayan Sejahtera, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai
- p) KUB Medang Kampai Jaya, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.
- q) KUB Nelayan Bunga Mawar, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.
- r) KUB Mundam Jaya, berlokasi di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai

17. Sasaran 7.2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.071.933.234,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.029.027.224,00 atau 97,93%.

- 1) Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.77.396.234,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.77.246.234,00 atau 99,81% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pendataan SP dan ubinan produktivitas tanaman 12 bulan dengan realisasi 12 bulan.
- 2) Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.142.380.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.142.298.300,00 atau 99,94% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran;

Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh pemangku kepentingan tingkat kota/propinsi 2 kali dengan realisasi 2 kali.

3) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 620.450.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 605.821.800,00 atau 97,64%. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pelatihan pemanfaatan pekarangan 40 orang dengan realisasi 40 orang, Terlaksananya pengembangan tanaman buah dalam pot 2 kelompok dengan realisasi 2 kelompok.

4) Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.83.085.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.83.038.644,00 atau 99,94% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Pendampingan kegiatan APBN hortikultura dan tanaman pangan 1 Kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan.

5) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.12.350.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.12.350.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI 5 Kali dengan realisasi 5 Kali.

6) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu produk perkebunan, produk pertanian

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.136.272.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.108.272.246,00 atau 97,54% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya penanaman tanaman buah-buahan di KPT 3.000 batang dengan realisasi 3.000 batang, Pengembangan Tanaman Cabe 14 Ha dengan realisasi 14 Ha, Pengembangan tanaman nenas 12 Ha dengan realisasi 12 Ha, Pengembangan Jagung Manis 2 ha dengan realisasi 2 Ha dan pengembangan Semangka 3 Ha dengan realisasi 3 Ha.

b. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.363.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.349.800.000,00 atau 96,36% yang dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini :

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.178.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.168.000.000,00 atau 94,38% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE 1 kegiatan dengan realisasi 1 Kegiatan, Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik verteriner di puskesmas 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, Terlaksananya pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan 1 kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan.
2. Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.185.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.181.800.000,00 atau 98,27% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Pengawasan Peredaran BAH/HBAH 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan, Terlaksananya Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban 1 Kali dengan realisasi 1 kali.

Dinas Perikanan

a. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 40.800.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 40.800.000 atau 100%.

- 1) Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 40.800.000,- dan realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 40.800.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa terpenuhinya Jasa Keamanan Kantor UPT. BBI Air Payau sebanyak 24 OB dan terealisasi 100%.

b. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 99.610.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 99.610.000 atau 100%.

- 1) Kegiatan peningkatan keanekaragaman produk hasil olahan perikanan.
Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 99.610.000,- dan realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 99.610.000,- atau sebesar 100% dan target capaian kegiatan (output) 1. Terlaksananya lomba masak menu serba ikan sebanyak 2 kali 2. Terlaksananya sosialisasi gemarikan untuk stunting nilai konsumsi ikan sebanyak 8 kali, realisasi kegiatan untuk lomba masak menu serba ikan sebanyak 2 kali dan terlaksananya sosialisasi gemarikan untuk stunting sebanyak 8 kali atau sebesar 100%.

18. Sasaran 8.1. Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah

Dinas Perdagangan

a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 128.816.145 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 104.339.145 atau 81%.

- 1) Pengembangan pelayanan UPT Metrologi Legal

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 114,266,145.00 (seratus empat belas juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 93,539,145.00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah) atau 81,86%.

- 2) Pengembangan Sarana Pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan kemetrologian

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.14,550,000.00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.10,800,000.00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau 74,23%.

b. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Pada tahun 2020, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 87.524.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 86.507.384 atau 98,84%.

- 1) Kegiatan Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 66,924,000.00 (enam puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 66,247,510.00 (enam puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau 98,99%.
- 2) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat
Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 20,600,000.00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 20,259,874.00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 98,35%.

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Pada tahun 2020, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 44.802.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp 44.802.500,- atau 100%.

- 1) Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
Indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah pelatihan bagi IKM dengan target 15 IKM. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.29.722.500,- terealisasi Rp.29.722.500,-. Atau 100%.
- 2) Kegiatan Pembinaan Industri kerajinan dan industri kreatif
Indikator kinerja kegiatannya yaitu terlaksananya jumlah pembinaan dan promosi industri kerajinan daerah bekerjasama dengan dekranasda dengan target 100%. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.080.000,- terealisasi Rp. 15.080.000,-. Atau 100%.

19. Sasaran 8.2. Meningkatnya investasi di Kota Dumai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp 159150000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 156177410,- atau sebesar 98,13%.

1) *Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*

Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan LKPM dengan target 15 Perusahaan atau capaian realisasi 80%. Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 19.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.640.000,- atau sebesar 95,10%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan dan pembinaan bagi investor guna penyempurnaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang harus dilaporkan oleh investor.

2) *Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi.*

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar sebesar Rp. 120.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 119.677.410,- atau sebesar 99,32%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah keikutsertaan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pameran/seminar/rakor/presentasi investasi daerah dengan target 1 event atau capaian realisasi 0%. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam event pameran/expo dengan mempromosikan potensi investasi guna menampilkan produk-produk unggulan daerah dalam upaya meningkatkan inovasi, kreativitas dan mengoptimalkan pengembangan pembangunan serta meningkatkan nilai investasi daerah. Adapun pameran investasi pada Tahun 2020 yang diikuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai adalah yaitu *Dumai Expo*. Kegiatan ini sudah dilakukan persiapannya namun tidak dapat diselenggarakan karena sesuai himbauan Pemerintah Kota Dumai bahwa kegiatan yang mengundang keramaian/kerumunan banyak orang seperti Kegiatan Pameran Investasi ditunda pelaksanaannya sebagai akibat Kota Dumai terkena dampak pandemic covid-19.

3) *Kegiatan Peningkatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*

Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersusunnya rencana umum penanaman modal dengan target capaian 5 Perusahaan atau capaian realisasi 0%. Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 19.050.000,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.860.000,- atau sebesar 93,75%. Kegiatan ini tidak efektif dilaksanakan dalam pencapaian kinerja, karena dalam pelaksanaannya pada tahun 2020, kegiatan ini hanya dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi bersama beberapa perusahaan di Kota Dumai untuk persiapan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Dumai.

20. Sasaran 9.1. Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

a. Program pengembangan Kemitraan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 543.715.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 543.407.000,- atau sebesar 99,94%.

- 1) Kegiatan Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 444.050.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 443.742.000,- dan atau sebesar 99.93% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dengan target pelatihan yaitu : Pelatihan wisata budaya kuliner dan belanja, Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata, Pelatihan wisata budaya tematik, Pelatihan manajemen home stay/rumah wisata/pondok wisata (2x pelatihan). atau capaian realisasi 100%.

- 2) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 99.665.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 99.665.000,- dan atau sebesar 100% adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta yang mengikuti lomba mancing dengan target 700 orang atau capaian realisasi 50%.(dilakukan reconfusing anggaran akibat dampak covid 19)

21. Sasaran 9.2. Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar

Sekretariat Daerah

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 1.955.950.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp .1.891.940.000,- atau sebesar 96,73% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Tenaga Kependidikan Keagamaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.955.950.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.891.940.000,- atau dengan persentase 96,73%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah honorium guru TPQ, DTA dan Madrasah yang dibantu adalah selama 8 bulan dan target 8 bulan atau dengan realisasi kinerja 100%.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pada tahun 2020, jumlah anggaran Rp. 1.693.270.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.476.966.159,- atau sebesar 87,23%.

- 1) Kegiatan Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.65.050.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.64.881.701,- atau dengan persentase 99,74% Adapun indikator kinerja keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah event MTQ/ Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Provinsi yang diikuti. Adanya *refocusing* tahun 2020 kegiatan ini dikurangi dan terjadinya wabah Covid-19 pada tahun 2020, maka kegiatan ini dilaksanakan sebatas persiapan untuk keikutsertaan Kota Dumai sedangkan pada event MTQ/STQ di Provinsi Riau ke-39 pada tahun 2020 di Kabupaten Pelalawan diundur karena wabah Covid-19 di Provinsi Riau.
- 2) Kegiatan Pembinaan Kehidupan Beragama
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.497.420.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.454.202.195,- atau dengan persentase 91,31% Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pelatihan bagi pengurus mesjid/musholla yang diadakan adalah 1 kegiatan dengan target 1 kegiatan, jumlah kegiatan pengajian bagi masyarakat yang diadakan selama 5 bulan dengan target 5 bulan, Jumlah haul yang diikuti ke Baslam Langkat, adapun persentase realisasi ke tiga kegiatan tersebut adalah 100%.
- 3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.142.100.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.67.460.000,- atau dengan persentase 47,47%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pembinaan calon jemaah haji Kota Dumai yang dilakukan (proses seleksi TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah), pelaksanaan manasik haji, pemberangkatan ke embarkasi Kota Pekanbaru Provinsi Riau hingga pulang ke Kota Dumai. Kegiatan pelaksanaan keberangkatan Haji tahun 2020 di batalkan keberangkatannya secara nasional dikarenakan adanya wabah Covid-19 di Dunia dan termasuk di Makkah Arab Saudi.

- 4) Kegiatan Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari - Hari Besar Keagamaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.908.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.819.416.800,- atau dengan persentase 90,17%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah petugas rumah ibadah yang mendapat bantuan adalah sebanyak 878 orang dengan target dan realisasi yaitu 785 orang atau dengan realisasi 89,40%, jumlah hari besar keagamaan yang diperingati dan realisasi adalah dari target 8 hari besar Islam. Hari besar Islam yang dilaksanakan adalah Maulid Nabi Muhammad, SAW atau dengan persentase 12,5%. Kegiatan ini banyak tidak dilaksanakan dikarenakan adanya *refocusing* tahun anggaran 2020 sehingga kegiatan ini dikurangi dan terjadinya wabah Covid-19 pada tahun 2020
- 5) Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Masjid Paripurna
Jumlah anggaran pada kegiatan belum tersedia sehingga indikator kinerja sasaran pada tahun 2020 yaitu persentase masjid yang ditingkatkan pembinaannya menjadi masjid paripurna kecamatan dengan target sebanyak 57,14% belum terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah (Perda) tentang Masjid Paripurna belum disahkan oleh DPRD Kota Dumai (Kriteria Penetapan Masjid Paripurna di Kota Dumai belum terpenuhi).
- 6) Pembinaan Kesehatan Generasi Muda Dan Pendidikan Masyarakat
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.79.950.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.71.005.463,- atau dengan persentase 88,81%. Adapun indikator kinerja keluaran terlaksananya pelayanan kesehatan generasi muda dan pendidikan masyarakat yaitu 100%.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2020. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Dumai selama tahun 2019 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2016-2021 dan telah memenuhi 13 (Tiga Belas belas) sasaran strategisnya yang realisasi > 91% sebagaimana yang telah ditargetkan dari total 21 sasaran strategis. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Dumai dapat dinyatakan sangat berhasil.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Dumai juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja Langsung dalam Perubahan Rp. 766.620.619.094 jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp 750.456.543.246,85 atau 97,89% (un audit tertanggal 26 Februari 2021)

Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kota Dumai akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Adapun upaya perbaikan terhadap indikator kinerja yang tidak mencapai target pada tahun 2020, seperti:

- 1) Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan (dengan capaian Kinerja 66,01%.)
- 2) Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan, dengan (capaian kinerja 7,43%.)
- 3) Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (dengan capaian kinerja 57,47%.)

- 4) Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat, (dengan capaian kinerja 0%).
- 5) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs (dengan capaian kinerja 56,03%).
- 6) Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan dengan capaian kinerja 48,24%).
- 7) GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit (dengan capaian kinerja 55,29%).
- 8) Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA (tingkat capaian 0%).
- 9) Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB (dengan capaian 67,47%).

Kekurangan yang terjadi selama 2020 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 telah dilampirkan Rencana Kinerja Tahunan yang berupa Target Indikator Kinerja Utama tahun 2021 yang hendak dicapai. Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



WALIKOTA DUMAI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. ZULKIFLI, A.S, M.Si
Jabatan : WALIKOTA DUMAI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Dumai, Februari 2020

Walikota Dumai,



Drs. H. ZULKIFLI, A.S, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2020**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2020
1	2	3	4	5
Visi Terwujudnya masyarakat dumai yang makmur dan madani pada Tahun 2021				
Misi 1	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur			
	Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah 10.015
	Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	% 3,5
			Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	% 58,26
			Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	% 2,85
			Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	% 7
			Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	% 60
			Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan 416
	Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	% 80
			Persentase Kualitas air	% 80
Misi 2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing			
	Sasaran 2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	% 99,47
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	% 99,92
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	% 99,26
	Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	% 100
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	% 100
	Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa 0.2770833
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa 0.3701389
	Sasaran 3.1	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	% 100
			Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	% 100
			Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	% 100
	Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	% 31
			Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang 169.887

	Sasaran 4.1 Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	3
Misi 3	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan			
	Sasaran 5.1 Terwujudnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,403
	Sasaran 5.2 Menurunnya persentase penduduk	Tingkat Kemiskinan	%	4,42
	Sasaran 5.3 Menurunnya laju pertumbuhan per	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,07
	Sasaran 5.4 Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,42
Misi 4	Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan			
	Tujuan 6 Meningkatkan kualitas pelayanan p	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
	Sasaran 6.1 Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	5
	Sasaran 6.2 Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas	Nilai	B
Misi 5	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan			
	Tujuan 7 Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Rp. Milyar	2.143,19
	Sasaran 7.1 Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	210,3
	Sasaran 7.2 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,91
Misi 6	Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah			
	Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekono	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,37
	Sasaran 8.1 Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.46
		Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.65
	Sasaran 8.2 Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	6.022.113.766.368
Misi 7	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu			
	Tujuan 9 Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	96
	Sasaran 9.1. Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	95
	Sasaran 9.2. Meningkatnya implementasi nilai-n	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	97

Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp.	16.865.770.831
		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp.	150.000.000
Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	158.304.000
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp.	2.154.785.000
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp.	80.831.469.150,00
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp.	8.195.996.400
		Program pengendalian banjir	Rp.	2.352.172.590
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp.	2.877.755.500
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp.	13.497.992.925
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp.	303.750.000
		Program pengelolaan areal pemakaman	Rp.	276.807.250
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rp.	2.958.339.722
		Program Perencanaan Tata Ruang	Rp.	700.000.000
		Program Pemanfaatan Ruang	Rp.	280.000.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp.	120.000.000
Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp.	6.084.227.200
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Rp.	15.800.000
		Program peningkatan pengendalian polusi	Rp.	81.650.000
Sasaran 2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp.	859.365.350
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp.	1.819.739.250
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp.	297.364.850
Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	12.170.070.700
Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp.	26.004.487.950
Sasaran 3.1	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbiditas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	1.210.702.000
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Rp.	90.911.000
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Rp.	70.075.000
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.	627.540.000

		Program obat dan perbekalan kesehatan	Rp.	8.886.435.495
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	316.115.000
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp.	693.104.000
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp.	1.297.070.000
Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	33.876.677.280
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	5.105.668.310
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.	490.291.000
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp.	38.054.118.600
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp.	1.997.000.000
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	Rp.	9.745.872.090
Sasaran 4.1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp.	730.492.891
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Rp.	381.462.000
Sasaran 5.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp.	765.598.000
Sasaran 5.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp.	205.839.000
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp.	541.876.000
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp.	746.661.000
		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Rp.	215.861.000
Sasaran 5.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Program Keluarga Berencana	Rp.	296.914.275
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Rp.	1.093.259.234
		Program pelayanan kontrasepsi	Rp.	704.210.000
		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Rp.	704.210.000
Sasaran 5.4	Meningkatnya lapangan kerja	program peningkatan kesempatan kerja	Rp.	59.650.000
		Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	Rp.	83.698.500
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	999.800.000

Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp.	123.550.000
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	Rp.	311.768.000
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp.	261.544.000
		Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Rp.	114.580.000
		Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil	Rp.	200.640.000
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	1.653.201.700
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp.	2.184.617.000
		Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Rp.	1.065.630.000
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rp.	48.000.000
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp.	1.237.782.500
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp.	1.324.000.000
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp.	39.525.000
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp.	139.598.400
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp.	368.653.000
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp.	947.412.400
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp.	1.093.259.234
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	542.055.420
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp.	391.638.950
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	393.585.000
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	711.724.750
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	110.851.500		
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	50.000.000		
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	891.900.000		

	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	50.000.000
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	426.110.000
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	965.700.000
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	68.678.000
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	355.122.000
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	394.353.000
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	243.933.810
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	436.000.000
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	918.000.000
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	109.200.000
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	583.450.000
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	1.015.676.000
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	179.256.000
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	571.230.000
	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	Rp.	959.475.000
	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	Rp.	121.761.946
Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rp.	135.000.000
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Rp.	2.581.404.700
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.	2.861.905.700
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rp.	330.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	368.350.692
	program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rp.	104.364.900
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rp.	27.034.000

	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Rp.	37.350.000
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	4.124.356.300
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp.	102.959.000
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Rp.	2.254.292.325
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp.	9.672.607.000
	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp.	1.977.664.300
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp.	213.706.226
	Program perencanaan sosial dan budaya	Rp.	758.787.736
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.	6.003.000.200
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp.	62.893.400
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp.	139.598.400
Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	Rp.	784.021.750
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp.	1.126.095.000
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp.	1.126.095.000
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp.	752.900.000
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rp.	407.525.000
	Program pengembangan budidaya perikanan	Rp.	1.150.993.400
	Program pengembangan perikanan tangkap	Rp.	355.069.230
Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Rp.	2.231.774.600
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rp.	2.231.774.600
	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp.	166.590.000
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rp.	573.030.000
Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Rp.	376.291.000
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp.	376.291.000
	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Rp.	25.883.000
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp.	80.455.000
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp.	250.000.000

Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp.	295.870.000
Sasaran 9.1.	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Program pengembangan Kemitraan	Rp.	1.080.653.000
Sasaran 9.2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	12.170.070.700
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp.	4.139.500.000
TOTAL :			Rp.	368.372.419.512

Dumai, Februrai 2020

Walikota Dumai



Drs. H. ZULKIFLI A.S, M.Si



**PEMERINTAH KOTA DUMAI
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Tuanku Tambusai Kode Pos 28882
DUMAI – RIAU

e-mail : inspektoratkotadumai@yahoo.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2020**

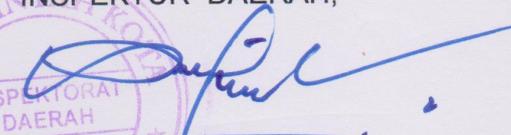
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, perlu dilakukan perbaikan sebagaimana rekomendasi yang diberikan sehingga tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Dumai, 25 Maret 2021

INSPEKTUR DAERAH,



SYAHRUL RIZAL, SH.
Jaksa Utama Pratama
NIP. 19641218 199303 1 003

